

# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022





WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 09 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu mengatur Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

9. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor );
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PTR/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
25. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Perangkat Daerah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lainnya adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Kebijakan Umum APBD selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi

yang mendasarinya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD).

## BAB II

### RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
  - b. prioritas pembangunan Daerah;
  - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun;
  - d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi *corona virus disease-19* di Daerah.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKP Tahun 2022, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi serta memuat urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022 dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD Tahun 2022.

#### Pasal 4

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai bahan evaluasi dan menjadi dasar penyusunan rancangan KUA, PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022.

## Pasal 5

- (1) Penjabaran RPJMD sebagaimana maksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Kinerja dan Program yang dituangkan dalam RKPD.
- (2) Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RPKD memuat kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari seluruh Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mempedomani pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam RPJMD.
- (3) Penyusunan Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

## Pasal 6

- (1) Penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RKPD Tahun 2022 berpedoman :
  - a. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Lampung dan Program Prioritas Nasional dalam RKP;
  - b. Evaluasi capaian Kinerja RPJMD Periode sebelumnya dan Renstra Perangkat Daerah sebelumnya;
  - c. Evaluasi capaian Kinerja RKPD Tahun 2020 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020;
  - d. Visi, misi dan program Walikota terpilih.
- (2) Program dalam RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian muatan dari Rancangan RPJMD yang sedang disusun.

## BAB III SISTEMATIKA

### Pasal 7

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :  
BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



- BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH  
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH  
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH  
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH  
BAB VIII : PENUTUP  
(2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 09 Juli 2021

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

  
EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 09 Juli 2021

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

  
TOLE DAILAMI

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 09

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR DIAGRAM</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-4
1.3 Hubungan Antardokumen .....	I-8
1.4 Maksud dan Tujuan .....	I-9
1.5 Sistematika Dokumen RKPD .....	I-10
<b>BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH</b> .....	<b>II-1</b>
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah	
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1.1 Letak dan Kondisi Geografi Daerah ....	II-1
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah .....	II-16
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana.....	II-20
2.1.1.4 Demografi .....	II-25
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II-27
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .....	II-27
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial .....	II-38
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga .....	II-50
2.1.2.4 Fokus Reformasi Birokrasi.....	II-52
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II-57
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib.....	II-57
2.1.3.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ....	II-57



2.1.3.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ....	II-81
2.1.3.2	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan .....	II-107
2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah .....	II-114
2.1.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-114
2.1.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-121
2.1.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi .....	II-132
2.1.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-135
2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.....	II-136
2.2.1	Evaluasi Capaian Target Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD Sampai Tahun 2020 .....	II-136
2.2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2020 .....	II-154
2.2.3	Penerapan dan Pencapaian SPM.....	II-202
2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah .....	II-230
2.3.1	Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	II-214
2.3.2	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	II-216
2.3.2.1	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib.....	II-216
2.3.2.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar .....	II-216
2.3.2.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ....	II-220
2.3.2.2	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan .....	II-229

### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN**

<b>DAERAH .....</b>	<b>III-1</b>
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	III-1
3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional.....	III-1



3.1.2	Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Lampung.....	III-7
3.1.3	Arah Kebijakan Ekonomi Kota Bandar Lampung.....	III-10
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	III-23
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....	III-25
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja .....	III-37
3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-43
<b>BAB IV</b>	<b>SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH..</b>	<b>IV-1</b>
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	IV-1
4.1.1	Visi .....	IV-1
4.1.2	Misi.....	IV-3
4.1.3	Tujuan dan Sasaran.....	IV-6
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021 .....	IV-8
4.2.1	Tinjauan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021 .....	IV-8
4.2.2	Tinjauan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2021 .....	IV-11
4.2.3	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2021 .....	IV-12
4.2.4	Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bandar Lampung.....	IV-63
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .....</b>	<b>V-1</b>
<b>BAB VI</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH .....</b>	<b>VI-1</b>
6.1	Indikator Kinerja Utama.....	VI-1
6.2	Indikator Kinerja Daerah.....	VI-3
6.3	Inovasi Daerah .....	VI-12
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>VII-1</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas dan Wilayah Administrasi Kota Bandar Lampung.....	II-2
Tabel 2.2	Gunung/Bukit/Lereng di Kota Bandar Lampung.....	II-6
Tabel 2.3	Banyaknya Kelurahan menurut Kecamatan, Letak Geografi, dan Topografi Tahun 2020.....	II-7
Tabel 2.4	Gambaran Data Sungai di Kota Bandar Lampung.....	II-8
Tabel 2.5	Titik Banjir Kota Bandar Lampung Tahun 2020 .....	II-24
Tabel 2.6	Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2020 .....	II-25
Tabel 2.7	Kepadatan Penduduk Tahun 2016-2020 .....	II-26
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020 berdasarkan Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.....	II-27
Tabel 2.9	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah) .....	II-28
Tabel 2.10	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2016-2020 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) .....	II-29
Tabel 2.11	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran (Miliar Rupiah) Tahun 2015-2019 .....	II-30
Tabel 2.12	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2015-2019 (Miliar Rupiah)	II-30
Tabel 2.13	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2020 (Persen).....	II-31
Tabel 2.14	PDRB Per Kapita Tahun 2016-2020 (Rupiah) .....	II-33
Tabel 2.15	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Persen) .....	II-34
Tabel 2.16	Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB Tahun 2016-2020 (Persen) .....	II-35
Tabel 2.17	Kontribusi Kategori Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2016-2020 (Persen) .....	II-36
Tabel 2.18	Kontribusi Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Bidang Pariwisata) terhadap PDRB Tahun 2016-2020 (Persen) .....	II-37



Tabel 2.19	Kontribusi Kategori Sektor Jasa terhadap PDRB Tahun 2016-2020 (Persen) .....	II-37
Tabel 2.20	Rasio Gini Tahun 2016-2020 .....	II-38
Tabel 2.21	Peningkatan Pengunjung Perpustakaan Tahun 2016-2020 .....	II-41
Tabel 2.22	Prevalensi Kekurangan Gizi ( <i>Underweight</i> ) pada Anak Balita Tahun 2016-2020 .....	II-43
Tabel 2.23	Prevalensi <i>Stunting</i> (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun) di Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020 .....	II-44
Tabel 2.24	Prevalensi <i>Stunting</i> (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Balita (Bawah Lima Tahun) Tahun 2016-2020 .....	II-44
Tabel 2.25	Penduduk Miskin Tahun 2016-2020 .....	II-44
Tabel 2.26	Luas Kawasan Kumuh Tahun 2016-2020.....	II-45
Tabel 2.27	Penanganan untuk Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun 2017-2020 .....	II-47
Tabel 2.28	Indeks Pembangunan Gender Tahun 2016-2020 .....	II-48
Tabel 2.29	Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2016-2020 .....	II-49
Tabel 2.30	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016-2020 .....	II-50
Tabel 2.31	Pemuda Pelopor Tahun 2016-2020.....	II-51
Tabel 2.32	Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2017-2020.....	II-53
Tabel 2.33	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016-2020 .....	II-53
Tabel 2.34	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016 – 2020 .....	II-55
Tabel 2.35	Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2016 – 2020 ....	II-56
Tabel 2.36	Angka Partisipasi Murni SD/MI Tahun 2016-2020 ...	II-57
Tabel 2.37	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Tahun 2016-2020 .....	II-58
Tabel 2.38	Angka Partisipasi Kasar PAUD Tahun 2016-2020 .....	II-58
Tabel 2.39	Angka Partisipasi Kasar SD/MI Tahun 2016-2020 ....	II-59
Tabel 2.40	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Tahun 2016-2020 .....	II-59



Tabel 2.41	Persentase Satuan PAUD Berakreditasi Tahun 2016-2020 .....	II-59
Tabel 2.42	Persentase Satuan Pendidikan Dasar SD/MI yang Berakreditasi A Tahun 2016-2020.....	II-60
Tabel 2.43	Persentase Satuan Pendidikan Dasar SD yang Berakreditasi B Tahun 2016-2020.....	II-60
Tabel 2.44	Persentase Satuan Pendidikan Dasar SMP Berakredetasi A Tahun 2016-2020 .....	II-60
Tabel 2.45	Persentase Satuan Pendidikan Dasar SMP Berakredetasi B Tahun 2016-2020 .....	II-61
Tabel 2.46	Data Keadaan Guru PAUD, SD, dan SMP sampai dengan Tahun 2020 .....	II-61
Tabel 2.47	Kualifikasi dan Sertifikasi Tenaga Pendidik .....	II-61
Tabel 2.48	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV .....	II-62
Tabel 2.49	Jumah Siswa PAUD, SD, dan SMP Tahun 2020 .....	II-62
Tabel 2.50	Rasio Guru terhadap Siswa.....	II-62
Tabel 2.51	Perbandingan Kondisi Ruang Kelas dengan Rombongan Belajar Tahun 2020 .....	II-63
Tabel 2.52	Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2016-2020 .....	II-63
Tabel 2.53	Rasio Dokter dan Bidan per 100.000 penduduk Tahun 2016-2020.....	II-64
Tabel 2.54	Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya Tahun 2016-2020 .....	II-64
Tabel 2.55	Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu Tahun 2016-2020 .....	II-65
Tabel 2.56	Jumlah Rumah Sakit Tahun 2016-2020.....	II-65
Tabel 2.57	Rasio Pos Pelayanan Terpadu Tahun 2016-2020.....	II-66
Tabel 2.58	Pencapaian 80 Persen Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi Tahun 2016-2020 (persen).....	II-67
Tabel 2.59	Angka Kematian Ibu, Bayi dan Kasus Gizi Buruk Tahun 2016-2020.....	II-67
Tabel 2.60	Jumlah Kasus Demam Berdarah dan Malaria Tahun 2016-2020 .....	II-70
Tabel 2.61	Cakupan penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Tahun 2016-2020 (persen) .....	II-70
Tabel 2.62	Jumlah Kasus Penyakit Tuberculosis Tahun 2016-2020 .....	II-71



Tabel 2.63	Prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk (CNR) Tahun 2016-2020 .....	II-71
Tabel 2.64	Jumlah Kasus Prevalensi Kasus HIV Tahun 2016-2020 .....	II-71
Tabel 2.65	Rasio Panjang Jalan Dibandingkan Luas Wilayah Tahun 2016-2020.....	II-72
Tabel 2.66	Rasio Panjang Jalan Dibandingkan Jumlah Penduduk Tahun 2016-2020 .....	II-73
Tabel 2.67	Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2016-2020.....	II-73
Tabel 2.68	Persentase Rumah Tinggal yang memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak Tahun 2016-2020 .....	II-73
Tabel 2.69	Persentase Cakupan Layanan SPAM Perkotaan Tahun 2016-2020.....	II-74
Tabel 2.70	Bangunan ber-IMB Tahun 2016-2020 .....	II-76
Tabel 2.71	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Tahun 2018-2020 .....	II-77
Tabel 2.72	Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2016-2020.....	II-77
Tabel 2.73	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Tahun 2016-2020 .....	II-78
Tabel 2.74	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2016-2020 .....	II-79
Tabel 2.75	Persentase PMKS yang Tertangani Tahun 2016-2020 .....	II-79
Tabel 2.76	Jumlah Tempat Pemakaman Penduduk sampai dengan Tahun 2020.....	II-80
Tabel 2.77	Luasan Areal Pemakaman Milik Pemerintah Kota Bandar Lampung .....	II-80
Tabel 2.78	Jumlah Angkatan Kerja Tahun 2016-2020 .....	II-81
Tabel 2.79	Jumlah Tenaga Kerja yang Terkena Dampak Pandemi Covid-19 .....	II-81
Tabel 2.80	Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2016-2020 ...	II-84
Tabel 2.81	Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2016-2020 .	II-84
Tabel 2.82	Pengawasan Keamanan Pangan Tahun 2016-2020..	II-85
Tabel 2.83	Penyelesaian Konflik Pertanahan Tahun 2016-2019	II-85
Tabel 2.84	Sertifikasi Tanah bagi Warga Tidak Mampu Tahun 2016-2020 .....	II-86
Tabel 2.85	Penanganan Sampah Tahun 2017-2020 .....	II-87





Tabel 2.86	UPT Pengelolaan Sampah dan Lokasi TPS .....	II-88
Tabel 2.87	Penduduk Kota Bandar Lampung yang Telah Melakukan Perekaman e-KTP dan Memiliki e-KTP Tahun 2016-2020 .....	II-91
Tabel 2.88	Persentase Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2020 (Persen) .....	II-91
Tabel 2.89	Persentase Kelompok Binaan LPM Tahun 2016-2020 .....	II-92
Tabel 2.90	Jumlah LSM Tahun 2016-2020 .....	II-92
Tabel 2.91	Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya di Bawah Usia 20 (Dua Puluh) Tahun.....	II-93
Tabel 2.92	Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi ( <i>Unmeet Need</i> ) Tahun 2016-2020...	II-94
Tabel 2.93	Pelayanan Parkir Tahun 2016-2020 .....	II-97
Tabel 2.94	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2016-2020 .....	II-97
Tabel 2.95	Peningkatan Produktivitas Koperasi Tahun 2016-2020 .....	II-98
Tabel 2.96	Jumlah UKM non BPR/LKMUKM Tahun 2016-2020 .....	II-99
Tabel 2.97	Pertumbuhan Penanaman Modal Asing Tahun 2016-2020 .....	II-99
Tabel 2.98	Pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun 2016-2020 .....	II-100
Tabel 2.99	Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020.....	II-102
Tabel 2.100	Sarana Prasarana Olahraga sampai dengan Tahun 2020 .....	II-103
Tabel 2.101	Objek Wisata Seni Budaya di Kota Bandar Lampung.....	II-105
Tabel 2.102	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2016-2020 .....	II-106
Tabel 2.103	Jumlah Perpustakaan di Kota Bandar Lampung.....	II-106
Tabel 2.104	Jumlah Data Arsip Terpilah Tahun 2016-2020 .....	II-107
Tabel 2.105	Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Tahun 2016-2020 (Ton) .....	II-108
Tabel 2.106	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020.....	II-109



Tabel 2.107	Produksi Tanaman Pangan Tahun 2016–2020 .....	II-110
Tabel 2.108	Produktivitas Tanaman Sayuran Tahun 2016–2020	II-110
Tabel 2.109	Populasi Ternak Besar, Kecil dan Unggas Tahun 2016–2020.....	II-111
Tabel 2.110	Persentase Kontribusi Kategori Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB Tahun 2016-2020.....	II-112
Tabel 2.111	Jumlah Pasar Tradisional dan Modern Tahun 2016-2020 .....	II-112
Tabel 2.112	Persentase Pertumbuhan Kategori Perdagangan Tahun 2016-2020 .....	II-113
Tabel 2.113	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah Tahun 2016-2020 .....	II-113
Tabel 2.114	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan Tahun 2016-2020 .....	II-113
Tabel 2.115	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020 .....	II-115
Tabel 2.116	Opini Penilaian BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016-2020 .....	II-115
Tabel 2.117	Kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2020 .....	II-117
Tabel 2.118	Perkembangan Koperasi Tahun 2016-2020 .....	II-117
Tabel 2.119	Perkembangan Koperasi Sehat Tahun 2016-2020....	II-118
Tabel 2.120	Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat Tahun 2016-2020 .....	II-118
Tabel 2.121	Perkembangan UMKM Tahun 2016-2020 .....	II-119
Tabel 2.122	Persentase UKM yang Memiliki Laba Tahun 2016-2020.....	II-119
Tabel 2.123	Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2016-2020.....	II-121
Tabel 2.124	Persentase Kondisi Jalan Kota dalam Kondisi Mantap Tahun 2016-2020.....	II-121
Tabel 2.125	Infrastruktur Jalan Tahun 2016-2017 .....	II-122
Tabel 2.126	Jumlah <i>Fly Over</i> dan <i>Underpass</i> .....	II-123
Tabel 2.127	Bus Rapi Transit Bandar Lampung Tahun 2016-2020 .....	II-126
Tabel 2.128	Pelayanan Bus Rapi Trans Bandar Lampung Tahun 2017-2020 .....	II-126



Tabel 2.129	Angkutan Perkotaan Bandar Lampung Tahun 2016-2020 .....	II-127
Tabel 2.130	Jurusan, Warna dan Jumlah Trayek Angkutan Tahun 2016-2020 .....	II-127
Tabel 2.131	Marka Jalan yang dikerjakan Tahun 2016-2020 .....	II-129
Tabel 2.132	Jumlah Rambu Lalu Lintas Tahun 2016-2020 .....	II-129
Tabel 2.133	Jumlah Persimpangan Tahun 2016-2020 .....	II-129
Tabel 2.134	Kasus/Kejadian Kecelakaan Tahun 2016-2020 .....	II-130
Tabel 2.135	Jumlah Jaringan Komunikasi Tahun 2016-2020 .....	II-130
Tabel 2.136	Pelanggaran Peraturan Daerah Penataan Ruang Tahun 2016-2020 .....	II-131
Tabel 2.137	Indeks Resiko Bencana Tahun 2016-2020 .....	II-131
Tabel 2.138	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020 .....	II-132
Tabel 2.139	Jumlah Tindak Kriminalitas Tahun 2016-2020 .....	II-132
Tabel 2.140	Jenis dan Standar Waktu dalam Penyelesaian Izin...	II-133
Tabel 2.141	Jumlah dan Macam Pajak serta Retribusi Daerah....	II-135
Tabel 2.142	Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2016-2020 ..	II-135
Tabel 2.143	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2016-2020 .....	II-136
Tabel 2.144	Jumlah Aparatur Sipil Negara Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020 (orang) .....	II-136
Tabel 2.145	Capaian Target Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 .....	II-148
Tabel 2.146	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Kota Bandar Lampung sampai dengan Tahun 2020	II-157
Tabel 3.1	Sasaran dan Target Provinsi Lampung Tahun 2022 ..	III-10
Tabel 3.2	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Ekonomi Kota	III-13
Tabel 3.3	Target dan Sasaran Makro Tahun 2022 .....	III-19
Tabel 3.4	Realisasi Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Kota Bandar Lampung .....	III-26
Tabel 3.5	Proporsi Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah) .....	III-31
Tabel 3.6	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Bandar Lampung Tahun 2019 s.d 2023 .....	III-40



Tabel 3.7	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Bandar Lampung Tahun 2019 s.d 2013.....	III-44
Tabel 4.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 .....	IV-7
Tabel 4.2	Keterkaitan antara Misi, Prioritas dan sasaran RKPD Tahun 2022 .....	IV-13
Tabel 4.3	Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Lampung dengan Prioritas dan Sasaran Daerah.....	IV-16
Tabel 4.4	Prioritas, Sasaran dan Target Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2022 .....	IV-18
Tabel 4.5	Keselarasan Prioritas Nasional dengan Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2022.....	IV-32
Tabel 5.1	Daftar Program, Kegiatan, Sub Kegiatan RKPD Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 .....	V-6
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 .....	VI-1
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Daerah Tahun 2022 .....	VI-3



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 ....	I-3
Gambar 1.2	Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	I-9
Gambar 2.1	Peta Administratif Kota Bandar Lampung .....	II-2
Gambar 2.2	Peta Topografi Kota Bandar Lampung .....	II-6
Gambar 2.3	Peta Hidrologi Kota Bandar Lampung.....	II-10
Gambar 2.4	Peta Klimatogi Kota Bandar Lampung.....	II-11
Gambar 2.5	Peta Tutupan Lahan Kota Bandar Lampung.....	II-12
Gambar 2.6	Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi.....	II-21
Gambar 2.7	Peta Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah.....	II-22
Gambar 2.8	Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami.....	II-23
Gambar 2.9	Peta Sungai dan Jaringan Drainase .....	II-125



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Laju Inflasi Tahun 2016-2020 (Persen) .....	II-34
Grafik 2.2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2016-2020..	II-40
Grafik 2.3	Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2016-2020 ....	II-40
Grafik 2.4	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tahun 2016-2020 .....	II-46
Grafik 2.5	Persentase Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun 2017-2020.....	II-47
Grafik 2.6	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang terselesaikan Tahun 2016-2020 .....	II-49
Grafik 2.7	Kasus Kematian Ibu Maternal Tahun 2016-2020 .....	II-68
Grafik 2.8	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2020 .....	II-68
Grafik 2.9	Kasus Kematian Bayi dan Balita Tahun 2016-2020 .....	II-69
Grafik 2.10	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2020 .....	II-69
Grafik 2.11	Rasio Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum terhadap Panjang Jalan Kota Tahun 2016-2020 (titik/km).....	II-125
Grafik 2.12	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Peruntukannya Tahun 2016-2020 .....	II-131



## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1	Luas Daerah Menurut Kecamatan berdasarkan Data BPS dalam BLDA Tahun 2021 (Persen) .....	II-3
Diagram 2.2	Luas Daerah Menurut Kecamatan berdasarkan data pada Ranperda RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041 (Persen) .....	II-3
Diagram 2.3	Suhu dan Pengendapan Rata-Rata di Bandar Lampung.....	II-10
Diagram 2.4	Kawasan Lindung .....	II-13
Diagram 2.5	Kawasan Budidaya .....	II-14
Diagram 2.6	Jumlah Penduduk 2016-2020 (jiwa).....	II-26
Diagram 2.7	Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2016-2020 (Persen) .....	II-32
Diagram 2.8	PDRB Per Kapita Tahun 2016-2020 .....	II-33
Diagram 2.9	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2016-2020...	II-39
Diagram 2.10	Indeks Pembangunan Manusia Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2016-2020 .....	II-39
Diagram 2.11	Angka Harapan Hidup Tahun 2016-2020 .....	II-42
Diagram 2.12	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016-2020 .....	II-45
Diagram 2.13	Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2016-2020....	II-48
Diagram 2.14	Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2016-2020 (Skor).....	II-56
Diagram 2.15	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak Tahun 2016-2020.....	II-74
Diagram 2.16	Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif Tahun 2016-2020 .....	II-93
Diagram 2.17	Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 2016-2020 (Dolar) .....	II-100
Diagram 2.18	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2016-2020 (Rupiah) .....	II-100
Diagram 2.19	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan Tahun 2016-2020 .....	II-101
Diagram 2.20	Persentase Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap Tahun 2016-2020.....	II-121



Diagram 2.21 Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Tahun  
2016-2020 ..... II-124





**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG**  
**NOMOR 09 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**  
**TAHUN 2022**

**BAB I. PENDAHULUAN**

**1.1 LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah.

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;



2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja PD; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

RKPD Tahun 2022 disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja dan dengan pendekatan perencanaan partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat sebagai stakeholders dengan proses yang partisipatif, memungkinkan masyarakat menyalurkan aspirasinya dan mampu memantau kinerja pemerintah, sehingga semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparat pemerintah dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat.

Penyusunan RKPD Tahun 2022 dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 sebagai tindak lanjut terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung hasil Pilkada serentak Tahun 2020, sehingga RKPD Tahun 2022 menyesuaikan dengan Rancangan RPJMD Tahun 2021-2026 dan memperhatikan RPJPD Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025, Rancangan RKP Tahun 2022, RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 maupun RKPD Provinsi Lampung Tahun 2022.



Penyusunan RKPD Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, melalui 6 (enam) tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Persiapan Penyusunan RKPD
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD
3. Penyusunan Rancangan RKPD
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD, dan
6. Penetapan RKPD

Tahapan dalam proses penyusunan RKPD tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017



Sebagaimana kita ketahui, saat ini perekonomian global dan nasional mengalami tekanan yang cukup berat sebagai akibat penyebaran cepat *Covid-19* ke banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Dalam penyusunan RKPD Tahun 2022, dampak ekonomi yang menurun akibat pandemi *Covid-19* menjadi hal yang perlu diperhatikan. Sebagaimana arahan Menteri Dalam Negeri bahwa penyusunan RKPD di setiap daerah mempertimbangkan kondisi pandemi *Covid-19*, selain juga memperhatikan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan isu strategis nasional yang sedang berkembang.

Menyusun perencanaan di tengah suasana yang tidak pasti tentu saja dibutuhkan langkah strategis untuk dapat menangani wabah *Covid-19* tersebut. Kita berharap tentunya krisis *Covid-19* ini segera berakhir, namun kita juga harus bersiap-siap jika skenario masih berlanjut. Jika pada Tahun 2021 krisis ini selesai, maka di tahun 2022 kita harus fokus pada pemulihan, terutama pemulihan ekonomi dan pemulihan sektor-sektor yang dapat memajukan kesejahteraan rakyat. Ada dua agenda penting dalam Perencanaan pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi pasca pandemi *Covid-19* dan mendukung tahapan pembangunan pencapaian visi misi dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

## **1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam



- Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor xx Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor );
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PTR/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan



- Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
  22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 13);
  24. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);



25. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 23).

### **1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RPJMD Tahun 2016 – 2021 merupakan landasan yang digunakan untuk menyusun RKPD Tahun 2021 untuk menjalankan agenda pembangunan tahunan dan dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD.

Keberadaan RKPD Tahun 2022 juga sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022. RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan. Rencana kerja tahunan pada tingkat nasional dinamakan RKP dan pada tingkat daerah disebut RKPD. Hubungan Renstra K/L dengan RKP dan Renstra Perangkat Daerah dengan RKPD adalah bersifat mengikat yaitu penyusunan rencana tahunan harus berpedoman pada rencana lima tahunan. Sedangkan hubungan antara Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah adalah bersifat konsultatif yaitu penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus memperhatikan Renstra K/L.

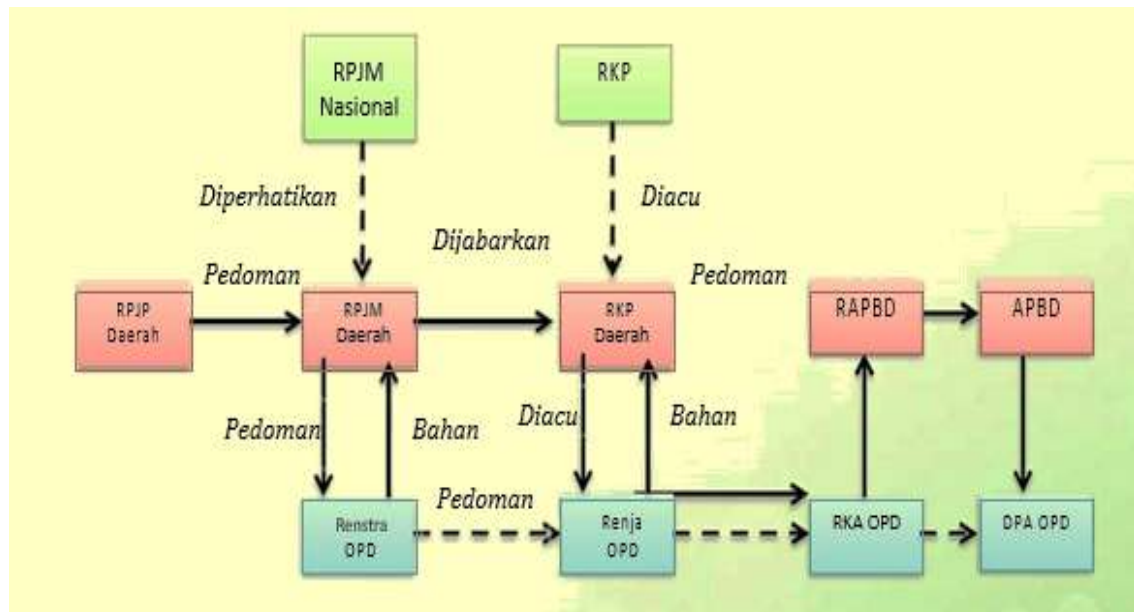
Mengingat adanya keselarasan sistem perencanaan dan sistem penganggaran, maka RKPD harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD. Oleh karena itu penyusunan RKPD tersebut, perlu dilakukan secara lebih rinci dengan tekanan utama pada penetapan program dan kegiatan. Penetapan program dan kegiatan tersebut harus pula mencakup indikator dan target kinerja serta perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan.





Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



#### 1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya RKPD Tahun 2022 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar level/tingkat pemerintahan, serta mengoptimalkan dan mewujudkan efisiensi pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya RKPD Tahun 2022 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA serta PPAS Tahun 2022 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam RAPBD Tahun 2022;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;



3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah;
5. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
6. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;
7. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

## **1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD**

Sistematika RKPD Tahun 2022 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 79 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
  - 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
  - 1.3. Hubungan antar Dokumen
  - 1.4. Maksud dan Tujuan
  - 1.5. Sistematika Dokumen RKPD
- II. Gambaran Umum Kondisi Daerah
  - 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
    - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
    - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
    - 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
    - 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
  - 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan, dan Realisasi RPJMD
  - 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah



2.3.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

III. Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

IV. Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

VII. Penutup



## **BAB III**

### **KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah merupakan kerangka implementatif RKPD Tahun 2022, yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 dan proyeksi tahun 2022, serta kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan Tahun 2022. Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan Daerah Tahun 2022 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang diharapkan.

#### **3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun perencanaan.

##### **3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional**

Covid-19 memberikan tekanan berat kepada Indonesia pada tahun 2020, tidak hanya kepada aspek kesehatan dan kemanusiaan, tapi juga aspek sosial dan ekonomi. Perekonomian dunia yang melambat serta kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk memitigasi penyebaran Covid-19 yang menurunkan mobilitas perekonomian, telah mengakibatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020.

Pada tahap awal, Covid-19 memicu ketidakpastian di pasar keuangan global dunia dan berdampak pada aliran masuk modal asing ke Indonesia yang menurun dan Rupiah yang terdepresiasi. Tekanan berlanjut pada penurunan kegiatan ekonomi akibat ekspor dan perekonomian dunia yang menurun. Tekanan juga merupakan implikasi dari kebijakan PSBB dan



protokol kesehatan yang mengurangi mobilitas manusia, barang, dan jasa. Akibatnya, kegiatan ekonomi di berbagai sektor menurun tajam, yang bila tidak ditangani dan direspons dengan segera akan dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pengangguran, dan memperluas kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang terus menurun juga menjadi perhatian karena apabila berlanjut dapat mengganggu stabilitas perekonomian, termasuk stabilitas sistem keuangan

Terkait hal tersebut, sinergi kebijakan diarahkan untuk meminimalkan dampak pembatasan mobilitas masyarakat terhadap perekonomian nasional. Pemerintah menempuh kebijakan fiskal ekspansif melalui pemberian stimulus dalam jumlah besar yang mengakibatkan pelebaran defisit dan peningkatan pembiayaan APBN 2020. Di tengah tekanan inflasi yang rendah, Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan akomodatif yang mencakup pemberian stimulus moneter melalui penurunan suku bunga dan pelonggaran moneter (*Quantitive Easing*) dalam jumlah besar. Kebijakan itu juga didukung dengan langkah stabilisasi nilai tukar Rupiah, pelonggaran kebijakan makroprudensial, dan digitalisasi sistem pembayaran. Sinergi kebijakan fiskal dan moneter ekspansif juga diperkuat melalui waktu, jenis, dan besaran stimulus dari masing-masing kebijakan.

Kuatnya dampak Covid-19 memberikan tekanan cukup berat pada perekonomian Indonesia pada semester I 2020, meskipun sinergi kebijakan telah mulai dilakukan. Dalam perkembangannya pada semester II 2020, Pemerintah terus berupaya memperluas dan menyesuaikan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) agar lebih implementatif, mudah dieksekusi, sehingga dapat efektif mendukung pemulihan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia melanjutkan tren perbaikan pada triwulan IV 2020 didukung perbaikan kinerja ekonomi di sebagian besar wilayah. Pertumbuhan ekonomi secara nasional pada triwulan IV 2020 mencatat kontraksi yang lebih kecil yakni -2,19% (yoy), dibandingkan -3,49% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perbaikan ini terutama ditopang oleh kontribusi



positif kinerja sektor eksternal sejalan dengan membaiknya perekonomian di beberapa negara tujuan ekspor diantaranya Tiongkok dan AS, di tengah masih terbatasnya kinerja impor. Dari sisi domestik, kontraksi konsumsi swasta mulai membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Perbaikan konsumsi swasta didukung meningkatnya mobilitas masyarakat pascarelaksasi PSBB dan adanya beberapa periode hari libur meskipun dampaknya masih terbatas. Berbagai kebijakan pembatasan sebagai bentuk mitigasi penyebaran COVID-19 menahan perbaikan kinerja konsumsi lebih lanjut. Selain itu, aktivitas Pilkada serentak di akhir tahun 2020 juga berdampak minimal akibat terbatasnya kegiatan pertemuan berskala besar. Sementara itu, pemulihan investasi masih berjalan lambat di sebagian besar wilayah karena masih tertahannya konstruksi bangunan. Meski demikian, perlambatan lebih dalam investasi tertahan investasi non bangunan pada sejumlah proyek di daerah. Di sisi lain, dorongan fiskal daerah kembali menurun setelah melewati puncaknya pada triwulan III 2020 pascapelonggaran mekanisme penyaluran TKDD sejak Agustus 2020.

Perekonomian domestik yang mulai membaik pada semester IV 2020 diperkirakan secara optimis terus menguat pada tahun 2021 dan akan berlanjut pada tahun 2022. Prakiraan tersebut didukung dengan kemajuan penanganan Covid-19 termasuk vaksinasi, peningkatan mobilitas, pemulihan ekonomi global, serta stimulus dan penguatan kebijakan di berbagai negara. Hal ini dikarenakan secara umum, kecepatan pemulihan ekonomi global akan dipengaruhi oleh kemajuan penanganan Covid-19, terutama implementasi vaksinasi, peningkatan mobilitas, besaran dan kecepatan stimulus kebijakan, kondisi sektor keuangan dan korporasi, serta struktur perekonomian suatu negara. Mulai awal tahun 2021, Pemerintah telah melaksanakan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan secara bertahap dengan prioritas pada tenaga kesehatan dan pelayanan publik, diikuti dengan kelompok masyarakat rentan, dan kemudian masyarakat lainnya.



Selama periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan pada kisaran 5,0 persen. Pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional pada Tahun 2019 tercatat sebesar 5,02 persen. Angka ini menunjukkan terjadinya sedikit penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2018 yang sebesar 5,17 persen dan Tahun 2017 yang sebesar 5,07 persen. Namun demikian akibat adanya pandemi Covid-19 menyebabkan perekonomian Indonesia tahun 2020 berkontraksi sampai sebesar 2,07 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2021 terhadap triwulan I-2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,74 persen (*y-on-y*). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 13,12 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 4,53 persen.

Sedangkan ekonomi Indonesia triwulan I-2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96 persen (*q-to-q*). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Pendidikan sebesar 13,04 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 43,35 persen.

Diharapkan tahun 2022 merupakan tahun kunci meletakkan kembali landasan untuk keluar dari *Middle Income Trap* (MIT). Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama mulai lepas dari tekanan Covid-19 dan merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (ADHK) pada Tahun 2018 sebesar Rp10.425.397,30 miliar meningkat pada Tahun 2019 menjadi sebesar Rp10.949.037,80 miliar. Seiring menurunnya kinerja perekonomian pada tahun 2020, PDB Indonesia (ADHK) di pada Tahun 2020 mengalami



penurunan jika dibandingkan tahun 2019 menjadi sebesar Rp10.722.442,70 miliar.

Tingkat inflasi di level nasional selama tahun 2017-2019 dapat dijaga sebesar  $3\pm 1$  persen. Inflasi pada Tahun 2019 sebesar 2,72 persen. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan Tahun 2018 sebesar 3,13 persen dan Tahun 2017 yaitu sebesar 3,61 persen. Namun pada tahun 2020 inflasi tercatat hanya sebesar 1,68 persen.

Trend penurunan tingkat kemiskinan sejak beberapa tahun terakhir hanya berlanjut sampai Tahun 2019 kemudian meningkat kembali pada tahun 2020 akibat covid-19. Pada September tahun 2018 tingkat kemiskinan tercatat sebesar 9,66 persen kemudian menurun menjadi sebesar 9,22 persen pada September Tahun 2019 dan pada September 2020 tingkat kemiskinan tercatat meningkat menjadi sebesar 10,19 persen. Begitu juga dengan jumlah penduduk miskin, pada tahun 2020 sebanyak 27.550 juta orang, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebanyak 24.786 juta orang dan tahun 2018 yang tercatat sebanyak 25.675 juta orang.

Penurunan kesempatan kerja/lapangan pekerjaan dalam setahun terakhir ini berimplikasi pada peningkatan tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka pada Agustus Tahun 2020 tercatat sebesar 7,07 persen meningkat jika dibandingkan Agustus Tahun 2019 yang sebesar 5,28 persen dan Agustus Tahun 2018 yang sebesar 5,34 persen.

Pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami perbaikan. Ini tercermin dari Indikator Pembangunan Manusia (Human Development Index) yang terus membaik. Pada Tahun 2020, HDI Indonesia adalah 71,94 naik jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sebesar 71,92, tahun 2018 sebesar 71,39, dan tahun 2017 sebesar 70,81.





RKP Tahun 2022 adalah sebagai tahapan guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, yaitu memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;
5. Transformasi Ekonomi, yaitu melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan



5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Terkait dengan rencana pembangunan tahunan, Pemerintah telah merancang tema RKP Tahun 2022 “*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*”. Selanjutnya pembangunan nasional tahun 2022 diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan
10. Reformasi Kesehatan

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2022, antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 – 6,0 %
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6.24 - 5.52 %
3. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44 – 73,48
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8 – 27,1 %
6. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102-104
7. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102-105
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %



### **3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Lampung**

Ekonomi Provinsi Lampung selama kurun waktu Tahun 2017-2019 tumbuh di kisaran 5 persen per tahun. Pada Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tercatat sebesar 5,27 persen, meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,25 persen di Tahun 2018 dan 5,16 persen di Tahun 2017. Namun adanya pandemi covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung berkontraksi sebesar 1,67 persen. Pertumbuhan ekonomi Lampung Tahun 2020 tersebut berada di bawah pertumbuhan ekonomi Sumatera yang berkontraksi sebesar 1,19 persen namun pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tersebut diatas nasional yang berkontraksi sebesar 2,07 persen (yoy).

Selanjutnya Ekonomi Provinsi Lampung triwulan I-2021 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,10 persen dibanding triwulan I-2020 (y-on-y), melemah dibanding capaian triwulan I-2020 yang tumbuh sebesar 1,74 persen. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 14,49 persen. Dari sisi pengeluaran, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 3,89 persen.

Ekonomi Provinsi Lampung triwulan I-2021 tumbuh sebesar 3,04 persen dibanding triwulan IV-2020 (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 18,31 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen PMTB dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tumbuh masing-masing sebesar 0,07 persen dan 0,03 persen.

PDRB per kapita Provinsi Lampung di Tahun 2019 mencapai Rp42,23 juta namun pada Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp41,62 juta. Dari sisi perkembangan harga-harga, tingkat inflasi di Provinsi Lampung pada Tahun 2020 sebesar 2,00 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat inflasi Tahun 2019 maupun tahun 2028 yang masing-masing sebesar 3,44 persen dan 2,73 persen.



Sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun pada tahun 2020 maka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Lampung pada bulan Agustus Tahun 2020 tercatat sebesar 4.67 persen, meningkat jika dibandingkan Tahun sebelumnya (Agustus 2019) yaitu sebesar 4,03 persen akibat dampak covid-19 yang menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran.

Selama Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019, jumlah penduduk miskin dan presentase penduduk miskin Provinsi Lampung tercatat mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin Provinsi Lampung pada September Tahun 2019 tercatat sebanyak 1,041 juta jiwa. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan jumlah penduduk miskin jika dibandingkan dengan periode sama Tahun sebelumnya (September 2018) yang tercatat sebanyak 1,091 juta jiwa. Adapun presentase penduduk miskin Provinsi Lampung pada bulan September Tahun 2019 sebesar 12,30 persen, sedangkan pada bulan September Tahun 2018 tercatat sebesar 13,01 persen, dan 13,04 persen pada September Tahun 2017. Namun di tengah kondisi pandemi covid-19, jumlah penduduk miskin dan presentase penduduk miskin Provinsi Lampung tercatat mengalami kenaikan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin Provinsi Lampung tercatat sebanyak 1.091 juta jiwa dan presentase penduduk miskin sebesar 12,76 persen. Angka persentase penduduk miskin tahun 2020 tersebut berada di atas tingkat kemiskinan nasional sebesar 10,19 persen.

Disisi lain, pada tahun 2020 ketimpangan mengalami penurunan. Rasio Gini turun dari 0,331 pada September Tahun 2019 menjadi 0,327 pada September Tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya perubahan pada kesenjangan pendapatan antara masyarakat kaya dan miskin.

Pembangunan manusia di Provinsi Lampung juga terus mengalami perbaikan. Hal ini tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus membaik. Pada Tahun 2020, IPM Provinsi Lampung sebesar 69,69, terus mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun



sebelumnya yaitu 69,57 pada tahun 2019, 69,02 pada Tahun 2018 dan 68,25 pada Tahun 2017.

Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan tema Pembangunan Tahun 2022 yakni **“Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan serta Peningkatan SDM Berkualitas”** dan telah menetapkan 6 (enam) prioritas pembangunan yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Pembangunan Infrastruktur
4. Reformasi Birokrasi
5. Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman Dan Berbudaya
6. Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana

Berikut adalah tabel sasaran dan target Provinsi Lampung Tahun 2022:

Tabel 3.1 Sasaran dan Target Provinsi Lampung Tahun 2022

SASARAN MAKRO	TARGET
Pertumbuhan Ekonomi (%yoy)	4,3 – 5,3 %
Inflasi (%yoy)	3,0 ± 1%
PDRB Perkapita (Rp Juta)	45 – 48
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4 – 4,5 %
Tingkat Kemiskinan (%)	11,7 – 12,2
IPM	71,49
Indeks Gini	0,32 – 0,33

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, 2021

### 3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Bandar Lampung

Berdasarkan data dari BPS Kota Bandar Lampung selama periode Tahun 2017-2019, secara umum kondisi perekonomian Kota Bandar Lampung cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Daerah berada pada kisaran 6 persen, berturut-turut sebesar 6,28 persen (Tahun 2017), 6,21 persen (Tahun 2018) dan 6,24 persen (Tahun 2019). Namun demikian, dengan adanya pandemi covid-19 maka pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi daerah Kota Bandar Lampung berkontraksi sebesar 1,85 persen. Perkembangan inflasi Daerah dalam kurun waktu/periode yang sama (tahun 2017-2019) inflasi



berada dikisaran angka 2,5 persen hingga 3,5 persen per Tahun sedangkan pada Tahun 2020 inflasi sebesar 1,93 persen. Laju Inflasi Tahun 2020 lebih rendah jika dibandingkan dengan laju inflasi tahun 2017-2019. Hal ini dikarenakan terbatasnya/tertahannya permintaan pada tahun 2020 akibat covid-19.

Tujuan pembangunan Daerah adalah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat serta harus mampu meningkatkan pembangunan penduduknya (Indeks Pembangunan Manusia). Kualitas penduduk yang tinggi dan ketersediaan lapangan pekerjaan dan stabilitas kepastian usaha tentu akan mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk sehingga distribusi pendapatan berada pada tingkat ketimpangan yang semakin rendah. Disamping itu pergerakan inflasi yang fluktuatif perlu dikendalikan untuk meningkatkan dan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil melalui upaya-upaya yang dapat menjaga stabilitas harga terutama bahan pokok.

Nilai PDRB Kota Bandar Lampung atas dasar harga berlaku pada Tahun 2019 mencapai 59.377 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 4.768 miliar rupiah dibandingkan dengan Tahun 2018 yang bernilai 54.609 miliar rupiah. Namun pada tahun 2020, nilai PDRB Kota Bandar Lampung atas dasar harga berlaku pada Tahun 2020 hanya sebesar mencapai 59,078 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sebesar 299 miliar jika dibandingkan tahun 2019. Penurunan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh menurunnya sebagian besar dari produksi pada lapangan usaha.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami penurunan, dari 39.385 miliar rupiah pada Tahun 2019 menjadi 38.656 miliar rupiah pada Tahun 2020, penurunan PDRB ini tidak dipengaruhi inflasi namun disebabkan oleh menurunnya produksi di beberapa lapangan usaha dan akibat covid-19. Hal ini ditunjukkan melalui pertumbuhan ekonomi Kota



Bandar Lampung tahun 2020 yang berkontraksi sebesar 1,85 persen. Tiga kategori/lapangan usaha yang paling besar mengalami kontraksi pada tahun 2020 adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 12,38 persen, perdagangan besar dan eceran sebesar 10,00 persen dan industri pengolahan sebesar 4,27 persen. Namun demikian terdapat beberapa kategori/lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2020. Adapun kategori/lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif paling besar adalah informasi dan komunikasi sebesar 8,75 persen. Peningkatan penggunaan internet untuk berbagai aktivitas pada perkantoran, pendidikan dan perdagangan di masa pandemi yang menyebabkan kategori ini mengalami pertumbuhan secara positif pada tahun 2020.

Sejalan dengan upaya untuk terus meningkatkan perekonomian di Kota Bandar Lampung, tingkat kemiskinan selama kurun waktu lima tahun (2017 sampai dengan 2019) juga dapat terus diturunkan hingga mencapai 8,71 persen pada Tahun 2019, dari 9,94 persen di Tahun 2017 dan 9,04 persen di Tahun 2018. Namun demikian akibat pandemi covid-19 menyebabkan tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung menjadi sebesar 8,81 persen atau sedikit mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 8,71 persen.

Ketimpangan pendapatan selama periode/kurun waktu yang sama (2017 sampai dengan 2019) juga telah berhasil diturunkan secara bertahap. Rasio gini Kota Bandar Lampung pada Maret Tahun 2019 sebesar 0,316, pada Tahun 2018 sebesar 0,342 konstan dibanding Tahun 2017. Selanjutnya di tengah pandemi covid-19, rasio gini Kota Bandar Lampung pada Tahun 2020 menjadi sebesar 0,359. Penurunan angka rasio gini di Kota Bandar Lampung selama tahun 2017-2019 tersebut menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kota Bandar Lampung berada pada tingkat ketimpangan yang semakin rendah.



Pembangunan manusia di Kota Bandar Lampung juga terus mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus membaik. Selama kurun waktu tahun 2017-2019 capaian angka IPM Kota Bandar Lampung terus mengalami kenaikan. IPM Kota Bandar Lampung pada Tahun 2017 sebesar 75,98 dan pada Tahun 2019 sebesar 77,33. Pada tahun 2020 IPM Kota Bandar Lampung mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun 2019 yakni menjadi sebesar 77,44. Posisi IPM Kota Bandar Lampung pada Tahun 2020 menduduki posisi teratas diantara seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung.

Arah Kebijakan Ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2022 memperhatikan Rancangan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 pada misi keempat yaitu mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan tujuan meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan, serta sasaran :

1. Meningkatnya sektor unggulan daerah
2. Meningkatnya investasi dan memperluas kesempatan kerja
3. Menurunnya kemiskinan
4. Meningkatnya penanganan PMKS

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan Kota Bandar Lampung Tahun 2021 untuk mewujudkan hal tersebut yaitu :

Tabel 3.2 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2022

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1.	Meningkatnya Sektor unggulan daerah	1.1	Meningkatkan kinerja sektor industri dengan didukung oleh penguatan dan pengembangan IKM/IRT	1.1.1	Mengembangkan Sektor Industri dengan Menumbuh kembangkan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Industri Rumah Tangga (IRT) yang Produktif, Berdaya Saing, Tahan Krisis, dan Padat Karya serta Optimalisasi Peran Sektor Industri dalam Penyerapan Tenaga Kerja Lokal





Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan			
				1.1.2	Meningkatkan Aksesibilitas IKM/IRT terhadap Pembiayaan Tanpa Bunga maupun dengan Bunga Rendah /Terjangkau Baik dengan Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank		
				1.1.3	Mengembangkan IKM /IRT Berbasis Potensi Daerah		
				1.1.4	Menyiapkan kapasitas IKM/IRT dalam memasuki era Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital		
		1.2	Mengembangkan perdagangan baik formal maupun informal dengan tetap memprioritaskan perlindungan konsumen			1.2.1	Stabilisasi harga komoditas, ketersediaan dan menghindari kelangkaan barang diantaranya melalui penyediaan sarana perdagangan yang representatif
						1.2.2	Meningkatkan Keamanan Perdagangan dan Perluasan Jaringan Pemasaran Produk Unggulan Daerah melalui Event Promosi, termasuk penerapan digitalisasi dalam aktivitas perdagangan (e-commerce)
						1.2.3	Meningkatkan kesadaran penggunaan produksi lokal
						1.2.4	Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan melalui Pengelolaan Pasar Tradisional dan Pasar Rakyat serta Pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lim
						1.2.5	Meningkatkan Cakupan Pengawasan Kemetrolgian
		1.3	Mengembangkan Industri/Jasa kepariwisataan secara terpadu			1.3.1	Meningkatkan Kualitas Jasa Transportasi, Perdagangan, Keuangan dan Jasa Lainnya
						1.3.2	Mendorong Keterpaduan Program dalam Masterplan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
						1.3.3	Mendorong Peningkatan Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara dengan Meningkatkan Promosi Pariwisata Kota Bandar Lampung baik melalui Event-event Lokal, Nasional dan Internasional maupun promosi melalui media digital



Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan			
				1.3.4	Meningkatkan SDM pemandu wisata yang sopan, ramah, menguasai bahasa, dan objek-objek wisata		
				1.3.5	Meningkatkan Kemitraan dengan Pelaku Usaha Kepariwisata untuk menumbuh kembangkan usaha-usaha kepariwisataan		
		1.4	Mengembangkan Koperasi dan UMKM sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan disertai peningkatan kualitas dan perluasan peluang usaha untuk mendorong tumbuh kembangnya wira usaha baru	1.4.1	Mendorong Penguatan Kelembagaan dan Meningkatkan Daya Saing UMKM dan Koperasi sehingga Mampu Tumbuh Menjadi Usaha yang Berkelanjutan dengan Skala yang Lebih Besar		
				1.4.2	Meningkatkan Fasilitasi/ pendampingan dalam mengembangkan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM untuk meningkatkan volume usaha		
				1.4.3	Meningkatkan aksesibilitas koperasi dan UMKM terhadap pembiayaan tanpa bunga maupun dengan bunga rendah/ terjangkau baik dengan lembaga keuangan Bank maupun Non Bank		
				1.4.4	Meningkatkan Iklim Usaha Mikro Kecil dan Koperasi yang Kondusif pada Era Perdagangan Bebas/Globalisasi		
				1.4.5	Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM dalam era Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital yang kompetitif		
		2.	Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja	2.1	Penguatan iklim investasi dengan didukung promosi sumberdaya, sarana dan Prasarana serta teknologi informasi	2.1.1	Optimalisasi Promosi Investasi untuk Publikasi Potensi Disertai Kemitraan Investasi
						2.1.2	Meningkatkan layanan investasi yang sederhana, mudah, cepat, tepat dan transparan baik secara offline maupun online
				2.2	Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan yang mampu menciptakan kesempatan kerja	2.2.1	Meningkatkan informasi investasi baik offline maupun online
2.2.2	Meningkatkan kerjasama daerah						
2.2.3	Mendorong investor/pelaku usaha, lembaga donor, dan lembaga pemerintah untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal						



Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
		2.3	Meningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan	2.3.1	Mendorong Arah Investasi yang Padat Karya yang Menjadikan Masyarakat Partisipatif dalam Pembangunan
				2.3.2	Meningkatkan kopetensi dan daya saing tenaga kerja lokal melalui Pembinaan dan Pelatihan serta mengembangkan tempat-tempat atau Balai Latihan Kerja
				2.3.3	Meningkatkan Perlindungan dan Pengawasan Sistem Ketenagakerjaan
				2.3.4	Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Informasi Lapangan Pekerjaan, Pelatihan Kerja dan Penyaluran Tenaga Kerja
3.	Menurunnya kemiskinan	3.1	Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan program-program unggulan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat	3.1.1	Meningkatkan koordinasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan daerah
				3.1.2	Meningkatkan peran serta / partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial dengan fokus pada peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berada di lingkungan masyarakat
				3.1.3	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dengan mendorong peran dan partisipasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam Pelaksanaan Pembangunan di segala bidang, terutama dalam menumbuh kembangkan Semangat Gotong Royong dalam masyarakat
				3.1.4	Meningkatkan ketahanan pangan sebagai wujud kedaulatan pangan melalui penganekaragaman, ketersediaan dan keamanan pangan
				3.1.5	Meningkatkan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura Rakyat
				3.1.6	Meningkatkan Aksesibilitas Petani terhadap Teknologi, Sumber-sumber Pembiayaan, serta Informasi Pasar dan Akses Pasar termasuk Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran



Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
				3.1.7	Meningkatkan Produktifitas Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat
				3.1.8	Menyalurkan Bibit dan Sarana Prasarana Produksi Pertanian dan Perikanan Skala Kecil pada Masyarakat
				3.1.9	Meningkatkan Produktivitas, Optimalisasi Kapasitas dan Kontinuitas Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya untuk Kesejahteraan nelayan dan Masyarakat
				3.1.10	Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautandan Perikanan
4.	Meningkatnya penanganan PMKS	4.1	Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan PMKS	4.1.1	Meningkatkan aksesibilitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi
				4.1.2	Penguatan Skema Perlindungan dan Bantuan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
				4.1.3	Meningkatkan Kemandirian Penyandang Disabilitas melalui Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
				4.1.4	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pemakaman Baik Milik Pemerintah Maupun Pemakaman Milik Masyarakat/Umum
				4.1.5	Menyediakan Buffer Stock Logistik dan Pemenuhan Dasar Korban Bencana

Prospek perekonomian global dan domestik pada Tahun 2021 dan 2022 sangat tergantung pada proses penanganan penyebaran *covid-19* dan pemulihan ekonomi dampak *Covid-19*. Dengan melihat target pertumbuhan ekonomi nasional maupun Provinsi Lampung Tahun 2022 yang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibanding dengan tahun 2020 dan tahun 2021 maka pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2022 juga diperkirakan akan menjadi lebih baik.



Pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 dari pengeluaran diperkirakan dapat ditopang oleh konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga dan investasi. Pertumbuhan ekonomi akan diupayakan didorong oleh konsumsi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang memiliki peran dalam pemulihan ekonomi akibat dampak *Covid-19* seiring adanya relokasi dan realisasi anggaran penanganan *Covid-19* untuk penanganan kesehatan, dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial dalam menghadapi pandemi yang terjadi. Lebih lanjut kinerja investasi diperkirakan perlahan membaik dan diperkirakan akan mampu membantu mengerakkan perekonomian Kota Bandar Lampung. Begitu juga konsumsi rumah tangga diharapkan mengalami peningkatan seiring kemajuan penanganan covid-19.

Dari Lapangan usaha, beberapa kategori yang pada tahun 2020 mengalami kontraksi selanjutnya pada tahun 2022 diperkirakan akan kembali menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi (produksi, distribusi maupun konsumsi) yang berdampak pada pada kategori tersebut.

Prospek inflasi Tahun 2021 diperkirakan akan terkendali yakni sebesar  $3,0 \pm 1$  persen. Rendahnya tekanan inflasi pada kelompok *volatile foods* diperkirakan sejalan dengan ketersediaan pasokan yang mencukupi disertai komitmen pemerintah untuk menjaga kelancaran distribusi. Sedangkan inflasi *administered prices* diperkirakan sejalan dengan permintaan masyarakat dan perkembangan perekonomian.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa dampak *Covid-19* diperkirakan masih akan mempengaruhi kondisi ekonomi makro Kota Bandar Lampung Tahun 2021 dan Tahun 2022. Selanjutnya dengan melihat target sasaran makro nasional dan Provinsi Lampung tahun 2022 serta menyimak perkembangan kondisi yang terjadi baik ditingkat global, nasional dan daerah terkait penanganan Covid-19 maupun besaran dan kecepatan stimulus kebijakan yang akan dilakukan maka berikut adalah target sasaran makro pada RKPD Tahun 2022:



Tabel 3.3 Target dan Sasaran Makro Tahun 2022

Sasaran	Target RKPD Tahun 2022
Pertumbuhan Ekonomi	4,50 - 5,50 persen
Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	21,20 persen
Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	14,05 persen
Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	15,34 persen
Laju Inflasi	3,0 ± 1 persen
Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan	91,43 persen
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,51 persen
Pendapatan Perkapita	Rp54 – 56 juta
Indek Pembangunan Manusia	77,65 – 77,99

Pada Tahun 2022, perekonomian Kota Bandar Lampung diperkirakan semakin baik sebagai lanjutan dari kondisi ekonomi tahun 2021 yang cenderung lebih baik dibanding tahun 2020, meskipun relatif terbatas. Pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2022 terutama didorong oleh aktivitas ekonomi nasional dan regional maupun Kota Bandar Lampung yang akan berdampak pada peningkatan permintaan.

Pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2022 juga diharapkan dari hasil respons dari berbagai kebijakan seperti kebijakan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui konsumsi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memiliki peran dalam pemulihan ekonomi akibat *Covid-19*. Seiring dengan hal tersebut maka tema rencana pembangunan tahunan/tema RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2022 adalah **“Pemulihan Ekonomi Daerah melalui Pemanfaatan Infrastruktur Perkotaan, Pendidikan, Kesehatan, Sosial Perdagangan dan Jasa serta Peningkatan Kualitas SDM”** dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Memulihkan Perekonomian Daerah melalui Peningkatan Sektor-Sektor Strategis Daerah;
2. Memantapkan Infrastruktur dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
3. Memantapkan Infrastruktur Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan;
4. Memantapkan Kualitas Infrastruktur dan Pelayanan Pendidikan serta SDM;



5. Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Kearifan Lokal;
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Sistem Inovasi Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kota Bandar Lampung juga mengambil kebijakan yakni tetap akan fokus pada upaya penanganan dampak pandemi *Covid-19* berupa penguatan kesehatan dan pemenuhan layanan dasar masyarakat, pemulihan ekonomi masyarakat dan jaringan pengaman sosial masyarakat seperti halnya yang dilakukan pada tahun 2021. Adapun fokus penanganan dampak *Covid-19* yang telah dan akan dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung pada Tahun 2022 adalah:

1. Penguatan kesehatan dan pemenuhan layanan dasar masyarakat, melalui peningkatan upaya promotif dan preventif serta penguatan infrastruktur kesehatan, tenaga medis dan laboratorium; terus melakukan sosialisasi protokol kesehatan 5 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas) dan 3 T (*testing, tracing, treatment*): meningkatkan fungsi dan koordinasi Satgas Covid-19 Kota Bandar Lampung sampai ke tingkat kelurahan; melaksanakan vaksinasi covid-19 termasuk memantau pelaksanaannya di masyarakat. Peningkatan SDM, Pendidikan dan Pelatihan non formal bagi angkatan kerja, Pendidikan Usia Dini;
2. Pemulihan ekonomi masyarakat, dengan mengaktifkan kembali UMKM dan IKM Kota Bandar Lampung dengan memberikan akses permodalan; memperkuat ketahanan pangan daerah; memberikan pelatihan kepada tenaga kerja dan masyarakat agar lebih terampil dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang mandiri
3. Jaringan pengaman sosial masyarakat, melalui perluasan program bantuan sosial dan hibah individu/masyarakat terdampak atau memiliki resiko sosial, termasuk perluasan basis data.



Selanjutnya masih dalam kaitannya dengan target pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2022, maka Pemerintah Kota Bandar Lampung akan terus melakukan relaksasi dan strategi guna memberikan dukungan penuh, baik kepada kelompok investasi yang telah beroperasi secara komersil maupun kelompok investasi baru yang masih pada tahap perencanaan. Dukungan yang diberikan antara lain dengan memberikan pelayanan perizinan secara online guna percepatan perizinan dan terus berupaya untuk menjaga kondisi yang kondusif bagi para investor. Hal tersebut sebagai upaya mempertahankan iklim investasi yang telah berjalan baik dan untuk mendukung kegiatan usaha investor selama masa pemulihan ekonomi daerah akibat dampak *Covid-19*.

Pada tahun 2022, Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan ditargetkan sebesar 91,43 persen dan tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan sebesar 8,51persen. Hal ini dikarenakan diperkirakan pada tahun 2022 mulai terciptanya lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja (penduduk yang kehilangan lapangan pekerjaan) yang terdampak akibat *Covid-19* meskipun masih terbatas. Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan juga secara perlahan diharapkan akan semakin meningkat dibandingkan tahun 2020 seiring dengan terciptanya lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi Lapangan usaha, berdasarkan trend dan dengan melihat kondisi yang ada maka kategori industri pengolahan dan kategori perdagangan besar dan eceran diproyeksikan masih memiliki share yang terbesar terhadap struktur PDRB Kota Bandar Lampung Tahun 2022. Pada tahun 2022, kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB diproyeksikan sebesar 21,20 persen dan kategori perdagangan besar dan eceran sebesar 14,05 persen.

Adapun kontribusi jasa, penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar 15,34 persen. Kontribusi kategori jasa diproyeksikan mengalami peningkatan sesuai dengan karakteristik perkotaan juga seiring Kota Bandar Lampung sebagai pusat perekonomian dan pusat pemerintahan di Provinsi Lampung.





Kontribusi kategori penyediaan akomodasi dan makan minum juga diproyeksikan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2020, kontribusi kategori penyediaan akomodasi dan makan minum ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 dikarenakan kategori ini merupakan kategori yang sangat terdampak dari pembatasan aktivitas ekonomi akibat *Covid-19*.

Prospek inflasi Tahun 2022 diperkirakan akan terkendali dan stabil dalam kisaran  $3,0 \pm 1$  persen. Tekanan permintaan masyarakat terhadap inflasi diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang belum terlalu maksimal. Namun demikian, terdapat beberapa risiko tekanan inflasi diantaranya terkait pasokan beberapa komoditas serta penyesuaian tarif pendidikan yang mungkin tetap perlu dimitigasi.

Pada Tahun 2022, Pendapatan per kapita diproyeksikan sebesar Rp 54 – 56 juta. Nilai Pendapatan per kapita tahun 2022 tersebut relatif meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang sempat mengalami penurunan dibanding tahun 2019. Pendapatan perkapita ini tentunya dipengaruhi oleh kenaikan produksi pada seluruh lapangan usaha, laju inflasi dan pertumbuhan penduduk

Adapun pembangunan manusia di Kota Bandar Lampung Tahun 2022 diproyeksikan mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Tahun 2022 diproyeksikan sebesar 77,65 – 77,99. Hal ini dikarenakan sebagaimana kita ketahui bahwa IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks Pendidikan dan indeks pengeluaran atau dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*) diproyeksikan masih akan terus mengalami kenaikan



### 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu Tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas, nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi diwujudkan dalam APBD yang setiap Tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

- I. Pendapatan Daerah, terdiri dari :
  - A. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi:
    1. Pajak Daerah;
    2. Retribusi Daerah;
    3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
    4. Lain- lain PAD yang sah;
  - B. Pendapatan Transfer, meliputi:
    1. Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari
      - 1) Dana Perimbangan, terdiri dari:
        - (1) Dana Transfer Umum, terdiri dari:
          - a. Dana Bagi Hasil (DBH);
          - b. Dana Alokasi Umum (DAU)



- (2) Dana Transfer Khusus, terdiri dari:
  - a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
  - b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- 2) Dana Insentif Daerah;
- 3) Dana Otonomi Khusus;
- 4) Dana Keistimewaan;
- 5) Dana Desa.
- 2. Transfer antar-daerah, terdiri dari:
  - 1) Pendapatan Bagi Hasil;
  - 2) Bantuan Keuangan.
- C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, meliputi:
  - 1. Hibah;
  - 2. Dana Darurat;
  - 3. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- II. Belanja Daerah, terdiri dari:
  - A. Belanja Operasi, meliputi:
    - 1. Belanja Pegawai;
    - 2. Belanja Barang Dan Jasa;
    - 3. Belanja Bunga;
    - 4. Belanja Subsidi;
    - 5. Belanja Hibah;
    - 6. Belanja Bantuan Sosial.
  - B. Belanja Modal
  - C. Belanja Tidak Terduga
  - D. Belanja Transfer, meliputi:
    - 1. Belanja Bagi Hasil;
    - 2. Belanja Bantuan Keuangan.
- III. Pembiayaan Daerah, terdiri dari:
  - A. Penerimaan Pembiayaan, bersumber dari:
    - 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);



2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
4. Penerimaan Pinjaman Daerah;
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
6. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

B. Pengeluaran Pembiayaan, mencakup:

1. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo;
2. Penyertaan Modal Daerah;
3. Pembentukan Dana Cadangan;
4. Pemberian Pinjaman Daerah;
5. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan:

1. Keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran,
2. Konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal, dan
3. Program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

### **3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

(UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), Pendapatan Daerah selain berasal dari pendapatan transfer (Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar-daerah) dan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah juga berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah. Berikut adalah realisasi dan proyeksi/target Pendapatan Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023:



Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Bandar Lampung Tahun 2019 s.d tahun 2013

Kode	Uraian	Tahun (Rp)				
		2019*	2020*	2021**	2022***	2023***
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>627.296.544.826,64</b>	<b>537.542.438.100,13</b>	<b>991.584.810.227,00</b>	<b>800.000.000.000,00</b>	<b>840.000.000.000,00</b>
4.1.01	Pajak daerah	480.420.824.001,04	410.455.262.268,60	679.900.000.000,00	520.195.262.269,00	546.205.025.382,45
4.1.02	Retribusi daerah	29.626.488.615,00	25.725.636.298,00	107.396.850.000,00	47.954.673.205,48	50.352.406.865,75
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	17.468.775.203,28	21.276.185.222,10	47.000.000.000,00	31.276.185.222,10	32.839.994.483,21
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	99.780.457.007,32	80.085.354.311,43	157.287.960.227,00	200.573.879.303,42	210.602.573.268,59
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.573.905.158.320,26</b>	<b>1.493.843.904.312,61</b>	<b>1.610.692.053.000,00</b>	<b>1.791.846.996.465,23</b>	<b>1.847.561.188.629,81</b>
4.2.01	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.400.623.202.255,00</b>	<b>1.320.383.923.526,00</b>	<b>1.410.692.053.000,00</b>	<b>1.581.846.996.465,23</b>	<b>1.627.061.188.629,81</b>
4.2.01.01	Dana Perimbangan :	<b>1.400.623.202.255,00</b>	<b>1.320.383.923.526,00</b>	1.367.869.346.000,00	1.536.883.154.115,23	1.579.849.154.162,31
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)			50.688.287.000,00	53.222.701.350,00	55.883.836.417,50
	Dana Bagi Hasil Pajak	38.159.663.251,00	52.417.270.224,00			
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.813.609.460,00	8.258.705.982,00			
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum	1.110.510.308.000,00	1.019.027.785.000,00	1.035.373.952.000,00	1.203.615.162.765,23	1.229.917.763.244,81
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus	246.139.621.544,00	240.680.162.320,00	281.807.107.000,00	280.045.290.000,00	294.047.554.500,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)			42.822.707.000,00	44.963.842.350,00	47.212.034.467,50
	<b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	<b>9.163.335.000,00</b>	<b>40.888.117.000,00</b>			
	Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	9.163.335.000,00	40.888.117.000,00			
	<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>164.118.621.065,26</b>	<b>132.571.863.786,61</b>			
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	164.118.621.065,26	132.571.863.786,61			



Kode	Uraian	Tahun (Rp)				
		2019*	2020*	2021**	2022***	2023***
4.2.02	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>			<b>200.000.000.000,00</b>	<b>210.000.000.000,00</b>	<b>220.500.000.000,00</b>
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak			200.000.000.000,00	210.000.000.000,00	220.500.000.000,00
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>93.454.680.000,00</b>	<b>114.415.128.158,00</b>	<b>101.312.000.000,00</b>	<b>106.377.600.000,00</b>	<b>111.696.480.000,00</b>
4.3.01	- Pendapatan Hibah	93.454.680.000,00	114.415.128.158,00	4.500.000.000,00	4.725.000.000,00	4.961.250.000,00
4.3.03	- Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan			96.812.000.000,00	101.652.600.000,00	106.735.230.000,00
4.	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.294.656.383.146,90</b>	<b>2.145.801.470.570,74</b>	<b>2.703.588.863.227,00</b>	<b>2.698.224.596.465,23</b>	<b>2.799.257.668.629,81</b>

Sumber : BPKAD Kota Bandar Lampung 2021 dan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2021-2026

Ket \*) : realisasi

\*\*): target (anggaran)

\*\*\*): rencana /proyeksi RKPD Kota Bandar Lampung



Pada Tahun 2020 terjadi penurunan pendapatan daerah sebesar Rp148.854.912.576,16 dengan persentase penurunan sebesar 6,49 persen jika dibandingkan pendapatan Daerah Tahun 2019. Anggaran pendapatan Daerah pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp557.787.392.656,26 atau terjadi peningkatan sebesar 25,99 persen jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Daerah Tahun 2020. Selanjutnya pendapatan daerah pada RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp2.698.224.596.465,23. Angka ini turun sebesar Rp5.364.266.761,77 atau sekitar 0,20 persen jika dibandingkan dengan rencana anggaran Tahun 2021 yang sebesar Rp2.703.588.863.227,00. Kemudian diproyesikan pada tahun 2023, pendapatan daerah sebesar Rp2.799.257.668.629,81, naik sebesar Rp101.033.072.164,59 atau sekitar 3,74 persen jika dibandingkan dengan rencana pendapatan daerah tahun 2022.

Proyeksi pendapatan didasarkan pada pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Proyeksi pendapatan merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Dengan melihat *trend* pertumbuhan pendapatan daerah selama kurun waktu lima Tahun terakhir maka proyeksi pendapatan yang di atas dianggap masih realistis seiring kemampuan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengefektifkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan (Pendapatan Transfer) serta dari Sumber pendapatan lain yang sah. Proyeksi Pendapatan Daerah dalam RKPD Tahun 2022 juga dengan asumsi:

1. Optimalisasi pelaksanaan beberapa Peraturan Daerah terkait pajak dan retribusi yaitu Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha,



dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Optimalisasi potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Perekonomian Tahun 2022 yang diperkirakan lebih baik jika dibandingkan tahun 2020 dan tahun 2021 seiring dengan proses penanganan penyebaran covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi dampak Covid-19 yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi nasional, Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung yang diproyeksikan tumbuh secara positif sebagaimana yang telah digambarkan dalam kerangka ekonomi diatas.
4. Iklim investasi, keamanan, dan kegiatan perekonomian di Kota Bandar Lampung pada tahun 2022 diperkirakan positif dan stabil sehingga mendukung estimasi tersebut.

Proyeksi/rencana pendapatan Daerah Tahun 2022 disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Proyeksi/rencana PAD Tahun 2022 sebesar Rp800.000.000.000,00 sedangkan anggaran PAD Tahun 2021 sebesar Rp 991.584.810.227,00. Begitupula proyeksi/rencana Pendapatan Transfer Tahun 2022 sebesar Rp1.791.846.996.465,23 sedangkan anggaran Pendapatan Transfer Tahun 2021 sebesar Rp1.610.692.053.000,00. Selanjutnya Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah pada Tahun 2022 diproyeksikan/direncanakan sebesar Rp106.377.600.000,00 sedangkan anggaran pada Tahun 2021 sebesar Rp101.312.000.000,00.

Beberapa langkah strategis untuk mendukung pencapaian proyeksi/target Tahun 2022 tersebut antara lain dilakukan dengan terus meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan Daerah dan optimalisasi aset Daerah serta terus mengupayakan peningkatan Pendapatan Transfer.





Dalam upaya mencapai target pendapatan Daerah banyak usaha yang akan dan sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, yaitu melalui:

1. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan Daerah.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendapatan.
3. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah baik yang bersumber dari Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah dengan basis data dan sistem informasi yang tepat dan akurat. Salah satu upaya dengan pemasangan *Tapping Box* pada objek Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.
4. Mengoptimalkan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan pada Kecamatan di Kota Bandar Lampung dengan mengembangkan mekanisme pelayanan yang efisien, efektif, cepat dan tepat.
5. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga terutama untuk pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Bandar Lampung.
6. Meningkatkan sistem insentif bagi pejabat dan seluruh personil yang terkait dengan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selama kurun waktu 2019-2020 maupun pada anggaran tahun 2021 serta proyeksi Tahun 2022 dan tahun 2023, jika ditinjau dari kontribusi masing-masing pos pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah Kota Bandar Lampung maka pos pendapatan daerah yang memiliki kontribusi paling tinggi adalah pendapatan transfer.

Selanjutnya pendapatan transfer yang kontribusinya paling besar adalah transfer pemerintah pusat (dana perimbangan). Secara lebih rinci jika transfer pemerintah pusat (dana perimbangan) tersebut diurutkan dari yang paling besar porsinya secara berurutan adalah dana alokasi umum kemudian dana alokasi khusus kemudian dana bagi hasil pajak dan yang terakhir adalah dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam)

Tingginya kontribusi Pendapatan Transfer terhadap total pendapatan daerah Kota Bandar Lampung jika dibandingkan dengan tingkat kontribusi PAD mencerminkan tingginya ketergantungan daerah terhadap sumber



ekstern, khususnya pemerintah pusat, atau dapat juga dikatakan bahwa Kapasitas Fiskal Daerah Kota Bandar Lampung dalam posisi yang rendah. Namun begitu, untuk kontribusi dari sektor pajak dan retribusi pada perkembangannya mampu memberikan kontribusi yang tinggi untuk pendapatan daerah Kota Bandar Lampung. Pada Tahun 2019, persentase PAD terhadap total pendapatan Daerah sebesar 27,34 persen namun pada Tahun 2020 menurun menjadi sebesar 25,05 persen. Persentase PAD terhadap total pendapatan daerah Pada Tahun 2021, ditargetkan meningkat menjadi sebesar 36,68 persen dan pada Tahun 2022 diproyeksikan sebesar 29,65 persen dan diproyeksikan terus meningkat sehingga pada tahun 2023 menjadi sebesar 30,01 persen. Angka proyeksi Tahun 2022 tersebut memang lebih kecil dibandingkan rencana anggaran tahun 2021 namun lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 dan 2020. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi yang ada dan memperhatikan perkembangan kontribusi dari sektor pajak dan retribusi terhadap pendapatan Daerah. Tabel berikut menggambarkan proporsi pendapatan asli Daerah terhadap pendapatan Daerah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022:

Tabel 3.5 Proporsi Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Total Pendapatan (%)
(1)	(2)	(3)	(4) = ((2) / (3))
2019*	627.296.544.827	2.294.656.383.147	27,34
2020*	537.542.438.100	2.145.801.470.571	25,05
2021**	991.584.810.227	2.703.588.863.227	36,68
2022***	800.000.000.000	2.698.224.596.465	29,65
2023***	840.000.000.000	2.799.257.668.630	30,01

Sumber : BPKAD Kota Bandar Lampung 2021 dan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2021-2026

Ket \*) : realisasi

\*\*\*) : target (anggaran)

\*\*\*) : rencana /proyeksi RKPD Kota Bandar Lampung

Berbagai upaya dilakukan dalam meningkatkan kemandirian fiskal serta mengurangi ketergantungan terhadap Dana Transfer, oleh karena itu, Kebijakan pendapatan keuangan Daerah diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh



kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi).

Beberapa angka konkret yang telah, sedang dan akan dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mencapai target penerimaan PAD Tahun 2022 yaitu :

#### **A. PAJAK PARKIR, HIBURAN, HOTEL, RESTORAN, REKLAME**

- 1) Audit Pajak terhadap Wajib Pajak yang belum sesuai antara potensi dengan jumlah setoran pajaknya. Dilakukan secara persuasif dengan melakukan pemanggilan terhadap wajib pajak;
- 2) Penagihan piutang/tunggakan pajak secara intensif dan kontinyu dan Penertiban Objek Pajak yang memiliki tunggakan pajak dengan di dukung melalui kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung
- 3) Pemutakhiran dan Peremajaan Data Objek Pajak dan Wajib Pajak dengan melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak dan melakukan pendataan terhadap objek pajak baru yang belum menjadi wajib pajak;
- 4) Telah melaksanakan Penerapan Pembayaran pajak secara online (Payment Online System) di seluruh kantor cabang PT.Bank Lampung, untuk mempermudah WP dalam membayar pajak. Proses pemungutan pajak dilakukan dengan cara menginput data Objek Pajak dengan menggunakan SIMPATDA dan SAI-PEPADUN, sehingga Wajib Pajak yang memiliki tunggakan harus terlebih dahulu melunasi tunggakan pajaknya, untuk memperoleh SPTPD dan SKPD;
- 5) Melakukan kerjasama dengan PT. Bank Lampung untuk melakukan pemasangan tapping box dalam pembayaran Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir (sebagaimana arahan KPK);
- 6) Peninjauan kembali kebijakan yang berkenaan dengan Pajak Restoran terhadap warung makan tenda yang berdasarkan omzet atau



- keuntungannya dapat dikenakan pajak sesuai Peraturan Perundang-undangan serta melakukan Kegiatan Pengawasan Objek Pajak Restoran
- 7) Optimalisasi pemungutan Pajak Reklame dari Papan Nama Toko dan Reklame dalam ruangan;
  - 8) Optimalisasi Pemungutan Pajak Kos-kosan/Rumah Kos;
  - 9) Telah melaksanakan Penerapan Tax Clearance secara Link-System dengan Perangkat Daerah terkait (salah satunya dengan DPM PTSP);
  - 10) Akan melaksanakan proses pelayanan perpajakan secara online (Pajak Online) dari proses penerbitan SPTPD sampai dengan proses pembayaran akan dilakukan oleh WP secara online;
  - 11) Penutupan Objek-objek Pajak Reklame dengan stiker, yang setelah diberikan teguran baik lisan maupun tertulis tetap tidak melakukan kewajiban pembayaran pajaknya;
  - 12) Penagihan Tunggakan dengan menyampaikan STPD kepada Wajib Pajak dan melakukan penagihan tunggakan secara langsung terhadap Wajib Pajak.

#### **B. PBB-P2 & BPHTB**

- 1) Meningkatkan Koordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan untuk lebih intensif dalam melakukan penagihan tunggakan dan PBB-P2 Tahun berjalan;
- 2) Meningkatkan pelayanan prima kepada Wajib Pajak, dengan membuka loket pembayaran PBB-P2 di setiap Kecamatan, menyediakan mobil kas keliling bank lampung untuk menerima pembayaran PBB, serta efisiensi pengurusan administrasi perpajakan. Bekerja sama dengan pihak KAJARI BANDAR LAMPUNG dalam upaya melakukan penagihan tunggakan PBB yang nilainya diatas Rp50.000.000;
- 3) Melakukan pendataan massal terhadap seluruh Objek PBB-P2 di 20 Wilayah Kecamatan Kota Bandar Lampung;
- 4) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembayaran Pajak khususnya PBB-P2 dan menghimbau agar pembayaran dilakukan sebelum jatuh tempo;



- 5) Menambah jumlah petugas untuk melakukan pemeriksaan lapangan terkait BPHTB;
- 6) Mempercepat proses penerbitan SSPD BPHTB;
- 7) Melaksanakan kerja sama dengan BPN Kota Bandar Lampung dalam rangka verifikasi data BPHTB.

Terkait dengan pendanaan pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2022 tentunya diperlukan strategi pendanaan dengan melakukan inovasi dan kreativitas untuk mengurangi ketergantungan pendanaan pembangunan terhadap APBD sehingga mampu meningkatkan kemandirian fiskal serta mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan antara lain dengan meningkatkan target PAD melalui pengelolaan pendapatan yang efektif dan efisien.

Kapasitas fiskal daerah mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dengan penerimaan pendapatan daerah. Beberapa strategi peningkatan pendapatan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menutup terjadinya kesenjangan fiskal adalah:

1. Penguatan Regulasi Pendapatan Daerah

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memuat jenis-jenis penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD telah melakukan revisi terhadap beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang merupakan peraturan pelaksanaan dalam kegiatan pemungutan Pendapatan Asli Daerah, khususnya mengenai pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Bandar Lampung.



Salah satu bentuk upaya ini adalah Penyusunan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dan Penyusunan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik (*e-Billing*). Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan pembenahan regulasi mengenai peningkatan standarisasi pelayanan dalam bentuk penyusunan Pedoman Operasional Standar (POS) pelayanan perpajakan, retribusi, dan perizinan yang bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif bagi para investor dalam menanamkan modalnya di Kota Bandar Lampung.

## 2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Intensifikasi perolehan pendapatan Daerah dimaksudkan untuk mengefektifkan pendapatan melalui optimalisasi pendapatan rutin daerah seperti; dari sektor perpajakan, retribusi Daerah, pendapatan Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penerimaan lain. Hal tersebut dilakukan melalui:

- a) Produk hukum dan penegakan hukum serta sanksi yang jelas dalam hal pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- b) Pendataan Wajib Pajak yang akurat dan berkelanjutan dengan sistem teknologi yang modern dan mutakhir.
- c) Meningkatkan disiplin dan kapasitas Aparat Daerah dalam hal pemungutan pajak dan pengelolaannya.
- d) Pembinaan manajemen Perusahaan Daerah/BUMD untuk mendukung penerimaan daerah.
- e) Pemasangan *Tapping Box*, pada objek Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.



Ekstensifikasi merupakan aktivitas mendapatkan sumber-sumber pendapatan daerah dari pihak eksternal. Strategi *fund rising* ini dimungkinkan dengan pihak swasta yang memiliki komitmen terhadap pembangunan di Kota Bandar Lampung. Hal tersebut dilakukan melalui:

- a) Kerjasama Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007.
- b) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan Infrastruktur sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015.
- c) Kerjasama antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung Dan Pemerintah Kota Bandar Lampung tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat Dan Pajak Daerah di Kota Bandar Lampung Nomor : KEP-41/WPJ.28/2020 dan Nomor : 11/PK/HK/2020.
- d) Pengelolaan Dana CSR dari Perusahaan Swasta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- e) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- f) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 115 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel.
- g) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 116 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran.
- h) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 117 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan.
- i) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.



- j) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.
- k) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir.
- l) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 71 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan BPHTB.
- m) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 72 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Reklame.
- n) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 74 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur PBB-P2.
- o) Keputusan Kepala BPPRD Nomor 970/50/SIMPATDA/IV.03/ 2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Informasi Manajemen.
- p) Hibah dari Luar Negeri.
- q) Dana-dana pembangunan dari Pemerintah Pusat.
- r) Mendata ulang seluruh objek pajak parkir di 20 UPT kecamatan.
- s) Input data objek pajak dengan menggunakan SIMPATDA baru, sehingga wajib pajak yang memiliki tunggakan harus terlebih dahulu melunasi tunggakan pajaknya.

### 3. Peningkatan Kompetensi Personil Pengelola Pendapatan

Setelah melakukan penguatan regulasi dan penerapan metode intensifikasi dan ekstensifikasi dalam memaksimalkan potensi penerimaan, maka yang tidak kalah penting untuk dilakukan adalah optimalisasi fungsi personil pengelola pendapatan. Dalam melaksanakan peningkatan pendapatan daerah, selain mengacu kepada Pedoman Operasional Standar (POS) yang berlaku, juga dibutuhkan personil yang memiliki kemampuan yang memadai.

Upaya peningkatan kemampuan personil ini dilakukan dalam bentuk pemberian bimbingan tentang materi pelayanan dan POS secara





berkesinambungan. Hasil akhir yang diharapkan adalah peningkatan kemampuan personil untuk memberikan pelayanan dengan kualitas yang baik kepada para wajib pajak, wajib retribusi, dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Selain itu, guna meningkatkan motivasi dan etos kerja pegawai, juga telah diberlakukan sistem insentif bagi pejabat dan seluruh personil yang terkait dalam pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan pelayanan publik.

#### 4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Untuk meningkatkan kemampuan Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan dan Badan Usaha Milik Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, diperlukan dukungan kemampuan teknologi informasi yang memadai. Oleh karenanya, setelah melakukan pembenahan secara konseptual dalam bentuk penyusunan POS dalam sektor perpajakan daerah, retribusi daerah, dan pelayanan publik, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga telah memanfaatkan program aplikasi dalam kegiatan operasionalnya. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan meminimalisir tingkat kebocoran dalam pemungutan pajak dan retribusi.

### 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja

Belanja daerah merupakan komponen pengeluaran yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Belanja daerah pada hakekatnya diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi



kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menciptakan efektivitas dan efisiensi anggaran. Penyusunan belanja Daerah diprioritaskan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Belanja sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah daerah dan mendorong optimalisasi pendayagunaan potensi daerah tentunya harus dilakukan secara efisien, efektif dan berbasis kinerja. Selanjutnya terkait dengan optimalisasi pendayagunaan potensi daerah dan mengingat luas dan besarnya cakupan masalah yang dihadapi maka harus ada upaya mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut mengurangi masalah dan bahkan menyelesaikan masalah. Untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah maka harus terbangun komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat.

Belanja daerah sepenuhnya tergantung pada pendapatan. Kemampuan belanja dipengaruhi oleh kapasitas pendapatan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, hibah, bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, dan belanja modal. Berikut adalah realisasi dan proyeksi/target Belanja Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023:



Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Bandar Lampung Tahun 2019 s.d 2023

Kode	Uraian	Tahun (Rp)				
		2019*	2020*	2021**	2022***	2023***
<b>5.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.875.776.505.229,98</b>	<b>1.837.485.250.635,48</b>	<b>2.080.815.352.927,14</b>	<b>2.193.322.110.320,87</b>	<b>2.317.994.782.363,19</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.124.018.492.465,50	1.170.699.661.039,33	966.954.617.594,79	1.044.000.555.045,88	1.111.508.719.975,85
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	668.577.338.927,48	552.618.463.513,15	1.013.589.133.595,35	1.078.011.215.274,99	1.131.601.880.387,34
5.1.03	Belanja Bunga	15.223.964.418,00	3.391.039.104,00	18.500.000.000,00	19.425.000.000,00	20.396.250.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	58.115.459.419,00	103.783.336.979,00	70.431.601.737,00	44.057.340.000,00	46.260.207.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.841.250.000,00	6.992.750.000,00	11.340.000.000,00	7.828.000.000,00	8.227.725.000,00
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>310.725.158.722,69</b>	<b>263.573.753.666,50</b>	<b>298.833.833.719,65</b>	<b>365.634.908.019,36</b>	<b>384.687.886.266,62</b>
<b>5.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>2.985.239.500,00</b>	<b>26.438.160.000,00</b>	<b>30.000.000.000,00</b>	<b>31.500.000.000,00</b>	<b>33.075.000.000,00</b>
5.4	<b>Belanja Transfer</b>			-	-	-
	<b>Transfer</b>	<b>1.174.259.780,00</b>	-			
	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-			
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.174.259.780,00	-			
<b>5.</b>	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.190.661.163.232,67</b>	<b>2.127.497.164.301,98</b>	<b>2.409.649.186.646,79</b>	<b>2.590.457.018.340,23</b>	<b>2.735.757.668.629,81</b>

Sumber : BPKAD Kota Bandar Lampung 2021 dan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2021-2026

Ket \*) : realisasi

\*\*) : target (anggaran)

\*\*\*) : rencana /proyeksi RKPD Kota Bandar Lampung



upaya yang sistematis dan kontinyu untuk mengefisienkan dan mengefektifkan belanja daerah membutuhkan pengaturan dan manajemen penganggaran yang baik. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Dalam rancangan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021–2026, diamanatkan bahwa kebijakan alokasi anggaran menganut prinsip skala prioritas. Hal ini mengandung arti bahwa pengalokasian belanja haruslah berdasarkan skala prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan. Dalam rancangan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021–2026, juga disebutkan bahwa kebijakan penganggaran yang dianut oleh Kota Bandar Lampung adalah anggaran berimbang. Artinya belanja daerah tentu sepenuhnya tergantung pada pendapatan atau dengan kata lain, kemampuan belanja dipengaruhi oleh kapasitas pendapatan. Oleh karena itu, pengeluaran haruslah selalu didasarkan atas kapasitas pendapatan.

Pemerintah daerah telah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, organisasi perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kerjanya.

Selanjutnya kebijakan anggaran belanja masih tetap memastikan hanya program-program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas dan fungsi suatu lembaga yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan daerah memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan melalui prioritas daerah/program prioritas/kegiatan prioritas.



Kebijakan rencana belanja Daerah pada Tahun 2022 sebagai berikut:

- 1) Belanja daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja RKPD Tahun lalu yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- 2) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah terutama yang berkaitan dengan pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan. Selanjutnya kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan program bermanfaat yang dialokasikan dan bukan hanya merupakan tugas fungsi perangkat daerah bersangkutan.
- 3) Dana Alokasi Umum (DAU) ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum.
- 4) Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, pertanian, ketahanan pangan, perhubungan dan kelautan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja yang bersumber dari DAK dianggarkan pada Perangkat Daerah yang berkenaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



### **3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan di Kota Bandar Lampung berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu dan hutang, sedangkan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah dan pembayaran hutang. Berikut adalah realisasi dan proyeksi/target Belanja Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2023:



Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Bandar Lampung Tahun 2019 s.d 2013

Kode	Uraian	Tahun (Rp)				
		2019*	2020*	2021**	2022***	2023***
6.1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>					
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	8.800.003.559,85	14.266.985.974,08	24.560.323.419,79	-	-
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-			
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>8.800.003.559,85</b>	<b>14.266.985.974,08</b>	<b>24.560.323.419,79</b>	-	-
6.2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>					
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	39.500.000.000,00	6.000.000.000,00	63.500.000.000,00	63.500.000.000,00	63.500.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	59.023.437.500,00	14.755.859.375,00	255.000.000.000,00	44.267.578.125,00	-
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>98.523.437.500,00</b>	<b>20.755.859.375,00</b>	<b>318.500.000.000,00</b>	<b>107.767.578.125,00</b>	<b>63.500.000.000,00</b>
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(89.723.433.940,15)</b>	<b>(6.488.873.400,92)</b>	<b>(293.939.676.580,21)</b>	<b>(107.767.578.125,00)</b>	<b>(63.500.000.000,00)</b>

Sumber : BPKAD Kota Bandar Lampung 2021 dan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2021-2026

Ket \*) : realisasi

\*\* ) : target (anggaran)

\*\*\* ) : rencana /proyeksi RKPD Kota Bandar Lampung



Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2022 secara umum tidak banyak berbeda dengan kebijakan pembiayaan pada tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Tahun 2019-2021 diarahkan untuk pengamanan SiLPA Tahun lalu untuk dapat dipergunakan secara efisien bagi kegiatan yang bernilai ekonomis tinggi maupun cadangan penguatan modal atau dana cadangan Daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2022 diarahkan untuk membayar pokok utang serta penyertaan modal pada BUMD. Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Tahun 2022 yaitu:

1. Penyertaan modal pemerintah Kota Bandar Lampung pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.
2. Jika pemerintah Kota Bandar Lampung akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, maka akan dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal tersebut.
3. Pemerintah Kota Bandar Lampung akan menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, penambahan penyertaan modal dimaksud guna memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.
4. Sampai dengan Tahun 2020, disamping ikut memiliki saham pada PT. Bank Lampung, sudah ada 5 (lima) BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu PT BPR Waway Lampung, PT BPRS Bandar Lampung, PDAM Way Rilau, PD Pasar Tapis Berseri dan PD Kebersihan.





## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1 KONDISI UMUM KONDISI DAERAH

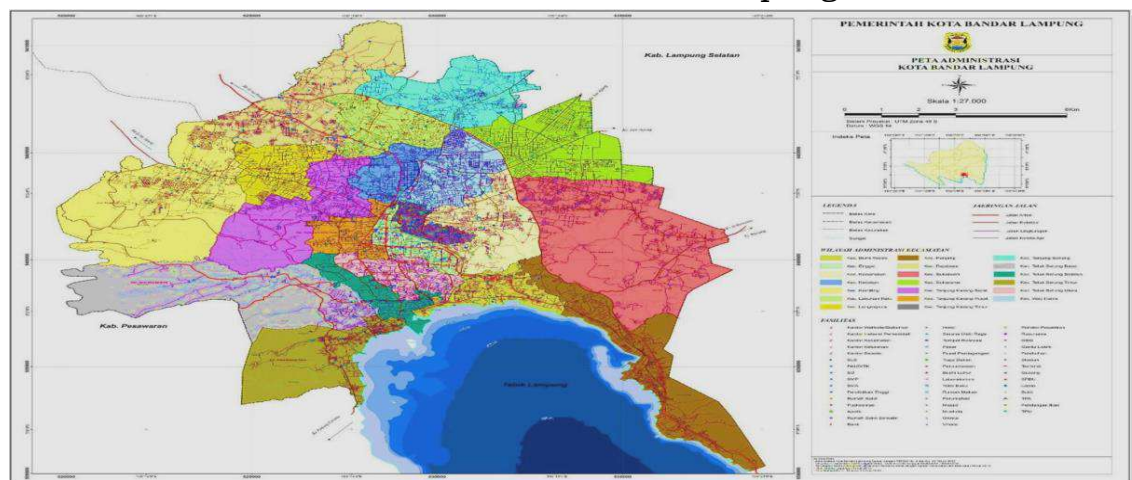
#### 2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

##### 2.1.1.1 Letak dan Kondisi Geografi Daerah

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung yang secara geografis terletak pada koordinat 5<sup>o</sup>20' sampai dengan 5<sup>o</sup>30' Lintang Selatan dan 105<sup>o</sup>28' sampai dengan 105<sup>o</sup>37' Bujur Timur. Ibukota Bandar Lampung berada di Teluk Betung yang terletak di ujung Selatan Pulau Sumatera. Secara Administrasi, Kota Bandar Lampung berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten di Provinsi Lampung, yaitu :

- Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan,
- Di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan serta Teluk Lampung,
- Di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran,
- Di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Gambar 2.1 Peta Administratif Kota Bandar Lampung



Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2021



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung yang tersaji dalam Kota Bandar Lampung Dalam Angka (BLDA) Tahun 2021, Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan ±19.722 Ha (197,22 Km<sup>2</sup>). Namun berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041, Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan ±18.374 Ha (183,74 Km<sup>2</sup>) dengan panjang garis pantai sepanjang 35,6 Km dan luas perairan ±11,56 Ha yang terdiri atas Pulau Kubur (0,96 Ha) dan Pulau Pasaran (10,6 Ha). Secara administratif Kota Bandar Lampung terdiri dari 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan. Berikut adalah data yang menunjukkan luas dan wilayah administrasi Kota Bandar Lampung:

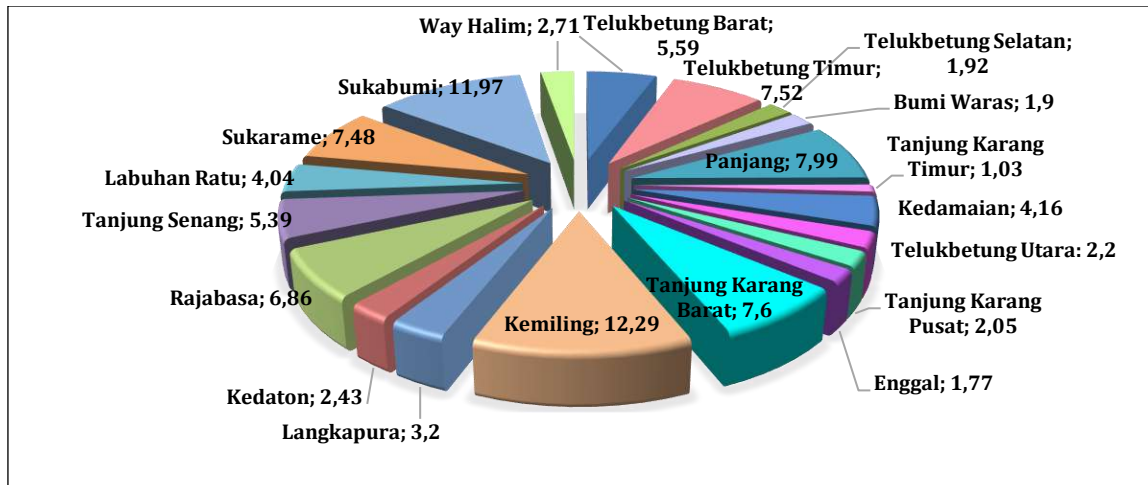
Tabel 2.1 Luas dan Wilayah Administrasi Kota Bandar Lampung

<b>Kecamatan</b>	<b>Luas Wilayah berdasarkan data BPS dalam BLDA Tahun 2021 (Km<sup>2</sup>)</b>	<b>Luas Wilayah Berdasarkan Ranperda RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041 (Km<sup>2</sup>)</b>
Telukbetung Barat	11,02	18,26
Telukbetung Timur	14,83	10,39
Telukbetung Selatan	3,79	3,49
Bumi Waras	3,75	4,52
Panjang	15,75	13,64
Tanjung Karang Timur	2,03	2,07
Kedamaian	8,21	8,34
Telukbetung Utara	4,33	4,38
Tanjung Karang Pusat	4,05	3,45
Enggal	3,49	2,78
Tanjung Karang Barat	14,99	11,54
Kemiling	24,24	21,33
Langkapura	6,12	5,30
Kedaton	4,97	3,77
Rajabasa	13,53	12,93
Tanjung Senang	10,63	9,24
Labuhan Ratu	7,97	6,10
Sukarame	14,75	10,92
Sukabumi	23,60	25,04
Way Halim	5,35	6,25
<b>Jumlah</b>	<b>197,22</b>	<b>183,74</b>

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2021; Ranperda RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2021

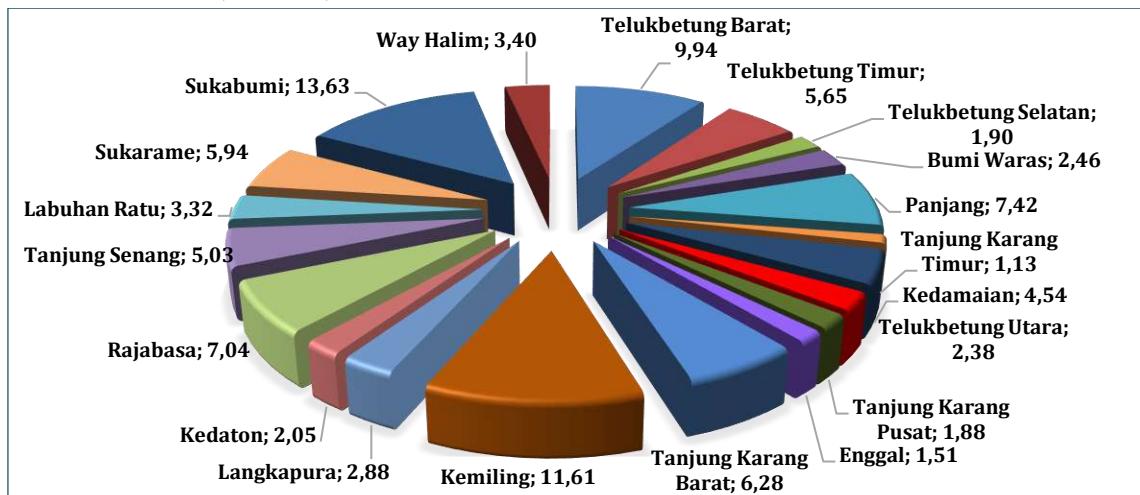


Diagram 2.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan berdasarkan Data BPS dalam BLDA Tahun 2021 (Persen)



Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2021

Diagram 2.2 Luas Daerah Menurut Kecamatan berdasarkan data pada Ranperda RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041 (Persen)



Sumber : Ranperda RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2024, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2021

a) Posisi Geostrategis

Kota Bandar Lampung memiliki andil yang sangat vital dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya serta memiliki Pelabuhan Panjang untuk kegiatan ekspor impor dan Pelabuhan Srengsem yang melayani distribusi batubara dari Sumatera ke Jawa, sehingga secara langsung Kota Bandar Lampung berkontribusi dalam mendukung pergerakan ekonomi nasional.



Kota Bandar Lampung berpotensi untuk menjadi Kota Metropolitan. Seiring dengan program pada Tahun 2015, Kota Bandar Lampung dan Kota Metro merupakan kawasan yang dipetakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) berpotensi sebagai Area Metropolitan, terkhusus dalam cetak biru Wilayah Pengembangan Strategis Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-Api. Keunggulan Kota Metropolitan ini adalah menjadi pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri, pariwisata serta pendidikan. Dengan posisi penting tersebut, Kota Bandar Lampung harus lebih unggul dan maju dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain yang ada di Provinsi Lampung.

Pembangunan jalur tol laut akan berperan dalam kemudahan akses jalur laut yang menghubungkan Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan pulau-pulau lainnya. Tol Laut akan memunculkan pusat-pusat pertumbuhan baru sebagai sebuah *multiplier effecter* masuk Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung sebagai salah satu pusat jaringan pergerakan nasional melengkapinya dengan pembangunan Pelabuhan Panjang yang diarahkan sebagai pelabuhan ekspor-impor dan antarpulau. Kondisi fisik perairan pelabuhan memungkinkan pengembangan Kota Bandar Lampung sebagai gerbang internasional.

Pembangunan jalur tol trans Sumatera, jaringan jalan arteri primer, dan jalur Kereta Api Trans Sumatera yang terintegrasi dengan wilayah Kota Bandar Lampung akan sangat berperan dalam yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, dan pulau-pulau lain melalui jalur darat. Jalan tol trans Sumatera dibangun di Timur Bandar Lampung ke arah Palembang sebagai kelanjutan jalur Jawa-Sumatera. Arteri primer sebagai bagian trans Sumatera dilengkapi jalur Lintas Barat dan Lintas Timur ke Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan. Gagasan pembangunan jalur Kereta Api trans Sumatera hingga Sumatera Utara akan berada pada sisi pantai Timur.



Kota Bandar Lampung memiliki berbagai fasilitas dan tempat yang lengkap yang terbagi atas pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat wisata dan pusat pendidikan. Aspek strategis lainnya adalah memiliki pantai yang indah yang berpotensi sebagai tempat wisata maupun Kota Pesisir yang dikenal dengan “Bandar Lampung Kota Marina”. Kota Bandar Lampung memiliki luas area pesisir sebesar 0,05% yang merupakan aset yang harus dioptimalkan.

b) Kondisi Kawasan

Secara umum, Kawasan Kota Bandar Lampung merupakan wilayah perkotaan padat penduduk yang terdiri atas daratan dan perairan (lautan) dengan beberapa dataran tinggi dan pegunungan yang terbentang di wilayah Kota Bandar Lampung. Secara letak posisi Kota Bandar Lampung dikelilingi oleh beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung.

c) Topografi

Kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian 0 sampai 700 meter diatas permukaan laut dengan topografi yang terdiri dari :

- 1) Daerah pantai yaitu sekitar Teluk Betung bagian selatan dan Panjang
- 2) Daerah perbukitan yaitu sekitar Teluk Betung bagian utara
- 3) Daerah dataran tinggi serta sedikit bergelombang terdapat di sekitar Tanjung Karang bagian Barat yang dipengaruhi oleh gunung Balau serta perbukitan Batu Serampok dibagian Timur Selatan.
- 4) Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil bagian Selatan.



Gambar 2.2 Peta Topografi Kota Bandar Lampung



Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2021

Sebagian wilayah Kota Bandar Lampung merupakan perbukitan. Berikut ini adalah data yang menunjukkan Gunung/Bukit/Lereng di Kota Bandar Lampung sampai dengan Tahun 2020.

Tabel 2.2 Gunung/Bukit/Lereng di Kota Bandar Lampung

Nomor	Nama Gunung/Bukit/Lereng	Lokasi
1	Gunung Kunyit	Bumi Waras
2	Gunung Mastur	Kel. Perwata (Teluk Betung Timur)
3	Gunung Bakung	Kel. Sukamaju (TelukBetung Timur)
4	Gunung Sulah	Kel. Gunung Sulah (Way Halim)
5	Gunung Celegi	Sukarame II (Teluk Betung Barat)
6	Gunung Perahu	Kel. Sidodadi
7	Gunung Cerepung	Kel. Olok Gading (Teluk Betung Barat)
8	Gunung Cerepoh	Kel. Olok Gading (Teluk Betung Barat)
9	Gunung Sari	Kel. Gunung Sari (Enggal)
10	Gunung Palu	Kel. Olok Gading (Teluk Betung Barat)
11	Gunung Depok	Kel. Keteguhan (Teluk Betung Barat)
12	Gunung Kucing	Kel. Segala Mider (Langkapura)
13	Gunung Banten	Kel. Sidodadi (Kedaton)
14	Gunung Sukajawa	Kel. Sukajawa (Tanjung Karang Barat)
15	Gunung Serampok	Kel. Srengsem (Panjang)
16	Bukit Asam	Ke. Way Lunik (Panjang)
17	Bukit Pidada	Kel. Way Gubak Campang Raya
18	Bukit Balau	Kel. Way Gubak Campang Raya
19	Gugusan Bukit Hatta	Kel. Sukamaju (Teluk Betung Timur)
20	Bukit Cepagoh	Kel. Olok Gading (Teluk Betung Barat)
21	Bukit Kaliawi	Kel Kaliawi (Tanjung Karang Pusat)
22	Bukit Palapa I	Kel. Durian Payung (Tanjung Karang Pusat)
23	Bukit Palapa II	Kel. Durian Payung (Tanjung Karang Pusat)
24	Bukit Pasir Gintung	Kec. Tanjung Karang Pusat
25	Bukit Kaki Gunung Betung	Kel. Beringin (Kemiling)
26	Bukit Sukadana Ham	Kec. Tanjung Karang Barat
27	Bukit Susunan Baru	Kec. Tanjung Karang Barat
28	Bukit Sukamenanti	Kec. Kedaton
29	Bukit Kelurum	Kec. Tanjung Karang Timur



Nomor	Nama Gunung/Bukit/Lereng	Lokasi
30	Bukit Randu	Kec. Tanjung Karang Timur
31	Bukit Langgar	Kel. Campang Raya
32	Bukit Camang Timur	Kec. Kedamaian
33	Bukit Camang Barat	Kec. Kedamaian

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2021

Berikut letak geografi dan topografi Kota Bandar Lampung yang dipilah menurut kecamatan.

Tabel 2.3 Banyaknya Kelurahan menurut Kecamatan, Letak Geografi, dan Topografi Tahun 2020

Kecamatan	Letak Geografi		Topografi	
	Pantai	Bukan Pantai	Datar	Berbukit
Telukbetung Barat	-	5	1	4
Telukbetung Timur	6	-	6	-
Telukbetung Selatan	-	6	2	4
Bumi Waras	5	-	5	-
Panjang	6	2	6	2
Tanjung Karang Timur	-	5	5	-
Kedamaian	-	7	6	1
Telukbetung Utara	-	6	6	-
Tanjung Karang Pusat	-	7	3	4
Enggal	-	6	6	-
Tanjung Karang Barat	-	7	2	5
Kemiling	-	9	4	5
Langkapura	-	5	1	4
Kedaton	-	7	6	1
Raja Basa	-	7	6	1
Tanjung Senang	-	5	5	-
Labuhan Ratu	-	6	6	-
Sukarame	-	6	6	-
Sukabumi	-	7	3	4
Way Halim	-	6	5	1
<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	<b>109</b>	<b>90</b>	<b>36</b>

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2021

#### d) Hidrologi

Secara hidrologi Kota Bandar Lampung mempunyai 2 sungai besar yaitu Way Kuripan dan Way Kuala, dan 23 sungai-sungai kecil. Semua sungai tersebut merupakan DAS (Daerah Aliran Sungai) yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung dan sebagian besar bermuara di Teluk Lampung. Berdasarkan inventarisasi dan penyusunan Database Sungai di Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, berikut ini adalah data yang menunjukkan Gambaran Data sungai di Kota Bandar Lampung.



Tabel 2.4 Gambaran Data Sungai di Kota Bandar Lampung

Nama Sungai	Lokasi Hulu		Lokasi Hilir		Dimensi				Debit					Muara ke	Potensi Banjir/ Bebas Banjir
	Kelurahan	Kecamatan	Kelurahan	Kecamatan	B1 (m) Bawah	B2 (m) Atas	H (m) Tinggi	Panjang (m)	Q (5)	Q (10)	Q (25)	Q (50)	Q (100)		
Way Kuala	Garuntang	Bumi Waras	Ketapang	Panjang	6	8	4	4.066	17,5737	20,5404	242517	26,9988	29,7252	Laut	Banjir
Anak Way Kuala	Garuntang	Bumi Waras	Ketapang	Panjang	4	6	2	1.029	0,8551	0,9995	1,18	1,3137	1,4464	Laut	Banjir
Way Balau	Jl. Imam Bonjol, Langkapura	Kemiling	Jl. Gatot Subroto, Garuntang, Kp. Balok	Teluk Betung Selatan	5	4	3	14.380						Way Kuala	Banjir
Way Galih	Sukarame	Sukarame	Sabah Balau	Tanjung Bintang	2	1,5	1	2.223	2,0471	2,3926	2,825	3,1449	3,4625	Sungai Way Galih Besar (Lampung Timur)	Banjir
Way Halim	Segala Mider	Tanjung Karang Barat	Surabaya	Kedaton	3	3	2	5.040	2,3684	2,7682	3,2684	3,6386	4,006	Ke Kuala	Banjir
Way Kupang	Jl. Wolter Monginsidi, Pengajaran	Teluk Betung Utara	Bumi Waras	Panjang	3	3	3	2.363	0,8681	1,0114	1,1979	1,3336	1,4683	Laut	Banjir
Way Awi	Jl. Singing-maharaja	Tanjung Karang Pusat	Jl. Antasari, Kedamaian	Tanjung Karang Timur	4	5	3	4.683	2,9825	34860	4,1159	4,5821	5,0448	Way Kedamaian	Banjir
Way Kuripan	Jl. Wan Abdurrahman, Sukarame II	Teluk Betung Barat	Jl. Ikan Kembang, Pesawahan	Panjang	18	18	3	6.024	22,5385	26,3433	31,1031	34,4626	38,1229	Laut	Bebas Banjir
Way Betung	Batu Putu	Teluk Betung Utara	Jl. Wan Abdurrahman, Sukarame II	Teluk Betung Barat	3	5	2	1.089	9,0434	10,5700	12,4799	13,8935	15,2965	Way Kuripan	Banjir
Way Penengahan	Jaga Baya	Way Halim	Jagabaya II	Sukabumi	1,2	1,3	1,2	1.679	0,3628	0,424	0,5006	0,5573	0,6136	Way Awi	Banjir
Anak Way Awi	Jl. Raden Intan Tanjung Karang	Tanjung Karang Pusat	Jl. Beo	Tanjung Karang Timur	2,5	3	3,5	1.075						Way Kedamaian	Banjir
Way Simpur	Durian Payung	Enggal	Enggal	Tanjung Karang Pusat	2,5	3	2,5	2.084	1,0909	1,2751	1,5055	1,6776	1,8452	Anak Way Awi	Banjir
Way Langkapura	Langkapura	Langkapura	Jl. Mangkubumi, Segala Mider	Tanjung Karang Barat	2	2,5	1,5	1.028	1,0184	1,1903	1,4053	1,5645	1,7225	Laut	Banjir



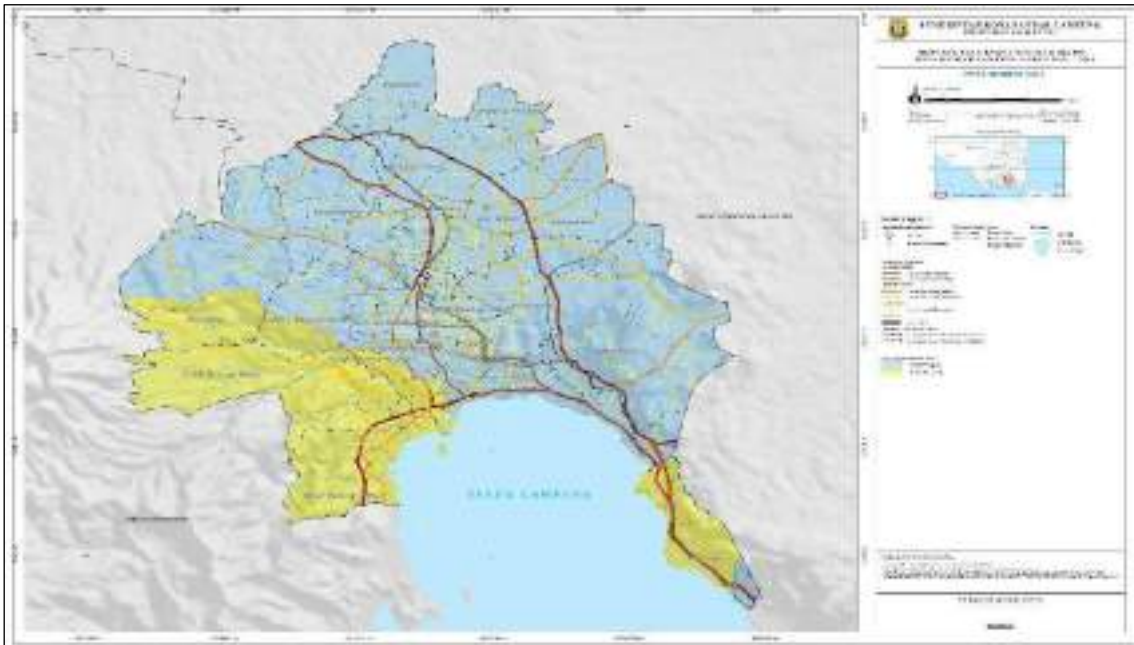


Nama Sungai	Lokasi Hulu		Lokasi Hilir		Dimensi					Debit					Muara ke	Potensi Banjir/ Bebas Banjir
	Kelurahan	Kecamatan	Kelurahan	Kecamatan	B1 (m) Bawah	B2 (m) Atas	H (m) Tinggi	Panjang (m)	Q (5)	Q (10)	Q (25)	Q (50)	Q (100)			
Way Sukamaju	Sukajaya Lempasing Padang Cermin	Kabupaten Pesawaran	Jl. Laks. Martadinata	Teluk Betung Barat	10	12	2,5	4.062	4,4828	5,2396	6,1863	6,887	7,5825	Laut	Bebas Banjir	
Way Keteguhan	Sawah Raya	Teluk Betung Selatan	Jl. RE. Martadinata	Panjang	1,2	2	1	2,013	0,7255	0,848	1,0013	1,1147	1,2272	Laut	Banjir	
Way Lunik	Jl. Soekarno Hatta, Way Lunik	Teluk Betung Selatan	Jl, Yos Sudarso, Way Lunik	Panjang	3	6	4	1.700	2,2673	2,6501	3,1289	3,4833	3,8351	Laut	Banjir	
Way Kedamaian	Antasari	Tanjung Karang Timur	Kampung Balok	Kedamaian	6	7	4	4.072	0,8732	1,0207	1,2051	1,3416	1,4771	Way Kuala	Banjir	
Way Kunit	Jl. Kh. Ahmad Dahlan	Teluk Betung Utara	Bumi Waras	Bumi Waras	3,4	3,4	2	1.087	1,1635	1,3599	1,6056	1,7874	1,9679	Laut	Banjir	
Way Langka	Sumberejo	Kemiling	Sumber Rejo	Kemiling	4	3	2	2.155						Way Balau	Banjir	
Way Simpang Kanan	Kp. Peninjauan	Teluk Betung Barat	Batu Putu	Teluk Betung Utara	4	7	2	1.695	43,921	5,1336	6,0611	6,7477	7,4291	Way Betung	Banjir	
Way Simpang Kiri	Kp. Peninjauan	Teluk Betung Barat	Sukarame II	Teluk Betung Barat	7	10	3	9.500	38.609	45,127	5,3281	5,9136	6,5306	Way Betung	Banjir	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, 2021



Gambar 2.3 Peta Hidrologi Kota Bandar Lampung

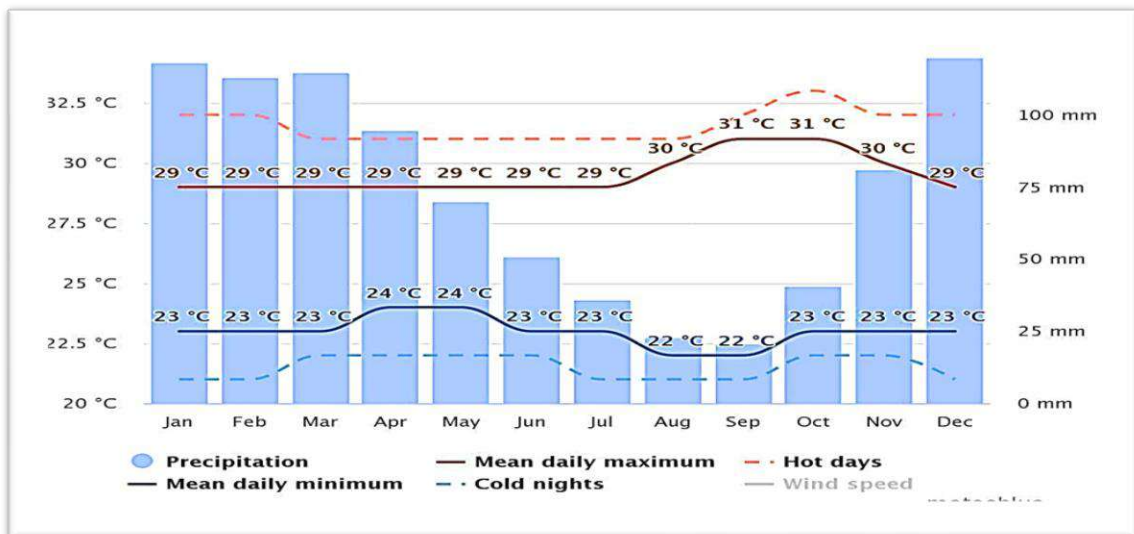


Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2021

e) Klimatologi

Berdasarkan kajian kerentanan iklim yang telah dilakukan bahwa kondisi iklim di Kota Bandar Lampung sama dengan iklim kota yang berada di garis khatulistiwa dengan kondisi panas dan lembab sepanjang tahun dan suhu di darat konstan. Gambar berikut ini mewakili suhu dan pengendapan rata-rata setiap bulan di Bandar Lampung.

Diagram 2.3 Suhu dan Pengendapan Rata-Rata di Bandar Lampung



Sumber : [www.meteoblue.com](http://www.meteoblue.com)



Data tersebut menunjukkan bahwa curah hujan sedang terjadi di tiga bulan pertama setiap tahun dan di akhir tahun, karenanya rata-rata harian suhu maksimum akan terjadi sekitar bulan September-Oktober.

Gambar 2.4 Peta Klimatogi Kota Bandar Lampung



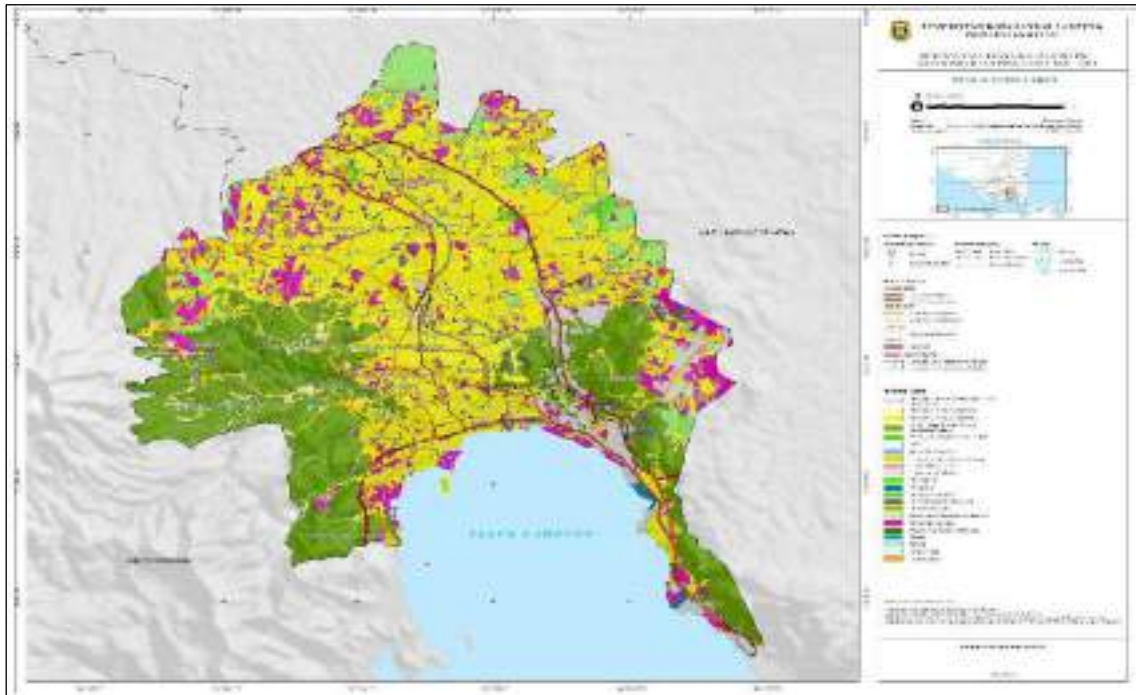
Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2021

#### f) Tutupan Lahan

Tutupan lahan di Kota Bandar Lampung secara eksisting sampai saat ini secara garis besar terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Berdasarkan data Ranperda RTRW 2021-2041 dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, saat ini luas Kota Bandar Lampung sekitar 18,374 Ha. Secara umum lahan terbangun sampai saat ini dengan luas sekitar ±9.983,34 Ha atau sekitar 54,33 persen dari luas Kota Bandar Lampung, sedangkan lahan yang belum terbangun saat ini sekitar ±8.390,66 Ha atau sekitar 45,67 persen dari luas Kota Bandar Lampung.



Gambar 2.5 Peta Tutupan Lahan Kota Bandar Lampung



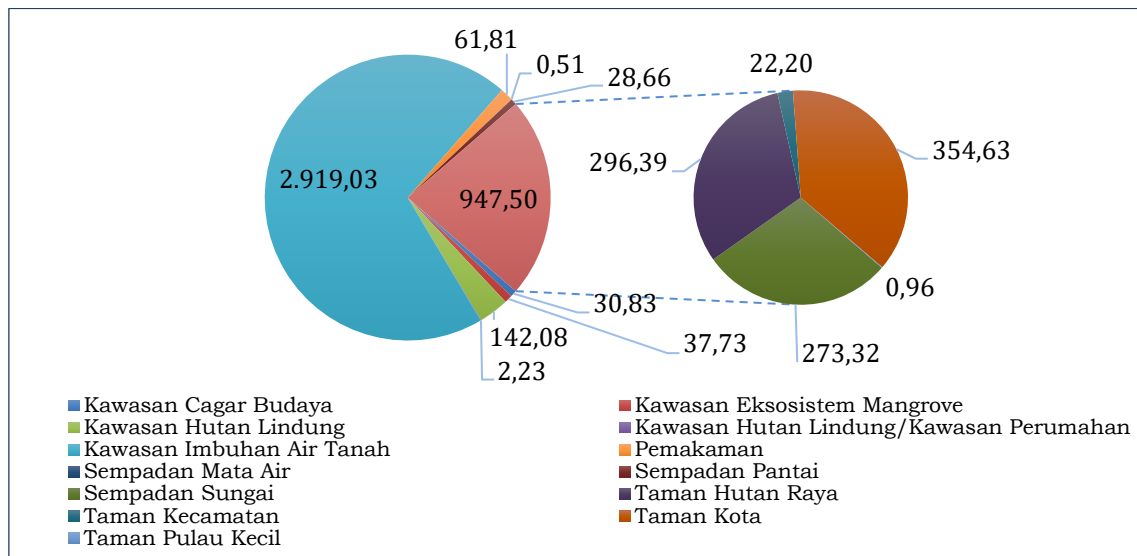
Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2021

a. Kawasan Lindung

Dengan mengacu kepada Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018, kawasan lindung terdiri atas kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, kawasan lindung geologi, kawasan cagar budaya, kawasan ekosistem mangrove, taman pulau kecil, kawasan imbuhan air tanah dan ruang terbuka hijau (RTH) kota dengan total luas kawasan lindung yaitu 4.170,37 Ha. Adapun pembagian kawasan lindung adalah sebagai berikut :



Diagram 2.4 Kawasan Lindung



Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2021

RTH publik terdiri dari taman kecamatan, taman kota, pemakaman, sempadan sungai dan sempadan pantai, sempadan mata air dan kawasan ekosistem mangrove yang tersebar diseluruh kecamatan wilayah Kota Bandar Lampung. Sedangkan RTH *private* tersebar pada lahan dengan fungsi permukiman di seluruh bagian wilayah kota. Selain itu RTH *private* juga tersebar pada kawasan industri yang banyak tersebar di wilayah Kecamatan Panjang, Sukabumi dan Kecamatan Bumi Waras.

RTH dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan aspek planologis perkotaan, serta meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanahkan ketersediaan RTH sebesar 30% yang terdiri dari RTH *public* sebesar 20% dan RTH *private* sebesar 10% dari luas wilayah terbangun kota. Kondisi eksisting di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa ketersediaan RTH saat ini jika dilihat dari luasannya belum dapat memenuhi ketentuan tersebut, dan RTH yang sudah ada perlu direvitalisasi fungsinya kembali. Luas ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kota Bandar Lampung saat ini berjumlah 658,57 Ha atau sekitar 4,37% dari total luas lahan terbangun Kota Bandar Lampung yang terdiri dari taman kota sebesar 355 Ha, taman kecamatan sebesar 22 Ha, pemakaman

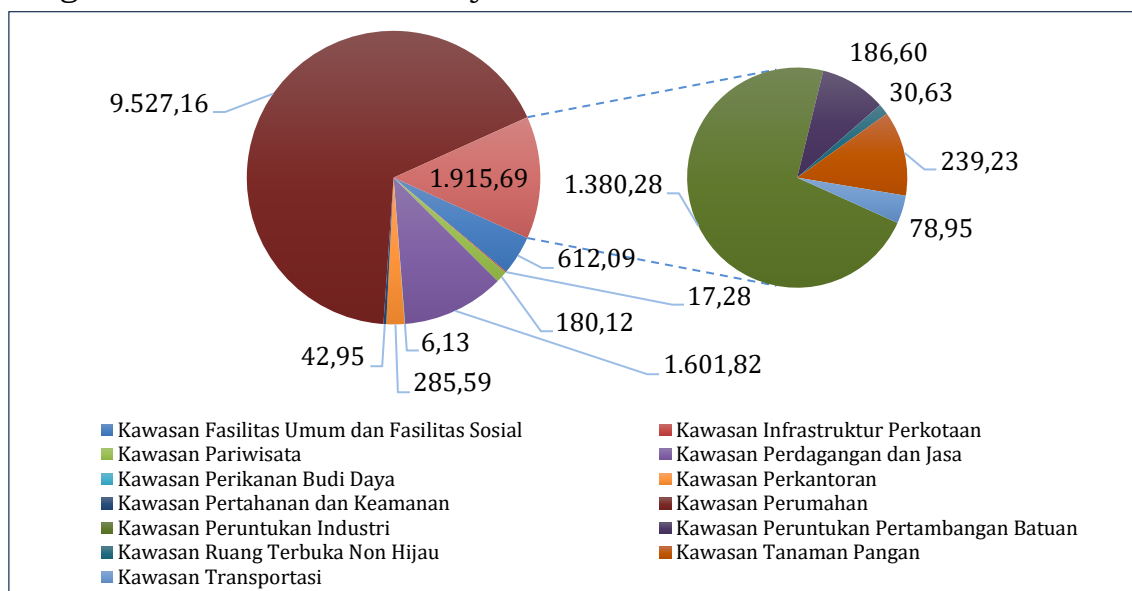


sebesar 62 Ha, sempadan sungai dan sempadan pantai sebesar 181,2 Ha, sempadan mata air 0,37 Ha dan kawasan ekosistem mangrove sebesar 38 Ha.

b. Kawasan Budidaya

Kawasan peruntukan budi daya kota adalah kawasan di wilayah kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Adapun pembagian kawasan budidaya adalah sebagai berikut:

Diagram 2.5 Kawasan Budidaya



Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2021

Berdasarkan Permen ATR Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kota, kawasan budidaya dibagi menjadi kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan pertambangan dan energi, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan hutan rakyat, dan kawasan pertahanan dan keamanan. Kawasan peruntukan budidaya Kota Bandar Lampung ditetapkan seluas 14.188,81 hektar.



### c. Proporsi Penggunaan Lahan

Berdasarkan Data dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, luasan pertanian tanaman pangan berdasarkan hasil *updating* terhadap luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (LP2B) yaitu seluas 204,82 Ha dengan dukungan saluran irigasi seluas 2,13 Ha. Dan berdasarkan data pola ruang tersebut diatas, menunjukkan bahwa luas areal terluas adalah luas lahan non pertanian. Hal ini berarti Kota Bandar Lampung telah menjadi Kota Metropolitan yang ditunjukkan dengan luas lahan pertanian yang semakin berkurang dan luas lahan non pertanian yang cenderung meningkat. Terjadi peningkatan areal untuk pemukiman dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terjadi sebagai dampak alami ketika jumlah penduduk meningkat. Hal yang perlu dibenahi adalah bagaimana mengatur perijinan tata ruang.

Untuk luas areal perusahaan menunjukkan terjadi peningkatan areal lahan untuk perusahaan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terjadi sebagai dampak positif dari munculnya badan usaha baru yang berinvestasi di Kota Bandar Lampung. Untuk areal industri terjadi peningkatan jumlah areal industri dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut sebagai dampak meningkatnya investasi sektor industri di Kota Bandar Lampung. Untuk luas areal jasa terjadi peningkatan luas areal yang digunakan untuk sektor jasa. Hal tersebut sebagai akibat tumbuhnya sektor industri jasa di Kota Bandar Lampung.

Penurunan areal yang digunakan untuk areal lainnya dikarenakan areal digunakan untuk penggunaan sektor lainnya yang lebih produktif seperti untuk industri pabrik dan perusahaan sektor jasa. Area tanah kosong juga mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena tanah kosong yang sebelumnya kurang produktif telah digunakan untuk sektor yang lebih produktif seperti sektor industri, jasa, dan pemukiman.



### 2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

#### 1) Kota yang Prospektif

Kota Bandar Lampung memiliki prospek yang kuat untuk berkembang menjadi kota besar dalam skala regional, nasional, bahkan internasional.

Potensi Kota Bandar Lampung yang mendukung antara lain adalah:

- a. Lokasi geografis yang sangat strategis.
- b. Kedudukan yang dituju dalam kebijaksanaan tingkat nasional dan regional.
- c. Pemandangan alam yang indah yang dapat dimanfaatkan untuk menarik wisatawan.
- d. Keanekaragaman suku bangsa (*multi ethnic*).
- e. Dukungan wilayah sekitarnya (*hinterland*) yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan Kota Bandar Lampung.

Dalam RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030 dijelaskan bahwa dengan potensi serta kecenderungan perkembangan yang ada, ditunjang dengan lokasi yang strategis, potensi alam, penduduk, dan potensi wilayah belakangnya, Kota Bandar Lampung terlihat menuju perkembangan yang prospektif. Dengan kedudukan potensi tersebut, Kota Bandar Lampung dapat berperan sebagai pusat pertumbuhan bagi Sumatera bagian Selatan, serta pendukung Provinsi Lampung sebagai pusat produksi pertanian nasional (perdagangan dan jasa). Sektor yang tengah difokuskan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah pariwisata, baik dalam rangka menunjang pembangunan pariwisata di Sumatera bagian Selatan maupun mendayagunakan potensi keindahan alam Kota Bandar Lampung. Pengembangan obyek wisata pantai dan laut serta perbukitan dalam Kota Bandar Lampung menciptakan daya tarik bagi wisatawan mancanegara maupun nusantara. Kelengkapan yang dapat dipersiapkan oleh Kota Bandar Lampung adalah penyediaan prasarana dan jasa pariwisata seperti perhotelan, restoran, agen perjalanan, perbankan, dan infrastruktur pendukung lain.





Berbagai peluang perkembangan yang prospektif juga membawa prasyarat agar kehidupan kota yang diharapkan dapat tercapai. Pertama adalah restrukturisasi *trend* perkembangan fisik dan kedua adalah penciptaan iklim yang kondusif bagi perkembangan Kota Bandar Lampung. Selain prasarana dan sarana pendukung kegiatan ekonomi, penyiapan kebijaksanaan, peraturan, dan program pembangunan menuju pemantapan Kota Bandar Lampung dalam memanfaatkan peluang ekonomi yang ada, dan perlu disiapkan pula sumber daya manusia yang menunjang.

## 2) Lokasi yang Strategis

Kota Bandar Lampung menempati posisi geografis yang sangat strategis, baik dalam konstelasi internasional, nasional, maupun regional. Posisinya terhadap Singapura dan Jakarta merupakan potensi bagi pengambilan peran dalam kerjasama ekonomi regional IMS-AFTA. Aspek yang menjadikan Kota Bandar Lampung strategis adalah:

- a. Aspek Ekonomi: Kawasan Perdagangan Jasa Pusat Kota, Kawasan pusat perdagangan dan jasa, Aktivitas campuran komersial dengan rumah tinggal (ruko), pemukiman, kawasan perdagangan (super blok perdagangan dan jasa) di Jalan R.A. Kartini–Jalan Radin Intan–Jalan Ahmad Yani berikut beberapa kawasan yang berada di sekitarnya.
- b. Aspek SDA dan teknologi: Kawasan Pendidikan Tinggi dan munculnya aktivitas pendidikan tinggi di sepanjang Jalan ZA Pagar Alam (Kedaton, Gedong Meneng, Rajabasa) dan sekitarnya (fungsi sosial budaya) dan wilayah Sukarame.
- c. Aspek Lingkungan Hidup: Kawasan Taman Hutan Rakyat (TAHURA) Wan Abdurahman (Reg 19), Kawasan Hutan Serampok, sebagian Kawasan Batu Putu, dan sebagian Sukadanaham. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan lindung. Kawasan ini merupakan daerah tangkapan air serta hulu beberapa sungai besar di Kota Bandar Lampung. Menjaga kelestarian air permukaan sebagai alternatif utama dalam pemenuhan sumber air baku Kota Bandar Lampung.



d. Aspek Sosial Budaya: Kawasan bersejarah situs budaya di wilayah Kedamaian merupakan kawasan cagar budaya yang harus dilindungi dan dilestarikan.

### 3) Potensi Alam

Selain memiliki wilayah yang cukup luas, Kota Bandar Lampung juga memiliki potensi alam yang indah, terutama laut dan perbukitannya. Kekhasan morfologinya mulai dari pegunungan, perbukitan, daratan, hingga pantai yang terletak di bagian dalam Teluk Lampung, menjadikan Kota Bandar Lampung sangat potensial untuk dikunjungi wisatawan. Citra endogenik “Laut dan Gunung” tersebut merupakan potensi keindahan dan daya tarik alam di Kota Bandar Lampung.

Pantai yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung memiliki pemandangan yang mempesona. Pantai ini memiliki keistimewaan tersendiri yaitu terletak di suatu teluk yang nyaman, dengan keindahan panorama laut dan beberapa gugusan pulau kecil di tengah teluk, yang potensial dikembangkan untuk wisata rekreasi bahari. Hal ini juga ditunjang oleh letaknya yang tidak jauh dari pusat kota. Perbukitan yang terletak di Pusat Kota dan bagian kota lainnya, juga merupakan potensi alam yang secara khas dimiliki oleh Kota Bandar Lampung. Selain berfungsi lindung bagi pelestarian tata air dan konservasi tanah, perbukitan dengan tanaman hijaunya akan berfungsi pula sebagai paru-paru Kota. Pemanfaatan yang terbatas dapat diselaraskan dengan pengembangan Wisata Hutan Raya.

### 4) Keanekaragaman Suku Bangsa

Salah satu ciri khas Kota Bandar Lampung adalah keanekaragaman suku bangsanya. Sejak dimulainya program transmigrasi dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera khususnya ke Provinsi Lampung, penduduk Provinsi Lampung terdiri dari berbagai suku bangsa. Dengan keanekaragaman suku bangsa, Provinsi Lampung dikenal sebagai negeri “Ruwa Jurai” (dua unsur) karena dihuni oleh masyarakat asli dan pendatang. Keanekaragaman suku bangsa ini harus dipandang sebagai potensi atau kekuatan untuk



membangun Kota Bandar Lampung, dalam arti Kota Bandar Lampung menjadi semakin mudah beradaptasi dan menerima pendatang baru, sehingga juga semakin terbuka menerima pengaruh pembangunan wilayahnya.

#### 5) Dukungan Wilayah Belakang (*Hinterland*)

Kota Bandar Lampung didukung oleh *Hinterland* yang merupakan wilayah penghasil perikanan, perkebunan, dan lokasi berbagai industri. Dengan wilayah seluas 35.376,50 Km<sup>2</sup>, Provinsi Lampung dijuluki wilayah unggulan, sentra pertumbuhan industri baru dan pintu gerbang lintas Pulau Jawa-Pulau Sumatera. Provinsi Lampung tumbuh menjadi wilayah penyangga bagi kegiatan pertanian dan industri pengolah hasil pertanian.

#### 6) Pusat Pertumbuhan

Sebagai pusat kegiatan Provinsi Lampung, sekitar 12,45 persen penduduk Provinsi Lampung berada di Kota Bandar Lampung (berdasarkan data BPS tahun 2019). Berbagai pelayanan bagi wilayah yang lebih luas disediakan oleh Kota Bandar Lampung, baik di bidang pemerintahan, niaga, jasa keuangan, pendidikan, dan sebagainya.

Peran sebagai pusat pertumbuhan ditunjang oleh rencana peningkatan aksesibilitas dari dan ke Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung siap berfungsi sebagai *transshipment point* dari berbagai moda angkutan.

#### 7) Pusat Koleksi dan Distribusi

Perkembangan sektor ekonomi, khususnya pertanian di wilayah Provinsi Lampung maupun Sumatera bagian Selatan, mendorong fungsi Kota Bandar Lampung sebagai pusat koleksi dan distribusi berbagai komoditi yang dihasilkan oleh wilayah belakangnya. Fungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi berbagai komoditi yang dihasilkan oleh Sumatera Bagian Selatan dilangsungkan oleh rencana pengembangan jaringan jalan tol dan kereta api, jaringan jalan Trans Sumatera, serta rencana pengembangan Pelabuhan Panjang. Kelengkapan fasilitas yang tersedia di Kota Bandar



Lampung juga mendukungnya sebagai pusat koleksi dan distribusi barang dan jasa pada berbagai skala pelayanan.

#### 8) Aksesibilitas yang Semakin Baik

Kota Bandar Lampung sebagai pusat pertumbuhan akan memperoleh pengaruh yang signifikan dari pergerakan tersebut melalui kemungkinan peningkatan investasi di sektor regional, nasional, dan internasional. Kota Bandar Lampung menjadi salah satu alternatif pilihan setelah Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Rencana dan ketersediaan sarana-prasarana pendukung aksesibilitas seperti rencana jalan tol, jalan (nasional, provinsi dan kabupaten/kota), terminal, pelabuhan menjadi akses pendukung pembangunan perekonomian khususnya di Kota Bandar Lampung.

#### 9) Pengembangan *Transshipment Point* Akibat Perkembangan Akses

Peran Kota Bandar Lampung sebagai pusat koleksi dan distribusi barang dan jasa didukung oleh Pelabuhan Panjang yang telah diminati oleh berbagai pihak untuk dikembangkan sebagai pelabuhan antarnegara, terutama dalam konteks region Sumatera bagian Selatan. Peranan yang dituju oleh pelabuhan ini adalah sebagai pelabuhan ekspor bagi komoditi dan produk yang dihasilkan oleh Sumatera Bagian Selatan. Pilihan ini mempertimbangkan posisi strategis Pelabuhan Panjang sebagai gerbang lintas dua kawasan ekonomi penting yaitu Sijori (Singapura-Johor-Riau) dan pusat pasar nasional Jakarta dan Jawa Barat bagian Barat, terutama dalam mengisi kerjasama ekonomi regional IMS-GT.

### **2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana**

Berdasarkan Ranperda RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041 dan studi mitigasi bencana Kota Bandar Lampung, wilayah Kota Bandar Lampung saat ini memiliki beberapa kawasan yang diidentifikasi sebagai kawasan rawan bencana, seperti gempa bumi, gerakan tanah, tsunami, dan banjir.



Pengamatan lapangan dan penelitian menjelaskan bahwa Kota Bandar Lampung memiliki potensi bahaya alam guncangan gempa bumi, pergeseran tanah (*ground-faulting*) bahaya pelulukan/likuifaksi akibat dari bahaya ikutan “*colateral hazard*” gempa bumi, tumbuh-tumbuhan yang semakin gundul, kondisi batuan yang sebagian sudah lapuk, pola drainase, kandungan cairan dalam batuan dan tanah lapukan dan tanah di beberapa tempat menunjukkan kondisi yang rentan terhadap gempa bumi. Kawasan yang terpetakan sebagai kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat menengah sampai tinggi adalah Kecamatan Panjang, Sukabumi, dan Teluk Betung Timur.

Berikut peta Kawasan rawan bencana gempa bumi di Kota Bandar Lampung:

Gambar 2.6 Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi



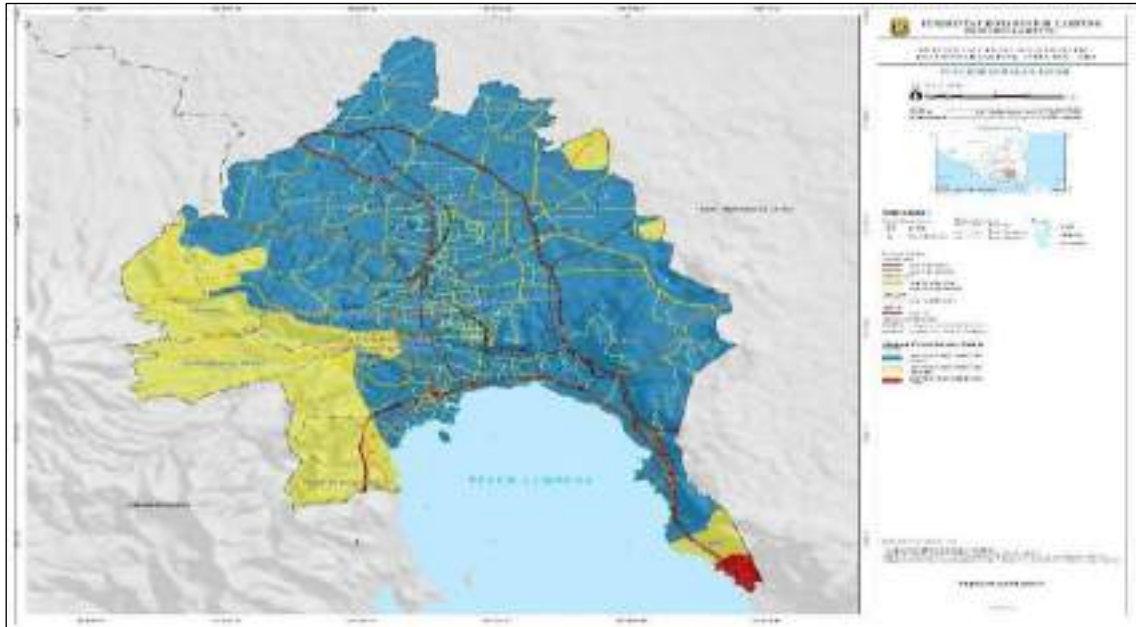
Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2021

Sementara itu secara eksisting kawasan rawan bencana Gerakan tanah tingkat menengah sampai tinggi di Kota Bandar Lampung terdapat di 10 (sepuluh) Kecamatan yaitu di Kecamatan Panjang, Kemiling, Sukabumi, Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Pusat, Tanjung senang, Telukbetung



Barat, Telukbetung Selatan, Telukbetung Timur, Telukbetung Utara. Berikut peta Kawasan rawan bencana Gerakan tanah di Kota Bandar Lampung :

Gambar 2.7 Peta Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah



Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2021

Berdasarkan analisis tektonik kawasan rawan bencana tsunami di Kota Bandar Lampung terletak di bagian Utara Komplek Hunjaman Sunda dan di Barat-Utara Gunung Krakatau yang berpotensi menimbulkan gelombang tsunami. Kondisi eksisting menunjukkan beberapa kawasan di Telukbetung Timur dan Bumi Waras berbatasan langsung dengan Teluk Lampung dan beberapa Kawasan memiliki topografi landai, yaitu wilayah Kecamatan Telukbetung Selatan, Telukbetung Utara, dan Panjang dimana daerah ini teridentifikasi sebagai kawasan rawan bencana tsunami tingkat menengah sampai tinggi. Berikut peta Kawasan rawan bencana tsunami di Kota Bandar Lampung :



Gambar 2.8 Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami



Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2021

Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi terjadi banjir. Kawasan rawan banjir terjadi disebabkan oleh tersumbatnya sungai maupun karena penggundulan hutan disepanjang sungai, bencana banjir terjadi hampir disetiap musim penghujan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam berupa curah hujan yang diatas normal dan adanya pasang naik air laut. Disamping itu faktor lainnya adalah ulah manusia juga seperti penggunaan lahan yang tidak tepat (permukiman bantaran sungai, daerah resapan, penggundulan hutan dan sebagainya), pembuangan sampah ke dalam sungai, dan permukiman di daerah dataran banjir dan sebagainya. Berdasarkan data BPBD Kota Bandar Lampung, pada Tahun 2018 bencana banjir yang terjadi di Kota Bandar Lampung sebanyak 19 kali, menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 30 kali. Pada Tahun 2019 terjadi banjir di 24 titik di 19 kelurahan pada 12 kecamatan, sedangkan pada Tahun 2020 banjir terjadi di 35 titik di 25 kelurahan pada 14 kecamatan. Berikut adalah data yang menunjukkan titik banjir Kota Bandar Lampung Tahun 2020.



Tabel 2.5 Titik Banjir Kota Bandar Lampung Tahun 2020

Kecamatan	Kelurahan	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )	Keterangan
Tanjung Karang Pusat	Pasir Gintung	Jl. Teuku Umar RT 01 RW 02	2.800	Ketinggian Air 60 cm
		Gang Garuda RT 05 LK 1	2.000	Ketinggian Air 60 cm
		Jl. Pisang gang Garuda 3	1.800	Ketinggian Air 60 cm
	Penengahan	Gang Ultra (depan Abdoel Moeloek)	2.200	Ketinggian Air 30 cm
	Kelapa tiga	Jl. Agus Salim gang Raya Muda (depan SMP Swadaya)	2.500	Ketinggian Air 30 cm
Kedaton	Penengahan Raya	Jl. Sam Ratulangi Gang Satria 2 (Depan PMI) RT 06 LK II	1.900	Ketinggian Air 35 cm
		Gang Suci Kedaton	2.150	Ketinggian Air 35 cm
	Kedaton	Jl. Tupai gang Manggis RT 02	2.000	Ketinggian Air 60 cm
	Sidodadi	Jl. Teratai gang Mawar 1 RT 32	2.300	Ketinggian Air 1 M
Kedamaian	Tanjung Gading	Jl. Yasirhadi-bromo (Belakang Indomaret)	1.800	Ketinggian Air 70 cm
		Jl. Bakau gang Hebras RT 02 LK II	3.200	Ketinggian Air 70 cm
		Jl. Pulau Kelagian	2.100	Ketinggian Air 70 cm
		Jl. Haji Sarip	2.300	Ketinggian Air 70 cm
	Kali Balau Kencana	Jl. P. Antasari gang Persada RT 003 RW 01 LK I	1.900	Ketinggian Air 1 M
Raja Basa	Raja Basa Jaya	Gang Thoyib	5.500	Ketinggian Air 70 cm
	Rajabasa Nyunyai	Jl. Nunyai	4.200	Ketinggian Air 60 cm
	Gedong Meneng	Jl. Lada 3 No. 10	3.600	Ketinggian Air 45 cm
Sukarame	Sukarame	Jl. Pulau Sebesi Permata Biru	5.600	Ketinggian Air 80 cm
		Jl. Prof. Dr. Hamka (SMPN 24 Bandar Lampung)	5.200	Ketinggian Air 80 cm
	Korpri Jaya	Jl. Ryacudu Perum Korpri Blok A.18 RT.02 LK.I	1.900	Ketinggian Air 70 cm
	Way Dadi Baru	Jl. Durian I Gang Durian 3	1.600	Ketinggian Air 70 cm
Sukabumi	Sukabumi	Perum Kurnia Indah RT 14 LK III	2.600	Ketinggian Air 60 cm
	Way laga	Jl. Soekarno Hatta	2.300	Ketinggian Air 90 cm
Tanjung Seneng	Tanjung Seneng	Jl. Damai Raya RT.02	3.400	Ketinggian Air 30 cm
Labuhan Ratu	Labuhan Ratu	Jl. Bumi	3.600	Ketinggian Air 30 cm
		Jl. Untung Suropati gang Rukun 2	2.450	Ketinggian Air 1 m
	Kampung Baru	Jl. Bumi Menanti	3.800	Ketinggian Air 70 cm
Way Halim	Jagabaya I	Jl. Hanoman Gang Abimayu RT 07	2.650	Ketinggian Air 40 cm
Teluk Betung Selatan	Pesawahan	Jembatan Beton	30.070	67 rumah Tergenang Air setinggi 1 m
		Jembatan Merah	25.175	32 rumah Tergenang Air setinggi 1 m
Teluk Betung Timur	Keteguhan	Jl. RE Martadinata RT 05 LK II	5.200	Ketinggian Air 70 cm
		Jl. H. Sulaiman Kampung Sukamaju gang Jainudin rt 04	4.950	Ketinggian Air 60 cm
Panjang	Way lunik	Jl. Yos Sudarso	4.850	Ketinggian Air 60 cm
Langkapura	Gunung Terang	Perumahan Griya Sejahtera	4.100	Ketinggian Air 1 m
Teluk Betung Utara	Pengajaran	Jl. Wolter Monginsidi (belakang sate bontet)	3.850	Ketinggian Air 1 m

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung, 2021





#### 2.1.1.4 Demografi

##### 1) Jumlah Penduduk

Pada Tahun 2020, penduduk Bandar Lampung berjumlah 1.166.066 jiwa dengan sex ratio 103,9, yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Kepadatan penduduk paling besar terdapat di Kecamatan Tanjung Karang Timur yakni 21.220 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan yang paling kecil kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Sukabumi yaitu 3.215 jiwa/km<sup>2</sup>. Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin Tahun 2020:

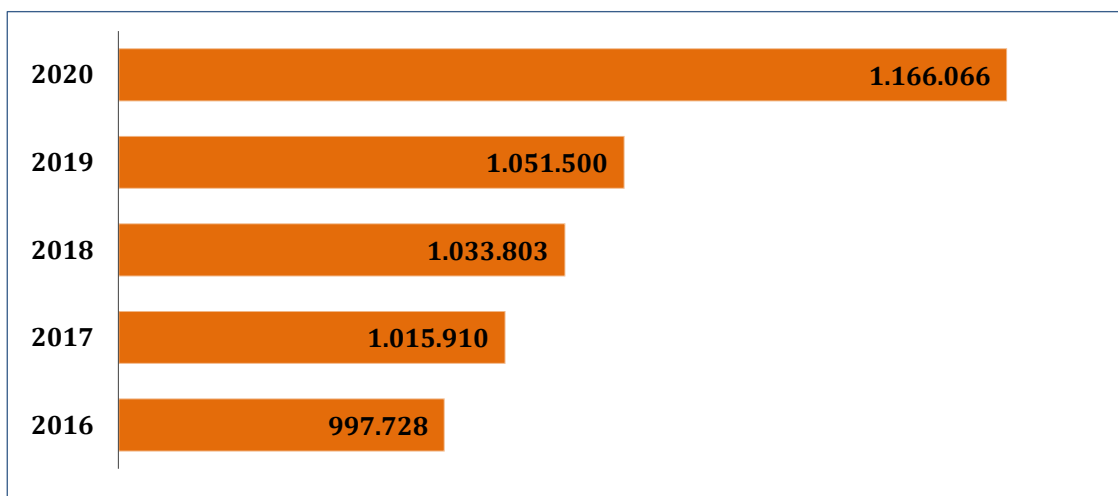
Tabel 2.6 Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
Telukbetung Barat	21.224	19.872	41.096	106,8
Telukbetung Timur	27.852	26.022	53.874	107,0
Telukbetung Selatan	21.866	21.004	42.870	104,1
Bumi Waras	32.627	30.539	63.166	106,8
Panjang	41.257	39.554	80.811	104,3
Tanjung Karang Timur	21.946	21.130	43.076	103,9
Kedamaian	29.435	28.470	57.905	103,4
Telukbetung Utara	27.258	26.294	53.552	103,7
Tanjung Karang Pusat	28.534	27.391	55.925	104,2
Enggal	14.416	14.233	28.649	101,3
Tanjung Karang Barat	33.464	32.090	65.554	104,3
Kemiling	45.065	43.509	88.574	103,6
Langkapura	22.205	21.364	43.569	103,9
Kedaton	29.027	28.309	57.336	102,5
Raja Basa	29.495	28.094	57.589	105,0
Tanjung Senang	31.458	30.710	62.168	102,4
Labuhan Ratu	26.415	25.978	52.393	101,7
Sukarame	34.345	33.380	67.725	102,9
Sukabumi	38.822	37.048	75.870	104,8
Way Halim	37.581	36.783	74.364	102,2
<b>2020</b>	<b>594.292</b>	<b>571.774</b>	<b>1.166.066</b>	<b>103,9</b>
<b>2019</b>	<b>528.804</b>	<b>522.696</b>	<b>1.051.500</b>	<b>101</b>
<b>2018</b>	<b>520.078</b>	<b>513.725</b>	<b>1.033.803</b>	<b>101</b>
<b>2017</b>	<b>511.371</b>	<b>504.539</b>	<b>1.015.910</b>	<b>101</b>
<b>2016</b>	<b>502.418</b>	<b>495.310</b>	<b>997.728</b>	<b>101</b>

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2021



Diagram 2.6 Jumlah Penduduk 2016-2020 (jiwa)



Sumber: Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2021

Berikut adalah data kepadatan penduduk per Kecamatan Tahun 2020:

Tabel 2.7 Kepadatan Penduduk Tahun 2016-2020

Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )	
		2019	2020	2019	2020
Telukbetung Barat	11.02	32.002	41.096	2.904	3.279
Telukbetung Timur	14.83	44.727	53.874	3.016	3.633
Telukbetung Selatan	3.79	42.262	42.870	11.151	11.311
Bumi Waras	3.75	60.939	63.166	16.250	16.844
Panjang	15.75	79.800	80.811	5.067	5.131
Tanjung Karang Timur	2.03	39.855	43.076	19.633	21.220
Kedamaian	8.21	56.482	57.905	6.880	7.053
Telukbetung Utara	4.33	54.337	53.552	12.549	12.368
Tanjung Karang Pusat	4.05	54.906	55.925	13.557	13.809
Enggal	3.49	30.164	28.649	8.643	8.209
Tanjung Karang Barat	14.99	58.754	65.554	3.920	4.373
Kemiling	24.24	70.491	88.574	2.908	3.654
Langkapura	6.12	36.454	43.569	5.957	7.119
Kedaton	4.79	52.685	57.336	10.999	11.970
Rajabasa	13.53	51.578	57.589	3.812	4.256
Tanjung Senang	10.63	49.160	62.168	4.625	5.848
Labuhan Ratu	7.97	48.159	52.393	6.043	6.574
Sukarame	14.75	61.130	67.725	4.144	4.592
Sukabumi	23.6	61.574	75.870	2.609	3.215
Way Halim	5.35	66.041	74.364	12.344	13.900
		<b>1.051.500</b>	<b>1.166.066</b>	<b>5.332</b>	<b>5.913</b>
<b>2018</b>	<b>197,22</b>	<b>1.033.803</b>		<b>5.242</b>	
<b>2017</b>	<b>197,22</b>	<b>1.015.910</b>		<b>5.151</b>	
<b>2016</b>	<b>197,22</b>	<b>997.728</b>		<b>5.059</b>	

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2021



Data tersebut menunjukkan dalam beberapa tahun terakhir terjadi kecenderungan peningkatan angka kepadatan penduduk yang mendiami wilayah administratif Kota Bandar Lampung. Hal tersebut terjadi sebagai akibat bertambahnya jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung serta perpindahan penduduk baik antarwilayah di dalam Kota Bandar Lampung maupun dari luar Kota Bandar Lampung yang masuk ke Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, jumlah penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2020 berjumlah 1.189.297 jiwa. Berikut jumlah penduduk Kota Bandar Lampung berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020 :

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020 berdasarkan Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2016	1.169.286
2017	1.176.612
2018	1.179.627
2019	1.183.251
2020	1.189.297

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, 2021

## 2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

### 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### 1. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian Kota Bandar Lampung menunjukkan tanda pemulihan, bangkit dari masa krisis yang melanda ekonomi dunia. Perlahan namun pasti, ekonomi Bandar Lampung merangkak naik. Hal ini terlihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif.



Nilai PDRB Kota Bandar Lampung menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai 59.078,74 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sebesar 299,18 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang bernilai 59.377,92 miliar rupiah. Turunnya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh penurunan produksi di beberapa kategori dan adanya inflasi di tahun berjalan.

Tabel 2.9 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.931,54	2.044,98	2.102,51	2.197,53	2.228,23
B	Pertambangan dan Penggalian	1.452,60	1.698,31	1.837,43	1.976,42	2.087,76
C	Industri Pengolahan	9.448,05	10.648,79	11.567,14	12.699,17	12.390,09
D	Pengadaan Listrik dan Gas	48,72	55,40	60,15	65,47	68,53
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	132,26	143,40	150,19	158,99	168,09
F	Konstruksi	4.657,72	5.356,49	6.038,85	6.482,85	6.466,41
G	Perdagangan Besar dan Eceran : Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.568,56	7.104,71	7.729,91	8.527,72	7.858,53
H	Transportasi dan Pergudangan	6.181,26	6.873,09	7.452,01	8.027,44	7.880,46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.259,06	1.412,87	1.556,06	1.724,75	1.515,58
J	Informasi dan Komunikasi	2.453,80	2.859,29	3.205,69	3.491,19	3.791,95
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.342,47	2.643,66	2.802,23	2.941,03	3.009,58
L	Real Estate	2.466,61	2.819,24	3.170,49	3.515,48	3.550,98
M,N	Jasa Perusahaan	165,73	181,32	198,93	212,82	209,98
O	Adm.Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.617,69	2.881,85	3.091,13	3.272,27	3.482,25
P	Jasa Pendidikan	1.428,78	1.571,93	1.709,71	1.968,96	2.156,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	836,48	946,54	1.016,22	1.101,78	1.247,02
R,S,T,U	Jasa Lainnya	750,58	840,96	920,52	1.014,04	967,14
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>44.741,90</b>	<b>50.082,84</b>	<b>54.609,16</b>	<b>59.377,92</b>	<b>59.078,74</b>

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik 2021

Berdasarkan harga konstan Tahun 2010, angka PDRB juga mengalami penurunan, dari 39.385,65 miliar rupiah pada Tahun 2019 menjadi 38.656,70 miliar rupiah pada Tahun 2020. Hal ini menunjukkan Tahun 2020 Bandar Lampung mengalami pertumbuhan ekonomi terkontraksi



sebesar 1,85 persen. Penurunan PDRB ini murni disebabkan oleh penurunan produksi pada beberapa kategori dan tidak dipengaruhi inflasi.

Tabel 2.10 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2016-2020 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.493,43	1.488,18	1.489,25	1.524,16	1.518,75
B	Pertambangan dan Penggalian	898,54	966,69	1.026,88	1.083,46	1.130,89
C	Industri Pengolahan	6.675,10	7.076,98	7.509,76	8.024,86	7.682,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	50,30	53,16	56,06	59,71	62,83
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	94,40	96,73	98,40	103,74	109,23
F	Konstruksi	3.489,92	3.809,57	4.187,16	4.419,90	4.420,18
G	Perdagangan Besar dan Eceran : Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.169,32	5.373,79	5.598,84	5.939,61	5.345,72
H	Transportasi dan Pergudangan	4.361,30	4.636,13	4.936,32	5.278,98	5.054,29
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	820,13	861,36	927,45	1.006,81	882,20
J	Informasi dan Komunikasi	2.208,43	2.427,21	2.669,05	2.882,79	3.135,21
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.606,11	1.716,11	1.752,97	1.809,59	1.848,43
L	Real Estate	1.992,94	2.158,63	2.313,10	2.447,96	2.416,13
M,N	Jasa Perusahaan	118,13	124,33	130,04	135,77	131,75
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.710,66	1.807,47	1.904,10	1.995,38	2.099,07
P	Jasa Pendidikan	983,14	1.051,44	1.125,32	1.212,33	1.303,22
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	619,88	666,31	705,57	755,09	839,86
R,S,T,U	Jasa Lainnya	567,29	606,97	654,21	705,50	676,94
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>32.859,03</b>	<b>34.921,08</b>	<b>37.084,49</b>	<b>39.385,65</b>	<b>38.656,70</b>

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2021

Nilai PDRB dari sisi Pengeluaran Kota Bandar Lampung (ADHB) juga menunjukkan angka perbaikan yang cukup signifikan selama 5 tahun terakhir. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Pada tahun 2019 nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bandar Lampung mencapai 59.507,48 miliar rupiah. Kondisi tersebut relatif meningkat bila dibandingkan tahun 2018 sebesar 54.794,61 miliar rupiah.



Tabel 2.11 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran (Miliar Rupiah) Tahun 2015-2019

Jenis Pengeluaran	Tahun				
	2015	2016	2017	2018*	2019**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	24.084,38	26.897,31	29.959,36	32.865,32	36.056,93
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	544,10	626,28	737,34	920,28	1.028,76
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9.227,92	9.890,20	10.298,89	10.712,87	11.208,55
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	12.110,39	13.713,11	15.560,51	17.380,45	19.215,81
Perubahan Inventori	-1.374,31	122,77	48,05	61,92	12,95
Net Ekspor Barang dan Jasa	-5.163,55	-6.507,77	-6.521,32	-7.146,23	-8.015,52
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>39.428,92</b>	<b>44.741,90</b>	<b>50.082,84</b>	<b>54.794,61</b>	<b>59.507,48</b>

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2021

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar konstan 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan atas dasar harga konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau hanya secara kuantitas (tanpa ada pengaruh perubahan harga). Gambaran tentang perkembangan ekonomi berdasarkan PDRB atas dasar harga Konstan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.12 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2015-2019 (Miliar Rupiah)

Jenis Pengeluaran	Tahun				
	2015	2016	2017	2018*	2019**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	18.864,23	20.048,10	21.352,14	22.811,39	24.086,57
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	394,91	421,54	468,37	548,57	604,00
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6.531,28	6.754,13	6.852,17	6.971,44	7.148,29
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	9.677,80	10.456,91	11.284,26	12.320,11	12.953,95
Perubahan Inventori	-1.114,18	-759,48	-91,84	-93,20	-74,01
Net Ekspor Barang dan Jasa	-3.480,49	-4.062,17	-4.944,03	-5.468,82	-5.313,52
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>30.873,56</b>	<b>32.859,03</b>	<b>34.921,08</b>	<b>37.089,49</b>	<b>39.405,27</b>

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2021

Angka pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan data laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut lapangan usaha. Untuk menghitung laju pertumbuhan riil dalam satu kurun waktu,



lazimnya digunakan tahun dasar yang sama dan menggunakan penghitungan tanpa migas. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun pertumbuhan sektor lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Bandar Lampung tumbuh cukup bervariasi. Berikut adalah data yang menunjukkan laju pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2020:

Tabel 2.13 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2020 (Persen)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,28	-0,35	0,07	2,34	-0,36
Pertambangan dan Penggalian	6,47	7,58	6,23	5,51	4,38
Industri Pengolahan	6,25	6,02	6,12	6,86	-4,27
Pengadaan Listrik dan Gas	5,82	5,69	5,45	6,51	5,23
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,13	2,47	1,73	5,43	5,29
Konstruksi	10,09	9,16	9,91	5,56	0,01
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,60	3,96	4,19	6,09	-10,00
Transportasi dan Pergudangan	7,84	6,30	6,48	6,94	-4,26
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,89	5,03	7,67	8,56	-12,38
Informasi dan Komunikasi	9,95	9,91	9,96	8,01	8,76
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,74	6,85	2,15	3,23	2,15
Real Estat	5,71	8,31	7,16	5,83	-1,30
Jasa Perusahaan	2,85	5,25	4,59	4,41	-2,96
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,46	5,66	5,35	4,79	5,20
Jasa Pendidikan	6,46	6,95	7,03	7,73	7,50
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,93	7,49	5,89	7,02	11,23
Jasa lainnya	7,05	7,00	7,78	7,84	-4,05
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>6,43</b>	<b>6,28</b>	<b>6,20</b>	<b>6,21</b>	<b>-1,85</b>

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2021

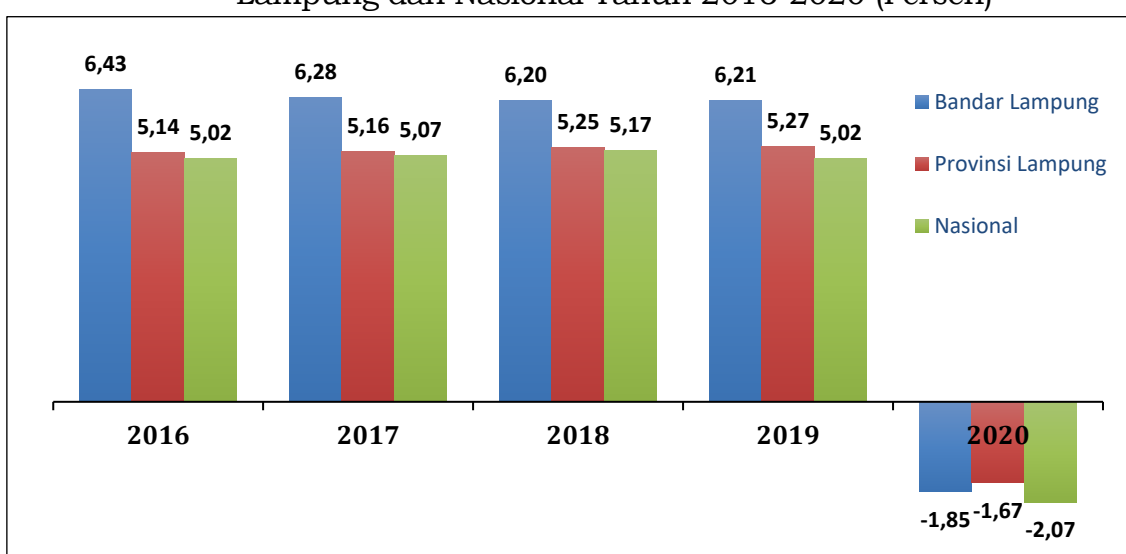
Pada Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi terkontraksi sebesar 1,85 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar 6,21 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial yaitu sebesar 11,23 persen. Dari 17 (tujuh belas) kategori lapangan usaha ekonomi yang ada, terdapat sembilan kategori lapangan usaha dengan nilai pertumbuhan positif (ekspansi) sedangkan delapan kategori lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan negatif (kontraksi); Enam kategori lapangan usaha dengan nilai pertumbuhan diatas lima persen sedangkan



sebelas kategori lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan dibawah lima persen.

Selama kurun waktu Tahun 2015 – 2019 perekonomian Bandar Lampung mampu tumbuh stabil di kisaran 6 persen. Angka pertumbuhan ekonomi Bandar Lampung tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dan Nasional. Sedangkan Tahun 2020, perekonomian Bandar Lampung berkontraksi sebesar 1,85% (yoy) yang dipengaruhi oleh kontraksi pertumbuhan hampir di semua kategori lapangan usaha. Pertumbuhan ekonomi Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2015-2020 ditunjukkan pada diagram berikut ini:

Diagram 2.7 Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2016-2020 (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

## 2. PDRB per Kapita

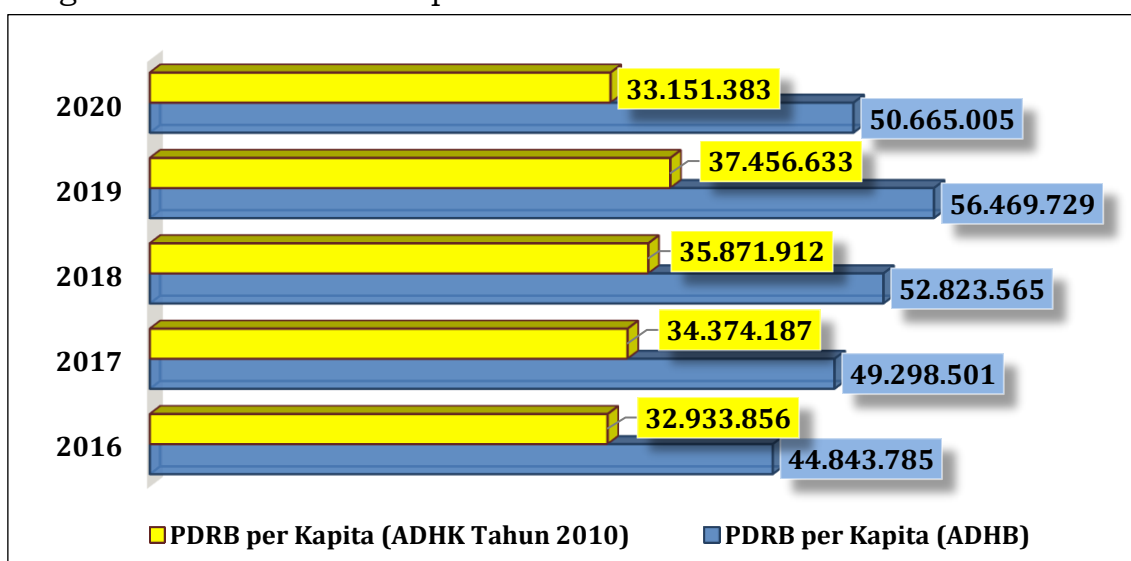
Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan





faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 44,844 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 56,470 juta rupiah. Pada Tahun 2020 terjadi penurunan PDRB perkapita dibandingkan Tahun 2019 yaitu menjadi sebesar 50,665 juta rupiah. Berikut adalah data yang menunjukkan PDRB Per Kapita (ADHB maupun ADHK 2010) Tahun 2016-2020 :

Diagram 2.8 PDRB Per Kapita Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Tabel 2.14 PDRB Per Kapita Tahun 2016–2020 (Rupiah)

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Nilai PDRB (Miliar Rupiah)</b>					
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	44.742	50.083	54.609	59.378	59.079
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	32.859	34.921	37.084	39.386	38.657
<b>PDRB Perkapita (Juta Rupiah)</b>					
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	44,844	49,299	52,824	56,470	50,665
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	32,934	34,374	35,872	37,457	33,151

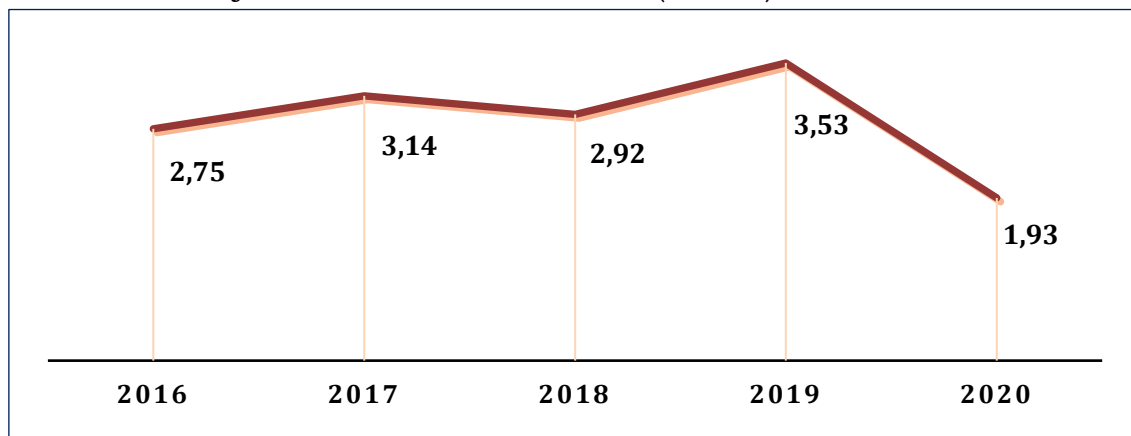
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021



### 3. Laju Inflasi

Berikut adalah data yang menunjukkan laju inflasi Tahun 2016 –2020:

Grafik 2.1 Laju Inflasi Tahun 2016-2020 (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Perkembangan inflasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun cukup fluktuatif dengan nilai inflasi tertinggi terjadi pada Tahun 2019 yaitu sebesar 3,53 persen dan inflasi terendah terjadi pada Tahun 2020 yaitu sebesar 1,93 persen. Pergerakan inflasi yang fluktuatif perlu dikendalikan untuk meningkatkan dan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil melalui upaya-upaya yang dapat menjaga stabilitas harga terutama bahan pokok.

### 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berikut adalah data Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020:

Tabel 2.15 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Persen)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,32	4,08	3,85	3,70	3,77
Pertambangan dan Penggalian	3,25	3,39	3,36	3,33	3,53
Industri Pengolahan	21,12	21,26	21,18	21,39	20,97
Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,30	0,29	0,28	0,27	0,28
Konstruksi	10,41	10,70	11,06	10,92	10,95
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,68	14,19	14,15	14,36	13,30
Transportasi dan Pergudangan	13,82	13,72	13,65	13,52	13,34
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,81	2,82	2,85	2,90	2,57



Lapangan Usaha	Tahun				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
Informasi dan Komunikasi	5,48	5,71	5,87	5,88	6,42
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,24	5,28	5,13	4,95	5,09
Real Estat	5,51	5,63	5,81	5,92	6,01
Jasa Perusahaan	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,85	5,75	5,66	5,51	5,89
Jasa Pendidikan	3,19	3,14	3,13	3,32	3,65
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,87	1,89	1,86	1,86	2,11
Jasa lainnya	1,68	1,68	1,69	1,71	1,64
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2021

Industri pengolahan merupakan kategori dengan kontribusi terbesar dalam PDRB Kota Bandar Lampung. Terbukti selama tahun 2016-2020 kategori ini mendominasi perekonomian Kota Bandar Lampung dengan kontribusi diatas 20 persen. Sedangkan untuk kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor kontribusi serta kategori Transportasi dan Pergudangan menduduki urutan kedua dan ketiga dalam dominasi kontribusi PDRB Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dengan kontribusi diatas 13 persen.

#### a) Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB

Berikut adalah data Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB Tahun 2016-2020:

Tabel 2.16 Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB Tahun 2016-2020 (Persen)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
Industri Pengolahan	21,12	21,26	21,18	21,39	20,97

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2021

Walaupun masih relatif berfluktuatif, kontribusi Industri Pengolahan cenderung meningkat. Pada Tahun 2019 dominasi industri pengolahan dalam PDRB Kota Bandar Lampung telah mencapai 21,39 persen. Walaupun terjadi penurunan pada Tahun 2020 yaitu menjadi sebesar 20,97 persen, namun demikian, kategori industri pengolahan memberikan



kontribusi paling besar dalam PDRB Kota Bandar Lampung pada Tahun 2020.

**b) Kontribusi Kategori Perdagangan terhadap PDRB**

Berikut adalah data Kontribusi Kategori Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2016-2020:

Tabel 2.17 Kontribusi Kategori Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2016-2020 (Persen)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,68	14,19	14,15	14,36	13,30

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2021

Selama kurun waktu Tahun 2016-2019, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang lebih dari 14 persen terhadap PDRB Kota Bandar Lampung. Pada tahun 2019, kontribusi kategori ini mencapai 14,36 persen. Terjadi penurunan pada Tahun 2020 menjadi 13,30 persen. Namun demikian Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tetap sebagai penyumbang PDRB terbesar urutan ketiga setelah Kategori Industri Pengolahan (20,97 persen) dan Kategori Transportasi dan Pergudangan (13,34 persen).

**c) Kontribusi Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Bidang Pariwisata) terhadap PDRB**

Dalam kurun waktu tahun 2016-2020, kontribusi Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB Kota Bandar Lampung terus mengalami kenaikan. Pada Tahun 2019, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Kota Bandar Lampung sebesar 2,90 persen. Terjadi penurunan kontribusi Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada Tahun 2020 menjadi sebesar 2,57 sebagai dampak dari pandemi Covid-19.



Kedepan Pariwisata Bandar Lampung perlu menjadi perhatian mengingat banyak potensi pariwisata yang bisa digali dan dikembangkan, sehingga kedepan kategori pariwisata menjadi unggulan daerah yang akan mendorong sektor lainnya untuk berkembang. Berikut adalah data Kontribusi Kategori penyediaan akomodasi dan makan minum (bidang pariwisata) terhadap PDRB Tahun 2016-2020:

Tabel 2.18 Kontribusi Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Bidang Pariwisata) terhadap PDRB Tahun 2016-2020 (Persen)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Bidang Pariwisata)	2,81	2,82	2,85	2,90	2,57

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2021

#### d) Kontribusi Kategori Sektor Jasa terhadap PDRB

Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB merupakan penjumlahan dari kontribusi Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi, Kategori Jasa Perusahaan, Kategori Jasa Pendidikan, Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta Kategori Jasa Lainnya terhadap PDRB Kota Bandar Lampung. Pada kurun waktu Tahun 2016-2020, Kontribusi Sektor Jasa berada pada diatas 12 persen. Pada Tahun 2020, terjadi peningkatan kontribusi Sektor Jasa menjadi sebesar 12,85 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar 12,20 persen. Berikut adalah data Kontribusi Kategori Sektor Jasa terhadap PDRB Tahun 2016-2020:

Tabel 2.19 Kontribusi Kategori Sektor Jasa terhadap PDRB Tahun 2016-2020 (Persen)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,24	5,28	5,13	4,95	5,09
Jasa Perusahaan	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36
Jasa Pendidikan	3,19	3,14	3,13	3,32	3,65
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,87	1,89	1,86	1,86	2,11
Jasa lainnya	1,68	1,68	1,69	1,71	1,64
<b>Produk Domestik Regional Bruto Kategori Jasa</b>	<b>12,35</b>	<b>12,35</b>	<b>12,17</b>	<b>12,20</b>	<b>12,85</b>

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2021



## 5. Rasio Gini

Rasio gini merupakan merupakan salah satu ukuran untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai rasio gini berkisar antara 0 hingga 1. Rasio gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Berikut adalah data yang menunjukkan Rasio Gini Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020 :

Tabel 2.20 Rasio Gini Tahun 2016-2020

Tahun	Rasio Gini
2016	0,369
2017	0,342
2018	0,342
2019	0,316
2020	0,359

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (Tahun 2017-2020), terjadi penurunan rasio gini dibandingkan dengan rasio gini Tahun 2016. Penurunan Angka rasio gini ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kota Bandar Lampung berada pada tingkat ketimpangan yang semakin rendah.

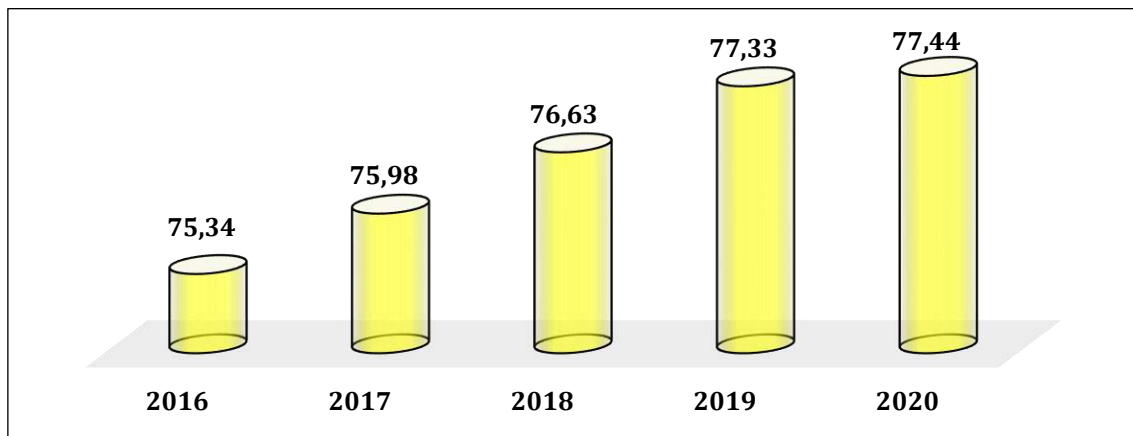
### 2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

#### 1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan sebuah negara menjadi negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang, serta untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Berikut adalah data yang menunjukkan IPM Tahun 2016–2020:



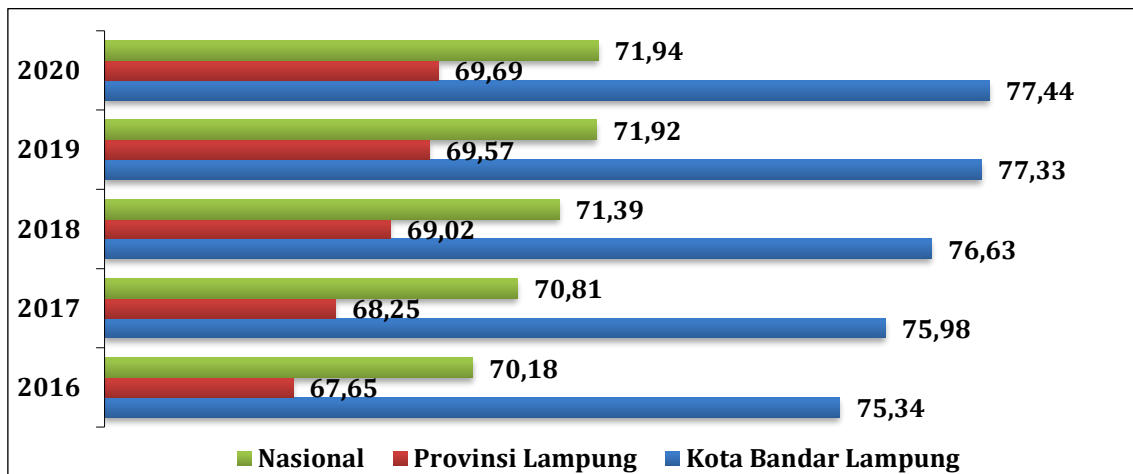
Diagram 2.9 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2016-2020



Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2021

Selama 5 (lima) tahun terakhir, IPM Kota Bandar Lampung selalu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. IPM Kota Bandar Lampung lebih tinggi jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Lampung dan Nasional, sebagaimana yang ditunjukkan pada diagram berikut ini :

Diagram 2.10 Indeks Pembangunan Manusia Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2016-2020



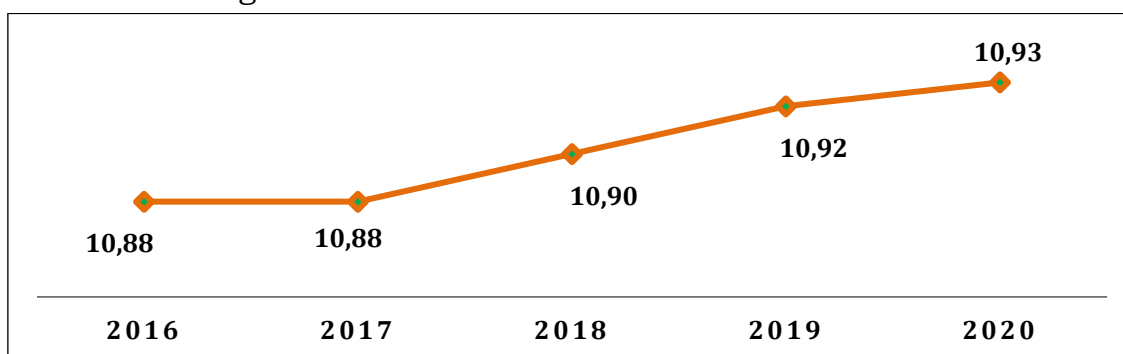
Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2021

## 2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Berikut adalah data yang menunjukkan angka rata-rata lama sekolah Tahun 2016-2020:



Grafik 2.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2016-2020



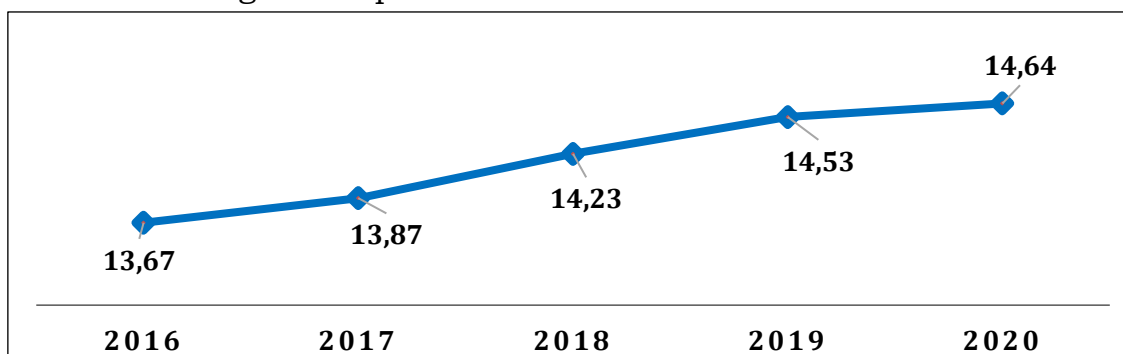
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Berdasarkan data tersebut, terjadi perkembangan yang positif dimana terjadi peningkatan angka rata-rata lama sekolah dibanding tahun sebelumnya. Kesadaran akan pentingnya pendidikan, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta program dan kebijakan pemerintah yang mempermudah akses pendidikan menjadi pendorong utama semakin baiknya nilai angka rata-rata lama sekolah.

### 3. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan diitung pada usia 7 (tujuh) tahun keatas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Berikut adalah data yang menunjukkan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2016-2020:

Grafik 2.3 Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021





Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah setiap tahunnya.

#### 4. Peningkatan Pengunjung Perpustakaan

Peningkatan jumlah koleksi buku perpustakaan mutlak diperlukan dalam rangka meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan. Pemerintah Kota Bandar Lampung berupaya memajukan perpustakaan daerah dengan cara meningkatkan kualitas perpustakaan baik dari segi koleksi buku maupun sarana penunjang lainnya. Berikut adalah data yang menunjukkan Peningkatan Pengunjung Perpustakaan Daerah Tahun 2016-2020:

Tabel 2.21 Peningkatan Pengunjung Perpustakaan Tahun 2016-2020

Tahun	Peningkatan Pengunjung (Persen)
2016	7,69
2017	-20,66
2018	10,39
2019	-35
2020	-53

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandar Lampung, 2021

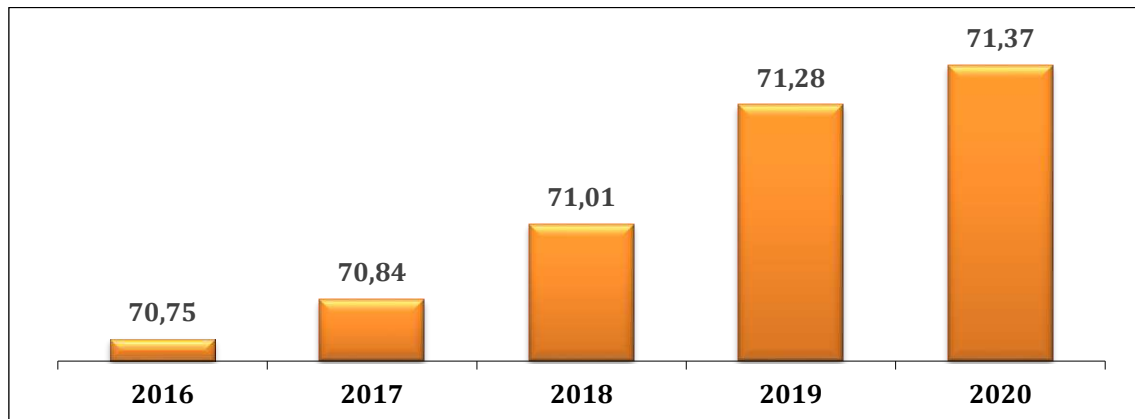
Penurunan pengunjung perpustakaan sebesar 20,66 persen di Tahun 2017 disebabkan penerapan *full day school* yang berdampak pada terbatas nya waktu siswa untuk mengunjungi perpustakaan. Sejumlah perbaikan pelayanan dan peningkatan sarana prasarana perpustakaan yang telah dilakukan pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada para pengunjung yang datang, sehingga pada Tahun 2018 pengunjung perpustakaan kembali meningkat sebesar 10,39 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2019 terjadi penurunan kembali jumlah pengunjung perpustakaan yang disebabkan karena pelaksanaan pembangunan rehab kantor sehingga menyebabkan operasional perpustakaan terganggu. Sedangkan pada Tahun 2020 terjadi penurunan jumlah pengunjung perpustakaan secara drastis dikarenakan Pandemi *Covid-19* yang menyebabkan pembatasan sosial dimasyarakat dan berdampak pula kepada kunjungan masyarakat ke perpustakaan.



## 5. Angka Harapan Hidup

Berikut adalah data yang menunjukkan Angka Harapan Hidup Tahun 2016-2020:

Diagram 2.11 Angka Harapan Hidup Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Data tersebut menunjukkan terjadi peningkatan persentase angka usia harapan hidup dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut berarti terjadi peningkatan dari faktor pendukung angka usia harapan hidup seperti kesadaran hidup sehat, ketersediaan tenaga dan sarana prasarana pendukung kesehatan seperti rumah sakit dan apotek.

## 6. Prevalensi Kekurangan Gizi (*Underweight*) pada Anak Balita

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. *Underweight*/Berat Badan Kurang/Gizi Kurang adalah gabungan dari gizi buruk. Anak Balita rentan untuk menjadi gizi buruk karena balita merupakan anak yang dalam masa tumbuh Kembang, sehingga masa balita merupakan masa kehidupan yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian yang serius. Oleh karena itu, masalah kekurangan gizi pada anak balita masih memerlukan perhatian untuk penanganannya.

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) Kementerian Kesehatan Bulan Maret Tahun 2019, data Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita pada level Nasional, Provinsi dan di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2016-2018 ditunjukkan pada Tabel berikut ini.



Sedangkan untuk Tahun 2019–2020 data prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita diperoleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung berdasarkan data penimbangan langsung di Posyandu :

Tabel 2.22 Prevalensi Kekurangan Gizi (*Underweight*) pada Anak Balita Tahun 2016-2020

<b>Prevalensi Kekurangan Gizi pada Anak Balita</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Bandar Lampung	17,40	21,80	16,09	3,08	5,77
Provinsi Lampung	14	18,50	27,38		
Nasional	17,8	17,80	17,70		

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2021

## **7. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)**

Masa baduta (bawah dua tahun) merupakan “*Window of Opportunity*”. Pada masa ini, seorang anak memerlukan asupan zat gizi yang seimbang baik dari segi jumlah maupun proporsinya untuk mencapai berat dan tinggi badan yang optimal.

Masalah baduta pendek dan sangat pendek (*stunting*) menggambarkan adanya masalah gizi kronis, dipengaruhi dari kondisi ibu/calon ibu, masa janin, dan masa bayi/baduta, termasuk penyakit yang diderita selama masa baduta. Seperti masalah gizi lainnya, tidak hanya terkait masalah kesehatan, namun juga dipengaruhi berbagai kondisi lain yang secara tidak langsung mempengaruhi kesehatan.

Tabel dibawah ini menunjukkan prevalensi *stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun) di Kota Bandar Lampung. Data Tahun 2016-2018 diperoleh berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) Kementerian Kesehatan Bulan Maret Tahun 2019, sedangkan untuk Tahun 2019-2020 data diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung berdasarkan data penimbangan langsung di Posyandu.



Tabel 2.23 Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun) di Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020

<b>Prevalensi Stunting pada Anak Baduta</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Bandar Lampung	21,20	23,80	26,38	6,1	6,60

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2021

Target menurunkan *prevalensi* stunting di Kota Bandar Lampung juga selaras dengan kebijakan Provinsi Lampung dan Nasional yang sangat fokus dalam menurunkan angka *stunting* yang ada, hal ini sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung dan RPJMN. Berikut data Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak Balita (Bawah Lima Tahun) pada level Provinsi dan Nasional. Data Tahun 2016-2018 diperoleh berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) Kementerian Kesehatan RI Bulan Maret Tahun 2019, sedangkan data Tahun 2019 berdasarkan data hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI).

Tabel 2.24 Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Balita (Bawah Lima Tahun) Tahun 2016-2020

<b>Prevalensi Stunting pada Anak Balita</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Provinsi Lampung	18,90	23,00	27,33	26,26
Nasional	21,70	20,10	30,88	27,67

Sumber : Kementerian Kesehatan RI, 2020

## 8. Persentase Penduduk Miskin

Berikut adalah data yang menunjukkan persentase penduduk miskin Tahun 2016-2020:

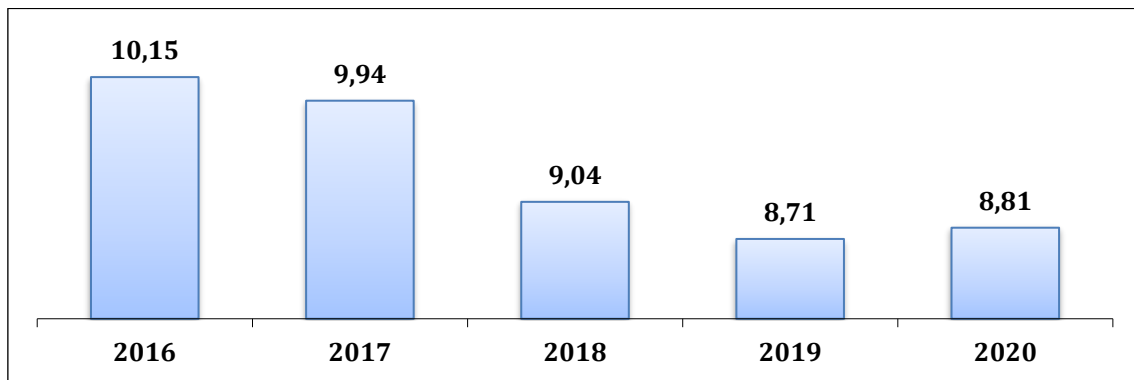
Tabel 2.25 Penduduk Miskin Tahun 2016-2020

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin</b>	<b>Persentase Penduduk Miskin</b>
2016	997.728	100.540	10,15
2017	1.015.910	100.500	9,94
2018	1.033.803	93.040	9,04
2019	1.051.500	91.240	8,71
2020	1.166.066	93.740	8,81

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021



Diagram 2.12 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa jumlah persentase penduduk miskin cenderung terjadi penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini berarti terdapat peningkatan kesejahteraan penduduk dari sisi pendapatan. Ketersediaan lapangan pekerjaan dan stabilitas kepastian usaha akan mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk sekaligus mengurangi jumlah penduduk kategori miskin di Kota Bandar Lampung.

## 9. Luas Kawasan Kumuh

Berikut adalah data yang menunjukkan luas kawasan kumuh berdasarkan data dokumen pengurangan luasan kumuh pokja PKP Kota Bandar Lampung:

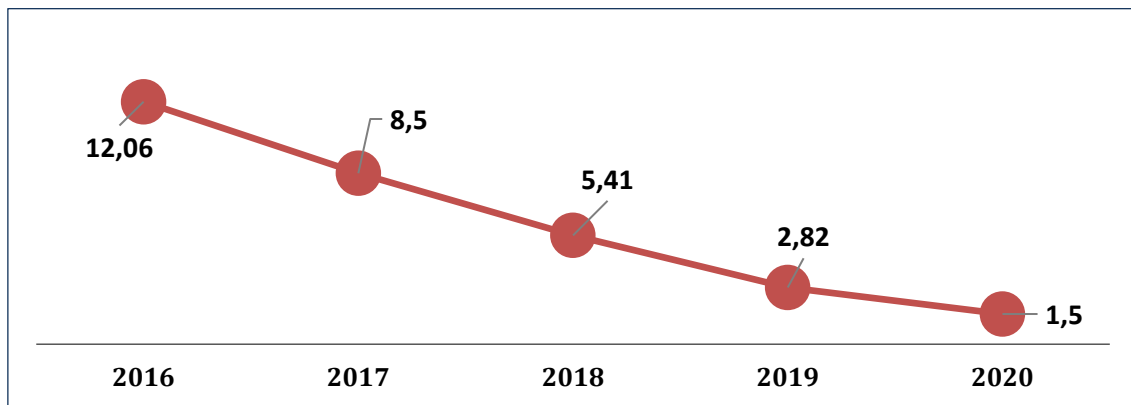
Tabel 2.26 Luas Kawasan Kumuh Tahun 2016-2020

Tahun	Luas (Ha)	Jumlah Kelurahan
2016	4.365,25	67
2017	1.676,97	43
2018	1.065,42	18
2019	589,80	18
2020	297,25	30

Sumber : Pokja PKP Kota Bandar Lampung, 2021



Grafik 2.4 Persentase Luas Kawasan Kumuh Tahun 2016-2020



Sumber : Pokja PKP Kota Bandar Lampung, 2021

## 10. Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kesehatan penghuninya serta kecukupan minimum luas bangunan. Pada dasarnya rumah layak huni memiliki manfaat yang besar untuk masyarakat itu sendiri. Manfaat terbesar dengan memiliki rumah layak huni yakni datangnya kenyamanan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kenyamanan, tentunya kehidupan dalam berkeluarga menjadi tentram, rukun, aman, dan bahagia.

Manfaat lainnya dengan memiliki rumah layak huni adalah, terselenggaranya kesehatan dari setiap masing-masing individu dalam keluarga. Sebab rumah yang layak huni, senantiasa bersih. Selain itu juga sebagai penunjang dalam pendidikan anak-anak. Karena rumah layak huni juga membuat anak memiliki konsentrasi penuh dalam belajar, sehingga prestasi akademik anak lebih meningkat.

Rumah layak huni merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui stakeholder terkait berkomitmen untuk memberikan akses kepada masyarakat agar dapat memperoleh permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan sosial. Sampai dengan Tahun 2020, penanganan untuk Rumah Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Bandar Lampung mencapai 819 unit yang rincian sebagai berikut :

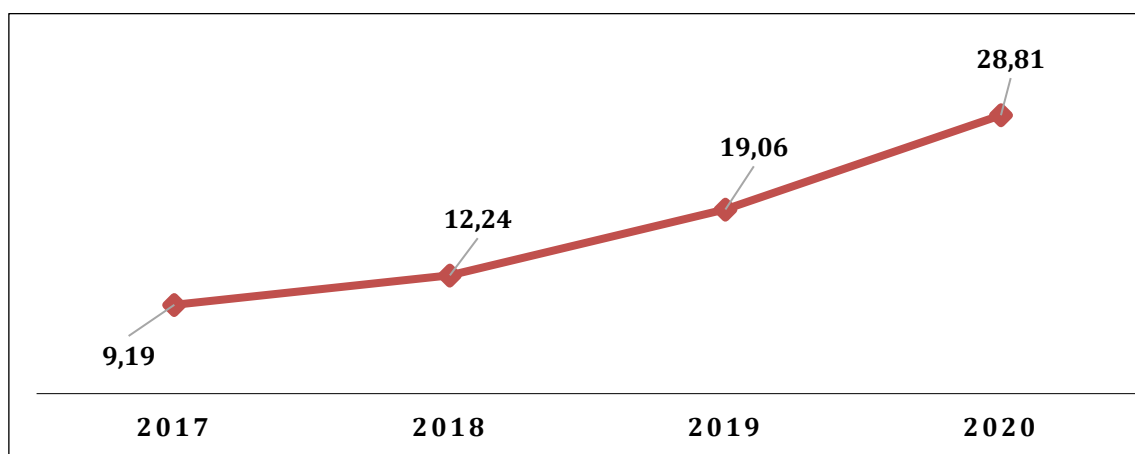


Tabel 2.27 Penanganan untuk Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun 2017-2020

Tahun	Unit Rumah Layak Huni
2017	201
2018	163
2019	178
2020	277
<b>Jumlah</b>	<b>819</b>

Sumber : Pokja PKP Kota Bandar Lampung, 2021

Grafik 2.5 Persentase Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun 2017-2020



Sumber : Pokja PKP Kota Bandar Lampung, 2021

## 11. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Berikut adalah data yang menunjukkan IPG Tahun 2016-2020:



Tabel 2.28 Indeks Pembangunan Gender Tahun 2016-2020

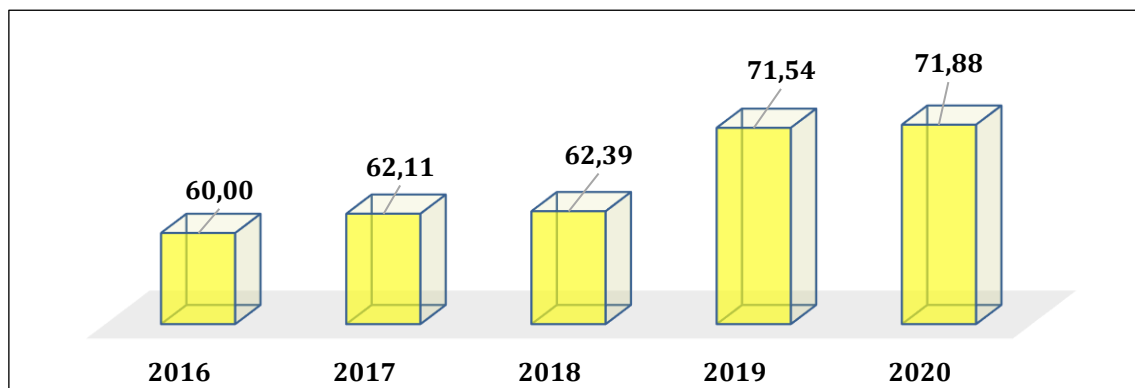
Tahun	IPG
2016	93,94
2017	93,53
2018	93,55
2019	93,96
2020	93,86

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

## 12. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Berikut adalah data yang menunjukkan IDG Tahun 2016-2020:

Diagram 2.13 Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

Data tersebut menunjukkan bahwa Indeks Pemberdayaan Gender Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan setiap tahun.

## 13. Kota Layak Anak

Pemerintah Kota Bandar berupaya mewujudkan pembangunan berbasis hak anak dengan mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Pada Tahun 2018 Kota Bandar Lampung merupakan Kota Layak Anak dengan predikat Pratama dan meningkat pada tahun 2019 dengan predikat Madya. Pada





Tahun 2020 penilaian Lomba Kota Layak Anak tidak dilaksanakan dikarenakan *Pandemi Covid-19*.

#### 14. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

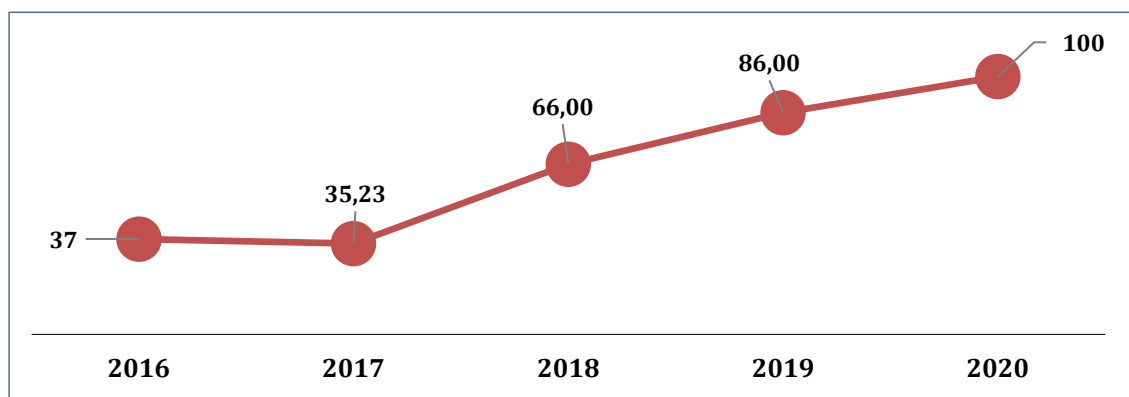
Berikut adalah data yang menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bandar Lampung yang tercatat melalui Unit Perlindungan Anak dan Perempuan (PPA) Polresta Bandar Lampung:

Tabel 2.29 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2016-2020

Tahun	Kekerasan pada Perempuan (kasus)	Kekerasan pada Anak (kasus)
2016	58	76
2017	38	50
2018	86	122
2019	83	33
2020	105	43

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

Grafik 2.6 Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang terselesaikan Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

Trend kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Kota Bandar Lampung 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Kemungkinan masih banyak kasus kekerasan yang tidak terungkap dengan alasan berbagai faktor, salah satunya karena masih kental budaya malu, takut, dan tidak ingin melaporkan kasus tersebut. Masyarakat menganggap bahwa kasus kekerasan yang menimpa keluarga mereka itu dinilai sebagai aib keluarga.

Maraknya kasus kekerasan pada perempuan dan anak menuntut Pemerintah Kota Bandar Lampung bersama stakeholder terkait untuk dapat



menekan/meminimalisir jumlah kasus melalui upaya pencegahan dan sosialisasi, serta memfasilitasi lembaga yang melakukan pendampingan korban tindak kekerasan.

## 15. Laju Pertumbuhan Penduduk

Berikut data yang menunjukkan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016-2020:

Tabel 2.30 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016-2020

Tahun	Pertumbuhan Penduduk (Persen)
2016	1,019
2017	1,018
2018	1,018
2019	1,017
2020	1,109

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Data tersebut menunjukkan bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir, pertumbuhan penduduk Kota Bandar Lampung cenderung stabil yaitu dibawah 2 persen.

### 2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

#### a. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Lestari

Pemerintah daerah memiliki peran yang cukup strategis dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi serta globalisasi yang sedikit banyak menimbulkan efek negatif bagi perkembangan budaya lokal, pemerintah berkewajiban membuat kebijakan-kebijakan yang mengarah pada upaya pelestarian daerah.

Warisan budaya bendawi atau cagar budaya (sumber daya arkeologi) mempunyai sifat yang rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak dapat diperbaharui. Oleh karenanya perlu ada langkah-langkah untuk penyelamatan dan melestarikan cagar budaya daerah. Sampai dengan Tahun 2020, Kota Bandar Lampung belum memiliki benda, situs dan



kawasan cagar budaya yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

## **b. Pemuda Pelopor**

Pemuda Pelopor adalah pemuda yang memiliki semangat dalam mengembangkan potensi diri guna merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah yang dilandasi sikap dan jiwa kesukarelaan, tanggung jawab dan keberdualian untuk menciptakan sesuatu dan atau mengubah gagasan pemikiran, tindakan dan perilaku menjadi suatu karya nyata yang berkualitas dan dilaksanakan secara konsisten dan gigih yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta diakui oleh berbagai pihak dan pemerintah.

Guna mendorong munculnya para pemuda yang memiliki jiwa kepeloporan di Kota Bandar Lampung, maka pemerintah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga menetapkan predikat pemuda pelopor kepada para pemuda yang telah menunjukkan semangat dalam mengembangkan potensi diri, merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, yang kemudian menjadi perwakilan Pemuda Pelopor Kota Bandar Lampung untuk mengikuti seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi. Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah pemuda pelopor Tahun 2016-2020:

Tabel 2.31 Pemuda Pelopor Tahun 2016-2020

<b>Tahun</b>	<b>Pemuda Pelopor (orang)</b>
2016	7
2017	8
2018	8
2019	8
2020	8

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandar Lampung, 2021

Sampai dengan Tahun 2020, pemuda pelopor Kota Bandar Lampung berjumlah 8 (delapan) orang.



### **c. Cabang Olahraga yang Berprestasi**

Olahraga tidak hanya sebagai kebutuhan untuk menjaga kebugaran tubuh, akan tetapi olahraga telah merasuk dalam semua sektor kehidupan. Lebih jauh lagi, prestasi olahraga dapat mengangkat harkat dan martabat manusia baik secara individu, kelompok, masyarakat, bangsa, dan negara. Suatu prestasi olahraga tidak serta merta datang dengan sendirinya, hasil kompetisi atau kejuaraan yang di tandai dengan perolehan medali harus memperhatikan proses dari pembinaan yang dimulai dari usia dini sehingga diharapkan akan memunculkan bibit-bibit atlit. Sebagai langkah berikutnya perlu melakukan kerja sama antara Pemerintah dengan induk organisasi keolahragaan seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Berdasarkan data yang tercatat pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung Tahun 2016, 2017 dan 2018, dari 24 (dua puluh empat) cabang olah raga yang diikuti oleh atlet Kota Bandar Lampung, sebanyak 22 (dua puluh dua) cabang olah raga yang berprestasi atau mendapatkan medali, sedangkan untuk Tahun 2019 hanya 11 (sebelas) cabang olah raga yang diikuti dan kesebelasnya cabang olahraga tersebut merupakan cabang olah raga yang berprestasi atau mendapatkan medali. Pada tahun 2020, Kota Bandar Lampung tidak mengadakan event olahraga dikarenakan *Pandemi Covid-19*. Event olahraga (POPWIL dan PON) direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun 2021.

#### **2.1.2.4 Fokus Reformasi Birokrasi**

##### **1. Indeks Reformasi Birokrasi**

Reformasi Birokrasi (RB) sekarang ini telah menjadi suatu keharusan bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), dan Pemerintah Daerah dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintah yang baik, dengan menerapkan prinsip-prinsip *clean governance* dan *good governance*. Dengan dorongan penuh dari Presiden RI, seluruh K/L dan Pemda ditargetkan telah memiliki komitmen dalam melaksanakan RB. Dari tahun ke tahun setiap instansi berlomba



untuk meningkatkan Indeks RB-nya, mengingat setiap tahunnya dilaksanakan evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Republik Indonesia terhadap setiap K/L dan Pemda.

Hasil penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi terhadap 8 (delapan) area perubahan yang diperoleh Pemerintah Kota Bandar Lampung oleh KemenPAN-RB pada Tahun 2017-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.32 Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2017-2020

Tahun	Skor	Predikat
2017	56,04	CC
2018	55,55	CC
2019	60,01	B
2020	59,98	CC

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Bandar Lampung, 2021

## 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian PAN-RB melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.33 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016-2020

Tahun	Skor	Predikat
2016	45,29	C
2017	48,90	C
2018	53,03	CC



Tahun	Skor	Predikat
2019	55,14	CC
2020	57,09	CC

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Bandar Lampung, 2021

Berdasarkan hasil evaluasi KemenPAN RB, nilai AKIP Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 sampai Tahun 2017 masih berada pada level predikat C, meskipun secara bobot hasil penilaian AKIP meningkat dari skor 45,29 pada Tahun 2016 menjadi 48,90 di Tahun 2017. Selanjutnya pada Tahun 2018 nilai AKIP Pemerintah Kota Bandar Lampung menjadi 53,03 atau berada pada level predikat CC dan skor meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 55,14 dan tahun 2020 menjadi sebesar 57,09, walaupun masih berada pada level predikat CC. Hal tersebut tentu saja menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung kedepan, untuk terus memperbaiki akuntabilitas kinerja daerah.

### 3. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Didalam pelaksanaan Otonomi Daerah oleh Pemerintahan Daerah, monitoring dan evaluasi perlu dilakukan utk melihat kinerja Pemda dalam konteks desentralisasi. Dalam rangka monitoring dan evaluasi tersebut, Pemda membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kewajiban melaporkan penyelenggaraan pemda oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah melalui Kemendagri dalam bentuk LPPD digunakan sebagai dasar Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) dan bahan pembinaan lebih lanjut. Pelaksanaan EPPD ditetapkan dengan PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)



Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2016 dan 2017 mendapat penghargaan Pemerintah Daerah yang berkinerja Tinggi (T). Pada Tahun 2018, hasil EKPPD LPPD Pemerintah Kota Bandar Lampung meningkat dengan mendapat penghargaan Pemerintah Daerah yang berkinerja Sangat Tinggi (ST). Pencapaian ini tentu saja akan terus ditingkatkan. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.34 Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016 - 2020

Tahun	Skor	Predikat
2016	3,0379	Tinggi (T)
2017	2,8870	Tinggi (T)
2018	3,0679	Sangat Tinggi (ST)
2019	Dalam Proses Penilaian Kementerian Dalam Negeri	
2020	Belum dilakukan Proses Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri	

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Bandar Lampung, 2021

#### 4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin meningkat bentuk respon tuntutan tersebut adalah munculnya aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warganegara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

IKM wajib dilaksanakan oleh seluruh unit penyelenggara pelayanan publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan didukung oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN&RB)



Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN&RB) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

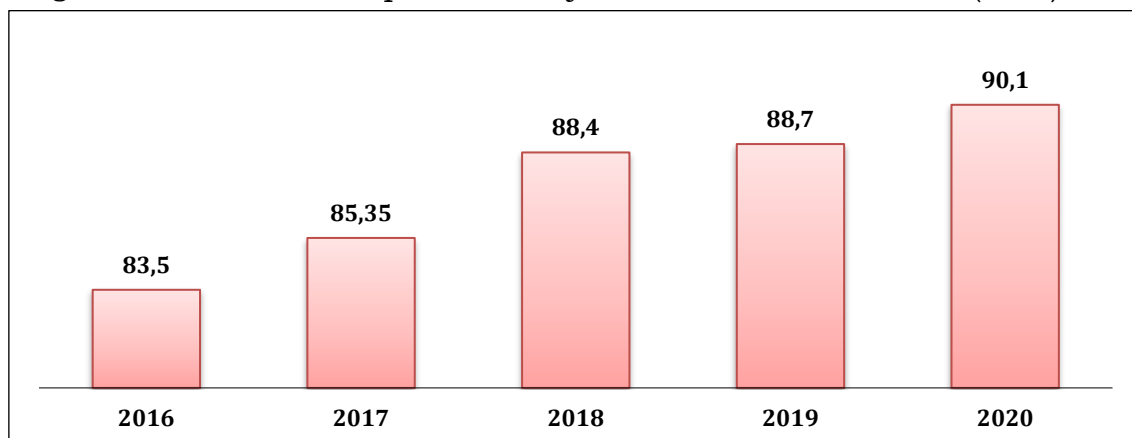
Atas dasar tersebut, sebagaimana hasil penilaian kualitas pelayanan publik Pemerintah Daerah oleh Kementerian Penadayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, (KemenPAN&RB), Pemerintah Kota Bandar Lampung memperoleh predikat Sangat Baik (A) dalam 3 (tiga) tahun terakhir (Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020). Berikut adalah data yang menunjukkan IKM Tahun 2016-2020:

Tabel 2.35 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2016 - 2020

Tahun	Skor	Predikat
2016	83,50	Baik (B)
2017	85,35	Baik (B)
2018	88,40	Sangat Baik (A)
2019	88,70	Sangat Baik (A)
2020	90,10	Sangat Baik (A)

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Bandar Lampung, 2021

Diagram 2.14 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2016-2020 (Skor)



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Bandar Lampung, 2021





## 2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

### 2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

#### 2.1.3.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

##### 1. Pendidikan

Urusan pendidikan berkaitan dengan peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memberikan pelayanan dan menyelenggarakan pendidikan. Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah melaksanakan pendidikan yang sesuai standar serta penyediaan sarana dan prasana yang memadai untuk kemudian menindaklanjuti dengan program-program peningkatan kualitas Pendidikan.

##### a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

Berikut adalah data yang menunjukkan APM SD/MI Tahun 2016-2020:

Tabel 2.36 Angka Partisipasi Murni SD/MI Tahun 2016-2020

Tahun	APM SD/MI
2016	83,29
2017	81,84
2018	98,19
2019	96,20
2020	91,32

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Data tersebut menunjukkan jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang SD/MI berfluktuasi setiap tahunnya. Hal tersebut berpengaruh terhadap kenaikan APM untuk SD/MI di Kota Bandar Lampung.

##### b. APM SMP/MTs

Berikut adalah data yang menunjukkan APM SMP/MTs Tahun 2016-2020:



Tabel 2.37 Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Tahun 2016-2020

Tahun	APM SMP/MTs
2016	65,14
2017	65,49
2018	86,95
2019	89,63
2020	80,17

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang SMP/MTs pada Tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut berpengaruh terhadap nilai APM untuk SMP/MTs di Kota Bandar Lampung.

### c. Angka Partisipasi Kasar PAUD

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Berikut adalah data yang menunjukkan APK PAUD Tahun 2016-2020:

Tabel 2.38 Angka Partisipasi Kasar PAUD Tahun 2016-2020

Tahun	APK PAUD
2016	82,01
2017	85,59
2018	48,87
2019	49,46
2020	49,36

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Penurunan APK PAUD yang signifikan pada Tahun 2018 dibandingkan Tahun 2017 disebabkan karena terjadinya data ganda pada setiap lembaga sekolah pada saat pendataan Tahun 2017. Setelah dilakukan verifikasi ulang melalui data DAPODIK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka data tersebut menjadi berkurang.

### d. Angka Partisipasi Kasar SD/MI

Berikut adalah data angka partisipasi kasar (APK) SD/MI Tahun 2016-2020:



Tabel 2.39 Angka Partisipasi Kasar SD/MI Tahun 2016-2020

Tahun	APK SD/MI
2016	97,08
2017	93,58
2018	111,47
2019	109,23
2020	108,14

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

**e. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs**

Berikut adalah data yang menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Tahun 2016-2020:

Tabel 2.40 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Tahun 2016-2020

Tahun	APK SMP/MTs
2016	89,99
2017	89,50
2018	109,32
2019	107,16
2020	96,37

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

**f. Persentase Satuan PAUD Berakreditasi**

Berikut adalah data yang menunjukkan Persentase Satuan PAUD Berakreditasi Tahun 2016-2020:

Tabel 2.41 Persentase Satuan PAUD Berakreditasi Tahun 2016-2020

Tahun	Persentase
2016	39,03
2017	39,03
2018	25,28
2019	40,84
2020	54,00

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2021

**g. Persentase Satuan Pendidikan Dasar SD/MI yang Berakreditasi A**

Berikut adalah data yang menunjukkan Persentase Satuan Pendidikan Dasar SD/MI yang Berakreditasi A Tahun 2016-2020:



Tabel 2.42 Persentase Satuan Pendidikan Dasar SD/MI yang Berakreditasi A Tahun 2016-2020

Tahun	Persentase
2016	19,49
2017	28,03
2018	28,03
2019	30,00
2020	30,00

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2021

#### **h. Persentase Satuan Pendidikan Dasar SD yang Berakreditasi B**

Berikut adalah data yang menunjukkan Persentase Satuan Pendidikan Dasar SD yang Berakreditasi B Tahun 2016-2020:

Tabel 2.43 Persentase Satuan Pendidikan Dasar SD yang Berakreditasi B Tahun 2016-2020

Tahun	Persentase
2016	61,02
2017	66,12
2018	61,74
2019	60,00
2020	60,00

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2021

#### **i. Persentase Satuan Pendidikan Dasar SMP yang Berakreditasi A**

Berikut adalah data yang menunjukkan Persentase Satuan Pendidikan dasar SMP Berakredetasi A Tahun 2016-2020:

Tabel 2.44 Persentase Satuan Pendidikan Dasar SMP Berakredetasi A Tahun 2016-2020

Tahun	Persentase
2016	26,45
2017	35,93
2018	39,52
2019	41,00
2020	41,00

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2021

#### **j. Persentase Satuan Pendidikan Dasar SMP yang Berakreditasi B**

Berikut adalah data yang menunjukkan Persentase Satuan Pendidikan dasar SMP Berakredetasi B Tahun 2016-2020:



Tabel 2.45 Persentase Satuan Pendidikan Dasar SMP Berakreditasi B Tahun 2016-2020

Tahun	Persentase
2016	32,90
2017	36,71
2018	35,48
2019	42,00
2020	42,00

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2021

### k. Jumlah Tenaga Pendidik (Guru)

Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah guru PAUD, SD dan SMP berdasarkan Jenis Kelamin dan status kepegawaian (PNS atau Non PNS) sampai dengan Tahun 2020:

Tabel 2.46 Data Keadaan Guru PAUD, SD, dan SMP sampai dengan Tahun 2020

Jenjang	PNS			Non PNS			Guru PNS dan Non PNS
	Laki	Perempuan	Jumlah	Laki	Perempuan	Jumlah	
PAUD	12	178	<b>190</b>	65	1.475	<b>1.540</b>	<b>1.730</b>
SD	303	1.517	<b>1.820</b>	764	2.211	<b>2.975</b>	<b>4.795</b>
SMP	345	1.096	<b>1.441</b>	681	1.087	<b>1.768</b>	<b>3.209</b>
<b>Jumlah</b>	<b>660</b>	<b>2.791</b>	<b>3.451</b>	<b>1.510</b>	<b>4.773</b>	<b>6.283</b>	<b>9.734</b>

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2021

### l. Kualifikasi Tenaga Pendidik

Berikut adalah data yang menunjukkan kualifikasi guru PAUD, SD dan SMP Tahun 2020:

Tabel 2.47 Kualifikasi dan Sertifikasi Tenaga Pendidik

Jenjang	Jumlah Guru	Kualifikasi		Sertifikasi	
		< S1/D-IV	≥S1/D-IV	Sudah	Belum
TK	1.730	624	1.106	577	1.153
SD	4.795	460	4.335	1.715	3.080
SMP	3.209	156	3.053	1.601	1.608
<b>Total</b>	<b>9.734</b>	<b>1.240</b>	<b>8.494</b>	<b>3.893</b>	<b>5.841</b>

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2021



Tabel 2.48 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Jenjang	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
PAUD	63,93
SD	90,41
SMP	95,14

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2021

#### m. Jumlah Siswa PAUD, SD dan SMP

Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah Siswa PAUD, SD, dan SMP berdasarkan status sekolah negeri/swasta di Kota Bandar Lampung Tahun 2020:

Tabel 2.49 Jumlah Siswa PAUD, SD, dan SMP Tahun 2020

Jenjang	Negeri			Swasta			Jmlah Siswa
	Laki	Perempuan	Total	Laki	Perempuan	Total	
PAUD	140	130	270	11.433	10.955	22.388	<b>22.658</b>
SD	35.796	33.682	69.478	12.041	10.973	23.014	<b>92.492</b>
SMP	15.782	16.438	32.220	7.545	6.336	13.881	<b>46.101</b>
<b>Jumlah</b>	<b>51.718</b>	<b>50.250</b>	<b>101.968</b>	<b>31.019</b>	<b>28.264</b>	<b>59.283</b>	<b>161.251</b>

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2021

#### n. Rasio Guru terhadap Siswa PAUD, SD dan SMP

Rasio guru terhadap siswa dihitung berdasarkan jumlah guru secara keseluruhan baik yang berstatus PNS dan Non PNS. Berikut adalah data yang menunjukkan Rasio Guru terhadap Siswa PAUD, SD, dan SMP Tahun 2020:

Tabel 2.50 Rasio Guru terhadap Siswa

Jenjang	Rasio
PAUD	14,71
SD	19,29
SMP	14,36

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2021

Dari rasio diatas terlihat bahwa secara keseluruhan rasio guru terhadap murid/siswa sudah mencukupi, hal ini karena dipenuhi dari tenaga guru berstatus Non PNS yang jumlahnya cukup banyak di Kota Bandar Lampung.



Berikut adalah data yang menunjukkan kondisi ruang kelas PAUD, SD dan SMP Tahun 2020:

Tabel 2.51 Perbandingan Kondisi Ruang Kelas dengan Rombongan Belajar Tahun 2020

Jenjang	Ruang Kelas			Jumlah Ruang Kelas	Rombongan Belajar
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang/Berat		
PAUD	718	596	2 / 0	1.316	1.142
SD	1.512	1.075	15 / 12	2.614	3.492
SMP	1.036	710	10 / 4	1.760	1.594
<b>Total</b>	<b>3.266</b>	<b>2.381</b>	<b>27 / 16</b>	<b>5.690</b>	<b>6.228</b>

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2021

## 2. Kesehatan

Urusan kesehatan berkaitan dengan peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam urusan kesehatan, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melaksanakan program kesehatan untuk masyarakat seperti Jamkeskot (Jaminan Kesehatan Kota), Jampersal (Jaminan Persalinan) dan menyediakan fasilitas Ambulance gratis bagi masyarakat. Hal tersebut sebagai pendukung atas peran untuk menyediakan sarana dan prasarana kesehatan seperti tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, alat kesehatan dan bentuk lainnya.

### a. Tenaga Kesehatan

Berikut ini adalah data yang menunjukkan jumlah tenaga kesehatan berdasarkan jenisnya Tahun 2016-2021:

Tabel 2.52 Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2016-2020

Jenis Tenaga Kesehatan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Dokter Ahli/Spesialis	203	205	215	241	332
Dokter Umum	639	645	745	847	501
Dokter Gigi	226	220	254	279	289
Bidan	644	680	680	697	1.045

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2021



Berdasarkan data jumlah dokter dan bidan secara keseluruhan di Kota Bandar Lampung baik yang berstatus PNS Kota Bandar Lampung maupun lainnya, berikut adalah data yang menunjukkan Rasio Dokter dan Bidan per 100.000 penduduk Tahun 2016-2020:

Tabel 2.53 Rasio Dokter dan Bidan per 100.000 penduduk Tahun 2016-2020

Tahun	Rasio	
	Dokter	Bidan
2016	84,39	64,55
2017	83,67	66,94
2018	92,86	65,78
2019	103,47	66,29
2020	71,44	89,62

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2021

Berdasarkan Rasio Indonesia Sehat, rasio ideal dokter per 100.000 penduduk adalah 40, dan berdasarkan tabel diatas Rasio Dokter di Kota Bandar Lampung Tahun 2020 sebesar 71,44 orang, artinya setiap 100.000 penduduk Kota Bandar Lampung dilayani oleh 71 orang dokter.

Sedangkan untuk Bidan, berdasarkan Rasio Indonesia Sehat, rasio ideal bidan per 100.000 penduduk adalah 100, artinya setiap 100.000 penduduk dilayani oleh 100 orang bidan. Sedangkan kondisi yang ada saat ini pada Tahun 2020 setiap 100.000 penduduk Kota Bandar Lampung dilayani oleh 89 orang bidan sehingga diperlukan penambahan bidan.

Sementara itu, berdasarkan data Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, berikut ini adalah data yang menunjukkan jumlah tenaga kesehatan di Kota Bandar Lampung yang berstatus PNS Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021:

Tabel 2.54 Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya Tahun 2016-2020

Jenis Tenaga Kesehatan Lainnya	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Dokter Umum	70	79	113	143	147
Dokter Gigi	42	45	48	51	58
Perawat	310	306	317	329	340
Bidan	200	212	310	330	335





Jenis Tenaga Kesehatan Lainnya	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kesehatan Masyarakat	30	35	37	40	41
Kesehatan Lingkungan	29	32	35	40	41
ATML	27	37	39	41	45
Farmasi	30	32	31	32	41
Gizi	30	30	43	44	42
<b>JUMLAH</b>	<b>770</b>	<b>808</b>	<b>973</b>	<b>1.050</b>	<b>1.090</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2021

### b. Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu

Berikut adalah data yang menunjukkan data jumlah puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu Tahun 2016-2020:

Tabel 2.55 Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Puskesmas	30	30	30	30	31
Jumlah Poliklinik	51	71	71	80	79
Jumlah Pustu	50	50	50	50	50
Jumlah Penduduk	997.728	1.015.910	1.033.803	1.051.500	1.166.066
Rasio Puskesmas Persatuan Penduduk	33.258	33.863	34.460	35.050	37.615
Rasio Puskesmas persatuan Penduduk (Nasional)	1 Puskesmas Melayani 20.000 penduduk (Indonesia sehat)				
Rasio Poliklinik persatuan Penduduk	19.563	14.308	14.561	13.144	14.760

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2021

Pada Tahun 2020, rasio puskesmas persatuan penduduk di Kota Bandar Lampung adalah sebesar 34.483 (1 puskesmas melayani 34.483 penduduk) sedangkan menurut Indonesia Sehat 1 puskesmas melayani 20.000 penduduk. Sejak Tahun 2018 jumlah puskesmas yang telah terakreditasi mencapai 100 persen, demikian juga untuk Tahun 2020.

### c. Rumah Sakit

Berikut data yang menunjukkan jumlah rumah sakit Tahun 2016-2020:

Tabel 2.56 Jumlah Rumah Sakit Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	1	1	1	1	1



Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus Lainnya milik pemerintah	1	1	1	1	1
Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/ POLRI	2	2	2	2	2
Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah	1	1	1	1	1
Jumlah seluruh Rumah Sakit	19	20	20	20	21
Jumlah Penduduk	997.728	1.015.910	1.033.803	1.051.500	1.166.066
<b>Rasio</b>	<b>52.512</b>	<b>50.796</b>	<b>51.690</b>	<b>52.575</b>	<b>50.904</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2021

Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan rasio ketersediaan rumah sakit terhadap jumlah penduduk pada tahun 2020. Namun demikian ketersediaan sarana dan prasarana serta kualitas layanan rumah sakit mengalami peningkatan dalam hal melayani kebutuhan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh penduduk misalnya melalui ketersediaan jumlah ruangan, obat-obatan, dan tenaga kesehatan.

Pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini telah memiliki 1 (satu) Rumah sakit yang terakreditasi, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah A. Dadi Tjokrodipo, dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan RSUD 90 persen di Tahun 2016 dan 90,91 persen di Tahun 2017-2019. Pada Tahun 2020 terjadi peningkatan pencapaian SPM Pelayanan RSUD mencapai angka 95,45 persen.

#### d. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Berikut data yang menunjukkan data jumlah pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita Tahun 2016-2020:

Tabel 2.57 Rasio Pos Pelayanan Terpadu Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Posyandu	694	700	704	704	704
Jumlah Balita	92.417	91.981	91.502	90.994	90.461
<b>Rasio</b>	<b>133</b>	<b>131</b>	<b>130</b>	<b>129</b>	<b>129</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2021



Data di atas menunjukkan Jika dibandingkan dengan rasio ideal secara nasional dimana 1 posyandu melayani 50 balita, menunjukkan Kota Bandar Lampung masih kekurangan Posyandu guna melayani balita yang ada.

Tabel 2.58 Pencapaian 80 Persen Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi Tahun 2016-2020 (persen)

Tahun	Pencapaian 80 Persen Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi
2016	92,00
2017	98,80
2018	90,00
2019	96,90
2020	89,16

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2021

#### e. Angka Kematian Ibu, Bayi dan Kasus Gizi Buruk

Berikut adalah data yang menunjukkan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Kasus Gizi Buruk Tahun 2016-2020:

Tabel 2.59 Angka Kematian Ibu, Bayi dan Kasus Gizi Buruk Tahun 2016-2020

Kasus	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka kematian Ibu melahirkan (Kasus)	19	15	14	14	10
Angka kematian bayi dan balita (Kasus)	65	51	47	36	34
Gizi buruk (Kasus)	4	2	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2021

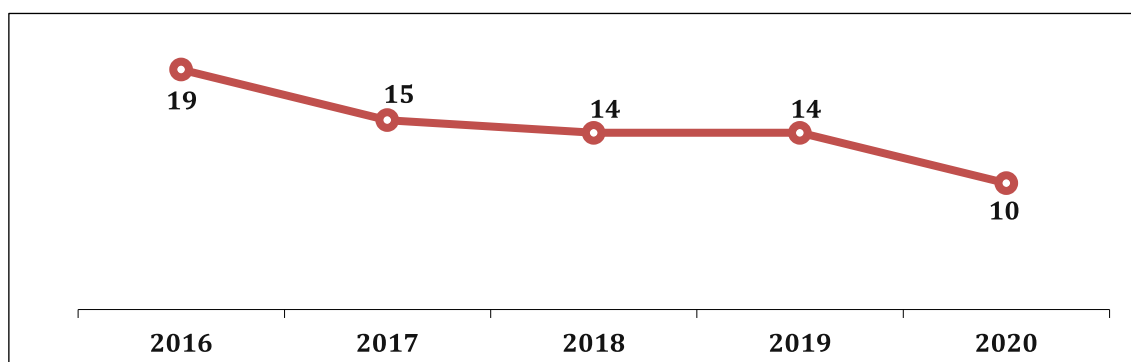
Angka kematian ibu melahirkan Tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2019 yaitu dari 14 kasus menjadi 10 kasus. Demikian juga halnya dengan Angka kematian bayi dan balita, pada Tahun 2020 menurun menjadi 34 kasus dibandingkan Tahun 2019 dengan 36 kasus. Sementara untuk kasus gizi buruk di Kota Bandar Lampung cenderung menurun, pada tahun 2016 terdapat 4 kasus dan Tahun 2017 menjadi 2 kasus. Pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 di Kota Bandar Lampung tidak terdapat kasus gizi buruk, hal ini disebabkan karena semua balita yang mengalami gizi buruk dilakukan pemantauan, pengobatan jika ada penyakit penyerta dan pemberian makanan tambahan



oleh Puskesmas setempat. Pemantauan dilakukan terhadap status gizi anak sehingga apabila ada kecenderungan anak mengalami kekurangan gizi dapat segera diatasi dan tidak sampai menimbulkan gizi buruk. Kriteria gizi buruk ini didasarkan pada grafik pertumbuhan anak dari Kementerian Kesehatan dengan indikator berat badan menurut tinggi badan. Seorang anak dikatakan gizi buruk apabila kondisi berat badan menurut tinggi badan berada pada posisi garis/kurva dibawah  $-3$  standar deviasi (SD).

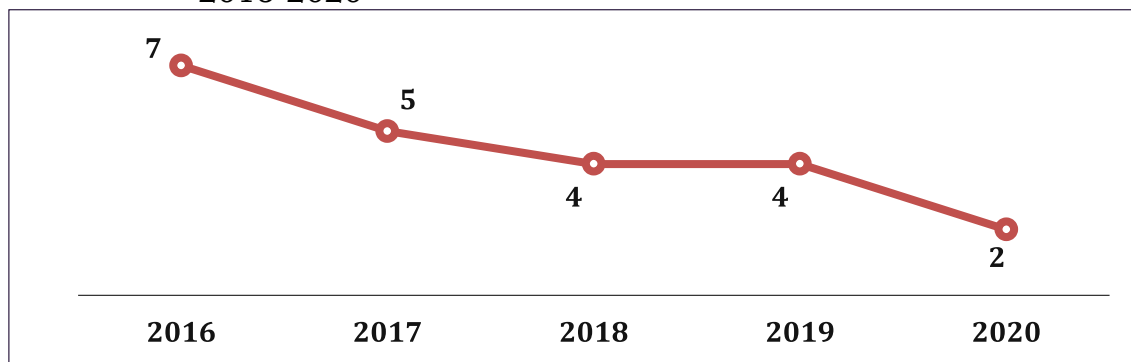
Pada tahun 2020 kasus kematian ibu maternal di Kota Bandar Lampung yakni sebanyak 10 kasus. Kasus ini disebabkan karena terjadinya pendarahan sebanyak 7 kasus (70%), Hipertensi 2 kasus (20%), penyebab lain-lain (decom cordis dll) sebanyak 1 kasus (10%). Sedangkan penyebab tidak langsung kematian ibu yang sering diabaikan oleh masyarakat seperti kondisi si ibu yang terlalu tua atau terlalu muda, terlalu banyak anak dan terlalu dekat jarak kehamilannya.

Grafik 2.7 Kasus Kematian Ibu Maternal Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2021

Grafik 2.8 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2020

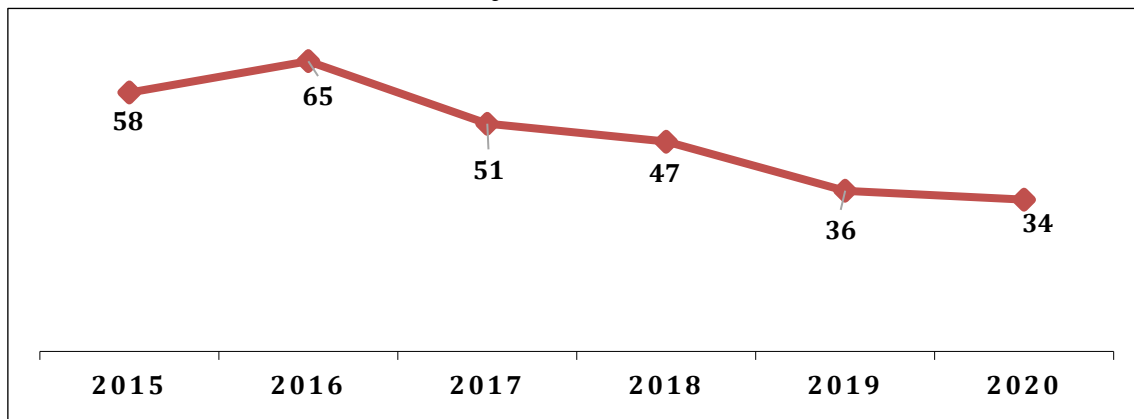


Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2021



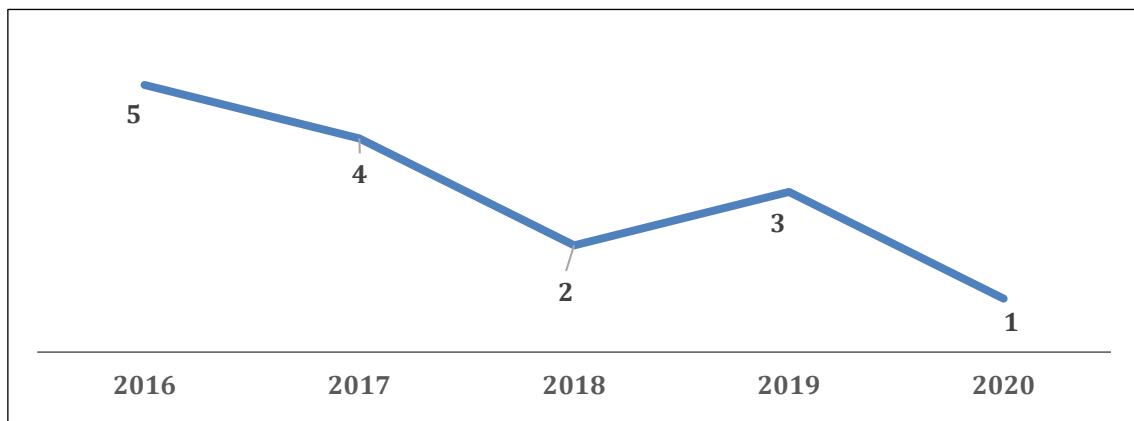
Pada tahun 2020, jumlah kasus kematian bayi dan balita di Kota Bandar Lampung yakni sebanyak 34 kasus. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yakni masih rendahnya status gizi ibu hamil, masih rendahnya pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif, buruknya kondisi kesehatan lingkungan, seperti rendahnya cakupan air bersih dan sanitasi serta kondisi perumahan yang tidak sehat, belum optimalnya pemanfaatan Posyandu di samping determinan sosial budaya lainnya.

Grafik 2.9 Kasus Kematian Bayi dan Balita Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2021

Grafik 2.10 Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2021

#### f. Cakupan Pelayanan Demam Berdarah dan Malaria

Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah kasus demam berdarah dan malaria Tahun 2016-2020:



Tabel 2.60 Jumlah Kasus Demam Berdarah dan Malaria Tahun 2016-2020

Tahun	Kasus Demam Berdarah	Kasus Malaria
2016	1.172	1.465
2017	932	829
2018	926	733
2019	1.190	379
2020	1.048	80

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2021

Untuk penyakit DBD jumlah kasus demam berdarah di Kota Bandar Lampung masih cukup tinggi, per tahunnya jumlah kasusnya lebih dari 500 kasus. Upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan pencegahan terhadap sumber penyakit yaitu nyamuk *Aedes Aegypti*. Pelaksanaan Fogging atau pemberian pencegahan pertumbuhan jentik nyamuk kepada masyarakat lebih ditingkatkan. Sosialisasi perilaku Hidup Bersih dan sehat pun harus lebih digalakan.

Pengendalian Penyakit Menular yang termasuk dalam komitmen global seperti malaria juga telah menunjukkan pencapaian program yang cukup baik. *Annual Parasite Incidence* (API) yang menjadi indikator keberhasilan upaya penanggulangan malaria cenderung menurun dari tahun ke tahun.

Tabel 2.61 Cakupan penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Tahun 2016-2020 (persen)

Tahun	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
2016	80
2017	97
2018	85
2019	97
2020	95

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2021

#### g. Cakupan Pelayanan Tuberculosis

Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah kasus penyakit Tuberculosis Tahun 2016-2020:



Tabel 2.62 Jumlah Kasus Penyakit Tuberculosis Tahun 2016-2020

Tahun	Kasus Tuberkulosis
2016	2.160
2017	2.622
2018	3.480
2019	3.349
2020	2.240

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2021

Data tersebut menunjukkan terjadinya penurunan kasus penyakit Tuberculosis pada Tahun 2020 yaitu sebesar 2.240 kasus dibandingkan dengan Tahun 2019 dengan 3.349 kasus. Kedepannya diperlukan peningkatan upaya pencegahan dengan sosialisasi pentingnya melakukan vaksinasi Tuberculosis untuk meningkatkan imun tubuh sehingga meminimalisir tertularnya penyakit Tuberculosis dan menghindari kontak fisik langsung dengan penderita Tuberculosis.

Tabel 2.63 Prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk (CNR) Tahun 2016-2020

Tahun	Prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk (CNR)
2016	220
2017	232
2018	231
2019	331
2020	211

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2021

#### **h. Cakupan Pelayanan Pengendalian HIV dan AIDS**

Berikut adalah data yang menunjukkan prevalensi kasus HIV Tahun 2016-2020:

Tabel 2.64 Jumlah Kasus Prevalensi Kasus HIV Tahun 2016-2020

Tahun	Prevalensi Kasus HIV pada Penduduk Usia 15-49
2016	267
2017	280
2018	340
2019	283
2020	257

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2021



Data tersebut menunjukkan jumlah prevalensi penyakit HIV dan AIDS di Kota Bandar Lampung masih cukup tinggi. Kedepannya diperlukan upaya untuk melakukan pencegahan dengan sosialisasi perilaku seks yang bersih dan sehat. Sosialisasi tentang bahaya seks bebas dan penyalahgunaan narkoba harus terus digalakkan. Potensi yang dimiliki Kota Bandar Lampung dalam pengendalian HIV-AIDS diantaranya adalah telah memiliki persiapan yang cukup baik, mencakup tata laksana penanganan pasien, tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan, dan laboratorium kesehatan.

### **3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

#### **3.1. Pekerjaan Umum**

##### **a. Rasio Panjang Jalan Dibanding dengan Luas Wilayah**

Berikut adalah data yang menunjukkan rasio panjang jalan dibandingkan luas wilayah Tahun 2016-2020:

Tabel 2.65 Rasio Panjang Jalan Dibandingkan Luas Wilayah Tahun 2016-2020

<b>Tahun</b>	<b>Rasio</b>
2016	6,98
2017	6,86
2018	6,86
2019	6,86
2020	7,89

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, 2021

Data tersebut menunjukkan terjadi peningkatan rasio panjang jalan dibandingkan luas wilayah di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2020.

##### **b. Rasio Panjang Jalan Dibanding dengan Jumlah Penduduk**

Berikut adalah data yang menunjukkan rasio panjang jalan dibandingkan jumlah penduduk Tahun 2016-2020:





Tabel 2.66 Rasio Panjang Jalan Dibandingkan Jumlah Penduduk Tahun 2016-2020

Tahun	Rasio
2016	1,38
2017	1,16
2018	1,31
2019	1,29
2020	1,46

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, 2021

Berdasarkan data tersebut menunjukkan terjadi peningkatan rasio panjang jalan dibandingkan jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2020.

### c. Rumah Tinggal Bersanitasi

Berikut adalah persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2016-2020:

Tabel 2.67 Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2016-2020

Tahun	Rumah Tinggal Bersanitasi (persen)
2016	98,07
2017	98,98
2018	97,27
2019	95,63
2020	95,70

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, 2021

Adapun Persentase Rumah Tinggal yang memiliki akses terhadap sanitasi layak Tahun 2016-2020 ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.68 Persentase Rumah Tinggal yang memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak Tahun 2016-2020

Tahun	Rumah Tinggal yang memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak (persen)
2016	33,26
2017	36,49
2018	35,99
2019	35,96
2020	35,61

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, 2021

Dari data tersebut menunjukkan bahwa Akses masyarakat terhadap sanitasi layak masih perlu untuk menjadi perhatian daerah, disisi lain,

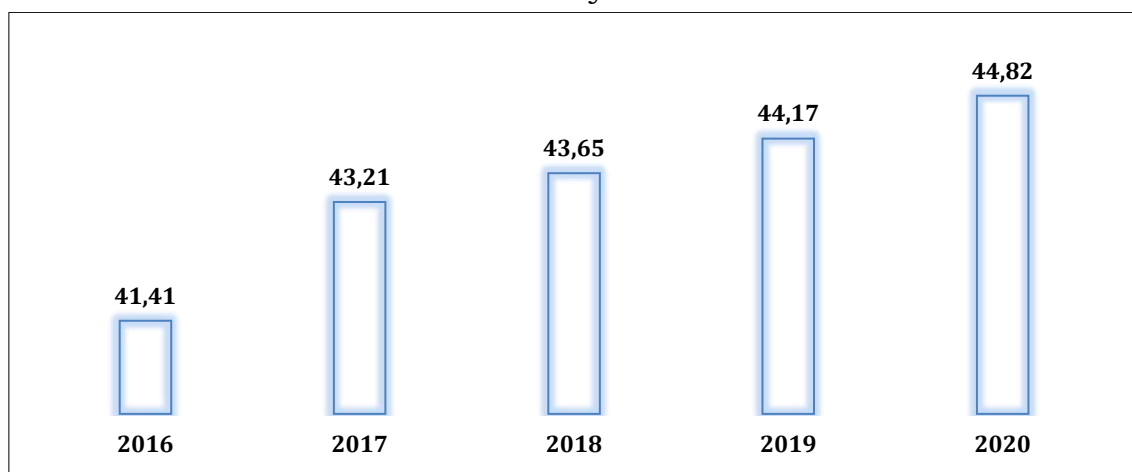


kesadaran masyarakat akan kesehatan dengan memiliki dan menjaga rumah dengan sanitasi yang sehat juga perlu untuk ditingkatkan.

**d. Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak**

Berikut adalah data yang menunjukkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak Tahun 2016-2020:

Diagram 2.15 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, 2021

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan bahwa upaya penyehatan lingkungan masih perlu untuk ditingkatkan.

**e. Cakupan Layanan SPAM Perkotaan**

Berikut adalah data yang menunjukkan cakupan layanan SPAM Perkotaan Tahun 2016-2020:

Tabel 2.69 Persentase Cakupan Layanan SPAM Perkotaan Tahun 2016-2020

Tahun	Cakupan
2016	31,98
2017	32,14
2018	32,14
2019	32,14
2020	33,25

Sumber : PDAM Kota Bandar Lampung, 2021



### **3.2. Penataan Ruang**

#### **a. Tersedianya Informasi Mengenai RTRW**

Pada Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung 2011-2030 telah dilakukan peninjauan kembali dan direkomendasikan untuk dilakukan revisi pada Tahun 2017. Pada Tahun 2018 dilakukan *updating* terhadap materi teknis dan peta dengan melakukan penyesuaian sesuai Peraturan Menteri ATR Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, Kabupaten, dan Kota. Pada tahun 2019 Rekomendasi Peta RTRW didapatkan dari Badan Informasi Geospasial (BIG), sebagai salah satu prasyarat mendapatkan rekomendasi Gubernur. Sampai sejauh ini, *progress* RTRW telah dilakukan evaluasi terhadap materi teknis serta peta dan penyusunan telah menyesuaikan Peraturan Menteri ATR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta RTRW Propinsi, Kabupaten/Kota dan Peta RDTR Kabupaten/Kota, yang kemudian ditindaklanjuti kembali terhadap penyesuaian Peraturan Menteri ATR Nomor 14 Tahun 2021 sebagai salah satu turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Forum lintas sektor terhadap Rancangan Peraturan Daerah RTRW Kota Bandar Lampung 2021-2041 telah dilakukan pada tahun 2021 dan tahapan selanjutnya sedang menunggu persetujuan substansi RTRW dari Kementerian ATR/BPN untuk kemudian dilanjutkan pembahasan dengan DPRD.

#### **b. Persentase Bangunan ber-IMB**

Persentase bangunan ber-IMB per satuan bangunan adalah perbandingan jumlah bangunan ber-IMB terhadap jumlah seluruh bangunan yang ada. Tertib administrasi dalam pengurusan IMB belum sepenuhnya dijalankan oleh masyarakat. Diperlukan peningkatan pembinaan, sosialisasi, serta penindakan yang tegas untuk mewujudkan tertib IMB di Kota Bandar Lampung. Berikut data persentase bangunan ber-IMB berdasarkan



penerbitan IMB yang dilakukan oleh sektor pelayanan publik Tahun 2016-2020 :

Tabel 2.70 Bangunan ber-IMB Tahun 2016-2020

<b>Tahun</b>	<b>Penerbitan IMB</b>	<b>Persentase Bangunan ber-IMB</b>
2016	2.241	37,31
2017	1.431	49,23
2018	1.897	65,04
2019	1.835	80,33
2020	1.574	93,45

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung, 2021

Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah salah satu dokumen bangunan gedung yang wajib dimiliki oleh pengguna bangunan sebelum bangunan tersebut dimanfaatkan. Sertifikat Laik Fungsi diterbitkan setelah bangunan gedung memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, merupakan dasar penerbitan SLF di Kota Bandar Lampung. Sebelum SLF di implemmentasikan dalam kurun waktu tahun 2014 – 2016, Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan pendalaman teknis dan memperoleh pendampingan dari Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam merumuskan pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG), pendataan bangunan gedung dan petunjuk pelaksanaan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Hasil dari pendampingan dan pembahasan di tingkat pusat dengan berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menyusun Petunjuk pelaksanaan yang mengatur Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran, tugas dan wewenang TABG serta pendataan bangunan gedung diatur melalui Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penyelenggaraan, Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, Tim Ahli Bangunan Gedung, dan Pendataan Bangunan Gedung.



Dalam periode tahun 2016 – 2017, implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2016, dilaksanakan melalui Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Bandar Lampung berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 270/III.04/HK/2018 Tentang Pembentukan Sekretariat Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018, dan setelah Tim Ahli Bangunan Gedung terbentuk maka dilakukan sosialisasi yang berkaitan dengan SLF kepada masyarakat dan pelaku usaha sehingga implementasi penerbitan SLF di Kota Bandar Lampung bisa terealisasi di Tahun 2018.

Berikut ini adalah data Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung yang diterbitkan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung Tahun 2018-2020 :

Tabel 2.71 Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Tahun 2018-2020

Tahun	Penerbitan IMB
2018	5
2019	11
2020	18

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2021

#### 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pembangunan perumahan merupakan program penyediaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain hal tersebut perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan menjadi prioritas untuk ditangani dan dilaksanakan sebagai bentuk komitmen pelaksanaan program 100-0-100 Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Berikut adalah jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2016-2020:

Tabel 2.72 Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2016-2020

Tahun	Rumah Tidak Layak Huni	Kelurahan
2016	2.187	26
2017	2.187	26
2018	2.843	67



<b>Tahun</b>	<b>Rumah Tidak Layak Huni</b>	<b>Kelurahan</b>
2019	2.843	67
2020	2.843	67

Sumber : Pokja PKP Kota Bandar Lampung, 2021

Untuk mendukung penanganan RTLH pada tahun 2017-2020 Kota Bandar Lampung mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PUPR Republik Indonesia melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sumber anggaran APBN/DAK sebanyak 819 unit RTLH. Untuk tahun 2020 pelaksanaan BSPS kota Bandar Lampung sebanyak 277 unit.

## **5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Pemerintah Kota Bandar Lampung selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir telah melaksanakan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan terhadap masyarakat di wilayah Kota Bandar Lampung. Tim Penegakan Peraturan Daerah dan Tim Ketertiban Umum Kota Bandar Lampung telah melaksanakan beberapa penertiban antara lain Operasi Penertiban Pedagang Kaki Lima; Operasi Penertiban Tempat Hiburan Pada Bulan Suci Ramadhan; Operasi Penertiban Gelandangan dan Pengemis Serta Anak Jalanan; Pendataan Perizinan serta Objek-objek Pajak Tempat-tempat Usaha di Wilayah Kota Bandar Lampung; Pengamanan Unjuk Rasa; Penertiban Spanduk dan Banner Yang Pemasangannya Melanggar Peraturan Daerah dan yang Telah Habis Masa Izin dan lain sebagainya. Berikut adalah data terkait aktifitas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Tahun 2016-2020:

Tabel 2.73 Persentase Penegakan Peraturan Daerah Tahun 2016-2020

<b>Tahun</b>	<b>Penegakan Perda (Persen)</b>
2016	74
2017	100
2018	100
2019	100
2020	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, 2021



Data diatas menggambarkan aktifitas penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung terhadap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

## 6. Sosial

### a. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Berikut adalah data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2016-2020:

Tabel 2.74 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Anak terlantar	1.438	1.307	1.307	1.307	220
Lanjut usia terlantar	1.946	1.526	1.604	1.635	628
Perempuan rawan sosial ekonomi	625	266	420	427	900
Anak Jalanan	4	4	1	1	61
Anak yang berhadapan dengan hukum	4	-	-	-	10
Korban penyalahgunaan NAPZA	98	37	41	43	129
Penyandang cacat	1.062	607	767	820	817
Gelandangan dan pengemis	57	50	7	8	48
Tuna susila	77	44	47	47	144
Bekas warga binaan LP (napi)	144	12	18	19	69
Fakir miskin	55.234	49.711	49.711	43.322	43.332
Pemulung	380	109	145	151	264

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2018; Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 2021

Berikut adalah data Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Tertangani Tahun 2016-2020:

Tabel 2.75 Persentase PMKS yang Tertangani Tahun 2016-2020

Tahun	PMKS yang Tertangani (persen)
2016	25,00
2017	37,36
2018	40,00
2019	50,00
2020	70,00

Sumber : Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 2021

### b. Tempat Pemakaman

Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah tempat pemakaman sampai dengan Tahun 2020:



Tabel 2.76 Jumlah Tempat Pemakaman Penduduk sampai dengan Tahun 2020

Jenis Tempat Pemakaman	Jumlah Tempat Pemakaman (Lokasi)
Tempat Pemakaman Umum	103
Tempat Pemakaman Khusus	43
Tempat Pemakaman Bukan Umum	138
<b>Total</b>	<b>284</b>

Sumber : Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 2021

Data menunjukkan jumlah tempat pemakaman yang tersedia di Kota Bandar Lampung yang terdiri dari tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, dan tempat pemakaman khusus. Jumlah tersebut masih mencukupi kebutuhan masyarakat akan tempat pemakaman di Kota Bandar Lampung.

Saat ini terdapat 6 (enam) areal pemakaman milik Pemerintah Kota Bandar Lampung yang terdiri dari 3 (tiga) areal pemakaman berlokasi di Kecamatan Kemiling dengan luasan sebesar 38.600 m<sup>2</sup>, 1 (satu) areal pemakaman berlokasi di Kecamatan Teluk Betung Barat dengan luasan sebesar 14.449 m<sup>2</sup>, dan 1 (satu) areal pemakaman berlokasi di Kecamatan Langkapura dengan luasan 6.150 m<sup>2</sup>, serta 1(satu) areal pemakaman berlokasi di Kecamatan Teluk Betung Timur yang diperuntukkan untuk korban *Covid-19* dengan luasan sebesar 30.000 m<sup>2</sup>. Pengelolaan areal pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah terkait penyediaan infrastruktur penunjang pemakaman seperti pagar, talud/bronjong dan akses jalan ke areal pemakaman baik milik pemerintah maupun pemakaman milik masyarakat/umum. Berikut adalah rincian luasan pemakaman milik Pemerintah Kota Bandar Lampung :

Tabel 2.77 Luasan Areal Pemakaman Milik Pemerintah Kota Bandar Lampung

Lokasi Pemakaman	Luasan (m <sup>2</sup> )
Kelurahan Beringin Kecamatan Kemiling	20.000
Kelurahan Bukit Kemiling Permai Kecamatan Kemiling	18.000
Kelurahan Pinang Jaya Kecamatan Kemiling	600
Kelurahan Batu Putu Kecamatan Teluk Betung Barat	14.449
Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura	6.150
Kelurahan Teluk Betung Barat Kecamatan Teluk Betung Timur	30.000

Sumber : Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 2021





### 2.1.3.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

#### 1. Tenaga Kerja

Berikut adalah data yang menunjukkan data ketenagakerjaan Tahun 2016-2020:

Tabel 2.78 Jumlah Angkatan Kerja Tahun 2016-2020

Tahun	Angkatan Kerja	Penduduk yang Bekerja	Pengangguran Terbuka	Rasio Kesempatan Kerja
2016	445.064	407.190	37.874	91,5
2017	476.469	437.884	38.071	91,9
2018	504.849	468.121	36.728	92,7
2019	511.686	475.244	36.442	92,9
2020	554.224	505.483	48.741	91,2

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2021

Dampak *Pandemi Covid-19* yang semakin merebak termasuk di Kota Bandar Lampung menyebabkan sejumlah pekerja atau buruh dirumahkan bahkan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Tenaga Kerja mencatat sejak 3 April 2020 sampai dengan Juli 2020 setidaknya terdapat 1.687 tenaga kerja yang telah dirumahkan dan 59 orang pekerja yang mengalami PHK oleh 41 pihak perusahaan. Berikut adalah rekapitulasi jumlah tenaga kerja yang dirumahkan dan mengalami PHK Akibat Dampak *Pandemi Covid-19* di Kota Bandar Lampung periode 3 April 2020 s.d 16 Juli 2020:

Tabel 2.79 Jumlah Tenaga Kerja yang Terkena Dampak *Pandemi Covid-19*

Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja (orang)	
	Dirumahkan	PHK
41	1.687	59

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, 2021

*Pandemi Covid-19* yang terjadi pada Tahun 2020 menyebabkan banyak tenaga kerja yang dirumahkan dan di PHK sebagai akibat dari semakin menurunnya jumlah lapangan kerja.



## **2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah upaya terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan untuk meningkatkan wawasan, kepedulian, perhatian, kapasitas perempuan dan perlindungan anak. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintahan pada Tahun 2016 sebesar 4,20 persen, Tahun 2017 sebesar 3,71 persen, Tahun 2018 sebesar 3,23 persen, Tahun 2019 menjadi sebesar 3,24 persen, dan tahun 2020 sebesar 3,03. Angka tersebut menunjukkan jumlah pegawai Negeri Sipil perempuan di Pemerintah Kota Bandar Lampung dibandingkan dengan jumlah pekerja perempuan secara keseluruhan di Kota Bandar Lampung. Penurunan pada Tahun 2017 dan 2018 disebabkan karena tidak ada penambahan ataupun penerimaan PNS pada tahun tersebut, sementara terdapat PNS yang pensiun atau purna tugas.

Untuk membantu Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal penanganan dan pecegahan terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terdapat 6 (enam) Lembaga perempuan dan perlindungan anak di Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

1. Lembaga Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung (LPA)
2. Lembaga Advokasi Perempuan Damar (Damar)
3. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)
4. Children Crisis Center (CCC)
5. Lembaga Advokasi Anak (Lada)
6. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Keberadaan *Non Governmental Organizations* dalam upaya perlindungan perempuan dan anak sebagai wujud partisipasi masyarakat dan menjadi mitra aktif pemerintah dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut :



1. Lembaga Advokasi Damar mendorong/ advokasi dalam berbagai kebijakan yang peduli kepada perempuan; bekerja sama dalam penanganan kasus terhadap perempuan baik dalam pendampingan maupun dalam penyelesaian kasus.
2. Melalui Forum Komunikasi Puspa (Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Forum Puspa terdiri dari berbagai Lembaga/ Organisasi perempuan dan Anak termasuk juga dari disabilitas dan organisasi yang berbasis agama, Organisasi Profesi (IDI, IBI, HIMPSI, AJI) dan Dunia Usaha, yang bekerja bersama melalui lembaga masing-masing dan bersinergi dalam upaya perlindungan perempuan dan Anak.
3. Dengan pembentukan UPT PPA akan semakin terbuka kerjasama dalam penanganan terhadap kasus-kasus baik perempuan dan Anak (dalam penjangkauan, pendampingan, rehabilitasi terhadap korban serta untuk penyelesaian kasus sampai kepada pengadilan).
4. Pembentukan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga), sebagai layanan dalam pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak. Kegiatan yang dilakukan berupa sosialisasi, edukasi dan konseling terhadap permasalahan terhadap anak, perempuan dan keluarga, dalam sosialisasi dan edukasi dapat dilakukan keberbagai lapisan masyarakat, secara berkelompok, maupun lewat komunitas dimana dapat bekerja sama dengan lembaga non pemerintah dalam pelaksanaannya.
5. Dalam Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga Non Pemerintah, melalui layanan pengaduan dan pendampingan, pemulangan dan reintegrasi terhadap korban TPPO.

Selain lembaga sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga memiliki kader-kader binaan yang tersebar di Kelurahan dan Kecamatan yang bertugas untuk melakukan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan perempuan dan anak yang terjadi di masyarakat. Adapun kader-kader sebagaimana dimaksud adalah :



1. Kader Pelihara Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang berjumlah 252 orang dan tersebar di 126 Kelurahan se Kota Bandar Lampung;
2. Kader Pos Curhat yang tersebar di 20 Kecamatan dengan jumlah 10 orang per Kecamatan.

### 3. Pangan

Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah merupakan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 11/Permentan/KN.130.4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Daerah dan diperkuat dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyediaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok (Beras) di Wilayah Kota Bandar Lampung. Berikut adalah data yang menunjukkan cadangan pangan yang dialokasikan melalui APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020:

Tabel 2.80 Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2016-2020

Tahun	Cadangan Pangan Pemerintah (Ton)
2016	7
2017	7,148
2018	15,712
2019	24,084
2020	24,084

Sumber : Dinas Pangan Kota Bandar Lampung, 2021

Berikut adalah data ketersediaan energi dan protein perkapita Tahun 2016-2020:

Tabel 2.81 Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2016-2020

Tahun	Energi (Kal/kap/hari)	Protein (gr/kap/hari)
2016	2.286	71,98
2017	2.308	71,98
2018	2.286	71,98
2019	3.339	72,06
2020	2.490	72,10

Sumber : Dinas Pangan Kota Bandar Lampung, 2021



Berikut adalah data terkait Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan masyarakat Tahun 2016-2020 :

Tabel 2.82 Pengawasan Keamanan Pangan Tahun 2016-2020

Tahun	Tingkat Keamanan Pangan (%)
2016	62,5
2017	62,5
2018	80
2019	80
2020	85

Sumber : Dinas Pangan Kota Bandar Lampung, 2021

Dalam upaya meningkatkan keamanan pangan yang beredar di masyarakat, Dinas pangan gencar melakukan sidak ke pasar di Kota Bandar Lampung bekerjasama dengan instansi terkait, mengawasi dan juga melakukan edukasi kepada penjual di pasar tradisional dan swalayan. Salah satu komitmen dinas pangan terbukti dengan keberhasilan Pasar Way Halim, Bandar Lampung mendapat penghargaan dari BPOM RI Tingkat nasional sebagai pasar sehat dan aman dari bahan berbahaya.

#### 4. Pertanahan

Berikut adalah data yang menunjukkan penyelesaian konflik pertanahan Tahun 2016-2020:

Tabel 2.83 Penyelesaian Konflik Pertanahan Tahun 2016-2019

Tahun	Penyelesaian Konflik Pertanahan Tahun
2016	Konflik Tanah Milik Pelindo di Kecamatan Panjang
2017	Konflik Tanah Milik Pelindo di Kecamatan Panjang dan Konflik Asset Pemerintah Provinsi Lampung yang ada di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame
2018	Konflik Tanah SDN 2 Rajabasa
2019	Tidak ada Penyelesaian Konflik
2020	Tidak ada Penyelesaian Konflik

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Bandar Lampung, 2021

Selain itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga memberikan bantuan sertifikasi tanah bagi warga tidak mampu. Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah sertifikat warga tidak mampu yang terbit dan sedang dalam proses Tahun 2016-2020 :



Tabel 2.84 Sertifikasi Tanah bagi Warga Tidak Mampu Tahun 2016-2020

Tahun	Peserta Proda (Bidang)	Jumlah Serifikat yang Terbit (Bidang)	Jumlah Serifikat yang dalam Proses (Bidang)
2016	50	50	-
2017	228	-	228
2018	228	-	228
2019	228	-	228
2020	171	-	171

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Bandar Lampung, 2021

Sebagai daerah perkotaan yang padat penduduk, penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya tentu saja masih terjadi. Munculnya kawasan permukiman kumuh perkotaan terutama munculnya permukiman liar (*squatter area*) juga tidak dapat dihindari. Berdasarkan data Pokja PKP Nuwo Berseri Kota Bandar Lampung, luas kawasan permukiman liar (*squatter area*) di Kota Bandar Lampung sebagai berikut : tahun 2017 dengan luas 61.78 ha di 91 RT (7.976 KK); tahun 2018 dengan luas 20,18 ha di 28 RT (2.616 KK); dan tahun 2019 dengan luas 2,37 ha di 6 RT (607 KK). Dengan demikian terjadi pengurangan terhadap luasan kawasan permukiman liar yang ada di Kota Bandar Lampung. Hal ini dikarenakan adanya penanganan kawasan perkotaan secara kolaborasi. Untuk tahun 2020, tidak dilakukan pendataan dikarenakan tidak adanya penanganan kumuh perkotaan di lokasi *squatter* tersebut.

## 5. Lingkungan Hidup

### a. Persentase Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan aspek planologis perkotaan, serta meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau 30 persen dari luas wilayah kota yang terdiri dari publik 20 persen dan privat 10 persen. Kondisi eksisting di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau saat ini jika dilihat dari luasannya belum dapat memenuhi ketentuan



tersebut, dan ruang terbuka hijau yang sudah ada perlu direvitalisasi fungsinya kembali.

RTH publik terdiri dari taman kecamatan, taman kota, pemakaman, sempadan sungai dan sempadan pantai, sempadan mata air dan kawasan ekosistem mangrove yang tersebar diseluruh kecamatan wilayah Kota Bandar Lampung. Sedangkan RTH *private* tersebar pada lahan dengan fungsi permukiman di seluruh bagian wilayah kota. Selain itu RTH *private* juga tersebar pada kawasan industri yang banyak tersebar di wilayah Kecamatan Panjang, Sukabumi dan Kecamatan Bumi Waras. Luas ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kota Bandar Lampung saat ini berjumlah 658,57 Ha atau sekitar 4,37% dari total luas lahan terbangun Kota Bandar Lampung yang terdiri dari taman kota sebesar 355 Ha, taman kecamatan sebesar 22 Ha, pemakaman sebesar 62 Ha, sempadan sungai dan sempadan pantai sebesar 181,2 Ha, sempadan mata air 0,37 Ha dan kawasan ekosistem mangrove sebesar 38 Ha.

## b. Persampahan

Permasalahan lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung di dominasi oleh masalah persampahan. Masalah persampahan yang timbul sebagai dampak atas meningkatnya aktivitas penduduk di Kota Bandar Lampung. Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah penanganan sampah yang telah dilakukan di Kota Bandar Lampung Tahun 2017-2020:

Tabel 2.85 Penanganan Sampah Tahun 2017-2020

Tahun	Produksi Sampah Perhari (Ton)	Volume Sampah Terangkut Perhari (Ton)	Persentase
2017	800-900	700-800	80
2018	800-1.000	700-850	80
2019	900-1.100	800-900	80
2020	1.100-1.300	900-950	80

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, 2021

Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan pemukiman di Kota Bandar Lampung menuntut kesiapan pemerintah dalam mengatasi masalah



persampahan. Berikut adalah data yang menunjukkan UPT Pengelolaan Sampah dan lokasi TPS di Kota Bandar Lampung :

Tabel 2.86 UPT Pengelolaan Sampah dan Lokasi TPS

UPT Pengelolaan Sampah	Lokasi TPS
Panjang	1 Candy Baypass
	2 Srengsem
	3 Ketapang Kuala Ki Agus Anang
	4 Karang Maritim
	5 Pasar Panjang
	6 LDC Belakang
	7 Ketapang Kuala Atas
Sukabumi	1 TPS Villa Marina Jl. P. Singkep 7
	2 TPS Griya Abdi Negara Jl. P. Tirtayasa
	3 TPS Perumahan Nusantara Permai
	4 TPS Container Campang Raya Jl. Alimudin Umar
	5 TPS Jl. Soekarno Hatta
	6 TPS Karunia Indah Jl. P. Bangka
	7 TPS Puskud
Way Halim	1 TPS Jl. Belia Jagabaya Ii
	2 TPS Ismail, Jl. Pulau Buton
	3 TPS Kali Paman, Jl. Pulau Seram
	4 TPS Villa Citra, Jl. Hj Said
	5 TPS Dom, Jl. Morotai
	6 TPS Gantung BTN 3 Way Halim Permai
	7 TPS Gantung Jl. Griya Utama WHP
	8 TPS Pkor Jl. Sumpah Pemuda
	9 TPS Pasar Perumnas Jl. Gunung Rajabasa Raya
Sukarame	1 TPS UIN Kel-Sukarame
	2 TPS Umbul Rakub Kel- Way Dadi
	3 TBS Gamtung Man, Kel- Kopri Jaya
Teluk Betung Timur	1 TPS Teluk Bone Jl. Telukbone
	2 TPS Jl. Ikan Sebelah
	3 TPS Jl. RE Martadinata Putra Wisata
	4 TPS Jl. Zulkarnaen Subing
	5 TPS Lempasing Jl. Remartadinata
Rajabasa	1 TPS UPT Rajabasa
	2 TPS Pasar Rajabasa Raya
	3 TPS Gedung Meneng
Labuhan ratu	1 TPS Gantung Jl. Sultan Haji
	2 TPS Labuhan Ratu Gg. Family 1 Labuhan Dalam
	3 Kampung Baru
Teluk Betung Barat	1 TPS Container Jl. Dr. Setia Budi Kuripan
	2 TPS Konatainer Jl. Wan Abdurahman Batu Putu
Kedamaian	1 TPS Jl. Merbau Kel. Kupang Raya
	2 TPS Jl. Putri Balau Kel. Bumi Kedamaian
Tanjung Karang Timur	1 Pasar Tugu
	2 Bukit Klutum
Enggal	1 Jl. Way Sekampung
Kedaton	1 TPS Gantung Sidodadi Jl. Badak
	2 TPS Ratulangi
Kemiling	1 BKP
	2 Beringin Raya Jl. Garuda
	3 Beringin Jaya, Kalpataru
Tanjung Karang Barat	1 Gang Jeruk
	2 Ps. Tamin
	3 TPS Ratulangi





UPT Pengelolaan Sampah	Lokasi TPS
Teluk Betung Selatan	1 Cimeng
	2 Sumur Putri
	3 Kali Akar
	4 Talang Polda
	5 Gunung Mas
	6 Pesawahan
Langkapura	1 TPS Gantung Langkapura Gang Swadaya
	2 TPS Induk Gang Senen
Bumi Waras	1 TPS Kunyit Bw
	2 TPS Payang Bw
	3 TPS Nila Kandi Bw
	4 TPS Container Kangkung Bw
Teluk Betung Utara	1 TPS Dewi Sartika
	2 TPS Alfurgon Jl. Dipenogoro
	3 TPS Container Jl. Dr. Cipto Mangunnkusumo
	4 TPS Gantung Gg. Nusa Indah
	5 Bak Sampah Depan Kejaksaan Tinggi
Tanjung Senang	1 TPS Tanjung Senang
Tanjung Karang Pusat	1 TPS Bambu Kuning
	2 TPS Terminal Ramayana
	3 TPS Pasar Bawah
	4 TPS Hanoman
	5 TPS Pasar Tamin
	6 TPS Pasar Gintung
	7 TPS Gunung Botak
TPA Bakung	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, 2021

TPA Bakung merupakan satu-satunya tempat pemrosesan akhir sampah bagi masyarakat Kota Bandar Lampung. TPA Bakung mempunyai luas 14,01 ha dan mulai beroperasi pada Tahun 1994. Hingga saat ini TPA Bakung sudah beroperasi selama  $\pm$  27 Tahun dengan sampah yang masuk ke TPA  $\pm$  600 ton/hari dan pada saat ini meningkat menjadi  $\pm$  750 ton/hari.

Pengelolaan sampah di TPA Bakung masih menggunakan sistem *open dumping* dikarenakan sampah di TPA Bakung yang *overload* dan sudah terlalu tinggi untuk dikelola (saat ini ketinggian sampah mencapai  $\pm$  20 m) sehingga sampah yang masuk dibuang dengan cara menumpuk. Hanya sekitar 10% sampah yang masuk ke TPA dikelola dengan cara *control Landfill*, yaitu dengan cara penimbunan tanah secara berkala pada tumpukan sampah. Ketinggian sampah di TPA Bakung saat ini tentunya sangat membahayakan keselamatan para pemulung yang beroperasi di TPA Bakung.



Pemerintah Kota Bandar Lampung akan mengupayakan pengelolaan sampah dengan skema *Waste to Energi* melalui pembangunan PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) atau pemanfaatan sampah untuk dijadikan *Pelet/RDF (Refuse - Derived Fuel)* dengan mencari alternatif pembiayaan di luar APBD.

## **6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Penataan Administrasi yang baik sehingga dapat terwujud tertib administrasi kependudukan yang memadai yang akhirnya dapat digunakan dalam sebagai tolak ukur/pertimbangan Walikota dan Pemerintah Daerah dalam menentukan berbagai keputusan dan kebijakan yang menyangkut warga Kota Bandar Lampung, untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkomitmen untuk melaksanakan pendaftaran dan pendataan penduduk secara baik, cepat dan teratur. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melaksanakan fungsinya dengan melaksanakan fungsi administratif seperti pembuatan akta kelahiran, kematian, dan pendataan penduduk melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Penerapan KTP-El lebih diutamakan dikarenakan akan dihapuskannya KTP SIAK dan akan diberlakukannya KTP-El seumur hidup, pelaksanaan pencetakan KTP-El diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sedangkan perekaman KTP-El di serahkan kepada kecamatan masing-masing Kota Bandar Lampung. Berikut ini adalah data yang menunjukkan jumlah penduduk Kota Bandar Lampung yang telah melakukan perekaman e-KTP dan memiliki e-KTP Tahun 2016-2020:



Tabel 2.87 Penduduk Kota Bandar Lampung yang Telah Melakukan Perekaman e-KTP dan Memiliki e-KTP Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Penduduk ber e-KTP	Jumlah Penduduk yang Sudah Rekam	Jumlah Penduduk yang Belum Rekam	Jumlah Penduduk 0 s/d 17 Tahun - 1 Hari
2016	1.169.286	79.192	505.289	261.075	323.730
2017	1.176.612	52.497	566.866	242.956	314.293
2018	1.179.627	69.791	609.892	195.504	304.440
2019	1.183.251	77.987	634.497	155.801	314.966
2020	1.189.297	134.528	606.029	125.356	323.384

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, 2021

Berikut ini adalah data yang menunjukkan persentase data kependudukan dan pencatatan sipil pada Tahun 2020 :

Tabel 2.88 Persentase Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2020 (Persen)

Tahun	Penduduk ber-KTP	Bayi ber-Akte Kelahiran	Pasangan ber-Akte Perkawinan	Penduduk ber-Kartu Keluarga	Anak ber-Kartu Identitas Anak
2016	15,67	76,84	100	24,23	8,84
2017	9,26	82,27	100	26,60	6,57
2018	11,44	85,10	100	33,39	5,47
2019	12,20	93,34	100	24,90	16,25
2020	22,19	99,41	100	24,08	7,73

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, 2021

Pada persentase Pasangan ber-Akte Perkawinan telah mencapai 100 persen dengan asumsi yaitu akte yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung berdasarkan pasangan non muslim yang melaporkan perkawinannya ke catatan sipil Kota Bandar Lampung.

## 7. Pemberdayaan Masyarakat

### a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui satuan kerja terkait telah melakukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan pemberdayaan masyarakat, diantaranya pembinaan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan dan Kecamatan. Berikut adalah data yang menunjukkan persentase kelompok binaan LPM tahun 2016-2020 :



Tabel 2.89 Persentase Kelompok Binaan LPM Tahun 2016-2020

Tahun	Kelompok Binaan LPM (Persen)
2016	48
2017	60
2018	60
2019	95
2020	95

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung, 2021

#### b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah LSM Tahun 2016-2020:

Tabel 2.90 Jumlah LSM Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat
2016	53
2017	70
2018	118
2019	136
2020	151

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung, 2021

Data tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah LSM yang terdaftar pada Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung. Akan tetapi terjadi penurunan LSM baru yang mendaftar pada kurun waktu dua tahun terakhir. Hal ini terkait dengan diperketatnya regulasi tentang keormasaan dari mulai tatacara pendaftaran sampai dengan hak dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

### 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

#### a. Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya di Bawah Usia 20 Tahun

Berikut adalah data cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi Peserta KB Aktif Tahun 2016-2020:



Tabel 2.91 Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya di Bawah Usia 20 (Dua Puluh) Tahun

Tahun	Cakupan
2016	2,79
2017	2,95
2018	0,27
2019	0,28
2020	0,30

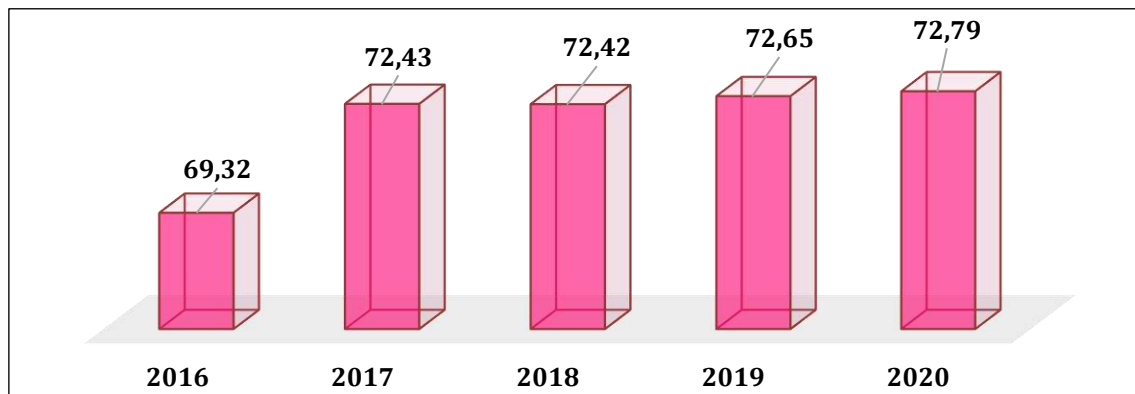
Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung, 2021

Data tersebut menunjukkan terjadi penurunan yang signifikan terhadap PUS yang Istrinya di Bawah usia 20 Tahun pada kurun waktu tahun 2018 – tahun 2020 dibandingkan Tahun 2017 dan tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa pendewasaan usia perkawinan di Kota Bandar Lampung cukup berhasil.

#### b. Cakupan Sasaran PUS menjadi Peserta KB Aktif

Berikut adalah data cakupan PUS menjadi Peserta KB Aktif Tahun 2016-2020:

Diagram 2.16 Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung, 2021

Data tersebut menunjukkan bahwa sejak Tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah cakupan Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB aktif sebagai dampak yang muncul atas meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap program Keluarga Berencana (KB) sekaligus keberhasilan Pemerintah Kota Bandar Lampung mengendalikan jumlah penduduk.



### c. Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmeet Need*)

*Unmeet need* dapat didefinisikan sebagai kelompok yang belum terpenuhi kebutuhan kontrasepsinya, mencakup semua pria atau wanita usia subur yang sudah menikah atau hidup bersama dan dianggap aktif secara seksual yang tidak menggunakan metode kontrasepsi, baik yang tidak ingin punya anak lagi ataupun menunda kelahiran berikutnya. Berikut adalah data cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmeet Need*) Tahun 2016-2020:

Tabel 2.92 Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmeet Need*) Tahun 2016-2020

Tahun	Cakupan (%)
2016	12,93
2017	12,25
2018	27,57
2019	11,62
2020	11,50

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung, 2021

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa terjadi penurunan *Unmeet Need* pada Tahun 2020 yaitu menjadi sebesar 11,50% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari data cakupan PUS menjadi peserta KB Aktif dengan Cakupan PUS yang ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi ( *Unmeet Need* ) yang telah disajikan diatas terlihat bahwa kedua data tersebut tidak memiliki korelasi secara langsung, artinya angka peningkatan PUS menjadi peserta KB Aktif tidak berbanding lurus dengan angka penurunan *Unmeet Need*. Hal ini disebabkan karena Pasangan Usia Subur yang menjadi Peserta Baru yang berasal dari orang yang pertama kali ber KB atau yang pasca persalinan dan keguguran, jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan Pasangan Usia Subur *Unmeet Need* yang menjadi Peserta Baru.

Itu sebabnya peningkatan cakupan Peserta Aktif lebih besar dibandingkan dengan penurunan angka *Unmeet Need*. Masih rendahnya *Unmeet Need* dikarenakan rata-rata Peserta Aktif memang tidak mau Ber-KB, baik yang



tidak ingin mempunyai anak lagi atau pun menunda kelahiran berikutnya, bukan karena tidak adanya pelayanan KB.

## **9. Perhubungan**

### **a. Tingkat Pelayanan pada Jalan Arteri Primer**

Tingkat pelayanan adalah kemampuan ruas jalan dan/atau persimpangan untuk menampung lalu lintas pada keadaan tertentu. Penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan merupakan kegiatan penentuan tingkat pelayanan ruas jalan dan/atau persimpangan berdasarkan indikator tingkat pelayanan. Jalan arteri primer menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antarpusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Untuk jalan arteri primer di Kota Bandar Lampung, tingkat pelayanan sekurang-kurangnya B atau dengan kondisi: 1) arus stabil dengan volume lalu lintas sedang dan kecepatan mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas; 2) kepadatan lalu lintas rendah hambatan internal lalu lintas belum mempengaruhi kecepatan; 3) pengemudi masih punya cukup kebebasan untuk memilih kecepatannya dan lajur jalan yang digunakan. Tingkat pelayanan pada jalan arteri primer sampai dengan tahun 2020 yaitu C.

### **b. Tingkat Pelayanan pada Jalan Arteri Sekunder**

Jalan arteri sekunder adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi, dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat dalam kota, atau juga disebut sebagai jalan protokol. Untuk jalan arteri sekunder di Bandar Lampung, tingkat pelayanan sekurang-kurangnya C atau dengan kondisi: 1) arus stabil tetapi kecepatan dan pergerakan kendaraan dikendalikan oleh volume lalu lintas yang lebih tinggi; 2) kepadatan lalu lintas sedang karena hambatan internal lalu lintas meningkat; 3) pengemudi memiliki keterbatasan untuk memilih kecepatan, pindah lajur atau mendahului. Tingkat pelayanan pada jalan arteri sekunder sampai dengan 2020 yaitu C.



### **c. Tingkat Pelayanan pada Jalan Kolektor Primer**

Jalan kolektor primer adalah jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan antarpusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal dan atau kawasan-kawasan berskala kecil dan atau pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal. Untuk jalan kolektor Primer di Bandar Lampung, tingkat pelayanan sekurang-kurangnya B. Tingkat pelayanan pada jalan kolektor primer sampai dengan Tahun 2020 yaitu D.

### **d. Tingkat Pelayanan pada Jalan Kolektor Sekunder**

Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan atau pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota. Untuk Jalan Kolektor Sekunder di Bandar Lampung, tingkat pelayanan sekurang-kurangnya C. Tingkat pelayanan pada jalan kolektor sekunder sampai dengan Tahun 2020 yaitu C.

### **e. Tingkat Pelayanan pada Jalan Lokal Sekunder**

Jalan lokal sekunder adalah menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan. Untuk jalan lokal sekunder di Bandar Lampung, tingkat pelayanan sekurang-kurangnya D. Tingkat pelayanan pada jalan lokal sekunder sampai dengan Tahun 2020 yaitu B.

### **f. Pelayanan Terminal**

Pada saat ini terdapat 6 (enam) terminal di Kota Bandar Lampung yaitu Terminal Kemiling, Terminal Rajabasa Raya Tipe C, Terminal Pasar Bawah, Terminal Lempasing, Terminal Sukaraja dan Terminal Panjang.

Pelayanan terminal yang dilakukan Dinas Perhubungan antara lain:

- 1) Melaksanakan kegiatan penertiban dan pengawasan angkutan umum yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung;





- 2) Membantu pelayanan posko angkutan lebaran, natal dan tahun baru dan pengendalian lalu lintas di sekitar daerah jangkauan terminal;
- 3) Memungut retribusi terminal dan retribusi kekayaan daerah seperti sewa WC/KM.

#### g. Pelayanan Parkir

Pelayanan perparkiran yang dilakukan Dinas Perhubungan yaitu memungut retribusi parkir di tepi jalan. Berikut adalah data pelayanan parkir Tahun 2016-2020 :

Tabel 2.93 Pelayanan Parkir Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Titik Parkir	837	621	621	621	190
Ruas Jalan	92	92	92	92	21
Pengelola Wilayah Parkir	19	15	15	15	5
Juru Parkir	937	937	937	844	190

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2021

#### h. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh Dinas Perhubungan yaitu Retribusi Kendaraan Bermotor. Berikut adalah data pelayanan pengujian kendaraan bermotor Tahun 2016-2020 :

Tabel 2.94 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2016-2020

Tahun	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
2016	13.946 Kendaraan Wajib Uji
2017	12.955 Kendaraan Wajib Uji
2018	10.929 Kendaraan Wajib Uji
2019	10.279 Kendaraan Wajib Uji
2020	13.048 Kendaraan Wajib Uji

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2021

Alat uji yang tersedia sebanyak 7 (tujuh) unit terdiri dari *Head Light Tester*, *Slide Slip Tester*, *Axle Load Tester*, *Brake Slip Tester*, dan *Speedometer Tester* yang telah dioperasikan sejak Tahun 1974 serta pengadaan Alat uji *CoHc Tester* dan *Smoke Tester* di Tahun 2020.



### **i. Pelayanan Sarana dan Prasarana dan Pembinaan Keselamatan**

Pelayanan sarana, prasarana dan pembinaan keselamatan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yaitu melakukan pembinaan terhadap Uji Pertama Kendaraan Wajib Uji dan Penetapan Teknis Laik Jalan, Pembinaan Prasarana Angkutan Umum serta Pembinaan Keselamatan Berlalu Lintas Lingkup Angkutan Umum.

### **10. Komunikasi dan Informatika**

Pada Tahun 2020, persentase rumah tangga yang mengakses internet sebesar 90 persen, meningkat dibandingkan Tahun 2019 yaitu sebesar 85 persen, Tahun 2017 dan 2018 yaitu sebesar 80 persen dan 2016 yaitu sebesar 70 persen. Persentase layanan telekomunikasi, informasi, dan komunikasi (TIK) pada Tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 90 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar 85 persen, Tahun 2017 dan 2018 sebesar 80 persen dan Tahun 2016 sebesar 70 persen. Pembangunan internet untuk area publik di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2020 sama dengan Tahun 2019 yaitu sebanyak 46 titik, meningkat dibandingkan Tahun 2017 dan 2018 sebanyak 34 titik dan Tahun 2016 yaitu 27 titik.

### **11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

#### **a. Peningkatan Produktivitas Koperasi**

Berikut adalah data yang menunjukkan Peningkatan Produktivitas Koperasi Tahun 2016-2020:

Tabel 2.95 Peningkatan Produktivitas Koperasi Tahun 2016-2020

<b>Tahun</b>	<b>Volume Usaha (Milyar)</b>	<b>Peningkatan (%)</b>
2016	562,868	0,35
2017	512,359	-8,98
2018	500,887	-2,23
2019	488,676	-2,44
2020	464,635	-2,26

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2021

Data tersebut menunjukkan terjadi penurunan pada produktivitas koperasi.



## **b. Peningkatan Produktivitas Usaha Kecil dan Menengah**

Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan unsur utama pembangunan ekonomi yang saat ini menjadi prioritas untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan UKM mampu mengurangi masalah kesenjangan antargolongan pendapatan dan antar pelaku usaha, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Lebih dari itu, pengembangan UKM mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan struktural, yaitu meningkatnya perekonomian daerah dan ketahanan nasional. Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu meningkatkan perannya dalam membina UKM dan menciptakan iklim usaha yang baik sehingga produktivitas UKM tiap tahun selalu meningkat. Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2016-2020:

Tabel 2.96 Jumlah UKM non BPR/LKMUKM Tahun 2016-2020

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah UKM non BPR/LKMUKM</b>
2016	40.851
2017	44.232
2018	46.324
2019	51.709
2020	57.019

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandar Lampung, 2021

## **12. Penanaman Modal**

### **a. Pertumbuhan Penanaman Modal Asing**

Berikut adalah data yang menunjukkan Pertumbuhan Penanaman Modal (PMA) Asing Tahun 2016-2020:

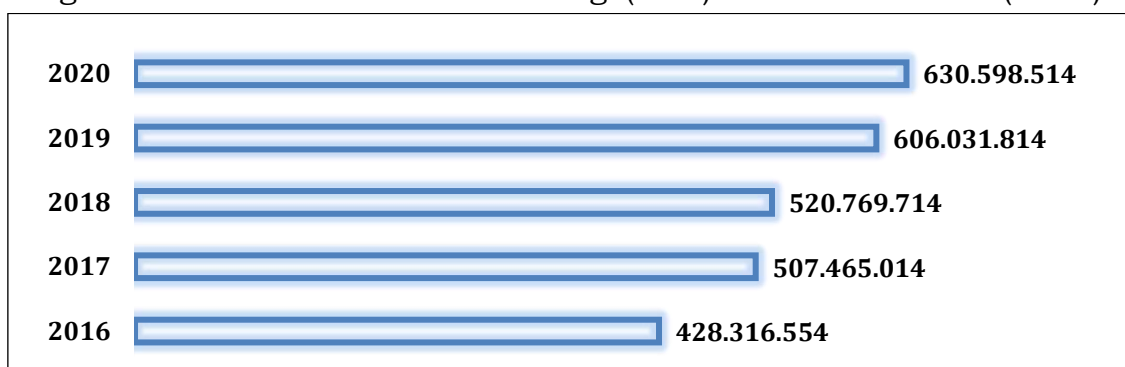
Tabel 2.97 Pertumbuhan Penanaman Modal Asing Tahun 2016-2020

<b>Tahun</b>	<b>PMA (Dolar)</b>	<b>Pertumbuhan (%)</b>
2016	428.316.554	21,71
2017	507.465.014	18,48
2018	520.769.714	2,62
2019	606.031.814	16,37
2020	630.598.514	4,05

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung, 2021



Diagram 2.17 Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 2016-2020 (Dolar)



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung, 2021

Data tersebut menunjukkan bahwa PMA di Bandar Lampung terus meningkat walaupun pertumbuhannya selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif.

#### b. Pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri

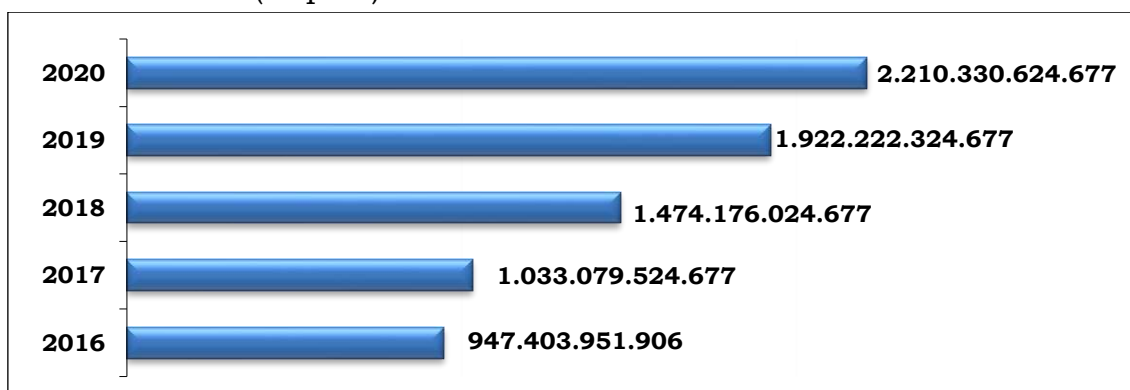
Berikut adalah data yang menunjukkan Pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2016-2020:

Tabel 2.98 Pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun 2016-2020

Tahun	PMDN (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2016	947.403.951.906	6,78
2017	1.033.079.524.677	9,04
2018	1.474.176.024.677	42,70
2019	1.922.222.324.677	30,39
2020	2.210.330.624.677	14,99

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung, 2021

Diagram 2.18 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2016-2020 (Rupiah)



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung, 2021

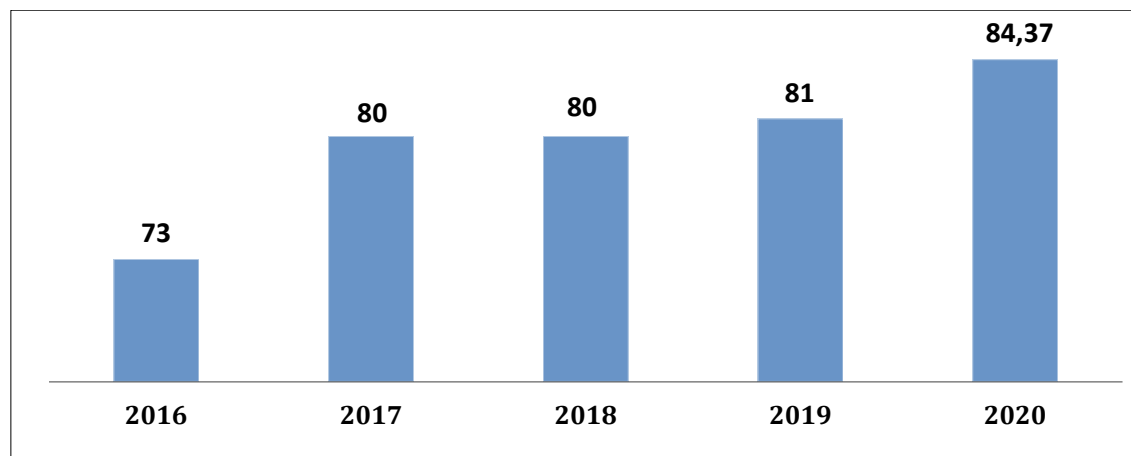


Data tersebut menunjukkan terjadi peningkatan pertumbuhan jumlah modal yang diinvestasikan di Kota Bandar Lampung selama 3 (tiga) tahun terakhir. Hal ini berarti Bandar Lampung memiliki potensi yang menjanjikan bagi investor. Hal yang tidak kalah pentingnya untuk menjaga kondisi ini adalah menjaga iklim investasi agar tetap kondusif seperti ketersediaan jaminan sarana transportasi, keamanan, perizinan, dan lain lain.

### c. IKM Bidang Perizinan

Berikut adalah data yang menunjukkan IKM Bidang Perizinan Tahun 2016-2020:

Diagram 2.19 Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung, 2021

## 13. Kepemudaan dan Olah Raga

### a. Organisasi Pemuda Aktif

Berdasarkan data Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Bandar Lampung, organisasi pemuda yang aktif di Kota Bandar Lampung Tahun 2020 sebanyak 32 organisasi dari 38 organisasi pemuda yang ada. Berikut adalah data yang menunjukkan persentase organisasi pemuda yang aktif Tahun 2016-2020:



Tabel 2.99 Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Organisasi Pemuda	Organisasi Pemuda yang Aktif	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif
2016	692	173	25
2017	225	102	40
2018	185	102	50
2019	45	32	70
2020	38	32	85

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandar Lampung, 2021

Dari data diatas terlihat bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir, organisasi pemuda di Kota Bandar Lampung terus menurun baik jumlah organisasi secara keseluruhan maupun jumlah organisasi pemuda yang aktif, meskipun secara persentase organisasi pemuda yang aktif semakin meningkat. Kedepan diharapkan jumlah tersebut terus meningkat diiringi dengan meningkatnya peran dan partisipasi pemuda di Kota Bandar Lampung.

#### **b. Jumlah Event Olahraga Tingkat Kota/Kabupaten yang Terlaksana**

Pengembangan kawasan olahraga terpadu di Kota Bandar Lampung saat ini didasarkan pada upaya untuk menciptakan atlet-atlet handal di berbagai bidang di tingkat nasional maupun internasional. Untuk itu perlu didukung dengan pengembangan sarana dan prasarana penunjang yang berskala nasional dan internasional, baik untuk latihan maupun melaksanakan event-event olahraga tingkat Kota sebagai upaya peningkatan kemampuan atlet di kancah nasional maupun internasional. Pada Tahun 2018, telah dilaksanakan 2 (dua) event olah raga tingkat Kota, yaitu Kejuaraan Wushu dan Kejuaraan Bola Volley. Terdapat peningkatan pada Tahun 2019 menjadi 11 (sebelas) event olah raga yaitu Kejuaraan Kempo, Futsal, Wushu, Tenis Meja, Tekwondo, Sepak Bola, Judo, Pencak Silat, Karate, Atletik, dan Bola Volly. Pada Tahun 2020, event olahraga tidak diadakan dikarenakan *Pandemi Covid-19*.



### c. Sarana Olahraga

Berikut adalah data sarana olahraga umum yang dimiliki Pemerintah Kota Bandar Lampung sampai dengan Tahun 2020:

Tabel 2.100 Sarana Prasarana Olahraga sampai dengan Tahun 2020

Sarana/Prasarana	Jumlah	Lokasi
Stadion Olahraga	1	Pahoman, Bandar Lampung
Lapangan Tenis Indoor	1	Pahoman, Bandar Lampung
Lapangan Tenis Outdoor	1	Kemiling, Bandar Lampung
Lapangan Sepakbola	1	Bandar Lampung

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandar Lampung, 2021

## 14. Statistik

Data statistik merupakan komponen sekaligus instrumen strategis dalam sebuah pemerintahan, bahkan disebut pula statistik menentukan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan UU nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 31 mengharuskan perencanaan pembangunan didasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data statistik itu bersifat spesifik, terukur, terjangkau, relevan dan ada masa waktunya, sesuai dengan kebutuhan dalam hal penentu dan kebijakan pemerintah. Selain itu, statistik juga berguna untuk mengevaluasi dampak kebijakan pembangunan yaitu berupa kinerja dalam waktu yang telah berjalan perlu indikator kualitatif dan kuantitatif.

Pembangunan di bidang statistik diarahkan pada upaya penyediaan data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan terpublikasinya data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan manajemen kebijakan serta meningkatnya mutu pelayanan statistik daerah.

Oleh karena itu, sebagai upaya penyediaan data dan informasi statistik daerah, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik selama kurun waktu lebih dari lima tahun



terakhir, hal tersebut terwujud dengan tersusun dokumen indikator ekonomi daerah berupa Bandar Lampung Dalam Angka (BLDA) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bandar Lampung.

## **15. Persandian**

Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.

Saat ini merupakan era keterbukaan dan globalisasi. Era ini berdampak pada keterbukaan informasi, dimana untuk memperoleh informasi sangat-sangat mudah, bahkan dijamin oleh Undang-Undang. Sebagaimana warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk mengakses informasi yang tertuang dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Namun bukan berarti bahwa kebebasan tersebut tanpa batas. Kebebasan untuk mengakses informasi dibatasi oleh informasi yang dikecualikan, dimana informasi ini wajib dilindungi agar selama masa berlakunya, informasi yang dikecualikan ini tetap terjaga kerahasiaan, keutuhan dan keasliannya, untuk menjaga stabilitas negara.

Urusan pemerintahan bidang persandian tergabung bersama urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, dan statistik serta perumpunan urusan tersebut harus diwadahi dalam perangkat daerah berbentuk dinas. Berdasarkan hal tersebut persandian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung.

Praktek persandian pada dasarnya adalah kegiatan pengamanan kegiatan komunikasi dan isi dari komunikasi yang dilakukan oleh intern pemerintah dalam pelayanan publik salah satunya tersedianya call center di Kota Bandar Lampung.





## 16. Kebudayaan

Sebagai bentuk dan upaya dalam mempromosikan kebudayaan daerah, Pemerintah Kota Bandar Lampung setiap tahunnya selalu mengikuti berbagai festival seni dan budaya baik lokal maupun luar daerah, yang terdiri dari Pentas Seni Budaya, Pagelaran Seni Budaya, Pentas Tari Kreasi, Festival dan Parade, Pawai Budaya, Carnaval Budaya/Pawai Budaya Nusantara, Gebyar Pesona Budaya. Hal tersebut akan selalu ditingkatkan agar budaya Lampung lebih dikenal dan berdampak pada kunjungan wisatawan ke Kota Bandar Lampung.

Peranan Kota Bandar Lampung dalam mengembangkan kebudayaan juga dapat terlihat dari pengembangan dan pemeliharaan peninggalan budaya yang ada di Kota Bandar Lampung. Berikut adalah beberapa objek wisata Seni Budaya yang ada di Kota Bandar Lampung:

Tabel 2.101 Objek Wisata Seni Budaya di Kota Bandar Lampung

Objek Wisata Budaya	Alamat Objek Wisata Budaya
Bunker Peninggalan Jepang	Jl. Amir Hamzah Teluk Betung
Goa Jajar	Jl. Juanda/Kesehatan Pahoman
Goa Cepit	Gunung Betung Tanjungkarang
Kelanteng Vihara Thay Hin Bio, Jl. Ikan Kakap, Telukbetung Selatan	Bangunan peribadatan umat Budha
Masjid Tua Al-Anwar, Jl. Laks. Mahayati, Telukbetung Selatan	Bentuk arsitektur dan nilai historisnya
Pura Way Lunik	Bangunan peribadatan besar bagi umat Hindu
Monumen Krakatau (Taman Dipangga), Jl. W.R. Supratman, Telukbetung Utara	Monumen bersejarah dan taman
Museum Lampung "Ruwa Jurai", Jl. Z.A. P. Alam Gedung Meneng	Museum dengan koleksi hasil kebudayaan masyarakat Lampung
Anjungan Lampung, Way Halim	Pusat Cindera Mata, Kuliner dan Kegiatan Seni Budaya, serta Replika Rumah Adat Lima Belas kabupaten/kota.
Rumah Adat Lampung Dalam Olok Gading, Jl. Basuki Rachmat, Telukbetung Utara	Bentuk arsitektur tradisional Lampung
Taman Budaya, Jl. Cut Nyak Dien, Tanjung Karang Pusat	Taman tempat rekreasi dan pertunjukan budaya
Lamban Balak Kedatun Keagungan Lampung	Rumah adat, dan perabot peninggalan Kerajaan Lampung
Kampung De Berow	Replika Kapal De Berow di Kampung De" Brow
Situs Keratuan Dibalaw	Peninggalan sejarah kerajaan Keratuan Balau di kedamaian
Reservoir PDAM Way Rilau	Peninggalan sejarah Belanda di Imam Bonjol
Jembatan Beton	Peninggalan sejarah Belanda di Kecamatan Telukbetung Selatan
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD ) Peninggalan Belanda	Di Telukbetung Selatan



Objek Wisata Budaya	Alamat Objek Wisata Budaya
Stasiun Kereta Api Jl Kotaraja Tanjung Karang Pusat	Peninggalan sejarah Belanda
Rumah Adat Jajar Intan Kedamaian	Bentuk arsitektur tradisional Lampung
Gereja Marturia Jl Imam Bonjol Tanjung Karang	Peninggalan sejarah Belanda

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2021

## 17. Perpustakaan

Minat baca masyarakat Kota Bandar Lampung dapat terlihat dari jumlah pengunjung di perpustakaan daerah Kota Bandar Lampung. Pada kurun waktu dua tahun terakhir, jumlah pengunjung perpustakaan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2019 dilaksanakan pembangunan rehab kantor sebagai upaya peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana perpustakaan sehingga menyebabkan operasional perpustakaan terganggu. Sedangkan untuk penurunan jumlah pengunjung perpustakaan di Tahun 2020, lebih dikarenakan *Pandemi Covid-19* yang menyebabkan adanya pembatasan sosial sehingga mengakibatkan penurunan jumlah pengunjung perpustakaan secara drastis. Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Tahun 2016-2020:

Tabel 2.102 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Pengunjung (Orang)
2016	14.223
2017	11.284
2018	12.457
2019	8.012
2020	3.791

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung, 2021

Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah perpustakaan di Kota Bandar Lampung :

Tabel 2.103 Jumlah Perpustakaan di Kota Bandar Lampung

Uraian	Jumlah Perpustakaan
Perpustakaan Perguruan Tinggi	25
Perpustakaan Sekolah dan Madrasah	145
Perpustakaan Umum Kota	1
Perpustakaan Umum Kecamatan	8
Perpustakaan Umum Kelurahan	63

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung, 2021



Perpustakaan juga diarahkan untuk memperkuat perannya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan literasi serta dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan mengurangi kesenjangan akses informasi. Perpustakaan berbasis *Inklusi* sosial juga telah dilaksanakan antara lain dengan melakukan pendampingan ke TBM SURYA dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk dapat menciptakan usaha ekonomi baru serta memberikan bantuan buku yang berkaitan dengan kreativitas dan keterampilan.

## 18. Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pengelolaan, pembinaan serta pengawasan kearsipan dalam suatu sistem kearsipan yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Berikut adalah data arsip terpilah berupa arsip statis dan dinamis yang berasal dari masing-masing Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020 :

Tabel 2.104 Jumlah Data Arsip Terpilah Tahun 2016-2020

Tahun	Data Arsip Terpilah
2016	2.000 berkas
2017	2.205 berkas
2018	1.500 berkas
2019	2.400 berkas
2020	611 berkas

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung, 2021

### 2.1.4.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

#### 1. Kelautan dan Perikanan

##### a. Produksi Perikanan Per Tahun

Berikut adalah data yang menunjukkan produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Tahun 2016-2020:



Tabel 2.105 Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Tahun 2016-2020 (Ton)

Kategori	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi Perikanan Tangkap (ton)	628,76	613,10	3.200	3.404	3.232,02
Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	110,31	118,23	113,92	115,55	131,40
<b>Jumlah</b>	<b>739,07</b>	<b>731,33</b>	<b>3.313,92</b>	<b>3.519,55</b>	<b>3.363,42</b>

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung, 2021

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia serta sumber data yang terbatas hanya dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang ada di Kota Bandar Lampung menyebabkan pada tahun 2016 dan 2017 data produksi perikanan tangkap relatif rendah. Sejak tahun 2018 sumber data produksi perikanan tangkap diperluas yaitu (1) bersumber dari TPI atau disebut dengan sumber data pelabuhan dan (2) bersumber dari data yang bukan dari pelabuhan atau non pelabuhan. Sumber data non pelabuhan ini dijadikan data perikanan tangkap dikarenakan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kepada nelayan-nelayan skala kecil yang hasil tangkapannya tidak dilelang di TPI dikarenakan hasil tangkapannya tidak banyak. Namun demikian, jumlah nelayan kecil di Kota Bandar Lampung ini cukup banyak sehingga terjadi kenaikan produksi perikanan tangkap yang signifikan yang merupakan gabungan dari dua sumber data tersebut. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan produksi perikanan tangkap akibat adanya *Pandemi Covid-19* yang juga berdampak terhadap penjualan hasil tangkapan (ikan banyak tetapi pembelinya yang berkurang) sehingga trip untuk melakukan penangkapan ikan semakin jarang.

Adapun untuk perikanan budidaya terjadinya fluktuasi produksi perikanan budidaya disebabkan cuaca atau terjadinya musim kemarau yang cukup panjang dan juga terjadinya degradasi lahan yang banyak berubah menjadi Kawasan permukiman. Pada tahun 2019 dan 2020 terjadi peningkatan



produksi perikanan budidaya disebabkan oleh adanya bantuan sarana dan prasarana perikanan budidaya yang dananya bersumber dari APBN dan juga bantuan langsung dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada kelompok-kelompok pembudidaya ikan di Kota bandar Lampung baik berupa bantuan bibit/benih, pakan, *bioflog* dan juga pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh perikanan.

## 2. Pariwisata

### a. Kunjungan Wisata

Berikut adalah data kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Kota Bandar Lampung berdasarkan jumlah tamu hotel Tahun 2016-2020:

Tabel 2.106 Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020

Wisatawan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Nusantara	111.612	117.193	599.460	1.064.493	819.492
Mancanegara	313	339	4.589	22.218	1.767

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung, 2021

Keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Bandar Lampung khususnya pada sektor Pariwisata. Hal ini terlihat dengan adanya peningkatan kunjungan wisatawan berdasarkan jumlah tamu hotel baik wisatawan nusantara maupun mancanegara yang cukup signifikan pada Tahun 2019. Namun demikian pada tahun 2020 terjadi penurunan pada jumlah kunjungan wisatawan akibat *Pandemi Covid-19*.

## 3. Pertanian

### a. Produksi Tanaman Pangan

Berikut adalah data yang menunjukkan Produksi Tanaman Pangan di Tahun 2016-2020:



Tabel 2.107 Produksi Tanaman Pangan Tahun 2016–2020

Tanaman	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Padi Sawah</b>					
Luas panen (Ha)	1.740,3	1.702,4	1.658,90	1.637,60	1.226,3
Produksi (ton)	10.093,74	10.239,94	9.540,21	9.269,65	7.110,06
<b>Padi Ladang</b>					
Luas panen (Ha)	-	-	50	-	-
Produksi (ton)	-	-	287,54	-	-
<b>Ubi Kayu</b>					
Luas panen (Ha)	64	65	43	75	53
Produksi (ton)	1.477,6	1.501,3	982,55	1.785	1.245,5
<b>Ubi Jalar</b>					
Luas panen (Ha)	9	15	16	11	13
Produksi (ton)	84,3	140,63	148,00	107,50	117,87
<b>Jagung</b>					
Luas panen (Ha)	111	116	212,5	157	217
Produksi (ton)	530,68	556,8	1.005,22	771,91	1.066,55
<b>Kacang Tanah</b>					
Luas panen (Ha)	16	15	6	-	6
Produksi (ton)	17,04	16,07	8,1	-	8,2

Sumber : Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung, 2021

Terdapat penurunan luas panen dan produksi padi sawah sejak tahun 2017, demikian juga dengan produktivitasnya. Alih fungsi lahan seperti untuk perumahan, industri, dan penggunaan lainnya akan berpengaruh terhadap produksi pertanian dan luas panen di masa yang akan datang. Hal ini perlu disikapi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan mengaktifkan lahan pekarangan untuk dijadikan kebun rumah tangga. Diharapkan dengan adanya kebun rumah tangga ini akan menambah sisi ekonomi keluarga sekaligus menjaga ketahanan pangan dan produktivitas pertanian di Kota Bandar Lampung.

#### b. Produksi Tanaman Holtikultura (Sayuran)

Berikut adalah data yang menunjukkan Produktivitas Tanaman Sayuran Tahun 2016–2020:

Tabel 2.108 Produktivitas Tanaman Sayuran Tahun 2016–2020

Tanaman	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Buncis</b>					
Luas panen (Ha)	11	16	15	11	49
Produksi (ton)	238	14	9	9,3	296



Tanaman	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Kacang Panjang</b>					
Luas panen (Ha)	25	15	17	12	35
Produksi (ton)	274	21,8	13,7	14,9	163,5
<b>Kangkung</b>					
Luas panen (Ha)	136	108	103	99	107
Produksi (ton)	2.475	84,3	60,7	49,2	399,6
<b>Bayam</b>					
Luas panen (Ha)	132	105	91	94	88
Produksi (ton)	1.767	94,1	69,6	69,9	351,1
<b>Terong</b>					
Luas panen (Ha)	23	11	21	33	38
Produksi (ton)	307	42,1	21	69,9	351,1
<b>Ketimun</b>					
Luas panen (Ha)	8	12	17	19	16
Produksi (ton)	311	10,4	15,5	15,6	56,4
<b>Sawi</b>					
Luas panen (Ha)	146	116	114	117	108
Produksi (ton)	7.452	69,2	74,6	118,8	473,2
<b>Cabe</b>					
Luas panen (Ha)	20	25	24	23	132
Produksi (ton)	144	22,2	14,6	33	540,7
<b>Tomat</b>					
Luas panen (Ha)	18	18	17	17	37
Produksi (ton)	145	16,5	11,4	16,9	201,6

Sumber : Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung, 2021

Secara umum, terdapat peningkatan produksi tanaman sayuran pada Tahun 2020. Mengefektifkan lahan pekarangan untuk menjadi kebun rumah tangga juga menjadi solusi untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat dan produktivitas pertanian di Kota Bandar Lampung kedepan.

### c. Populasi Ternak

Berikut adalah data yang menunjukkan Populasi ternak Tahun 2016-2020:

Tabel 2.109 Populasi Ternak Besar, Kecil dan Unggas Tahun 2016-2020

Ternak	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2019
Sapi potong	1.491	1.189	1.246	1.108	1.064
Sapi perah	13	13	13	13	-
Kerbau	67	61	69	54	24
Kuda	30	25	25	36	70
Kambing	3.327	3.129	3.166	3.207	2.895
Kambing perah	37	21	21	8	-
Domba	401	345	385	358	295
Kelinci	1.620	1.558	1.575	1.055	690
Ayam Buras	39.940	38.174	38.413	29.339	26.250
Ayam Petelur	12.000	12.000	11.500	4.500	5.000
Ayam pedaging	23.000	23.000	21.500	12.700	24.500
Layer	-	-	-	-	-



Ternak	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2019
Broiler	-	-	-	-	-
Itik/entok	3.435	2.733	2.657	2.470	2.045
Puyuh	15.329	14.877	10.660	8.446	3.000
Merpati	5.211	5.048	4.752	4.643	3.901

Sumber : Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung, 2021

#### d. Kontribusi Kategori Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB

Berikut adalah data yang menunjukkan Kontribusi Kategori Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB Tahun 2016-2019:

Tabel 2.110 Persentase Kontribusi Kategori Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha	Tahun				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,32	4,08	3,85	3,70	3,77

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik 2021

Data tersebut menunjukkan bahwa Kontribusi Kategori Pertanian terhadap PDRB Kota Bandar Lampung cenderung menurun tiap tahunnya.

#### 4. Perdagangan

Berikut adalah data pasar tradisional dan pasar modern Tahun 2016-2020:

Tabel 2.111 Jumlah Pasar Tradisional dan Modern Tahun 2016-2020

Pasar	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tradisional	31	31	34	34	33
Moderen	16	22	21	22	31

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, 2021

Kontribusi kategori perdagangan (perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor) terhadap PDRB Kota Bandar Lampung selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 berturut-turut sebesar 14,68 persen; 14,19 persen; 14,15 persen; 14,36 persen dan 13,30 persen. Jika dilihat dari angka tersebut, kontribusi Kategori Perdagangan terhadap perekonomian Kota Bandar Lampung selama 5 tahun terakhir berada diatas





13 persen. Berikut adalah data Pertumbuhan Kategori Perdagangan Tahun 2016-2020:

Tabel 2.112 Persentase Pertumbuhan Kategori Perdagangan Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha	Tahun				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,60	3,96	4,19	6,09	-10,00

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik 2020

Data tersebut menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2016-2019, PDRB menurut lapangan usaha dengan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami peningkatan pertumbuhan setiap tahunnya. Namun pada Tahun 2020, pertumbuhan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berkontraksi sebesar 10,00 persen.

## 5. Perindustrian

Pertumbuhan Industri Kecil menengah di Kota Bandar Lampung cenderung berfluktuasi dari Tahun 2016-2020. Berikut data yang menunjukkan Pertumbuhan IKM Tahun 2016-2020:

Tabel 2.113 Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
IKM	6,09	5,85	3,61	4,03	2,38

Sumber : Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung, 2021

Berikut adalah data Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan Tahun 2016-2020:

Tabel 2.114 Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
Industri Pengolahan	6,25	6,02	6,12	6,86	-4,27

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik 2021



Data tersebut menunjukkan bahwa Kategori Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan yang cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Pada Tahun 2019 pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2018. Sedangkan Tahun 2020, pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan terkontraksi sebesar 4,27 persen.

## **6. Transmigrasi**

Urusan transmigrasi merupakan urusan pemerintahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dan urusan ini baru dilaksanakan pada Tahun 2017. Program transmigrasi di Kota Bandar Lampung bertujuan untuk membantu daerah-daerah yang padat penduduknya, terutama untuk wilayah kumuh yang padat penduduk.

Pada Tahun 2019 telah dilaksanakan sosialisasi di 5 (lima) kecamatan guna menjangkau animo masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi dengan peserta sebanyak 80 orang. Sehingga selama kurun waktu Tahun 2018 dan 2019 telah dilakukan sosialisasi di 10 (sepuluh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Panjang, Teluk Betung Selatan, Bumi Waras, Teluk Betung Timur, Teluk Betung Barat, Enggal, Way Halim, Tanjung Karang Pusat, Teluk Betung Utara, dan Tanjung Karang Timur. Pada Tahun 2020, sosialisasi program transmigrasi tidak dapat dilaksanakan karena terkendala adanya pandemi *Covid-19*.

### **2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH**

#### **2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

##### **1. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah**

Berikut adalah data Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020:



Tabel 2.115 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020

Tahun	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
2016	23,50
2017	29,44
2018	25,45
2019	27,34
2020	25,45

Sumber: BPPRD Kota Bandar Lampung, 2021

Data tersebut menunjukkan bahwa persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020 cenderung berfluktuasi, namun demikian jika dibandingkan dengan Tahun 2016, terjadi kenaikan persentase selama tahun 2017-2020. Tahun 2020 persentase pencapaian PAD sebesar 25,45 persen, menurun 2,14 persen dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 27,34 persen.

## 2. Opini Penilaian BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Berikut adalah Opini Penilaian BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016-2020:

Tabel 2.116 Opini Penilaian BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPKAD Kota Bandar Lampung, 2021

Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung selama kurun waktu 9 (delapan) tahun terakhir memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Capaian prestasi tersebut harus dipertahankan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.

## 3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bandar Lampung

Dalam lingkup Pemerintah Kota Bandar Lampung, BUMD merupakan unit usaha milik Pemerintah Kota Bandar Lampung. Alasan ekonomis yang biasanya dijadikan acuan pertama mendirikan BUMD adalah mengoptimalkan potensi ekonomi daerah dalam upaya menggali dan mengembangkan sumber daya daerah, memberikan pelayanan masyarakat



atau *public service*, dan mencari keuntungan. Alasan strategis mendirikan BUMD adalah mendirikan lembaga usaha yang melayani kepentingan publik.

Maksud dan tujuan Pemerintah Kota Bandar Lampung mendirikan PD/BUMD adalah :

- 1) Sebagai aparat perekonomian daerah dalam rangka mengisi otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab, PD/BUMD harus dapat membantu kelancaran pembangunan daerah;
- 2) Sebagai unit perekonomian daerah PD/BUMD harus mampu berfungsi sebagai aparat pengembangan dan pembangunan ekonomi daerah yang secara aktif langsung melakukan usaha-usaha di berbagai sektor industri, jasa, perdagangan disamping menyelenggarakan usaha pelayanan bagi masyarakat dan kemanfaatan umum, yang sekaligus sebagai penyedia lapangan kerja;
- 3) Sebagai sumber keuangan daerah guna meningkatkan kemampuan dan kekuatan daerah dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dan penyelenggaraan pelayanan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2018, PD BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung berubah bentuk badan hukum dan nama perusahaan daerah menjadi PT BPR Waway Lampung (Perseroda). Sehingga sampai dengan Tahun 2019 Kota Bandar Lampung memiliki 5 BUMD yaitu BPR Bank Waway, BPR Syariah Bandar Lampung, PDAM Way Rilau, PD Pasar dan PD Kebersihan; yang mana 2 (dua) PD berstatus Perseroan Terbatas (PT) yaitu BPR Bank Waway dan BPR Syariah.

Pada Tahun 2020 terdapat 3 (tiga) Perusahaan Daerah yang sedang mengajukan penyesuaian bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda), yaitu :

1. PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung;
2. PD Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung;
3. PD Kebersihan Tapis Berseri Kota Bandar Lampung.



Penyesuaian bentuk badan hukum ini sedang diproses di DPRD Kota Bandar Lampung dan diharapkan akan selesai di Tahun 2021. Dengan berubahnya bentuk badan hukum tersebut diharapkan dapat dilakukan penilaian terhadap nilai aset sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam menentukan arah kebijakan yang diambil oleh pengurus PD. Terkait dengan pencapaian kinerja BUMD Perusahaan Daerah sudah memiliki 5 (lima) perusahaan dalam kategori sehat yaitu:

1. PT BPR WAWAY Kota Bandar Lampung;
2. PT BPR SYARIAH;
3. PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung;
4. PD Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung;
5. PD Kebersihan Tapis Berseri Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung.

Berikut adalah data kontribusi masing-masing BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2020 :

Tabel 2.117 Kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2020

Nama BUMD	Jumlah Kontribusi Terhadap PAD(Rupiah)				
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
PDAM WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG	500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	5.000.000.000,00
PT. BPR WAWAY LAMPUNG (PERSERODA)	4.123.482.819,26	5.779.915.793,00	6.900.000.000,00	6.918.439.531,00	8.071.743.172,00
PT. BPR SYARIAH BANDAR LAMPUNG	0	398.991.172,00	967.691.015,00	1.280.088.574,00	1.404.034.830,00
PD PASAR TAPIS BERSERI	0	0	0	150.000.000,00	62.591.151,00
PD KEBERSIHAN TAPIS BERSERI	0	0	0	60.000.000,00	0

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kota Bandar Lampung, 2021

#### 4. Koperasi Sehat dan Cukup Sehat

Berikut adalah data perkembangan koperasi Tahun 2016-2020:

Tabel 2.118 Perkembangan Koperasi Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Koperasi	Unit	740	741	744	662	664
	Aktif	355	313	158	167	175
	Tidak Aktif	385	428	586	495	489
Anggota	Orang	102.088	91.966	91.370	84.878	82.814
Persentase Koperasi Aktif	%	47,97	42,24	21,23	25,22	26,35



Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Permodalan						
- Modal Sendiri	Rp. Milyar	246.547	260.397	276.107	284.529	309.839
- Modal Luar	Rp. Milyar	285.481	251.985	259.018	249.022	239.969
Volume Usaha	Rp. Milyar	562.868	512.359	500.887	488.676	464.635
Sisa Hasil Usaha	Rp. Milyar	30.436	29.605	31.123	29.856	32.156

Sumber : Dinas Koperasi UKM Kota Bandar Lampung, 2021

Keberadaan koperasi maupun usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang turut menopang perekonomian di Kota Bandar Lampung, namun masih belum banyak yang tergolong dalam kategori koperasi sehat dan cukup sehat. Koperasi tergolong sehat jika koperasi tersebut menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT), punya usaha yang jelas, ada iuran wajib dan sukerela, sisa hasil usaha (SHU) dibagi dan punya Nomor Induk Koperasi (NIK) dari Kementerian. Berikut adalah data perkembangan koperasi sehat Tahun 2016-2020:

Tabel 2.119 Perkembangan Koperasi Sehat Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
I.	Koperasi Aktif	355	313	158	167	175
II.	Yang sudah melaksanakan RAT	88	99	91	91	107
III.	Kategori Koperasi					
	Sehat	1	1	1	1	5
	Cukup Sehat	61	59	50	50	57
	Dalam Pengawasan	23	36	37	37	43
	Dalam Pengawasan Khusus	3	3	3	3	2

Sumber : Dinas Koperasi UKM Kota Bandar Lampung, 2021

Berikut adalah data Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat Tahun 2016-2020:

Tabel 2.120 Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat Tahun 2016-2020

Tahun	Koperasi Sehat dan Cukup Sehat
2016	2,70
2017	3,10
2018	4,03
2019	6,05
2020	8,28

Sumber : Dinas Koperasi UKM Kota Bandar Lampung, 2021



## 5. UMKM yang Memiliki Laba

Dalam perekonomian Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu, kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penguatan kelompok UMKM yang melibatkan banyak kelompok.

UMKM yang terdapat di semua sektor ekonomi merupakan usaha yang banyak memberikan lapangan usaha tanpa harus mempunyai jenjang pendidikan maupun keahlian khusus. Perkembangan jumlah UMKM di Kota Bandar Lampung cukup pesat dari tahun ke tahun, idealnya adalah jika perkembangan jumlah UMKM tersebut idealnya diikuti oleh laba usaha, sehingga UMKM tersebut dapat terus bertahan dan berkembang. Berikut adalah data perkembangan UMKM Tahun 2016-2020:

Tabel 2.121 Perkembangan UMKM Tahun 2016-2020

Tahun	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Jumlah Keseluruhan
2016	21.013	15.291	5.383	41.687
2017	23.494	15.350	5.388	44.232
2018	25.385	15.505	5.434	46.324
2019	30.696	15.568	5.445	51.709
2020	35.978	15.584	5.447	57.019

Sumber: Dinas Koperasi UKM Kota Bandar Lampung, 2021

Berikut adalah data UKM yang memiliki laba Tahun 2016-2020:

Tabel 2.122 Persentase UKM yang Memiliki Laba Tahun 2016-2020

Tahun	UKM yang Memilili Laba
2016	16,38
2017	16,67
2018	17,01
2019	16,85
2020	16,14

Sumber: Dinas Koperasi UKM Kota Bandar Lampung, 2021

## 6. Skor Pola Pangan Harapan

Masalah kekurangan gizi pada anak merupakan masalah gizi yang belum pernah tuntas. Tingkat konsumsi gizi yang masih rendah, tidak seimbang,



dan tidak beragam diduga berkorelasi dengan masih tingginya prevalensi pendek (*stunting*), berat badan kurang (*underweight*), dan kurus (*wasting*).

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan kedepan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan instrumen sederhana untuk menilai mutu gizi konsumsi pangan kelompok baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor. PPH juga sebagai instrumen untuk mengevaluasi pola konsumsi pangan masyarakat dan sekaligus sebagai bahan untuk merencanakan kebutuhan pangan tingkat regional dan nasional.

Penghitungan skor PPH dimaksudkan untuk menganalisis pola konsumsi pangan suatu masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang ideal (Pola Pangan Harapan). Skor PPH ini berfungsi sebagai :

- a. Indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi atau pangan;
- b. Baseline data untuk mengestimasi kebutuhan pangan ideal di suatu wilayah;
- c. Baseline data untuk menghitung proyeksi konsumsi dan penyediaan pangan ideal untuk suatu wilayah.

Beberapa hal yang mempengaruhi skor PPH konsumsi yaitu :

- ✓ Tingkat pendapatan masyarakat (Rumah Tangga);
- ✓ Pengetahuan masyarakat terutama ibu rumah tangga tentang pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) semakin membaik dengan adanya sosialisasi;
- ✓ Lingkungan (sumber daya/kebiasaan/budaya).





Berikut adalah data skor Pola Pangan Harapan Tahun 2016-2020:

Tabel 2.123 Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2016-2020

Tahun	Skor
2016	82,95
2017	83,00
2018	84,00
2019	85,20
2020	85,50

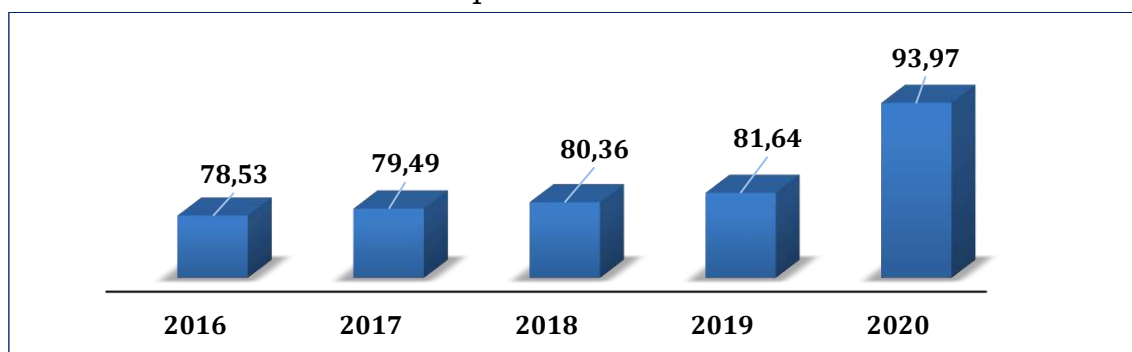
Sumber : Dinas Pangan Kota Bandar Lampung, 2021

#### 2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

##### 1. Kondisi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap

Berikut adalah data kondisi Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap Tahun 2016-2020 :

Diagram 2.20 Persentase Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, 2021

Sedangkan untuk Kondisi Jalan Kota dalam Kondisi Mantap Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.124 Persentase Kondisi Jalan Kota dalam Kondisi Mantap Tahun 2016-2020

Tahun	Kondisi Jalan Kota dalam Kondisi Mantap
2016	90,09
2017	79,49
2018	80,95
2019	81,64
2020	87,98

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, 2021



Dalam sistem jaringan jalan Nasional, pada Tahun 2017 sebagian besar jalan kota yaitu 683 ruas jalan atau sepanjang 528,426 Km yang kondisinya mantap beralih menjadi jalan lingkungan, jalan kota yang tersisa justru jalan kota dengan kondisi tidak mantap, sehingga pada Tahun 2017 kondisi jalan kota dalam kondisi mantap persentasenya menurun menjadi 79,49 persen. Namun demikian persentase kondisi jalan kota dalam kondisi mantap di Kota Bandar Lampung meningkat pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 dibandingkan Tahun 2017. Berikut data yang menggambarkan infrastruktur jalan Tahun 2016-2017:

Tabel 2.125 Infrastruktur Jalan Tahun 2016-2017

Status Jalan	2016		2017	
	Jumlah Ruas	Panjang (Km)	Jumlah Ruas	Panjang (Km)
Jalan Lingkungan	2.106	498,653	2.789	959,481
Jalan Kota	1.090	922,586	407	394,16
Jalan Provinsi	3	9,379	3	9,379
Jalan Nasional	12	57,65	12	57,65

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, 2018

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2021, pada kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 tidak terjadi perubahan data jumlah ruas maupun panjang Jalan Lingkungan, Jalan Kota, Jalan Propinsi maupun jalan Nasional. Jumlah ruas maupun panjang Jalan Lingkungan, Jalan Kota, Jalan Propinsi maupun jalan Nasional sama dengan Tahun 2017; sesuai dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 204.1/III.03/HK/2018 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Satusnya sebagai Jalan Kota di Kota Bandar Lampung.

Pembangunan *fly over* merupakan salah satu tindakan penyediaan prasarana transportasi untuk menambah kapasitas jalan sehingga dapat lebih banyak menampung volume lalu lintas dan memperlancar lalu lintas. Ketersediaan prasarana transportasi yang cukup efektif dapat memberikan keamanan dan keselamatan berkendara kepada para pelaku pergerakan. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan setiap tahun maka pembangunan



*fly over* perlu dilaksanakan untuk mengimbangi volume lalu lintas yang ditimbulkan oleh peningkatan jumlah kendaraan. Oleh karena itu, pada Tahun 2012, Pemerintah Kota Bandar Lampung memulai pembangunan *fly over* Sultan Agung-Riyacudu. Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah *fly over* di Kota Bandar Lampung yang telah terbangun:

Tabel 2.126 Jumlah *Fly Over* dan *Underpass*

FLY OVER	KETERANGAN
<i>Fly Over</i> Sultan Agung – Riyacudu	Sudah Terbangun
<i>Fly Over</i> Antasari – Tirtayasa	Sudah Terbangun
<i>Fly Over</i> Gajah Mada - Ir. Juanda	Sudah Terbangun
<i>Fly Over</i> Kimaja - Ratu Dibalau	Sudah Terbangun
<i>Fly Over</i> Gajah Mada - Antasari	Sudah Terbangun
<i>Fly Over</i> Teuku Umar (MBK)	Sudah Terbangun
<i>Fly Over</i> Cik Dik Tiro - Pramuka	Sudah Terbangun
<i>Fly Over</i> Pramuka – Indra Bangsawan	Sudah Terbangun
<i>Underpass</i> Pagar Alam – Soemantri BJ	Sudah Terbangun
<i>Fly Over</i> Untung Suropati – RA. Basyid	Sudah Terbangun
<i>Fly Over</i> Abdul Haq – Komarudin	Sudah Terbangun
<i>Fly Over</i> Sultan Agung	Sudah Terbangun

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, 2021

## 2. Pengelolaan Drainase

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, *drainase* Kota Bandar Lampung pada Tahun 2020 sepanjang 117,551 km. Terdapat beberapa sistem *Drainase* yang direncanakan di Kota Bandar Lampung diantaranya adalah:

### a. Sistem *Drainase* permukaan

Dilakukan dengan membuat penampungan kemudian dengan sistem retensi air akan diresapkan kedalam tanah dengan menggunakan sumur-sumur resapan dan sisanya akan merupakan limpasan permukaan yang akan ditampung oleh sistem *drainase* yang ada.

### b. Sistem *Drainase* terpadu

a. Pada bagian atas saluran akan dimanfaatkan sebagai prasarana umum, seperti sambungan telephon, listrik bawah tanah, pipa air minum dan lain-lain.

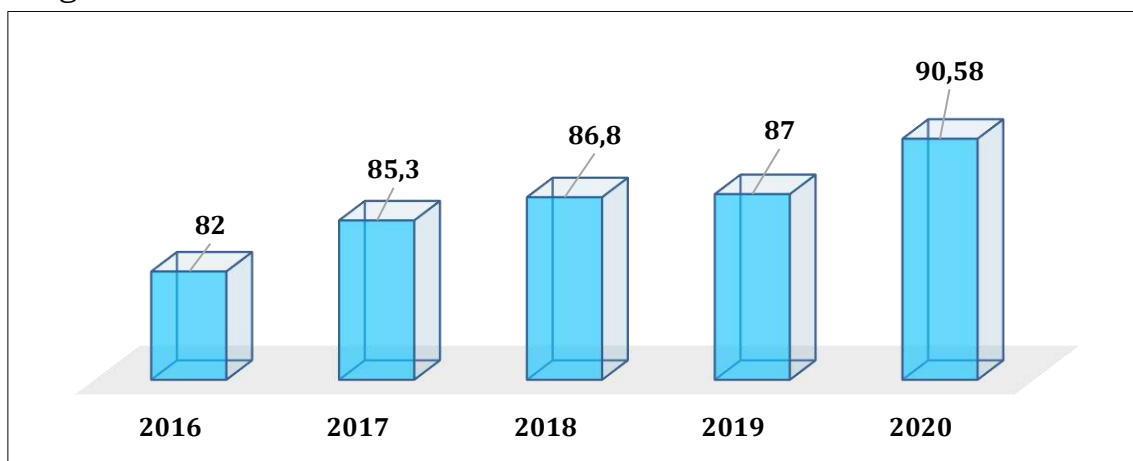
b. Pada bagian bawah saluran dimanfaatkan sebagai saluran *drainase*, seperti limbah rumah tangga dan air hujan pada musim hujan.



- c. Pada sistem *drainase* terpadu akan dibuatkan tempat-tempat penampungan sampah sehingga sampah yang ada tidak langsung terbawa dan masuk pada sistem Drainase yang ada.
- c. Sistem *Drainase* secara retensi  
Dilakukan dengan membuat kolam-kolam di sekitar hunian atau pada daerah yang lebih luas sehingga dapat digunakan untuk menyimpan air dan penanggulangan banjir.
- d. Sistem *Drainase* secara infiltrasi  
Diterapkan pada daerah yang padat penduduknya dengan menggunakan:
  - a. *Drainase* sumur resapan, dimaksudkan menampung air dari atap yang diteruskan melalui selokan keliling tritisan kemudian masuk kedalam sumur resapan. Resapan ini dilengkapi dengan pipa peluap untuk menyalurkan air ke saluran *drainase* jika air mengalami kelebihan.
  - b. *Drainase* saluran porous, diterapkan pada kawasan permukiman yang elevasi air tanahnya tidak terlalu dalam.

Berikut adalah data persentase drainase dalam kondisi baik Tahun 2016-2020:

Diagram 2.21 Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, 2021



Gambar 2.9 Peta Sungai dan Jaringan Drainase

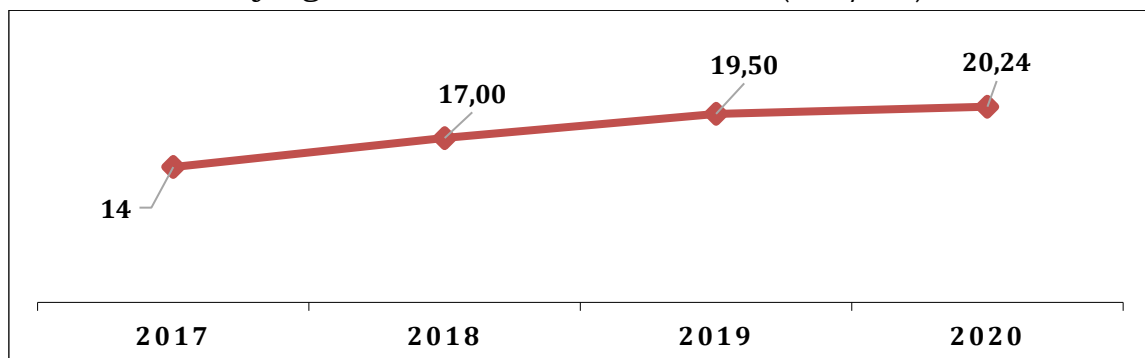


Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2021

### 3. Penerangan Jalan Umum

Penerangan jalan umum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari adanya jalan. Tujuan utama dari penerangan jalan adalah untuk menghasilkan kecepatan, keakuratan, dan kenyamanan penglihatan di waktu malam hari, menjaga kualitas jarak pandang, serta memudahkan bagi kendaraan yang melintas dan juga pejalan kaki. Fungsi penerangan jalan umum selain untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengendara, khususnya untuk mengantisipasi situasi perjalanan pada malam hari juga untuk keamanan lingkungan atau mencegah kriminalitas serta untuk memberikan kenyamanan dan keindahan lingkungan jalan. Berikut adalah data Rasio jumlah lampu penerangan jalan umum terhadap panjang jalan kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020 :

Grafik 2.11 Rasio Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum terhadap Panjang Jalan Kota Tahun 2016-2020 (titik/km)



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, 2021



Dengan demikian artinya pada tahun 2020 setiap 1 km jalan kota memiliki 20,24 titik lampu jalan.

#### 4. Kondisi Transportasi Kota Bandar Lampung

##### (a) Aspek Angkutan Umum

Pelayanan transportasi yang ada saat ini dilayani oleh :

##### 1. Bus Rapi Trans (BRT) Bandar Lampung

Berikut adalah data jumlah Bus Rapi Transit (BRT) Bandar Lampung Tahun 2016-2020 :

Tabel 2.127 Bus Rapi Transit Bandar Lampung Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah BRT
2016	59
2017	59
2018	23
2019	30
2020	30

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2021

Jumlah Bus Rapi Trans (BRT) dengan rute pelayanan di gambarkan pada tabel bawah ini :

Tabel 2.128 Pelayanan Bus Rapi Trans Bandar Lampung Tahun 2017-2020

Jurusan	Jumlah (unit)		
	2017	2018	2019 dan 2020
Rajabasa –	20	0	0
Korpri – Sukaraja	16	0	0
Rajabasa – Panjang	23	23	20 Via Soekarno Hatta (Swasta) 10 Via Kota (Pemkot Bandar)

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2021

##### 2. Angkutan Perkotaan

Berikut adalah data jumlah Angkutan Perkotaan dan jumlah trayek angkutan pada Tahun 2016-2020:



Tabel 2.129 Angkutan Perkotaan Bandar Lampung Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Angkutan Perkotaan
2016	477
2017	143
2018	107
2019	107
2020	29

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2021

Tabel 2.130 Jurusan, Warna dan Jumlah Trayek Angkutan Tahun 2016-2020

Jurusan	Warna	Jumlah Trayek				
		2016	2017	2018	2019	2020
T.Karang – Rajabasa	Biru Laut	148	68	4	4	1
T.Karang - Sukaraja	Ungu	105	53	13	13	1
Sukaraja – Serengsem	Orange	112	69	21	21	6
T.Karang – Garuntang	Hijau	73	27	5	5	3
T. Karang – Way Kandis	Cream	97	40	6	6	-
T.Karang - Jl. P.Tirtayasa – Ir. Sutami	Putih/Hijau	42	22	14	14	2
Tanjung Karang – Kemiling	Merah Hati	125	80	23	23	9
Tanjung – Sukarame	Abu-Abu	105	41	1	1	-
Tanjung Sukarame – Permata Biru	Abu-Abu/Biru	46	25	7	7	2
Tanjung Karang – Sam Ratulangi	Merah/Biru	76	41	10	10	5
Pasar Cimeng-Lemapasing	Biru Dongker	17	2	1	1	-
Sukaraja – Lempasing	Biru Dongker	21	7	2	2	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2021

### 3. Angkutan Aglomerasi

Angkutan aglomerasi tidak dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

### 4. Angkutan Taksi

Angkutan Taksi Perkotaan berbasis Argometer tidak dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

### 5. Angkutan Berbasis Online

Terdapat beberapa perusahaan berbasis online yang membantu pelayanan angkutan yaitu Grab, Go-Jek, dan Maxim.



## **(b) Aspek Lalu Lintas**

Kota Bandar Lampung sebagai pusat pemerintahan Provinsi Lampung mengalami perkembangan kehidupan kota yang dinamis. Pertambahan jumlah penduduk dan dinamika kehidupan penduduk kota mendorong bertambahnya prasarana sarana perkotaan seperti perumahan, kendaraan, jaringan jalan, dan sarana-sarana perkotaan lainnya. Kondisi tersebut juga berdampak pada perubahan dan terjadinya alih fungsi lahan kota. Kawasan yang dulunya hanya lahan kosong sekarang sudah banyak beralih fungsi menjadi pemukiman maupun pusat perdagangan.

Pergerakan Lalu Lintas Kota Bandar Lampung saat ini sangat pesat dan dapat melayani sampai ke wilayah yang berbatasan dengan wilayah Kota Bandar Lampung. Kondisi tingkat pelayanan lalu lintas saat ini sebagai berikut :

- a. Tingkat pelayanan pada Jalan arteri primer  
Tingkat pelayanan jalan pada beberapa jalan arteri primer di Kota Bandar Lampung adalah C seperti Jl. Soekarno Hatta
- b. Tingkat pelayanan pada Jalan arteri sekunder  
Tingkat pelayanan jalan pada beberapa jalan arteri sekunder di Kota Bandar Lampung adalah C seperti Jl. ZA. Pagar Alam.
- c. Tingkat pelayanan pada Jalan kolektor primer  
Tingkat pelayanan jalan pada beberapa jalan kolektor primer di Kota Bandar Lampung adalah D seperti Jl. RA. Kartini.
- d. Tingkat pelayanan pada Jalan kolektor sekunder  
Tingkat pelayanan jalan pada beberapa jalan kolektor sekunder di Kota Bandar Lampung adalah C seperti Jl. Urip Sumoharjo.
- e. Tingkat pelayanan pada Jalan lokal sekunder  
Tingkat pelayanan jalan pada beberapa jalan lokal sekunder di Kota Bandar Lampung adalah B seperti Jl. M. Yamin.





Kondisi fasilitas pendukung jalan yang ada di Kota Bandar Lampung :

(1) Marka Jalan

Berikut adalah data jumlah marka jalan yang dikerjakan pada Tahun 2016-2020 :

Tabel 2.131 Marka Jalan yang dikerjakan Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah
2016	5.276,84 m <sup>2</sup>
2017	3.982 m <sup>2</sup>
2018	7.000 m <sup>2</sup>
2019	2.792,57 m <sup>2</sup>
2020	24.781,01 m <sup>2</sup>

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2021

(2) Rambu Jalan

Berikut adalah data jumlah rambu – rambu lalu lintas Tahun 2016-2020:

Tabel 2.132 Jumlah Rambu Lalu Lintas Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rambu kondisi baik	573	543	681	974	1.117
Rambu kondisi rusak	88	88	88	-	-
Rambu kondisi hilang	32	32	32	7	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2021

(3) Persimpangan

Berikut adalah data jumlah persimpangan Tahun 2016-2020:

Tabel 2.133 Jumlah Persimpangan Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Simpang Tiga Prioritas	36	36	44	45	44
Simpang Tiga APILL	10	13	9	10	7
Simpang Tiga Bundaran	-	-	-	-	3
Simpang Tiga Fly Over	-	-	-	-	3
Simpang Tiga Underpass	-	-	-	-	1
Simpang Empat Prioritas	6	6	11	9	9
Simpang Empat APILL	14	18	19	14	12
Simpang Ema	-	-	-	-	7

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2021



### (c) Data Kasus/Kejadian Kecelakaan per Tahun

Berikut adalah data kejadian kecelakaan Tahun 2016-2020:

Tabel 2.134 Kasus/Kejadian Kecelakaan Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Kejadian
2016	415
2017	297
2018	241
2019	297
2020	220

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2021

Berdasarkan data kecelakaan POLRESTA Kota Bandar Lampung, jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas selama 4 (empat) tahun terakhir berfluktuasi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa diperlukan berbagai upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Bandar Lampung. Namun demikian terjadi penurunan kejadian kecelakaan pada Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2019.

### 5. Cakupan Layanan TIK (Telekomunikasi, Informasi, dan Komunikasi)

Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah jaringan komunikasi Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020:

Tabel 2.135 Jumlah Jaringan Komunikasi Tahun 2016-2020

Keterangan	Jumlah Jaringan Komunikasi (Unit)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Menara di atas Gedung	149	145	171	184	165
Menara di atas tanah	312	356	342	378	393
Menara eksisting	438	501	513	562	558
Menara baru	13	7	9	-	-
Menara terbangun	13	-	-	-	-
Menara tahap pembangunan	3	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>929</b>	<b>1.009</b>	<b>1.035</b>	<b>1.124</b>	<b>1.116</b>

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandar Lampung, 2021

Data tersebut menunjukkan Kota Bandar Lampung sudah memiliki ketersediaan sarana dan prasarana untuk informasi dan telekomunikasi yang mendukung kegiatan masyarakat dan pembangunan.



## 6. Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai Peruntukannya

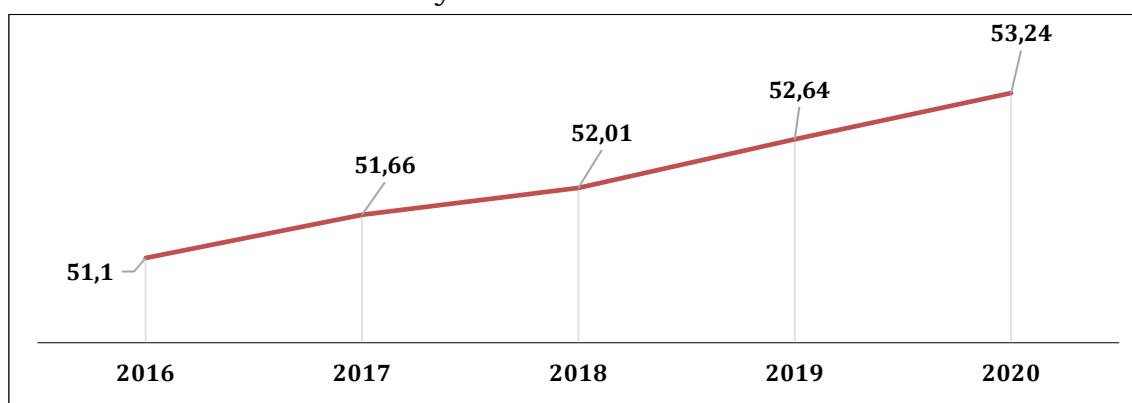
Berikut adalah data yang menunjukkan pelanggaran PERDA Penataan Ruang Tahun 2016-2020:

Tabel 2.136 Pelanggaran Peraturan Daerah Penataan Ruang Tahun 2016-2020

Uraian	Jumlah /Kasus				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase pelanggaran PERDA Penataan Ruang yang ditangani	50,00%	64,36 %	74,02%	79,23%	58,51%
Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang	357	188	154	130	94
- Yang terselesaikan	229	121	114	103	55
- Yang terus ditangani untuk dilakukan penyesuaian aturan	128	67	40	27	39

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2021

Grafik 2.12 Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Peruntukannya Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2021

## 7. Indeks Resiko Bencana

Seperti halnya Kota besar lainnya di Indonesia, Kota Bandar Lampung juga menghadapi berbagai macam permasalahan bencana. Berikut ini adalah indeks Resiko Bencana Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020 :

Tabel 2.137 Indeks Resiko Bencana Tahun 2016-2020

Tahun	Indeks	Kategori
2016	182	Tinggi
2017	182	Tinggi
2018	165,56	Tinggi
2019	155,80	Tinggi
2020	152,816 <sup>*)</sup>	Tinggi

Sumber : [www.inarisk, bnpb.go.id](http://www.inarisk, bnpb.go.id) ; <sup>\*)</sup> angka proyeksi



Kelurahan siaga bencana merupakan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana berbasis komunitas. Setiap kelurahan siaga bencana diharapkan sudah mengetahui apa yang harus dilakukan, terutama mengenai keselamatan mereka jika terjadi bencana alam, jadi BPBD Kota Bandar Lampung tinggal mengingatkan saja. Setiap kelurahan siaga bencana diberikan pengetahuan mengenai mitigasi bencana, terutama untuk jenis bencana yang rawan terjadi di daerah tersebut. Sampai dengan Tahun 2020, telah ditetapkan 2 (dua) Kelurahan Siaga Bencana di Kota Bandar Lampung yaitu Kelurahan Kota Karang dan Kelurahan Kota Karang Raya.

## 8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah Indeks Kualitas/ Pencemaran Air, Indeks Kualitas/Pencemaran Udara, dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan. Berikut adalah data IKLH Tahun 2016-2020:

Tabel 2.138 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020

Tahun	IKLH
2016	54,00
2017	55,00
2018	55,00
2019	55,00
2020	60,32

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, 2021

### 2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

#### 1. Angka Kriminalitas

Berikut adalah data jumlah tindak kriminalitas Tahun 2016-2020:

Tabel 2.139 Jumlah Tindak Kriminalitas Tahun 2016-2020

Tahun	Kriminalitas
2016	3.293
2017	3.173



Tahun	Kriminalitas
2018	1.870
2019	1.734
2020	3.349

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung, 2021

## 2. Lama Proses Perizinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan, kemudahan dalam memperoleh perijinan dan berapa lama proses dilakukan. Berikut adalah data yang menunjukkan jenis dan lama proses perizinan di Kota Bandar Lampung.

Tabel 2.140 Jenis dan Standar Waktu dalam Penyelesaian Izin

Jenis Perizinan	Waktu Penyelesaian
Izin Prinsip Penanaman Modal	3 (tiga) hari kerja
Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	3 (tiga) hari kerja
Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	5 (lima) hari kerja
Izin Usaha Penanaman Modal	6 (enam) hari kerja
Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)	5 (lima) hari kerja
Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	5 (lima) hari kerja
Izin Usaha Industri (IUI)	7 (tujuh) hari kerja
Keterangan Rencana Kota (K RK)	7 (tujuh) hari kerja
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	15 (lima belas) hari kerja
Izin Pendahuluan Membangun (IPM)	15 (lima belas) hr kerja
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	3 (tiga) hari kerja
Izin Gangguan (HO) Dicabut berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2017	-
Izin Peletakan Titik Reklame (IPTR)	7 (tujuh) hari kerja
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3 (tiga) hari kerja
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	3 (tiga) hari kerja
Tanda Daftar Gudang (TDG)	5 (lima) hari kerja
Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	7 (tujuh) hari kerja
Izin Usaha Angkutan (IUA)	1 (satu) hari kerja
Izin Usaha Toko Moderen (IUTM)	5 (lima) hari kerja
Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)	5 (lima) hari kerja
Tanda Daftar Industri (TDI)	5 (lima) hari kerja
Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)	5 (lima) hari kerja

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung, 2020



### **3. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah**

Dukungan Pemerintah dalam rangka menciptakan iklim berinvestasi yang kondusif berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perizinan Daerah pada pasal 15 yaitu Pemberian insentif dan pemberian kemudahan perizinan.

- 1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan dalam perizinan dan penanaman modal kepada perseorangan dan/atau badan hukum yang akan melaksanakan kegiatan usahanya.
- 2) Pemberian insentif dapat berbentuk :
  - a. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah
  - b. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah
- 3) Pemberian kemudahan dapat berbentuk :
  - a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal
  - b. Percepatan pemberian perizinan
  - c. Pemberian bantuan teknis
- 4) Jenis atau bidang usaha yang dapat memperoleh insentif dan/atau kemudahan dalam pemberian perizinan dan penanaman modal meliputi:
  - a. Usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi
  - b. Usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan
  - c. Usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya
  - d. Usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu
  - e. Usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus
- 5) Sektor atau usaha kegiatan yang dapat memperoleh insentif dan/atau kemudahan dalam pemberiaan perizinan dan penanaman modal meliputi:
  - a. Sektor listrik, gas dan air bersih
  - b. Sektor kontruksi dan bangunan
  - c. Sektor pariwisata dan kebudayaan termasuk sektor pendukungnya
  - d. Sektor industri diprioritaskan industri yang ramah lingkungan
  - e. Sektor transportasi dan komunikasi



Adapun Jumlah dan Macam Pajak serta Retribusi Daerah di Kota Bandar Lampung ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.141 Jumlah dan Macam Pajak serta Retribusi Daerah

Jenis Pajak dan Retribusi	Tahun	
	2019	2020
Pajak Hotel	8	8
Pajak Restoran	5	5
Pajak Hiburan	9	9
Pajak Reklame	9	9
Pajak Penerangan Jalan	1	1
Pajak Batuan Bukan Logam	1	1
Pajak Parkir	1	1
Pajak Air Tanah	1	1
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1	1
Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan	1	1
Retribusi Jasa Umum	7	7
Retribusi Jasa Usaha	9	6
Retribusi Perizinan Tertentu	2	2

Sumber: BPPRD Kota Bandar Lampung, 2021

#### 2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

##### 1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Berikut adalah data TPT Tahun 2016-2020 :

Tabel 2.142 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
TPT	8,10	8,10	7,28	7,12	8,78

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

##### 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Besarnya jumlah penduduk usia kerja berkaitan erat dengan besarnya penduduk itu sendiri, karena penduduk usia kerja merupakan segmen dari jumlah total penduduk secara keseluruhan. Dari total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), lebih dari separuh penduduk Bandar Lampung termasuk dalam angkatan kerja. Berikut adalah data TPAK Tahun 2016-2020:



Tabel 2.143 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
TPAK	63,41	63,41	65,92	65,52	67,79

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

### 3. Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bandar Lampung

Berikut adalah data yang menunjukkan Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020:

Tabel 2.144 Jumlah Aparatur Sipil Negara Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020 (orang)

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
PNS	9.716	9.353	8.836	8.347	8.478
ASN	4.193	4.385	4.643	5.005	5.401

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung, 2021

## 2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

### 2.2.1 Evaluasi Capaian Target Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD sampai Tahun 2020

Pencapaian target kinerja Tujuan dan Sasaran daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 yang diturunkan dalam Dokumen RKPD Kota Bandar Lampung selama kurun waktu 2016-2020 disajikan dalam Tabel 2.133. Untuk capaian kinerja indikator sasaran Tahun 2020, belum semua indikator dapat diukur, dikarenakan data capaian kinerja sasaran menggunakan data yang di rilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Terkait. Oleh karena itu, untuk capaian indikator sasaran yang data nya belum ada pada Tahun 2020 ditandai dengan \*), maka masih menggunakan data capaian kinerja tahun lalu dan atau data proyeksi.

Evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD dapat dilihat dari tingkat pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah yang mengindikasikan ukuran keberhasilan pencapaian RPJMD selama periode perencanaan. Berdasarkan Tabel T-E.1 dalam Lampiran Peraturan





Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka evaluasi kinerja dilakukan dengan mengukur capaian target kinerja setiap indikator tujuan dan sasaran yang kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tingkat capaian kinerja masing-masing indikator. Klasifikasi/interval capaian kinerja dijelaskan sebagai berikut :

No	Interval Nilai Realiasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi (ST)
2	$76 \leq 90$	Tinggi (T)
3	$66 \leq 75$	Sedang (S)
4	$51 \leq 65$	Rendah (R)
5	$\leq 50$	Sangat Rendah (SR)

Di dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 terdapat tujuh (7) tujuan dengan delapan belas (18) indikator yang rencananya akan dicapai pada akhir periode perencanaan (tahun 2020). Adapun sasarannya sebanyak sembilan belas (19) sasaran dengan empat puluh lima (45) indikator dengan target pertahun.

### **Capaian Kinerja Tujuan**

Secara rinci capaian dari delapan belas (18) indikator tujuan sampai dengan Tahun 2020 (akhir periode perencanaan) dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 13 indikator capaiannya masuk kategori sangat tinggi, 2 indikator capaiannya masuk kategori tinggi, 1 indikator capaiannya masuk kategori sedang, 0 indikator capaiannya masuk kategori rendah dan 2 indikator capaiannya masuk kategori sangat Rendah.



Berdasarkan hasil klasifikasi tersebut dan dengan mengacu pada gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Capaian kategori sangat tinggi dan tinggi sebesar 83,33 persen.  
Hal ini dapat dimaknai bahwa 83,33 persen pencapaian (realisasi kinerja capaian) indikator tujuan telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja
2. Capaian kategori sedang sebesar 5,56 persen  
Hal ini dapat dimaknai bahwa 5,56 persen pencapaian (realisasi kinerja capaian) indikator tujuan telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Capaian kategori rendah dan sangat rendah sebesar 11,11 persen.  
Hal ini dapat dimaknai bahwa 11,11 persen pencapaian (realisasi kinerja capaian) indikator belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa indikator tujuan yang telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja mencapai 83,33 persen dan indikator tujuan yang telah memenuhi target sebesar 5,56 persen. Faktor dapat tercapainya target tersebut adalah adanya komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap rencana pembangunan yang telah dibuat baik rencana pembangunan jangka menengah maupun rencana pembangunan tahunan yang didukung oleh sinergitas yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah maupun dengan para pemangku kepentingan dalam menciptakan kondisi yang kondusif didalam pembangunan yang dilaksanakan di Kota Bandar Lampung.

### **Indikator Tujuan yang masuk kategori sedang**

Terdapat satu Indikator tujuan yang masuk kategori sedang yakni **Indeks RB (Reformasi Birokrasi)** pada misi keenam tujuan 6.1. (Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel,



Transparan, Taat Hukum, Partisipatif, Demokratis, dan Responsif). Target tahun 2020 (akhir periode perencanaan) sebesar 87,00 sedangkan realisasi pada tahun 2020 sebesar 59,98 atau Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2020 sebesar 68,94 persen.

Tidak tercapainya target indikator tujuan Indeks RB (Reformasi Birokrasi) tersebut disebabkan target yang ditetapkan dalam RPJMD terlalu tinggi dikarenakan dasar yang dipakai dalam menentukan target (pada awal perencanaan) adalah realisasi hasil penilain mandiri dari APIP Inspektorat Kota Bandar Lampung (hasil penginputan nilai) pada tahun 2016 terhadap pelayanan publik di Kota Bandar Lampung. Adapun nilai capaian/realisasi indikator tujuan Indeks RB (Reformasi Birokrasi) merupakan hasil penilaian dari KemenPanRB terkait pelaksanaan pemerintahan di Kota Bandar Lampung yang dilihat dari beberapa komponen dengan standar/ukuran tertentu sehingga nilai capaian target indikator tujuan Indeks RB (Reformasi Birokrasi) pada tahun 2020 masuk dalam klasifikasi sedang atau telah memenuhi persyaratan minimal.

### **Indikator Tujuan yang masuk kategori sangat rendah**

Dua indikator tujuan yang masuk kategori sangat rendah yakni:

- 1. Indikator tujuan Pertumbuhan Ekonomi** pada misi keempat tujuan 4.1. (Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi, Struktur Perekonomian yang Kokoh serta Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat). Target tahun 2020 / akhir periode perencanaan sebesar 6,89 persen sedangkan realisasi pada tahun 2020 terkontraksi sebesar -1,85 persen atau Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2020 sebesar -26,85 persen.

Tidak tercapainya indikator pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020 yang berdampak terhadap perekonomian global, nasional dan Kota Bandar Lampung. Akibat Covid-19, perekonomian Kota Bandar



Lampung pada tahun 2020 terkontraksi sebesar 1,85 persen namun jika dilihat dari capaian pertumbuhan ekonomi dari tahun 2016 s.d. 2019, pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung selalu diatas 6 persen.

**2. Indikator tujuan Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Lestari** pada misi kelima tujuan 5.1 (Terwujudnya Masyarakat yang Aman, Tertib, dan Memelihara Warisan Budaya). Target 2020 / akhir periode perencanaan sebanyak 4 sedangkan sampai dengan tahun 2020 tidak terealisasi atau Tingkat Capaian Kinerja s.d Tahun 2020 sebesar 0 persen.

Tidak tercapainya indikator tersebut dikarenakan pada saat perencanaan awal dalam penyusunan indikator tersebut belum ada pemahanan yang utuh mengenai Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya. Padahal untuk dapat dinyatakan sebagai benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya, ada beberapa ketentuan/kriteria yang harus dipenuhi dan ada penetapan dari Kementerian yang terkait. Dengan merujuk pada dua hal tersebut maka di Kota Bandar Lampung dapat dikatakan belum memiliki Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya sehingga indikator tersebut tidak dapat terlaksana.

### ***Capaian Kinerja Sasaran***

Jika dilihat capaian target dari empat puluh lima (45) indikator sasaran secara rinci tingkat pencapaian indikator sasaran/kinerja sampai dengan Tahun 2020/ akhir periode perencanaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: capaian 27 indikator masuk kategori sangat tinggi, capaian 10 indikator masuk kategori tinggi, capaian 2 indikator masuk kategori sedang, capaian 2 indikator masuk kategori rendah, dan capaian 4 indikator masuk kategori sangat rendah.



Berdasarkan hasil klasifikasi tersebut diatas dan dengan mengacu pada gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Capaian kategori sangat tinggi dan tinggi sebesar 82,22 persen.  
Hal ini dapat dimaknai bahwa 82,22 persen pencapaian (realisasi kinerja capaian) indikator sasaran telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2. Capaian kategori sedang sebesar 4,44 persen  
Hal ini dapat dimaknai bahwa 4,44 persen pencapaian (realisasi kinerja capaian) indikator sasaran telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Capaian kategori rendah dan sangat rendah sebesar 13,33 persen.  
Hal ini dapat dimaknai bahwa 13,33 persen pencapaian (realisasi kinerja capaian) indikator sasaran belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa indikator sasaran yang telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja mencapai 82,22 persen dan indikator sasaran yang telah memenuhi target sebesar 4,44 persen. Faktor dapat tercapainya target tersebut adalah adanya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan melalui arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang dibuat dan pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang langsung terhadap pencapain ssasaran dalam rencana pembangunan tahunan. selanjutnya berikut adalah urian mengenai indikator sasaran yang masuk kategori sedang, rendah dan sangat rendah.

### **Indikator Sasaran yang masuk kategori sedang**

Terdapat Dua indikator sasaran yang masuk kategori sedang yakni:

1. Indikator Jumlah Kasus/Kejadian Kecelakaan per Tahun pada Misi ketiga tujuan 3.1. (Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kota



Bandar Lampung dalam Kondisi Mantap yang Berwawasan Lingkungan), sasaran 3.1.1 (Meningkatnya Mobilitas dan Aksesibilitas Masyarakat Antarwilayah serta Keselamatan Transportasi). Target 2020/akhir periode perencanaan sebanyak 158 kejadian sedangkan realisasi tahun 2020 sebesar 220 kejadian atau Tingkat Capaian Kinerja tahun 2020 sebesar 71,82 persen. Data Kasus/Kejadian Kecelakaan tersebut merupakan data dari Satlantas Polresta Bandar Lampung.

Tidak tercapainya indikator ini disebabkan Kasus/Kejadian Kecelakaan merupakan sesuatu yang *unconditional* artinya terdapat beberapa hal yang tidak bisa dikondisikan (diluar kendali). Hal ini karena banyak faktor yang mempengaruhinya dan diluar kendali Pemerintah Kota Bandar Lampung, seperti perilaku ketertiban berlalu lintas para pemakai jalan raya secara umum. Walaupun demikian pemerintah Kota Bandar Lampung selalu berupaya untuk mengambil perannya seperti melakukan pengaturan/penertiban lalu lintas angkutan jalan yang baik bagi para pengguna jalan raya maupun penyediaan sarana prasarana jalan raya yang memadai.

2. Indikator Indeks RB (Reformasi Birokrasi) pada misi keenam tujuan 6.1. (Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan, Taat Hukum, Partisipatif, Demokratis, dan Responsif), sasaran 6.1.1 (Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung). Target tahun 2020 (akhir periode perencanaan) sebesar 87,00 sedangkan realisasi pada tahun 2020 sebesar 59,98 atau Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2020 sebesar 68,94 persen.

Tidak tercapainya target indikator tujuan Indeks RB (Reformasi Birokrasi) tersebut disebabkan target yang ditetapkan dalam RPJMD terlalu tinggi dikarenakan dasar yang dipakai dalam menentukan target (pada awal perencanaan) adalah realisasi hasil penilaian



mandiri dari APIP Inspektorat Kota Bandar Lampung (hasil penginputan nilai) pada tahun 2016 terhadap pelayanan publik di Kota Bandar Lampung. Adapun nilai capaian/realisasi indikator tujuan Indeks RB (Reformasi Birokrasi) merupakan hasil penilaian dari KemenPanRB terkait pelaksanaan pemerintahan di Kota Bandar Lampung yang dilihat dari beberapa komponen dengan standar/ukuran tertentu sehingga nilai capaian target indikator tujuan Indeks RB (Reformasi Birokrasi) pada tahun 2017 s.d. 2020 masuk dalam klasifikasi sedang atau telah memenuhi persyaratan minimal.

### **Indikator Sasaran yang masuk kategori rendah**

Terdapat Dua indikator sasaran yang masuk kategori rendah yakni

1. Indikator Jumlah Pemuda Pelopor pada misi kedua tujuan 2.1. (Meningkatnya Ketersediaan Layanan Pendidikan yang Bermutu dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat), sasaran 2.1.2 (Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga). Target 2020/akhir periode perencanaan sebesar 14 orang sedangkan realisasi s.d 2020 sebesar 8 orang atau Tingkat Capaian Kinerja s.d Tahun 2020 sebesar 57,14 persen.

Tidak tercapainya kinerja indikator Jumlah Pemuda Pelopor tersebut dikarenakan pada awal perencanaan ditargetkan ada penambahan jumlah pemuda pelopor setiap tahun melalui proses seleksi untuk memperoleh sejumlah pemuda pelopor. Akan tetapi Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2018 s.d. 2020 tidak melakukan proses seleksi sehingga tidak ada penambahan jumlah pemuda pelopor yang pada akhirnya capaian kinerja indikator tersebut tidak tercapai. Hal ini dapat dilihat melalui nilai capaian kinerja indikator ini. Pada tahun 2016 dan 2017 nilai capaian kinerja sangat tinggi, pada tahun 2018 nilai capaian kinerjanya tinggi, tahun 2019 nilai capaian kinerjanya sedang selanjutnya tahun 2020 nilai



capaian kinerjanya rendah. Walaupun tahun 2020 nilai capaian kinerjanya rendah namun Pemerintah Kota Bandar Lampung selama periode tahun 2016 s.d. 2020 tetap/selalu mendukung dan melakukan pembinaan ataupun memfasilitasi terhadap kegiatan-kegiatan organisasi kepemudaan termasuk pemuda pelopor yang sudah ada.

2. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada misi keempat tujuan 4.1. (Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi, Struktur Perekonomian yang Kokoh serta Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat), sasaran 4.1.4 (Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat). Target 2020/akhir periode perencanaan sebesar 5,59 persen sedangkan realisasi s.d 2020 sebesar 8,78 persen atau Tingkat Capaian Kinerja s.d Tahun 2020 sebesar 63,61 persen.

Tidak tercapainya indikator tingkat pengangguran terbuka tersebut disebabkan adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020 yang berdampak terhadap perekonomian global, nasional dan Kota Bandar Lampung yang selanjutnya berpengaruh terhadap lapangan pekerjaan di Kota Bandar Lampung. Akibat Covid-19, perekonomian Kota Bandar Lampung pada tahun 2020 terkontaksi dan menyebabkan tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandar Lampung meningkat menjadi sebesar 8,78 persen namun capaian kinerja indikator tingkat pengangguran terbuka tahun 2016 s.d. 2018 sangat tinggi dan tahun 2019 tinggi.

### **Indikator Sasaran yang masuk kategori sangat rendah**

Terdapat Empat indikator sasaran yang masuk kategori sangat rendah yakni pada:

1. Indikator Persentase Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada misi ketiga tujuan 3.1. (Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kota Bandar Lampung dalam Kondisi Mantap





yang Berwawasan Lingkungan), sasaran 3.1.2 (Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Pemukiman). Target 2020/akhir periode perencanaan sebesar 72,25 persen sedangkan realisasi s.d 2020 sebesar 28,81 persen atau Tingkat Capaian Kinerja s.d Tahun 2020 sebesar 39,88 persen.

Penyebab tidak tercapainya indikator ini dikarenakan guna merealisasikan target yang ditetapkan pada awal perencanaan diperlukan kolaborasi dan dukungan dari semua pihak baik pemerintah pusat maupun daerah (Kota dan Provinsi) melalui penganggaran dana dalam APBN dan APBD serta diperlukan peran masyarakat. Rencananya kedepan hal ini akan menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung.

2. Indikator Jumlah Kelurahan Siaga Bencana pada misi ketiga tujuan 3.1. (Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kota Bandar Lampung dalam Kondisi Mantap yang Berwawasan Lingkungan), sasaran 3.1.4 (Menurunnya Resiko Akibat Bencana). Target 2020/akhir periode perencanaan sebanyak 10 sedangkan realisasi s.d 2020 sebanyak 2 atau Tingkat Capaian Kinerja s.d Tahun 2020 sebesar 20 persen.

Tidak tercapainya indikator ini dikarenakan pada tahun penyusunan rencana (tahun 2016) dilakukan penyematan keluarahan siaga bencana secara formal dan selanjutnya ditargetkan ada penambahan jumlah kelurahan siaga bencana setiap tahun. Akan tetapi Kelurahan Siaga Bencana sejak tahun 2017 s.d. 2020 tidak disematkan secara formal sehingga tidak ada penambahan jumlah kelurahan siaga bencana yang pada akhirnya capaian kinerja indikator ini tidak tercapai. Namun demikian meski Kelurahan Siaga Bencana tidak disematkan secara formal, Pemerintah Kota Bandar Lampung tetap melakukan sosialisasi dan pemberian bantuan berupa sarana/prasarana maupun pelayanan terhadap kejadian bencana yang ada di Kota Bandar Lampung.



3. Indikator Persentase Peningkatan Nilai Investasi (PMA) pada misi keempat tujuan 4.1. (Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi, Struktur Perekonomian yang Kokoh serta Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat), sasaran 4.1.3 (Meningkatnya Investasi). Target 2020/akhir periode perencanaan sebesar 25,50 persen sedangkan realisasi tahun 2020 sebesar 4,05 persen atau Tingkat Capaian Kinerja tahun 2020 sebesar 15,88 persen.

Tidak tercapainya indikator persentase peningkatan nilai investasi (PMA) disebabkan adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020 yang berdampak luas terhadap perekonomian global, nasional dan Kota Bandar Lampung. Covid-19 juga berpengaruh terhadap minat/sikap para investor asing untuk menanamkan modalnya di Kota Bandar Lampung sehingga target indikator persentase peningkatan nilai investasi (PMA) tahun 2020 sebesar 25,50 persen tidak tercapai. Namun demikian, meskipun target kinerja indikator persentase peningkatan nilai investasi (PMA) tidak tercapai namun pada tahun 2020 nilai investasi (PMA) di Kota Bandar Lampung masih mengalami kenaikan sebesar 4,05 persen.

4. Indikator Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Lestari pada misi kelima tujuan 5.1. (Terwujudnya Masyarakat yang Aman, Tertib, dan Memelihara Warisan Budaya), pada sasaran 5.1.2 (Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah). Target 2020/akhir periode perencanaan sebanyak 3 sedangkan sampai dengan tahun 2020 tidak terealisasi atau Tingkat Capaian Kinerja s.d Tahun 2020 sebesar 0 persen.

Tidak tercapainya indikator tersebut dikarenakan pada saat perencanaan awal dalam penyusunan indikator tersebut belum ada pemahanan yang utuh mengenai Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya. Padahal untuk dapat dinyatakan sebagai benda, Situs dan



Kawasan Cagar Budaya, ada beberapa ketentuan/kriteria yang harus dipenuhi dan ada penetapan dari Kementerian yang terkait. Dengan merujuk pada dua hal tersebut maka di Kota Bandar Lampung dapat dikatakan belum memiliki Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya sehingga indikator tersebut tidak dapat terlaksana.



Tabel 2.145 Capaian Target Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	2016	2017			2018			2019			2020					Target Kondisi Akhir RPJMD (2021)	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	
								Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target dalam RPJMD	Target dalam RPKD	Realisasi	Tingkat Capaian RPJMD (%)	Tingkat Capaian RPKD (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)= (10)/(9)* 100	(12)	(13)	(14)= (13)/(12) *100	(15)	(16)	(17) =(16)/(15)*100	(18)	(19)	(20)	(21) =(20)/(18)*100	(22) =(20)/(19)*100	(23)	(24) =(20)/(23)*100	
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan dan Status Gizi Masyarakat		Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka	70,65	70,75		70,84			71,01			71,28					71,37			71,05	100,45
				Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,77	1,019		1,018			1,018			1,017			1,109			1,109			1,77
			1.1.1 Meningkatkan Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka	70,65	70,75	70,75	70,84	100,13	70,85	71,01	100,23	70,95	71,28	100,47	71,00	71,00	71,37	100,52	100,52	71,05	100,45	
				Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada Anak Balita	%	21,70	17,40	21,80	21,80	100,00	17,00	16,09	105,66	13,00	3,80	342,11	9,00	9,00	5,77	155,98	155,98	6,00	103,99	
			Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	%	-	21,20	23,80	23,80	100,00	23,80	26,38	90,22	21,00	6,10	344,26	20,00	6,10	6,60	303,03	92,42	18,00	272,73		
		1.1.2 Meningkatkan Pengendalian Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan penduduk	%	1,77	1,019	1,77	1,018	173,87	1,77	1,018	173,87	1,77	1,017	174,04	1,77	1,77	1,109	159,60	159,60	1,77	159,60		
		1.2 Meningkatkan Pembangunan Berkesetaraan Gender		Indeks Pembangunan Gender	Angka	93,69			93,53			93,55			93,96			93,86			95,19	98,60		
				Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	59,05			62,11			62,39			71,54			71,54 <sup>1)</sup>			65,00	110,06 <sup>1)</sup>		
			1.2.1 Meningkatkan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Angka	93,69	93,94	94,19	93,53	99,30	94,44	93,55	99,06	94,69	93,96	99,23	94,94	94,94	93,86	98,86	98,86	95,19	98,60	
				Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	59,05	60,00	61,00	62,11	101,82	62,00	62,39	100,63	63,00	71,54	113,56	64,00	64,00	71,54 <sup>1)</sup>	111,78 <sup>1)</sup>	111,78 <sup>1)</sup>	65,00	110,06 <sup>1)</sup>	



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	2016	2017			2018			2019			2020					Target Kondisi Akhir RPJMD (2021)	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 (%)		
								Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target dalam RPJMD	Target dalam RKPD	Realisasi	Tingkat Capaian RPJMD (%)	Tingkat Capaian RKPD (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)= (10)/(9)* 100	(12)	(13)	(14)= (13)/(12) *100	(15)	(16)	(17)= (16)/(15)* 100	(18)	(19)	(20)	(21)= (20)/(18)* 100	(22)= (20)/(19)* 100	(23)	(24)= (20)/(23)* 100		
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan Masyarakat	2.1 Meningkatnya Ketersediaan Layanan Pendidikan yang Bermutu dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia	Angka	74,81	75,34		75,98			76,63			77,33				77,44			80,00	96,80		
				Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,87	10,88		10,89			10,89			10,92			10,93			10,93			11,00	99,36
				Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,35	13,67		13,87			14,23			14,53			14,64			14,64			14,75	99,25
			2.1.1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,87	10,88	10,90	10,88	99,82	10,95	10,90	99,54	10,98	10,92	99,45	11,00	11,00	10,93	99,36	99,36	11,00	99,36	
					Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,35	13,67	13,87	13,87	100,00	13,92	14,23	102,23	14,25	14,53	101,96	14,40	14,40	14,64	101,67	101,67	14,75	99,25	
			2.1.2	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga	Jumlah Pemuda Pelopor	Orang	4	7	8	8	100,00	9	8	88,89	11	8	72,73	14	14	8	57,14	57,14	17	47,06	
3	Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur Dalam Skala Mantap Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial	3 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Kota Bandar Lampung dalam Kondisi Mantap yang Berwawasan Lingkungan		Persentase Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	%	75,27	78,53		79,49			80,36			81,64			93,97			91,63	102,55			
				Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	%	80,00	82,00		85,30			86,80			87,00			90,58			92,00	98,46			
				Persentase Luas Kawasan Kumuh di Kota Bandar Lampung	%	-	12,06		8,50			5,41			2,82			1,5			0,24	16,00			
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	53,00	54,00		55,00			55,00			55,00			60,00			60,00		62,00	96,77	
			3.1.1	Meningkatnya Mobilitas dan Aksesibilitas Masyarakat Antarwilayah serta	Persentase Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	%	75,27	78,53	80,62	79,49	98,60	82,56	80,36	97,34	88,14	81,64	92,63	89,54	89,54	93,97	104,95	104,95	91,63	102,55	



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	2016	2017			2018			2019			2020					Target Kondisi Akhir RPJMD (2021)	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 (%)
								Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target dalam RPJMD	Target dalam RKP	Realisasi	Tingkat Capaian RPJMD (%)	Tingkat Capaian RKP (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)= (10)/(9)*100	(12)	(13)	(14)= (13)/(12)*100	(15)	(16)	(17)= (16)/(15)*100	(18)	(19)	(20)	(21)= (20)/(18)*100	(22)= (20)/(19)*100	(23)	(24)= (20)/(23)*100
			Keselamatan Transportasi	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	%	80,00	82,00	84,00	85,30	101,55	86,00	86,80	100,93	88,00	87,00	98,86	90,00	90,00	90,58	100,64	100,64	92,00	98,46
				Rasio Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum terhadap Panjang Jalan Kota	titik/km	14,00	14,00	17,00	14,00	82,35	19,00	17,00	89,47	19,10	19,50	102,09	20,20	20,20	20,24	100,20	100,20	21,30	95,02
				Jumlah Kasus/Kejadian Kecelakaan per Tahun	Kejadian	381	415	297	297	100,00	241	241	100,00	195	297	65,66	158	158	220	71,82	71,82	128	58,18
				Cakupan Layanan TIK (Telekomunikasi, Informasi dan Komunikasi)	%	60,00	70,00	80,00	80,00	100,00	85,00	80,00	94,12	90,00	85,00	94,44	100,00	100,00	90,00	90,00	90,00	100,00	90,00
			3.1.2 Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Pemukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh di Kota Bandar Lampung	%	-	12,06	15,18	8,50	178,59	10,15	5,41	187,62	6,09	2,82	215,96	2,78	2,78	1,5	185,33	185,33	0,24	16,00
				Persentase Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	%	-	-	9,24	9,19	99,46	16,78	12,24	72,94	44,49	19,06	42,84	72,25	72,25	28,81	39,88	39,88	100,00	28,81
			3.1.3 Meningkatnya Tata Ruang Sesuai Pemanfaatannya	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukannya	%	-	51,10	50,00	51,66	103,32	64,15	52,01	81,08	68,00	52,64	77,41	70,00	70,00	53,24	76,06	76,06	75,00	70,99
			3.1.4 Menurunnya Resiko Akibat Bencana	Jumlah Kelurahan Siaga Bencana	Angka	-	2	2	0	0,00	2	0	0,00	2	0	0,00	2	2	0	0,00	0,00	12	16,67
			3.1.5 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Menunjang Kota Layak Anak	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	53,00	54,00	55,00	55,00	100,00	56,00	55,00	98,21	58,00	55,00	94,83	60,00	60,00	60,00	100,00	100,00	62,00	96,77
				Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	-	-	-	-	-	Pratama	Pratama	100,00	Pratama	Madya	200,00	Pratama	Pratama	Madya <sup>a</sup>	200,00 <sup>a</sup>	200,00 <sup>a</sup>	Madya	100,00 <sup>a</sup>



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	2016	2017			2018			2019			2020					Target Kondisi Akhir RPJMD (2021)	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	
								Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target dalam RPJMD	Target dalam RKPd	Realisasi	Tingkat Capaian RPJMD (%)	Tingkat Capaian RKPd (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)= (10)/(9)* 100	(12)	(13)	(14)= (13)/(12)* 100	(15)	(16)	(17)= (16)/(15)* 100	(18)	(19)	(20)	(21)= (20)/(18)* 100	(22)= (20)/(19)* 100	(23)	(24)= (20)/(23)* 100	
4	Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah Berlandaskan pada Ekonomi Kerakyatan	4 Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi, Struktur Perekonomian yang Kokoh serta Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat		Pertumbuhan Ekonomi	%	6,33	6,43		6,28			6,20			6,21								7,00	-26,43
			4.1.1	Meningkatnya Kontribusi Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata terhadap PDRB	%	21,25	21,12	21,13	21,26	100,76	21,14	21,18	100,19	21,15	21,39	101,13	21,16	21,16	20,97	99,10	99,10	21,17	99,06	
				Persentase Kategori Perdagangan terhadap PDRB	%	14,79	14,68	14,75	14,19	99,25	14,90	14,15	94,97	14,95	14,36	96,05	14,97	13,65	13,30	88,84	97,44	15,00	88,67	
				Persentase Kategori Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum (Bidang Pariwisata) terhadap PDRB	%	2,74	2,81	2,80	2,82	100,71	2,85	2,85	100,00	2,90	2,90	100,00	2,95	2,00	2,57	87,12	128,50	3,00	85,67	
			4.1.2	Meningkatnya Kontribusi KUMKM dalam Perekonomian Daerah	%	2,49	2,70	3,10	3,10	100,00	3,37	4,03	119,58	4,05	6,05	149,38	4,45	4,45	8,28	186,07	186,07	4,72	175,42	
				Persentase UMKM Yang Memiliki Laba	%	17,85	16,38	16,67	16,67	100,00	17,23	17,01	98,72	17,59	16,85	95,79	18,02	10,81	16,14	89,57	149,31	18,81	85,81	
			4.1.3	Meningkatnya Investasi	%	18,44	6,78	9,00	9,04	100,44	10,50	42,70	406,67	12,00	30,39	253,25	13,50	10,80	14,99	111,04	138,80	15,00	99,93	
				Persentase Peningkatan Nilai Investasi (PMDN)	%	6,51	21,71	22,50	18,48	82,13	23,50	2,62	11,15	24,50	16,37	66,82	25,50	19,12	4,05	15,88	21,18	26,50	15,28	
			4.1.4	Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat	%	10,33	10,15	9,89	9,94	99,50	9,02	9,04	99,78	8,28	8,71	95,06	7,62	9,00-10,00	8,81	86,49	113,51	7,20	81,73	
				Rasio Gini	%	0,39	0,369	0,340	0,342	99,42	0,340	0,342	99,42	0,32	0,316	101,27	0,31	0,31	0,359	86,35	86,35	0,31	86,35	
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	8,51	8,10	7,34	8,10	90,62	6,76	7,28	92,79	6,17	7,12	86,66	5,59	7,90-8,90	8,78	63,61	101,37	5,00	56,95	
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	61,77	63,41	64,00	63,41	99,08	64,95	65,92	101,50	66,63	65,92	98,93	68,32	68,32	67,79	99,23	99,23	70,00	96,84	
				Laju Inflasi	%	4,65	2,75	3,12 - 3,15	3,14	100,00	3,08 - 3,12	2,92	106,85	3,03 - 3,08	3,53	87,25	3,00 - 3,04	1,20-2,00	1,93	157,51	103,63	2,97 - 3,03	156,99	
				PDRB per Kapita (ADHK Tahun 2010)	Rp	31.526.569	32.933.856	34.663.160	34.374.187	99,17	36.529.200	35.871.912	98,20	38.395.240	37.456.633	97,56	40.261.279	38.050.000	33.151.383	82,34	87,13	42.127.319	78,69	



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	2016	2017			2018			2019			2020					Target Kondisi Akhir RPJMD (2021)	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 (%)	
								Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target dalam RPJMD	Target dalam RKPD	Realisasi	Tingkat Capaian RPJMD (%)	Tingkat Capaian RKPD (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)= (10)/(9)* 100	(12)	(13)	(14)= (13)/(12)* 100	(15)	(16)	(17)= (16)/(15)* 100	(18)	(19)	(20)	(21)= (20)/(18)* 100	(22)= (20)/(19)* 100	(23)	(24)= (20)/(23)* 100	
				PDRB per Kapita (ADHB)	Rp	40.262.886	44.843.785		49.298.501			52.823.565			56.469.729			50.665.005						
				Skor Pola Pangan Harapan	Skor	82,10	82,95	83,50	83,00	99,40	84,50	84,00	99,41	85,00	85,20	100,24	86,00	83,20	85,50	99,42	102,76	87,00	98,28	
5	Mengembangkan masyarakat Agamis dan Berbudaya	5 Terwujudnya Masyarakat yang Aman, Tertib, dan Memelihara Warisan Budaya		Angka Kriminalitas	Angka	3.038	3.293		3.173			1.870			1.734			3.349			2.467	73,66		
				Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Lestari	Angka	0	0		0			0			0			0			4	0,00		
			5.1.1 Meningkatkan Rasa Aman di Masyarakat	Angka Kriminalitas	Angka	3.038	3.293	3.029	3.173	95,46	2.878	1.870	153,90	2.734	1.734	157,67	2.597	2.701	3.349	77,55	80,65	2.467	73,66	
				Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang Terslesaikan	%	35,00	37,00	40,00	35,23	88,08	42,00	66,00	157,14	45,00	86,00	191,11	48,00	48,00	100,00	208,33	208,33	50,00	200,00	
			5.1.2 Meningkatkan Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Lestari	Angka	0	0	0	0	0,00	1	0	0,00	1	0	0,00	1	1	0	0,00	0,00	4	0,00	
6	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Berorientasi Kemitraan dengan Masyarakat dan Dunia Usaha	6 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan, Taat Hukum, Partisipatif, Demokratis dan Responsif		Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Skor	55,79	60,56		56,04			55,55			60,01			59,98			89,00	67,39		
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	44,77	45,29		48,90			53,03			55,14			57,09			64,00			
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	B	B		A			A			A			A			A	100,00		
				Opini Wajar Tanpa Pengecualian BPK	Predikat	WTP	WTP		WTP			WTP			WTP			WTP			WTP	100,00		





No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2015)	2016	2017			2018			2019			2020					Target Kondisi Akhir RPJMD (2021)	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2020 (%)
								Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target dalam RPJMD	Target dalam RKPD	Realisasi	Tingkat Capaian RPJMD (%)	Tingkat Capaian RKPD (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)= (10)/(9)* 100	(12)	(13)	(14)= (13)/(12)* 100	(15)	(16)	(17)= (16)/(15)* 100	(18)	(19)	(20)	(21)= (20)/(18)* 100	(22)= (20)/(19)* 100	(23)	(24)= (20)/(23)* 100
			6.1.1 Meningkatkan Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Skor	55,79	60,56	74,21	56,04	75,52	80,00	55,55	69,44	85,00	60,01	70,60	87,00	87,00	59,98	68,94	68,94	89,00	67,39
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	44,77	45,29	48,90	48,90	100,00	50,01	53,03	106,04	60,01	55,14	91,88	62,00	62,00	57,09	92,08	92,08	64,00	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	B	B	B	A	200,00	B	A	200,00	B	A	200,00	A	A	A	100,00	100,00	A	100,00
			6.1.2 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Kemandirian Keuangan Daerah	Opini Wajar Tanpa Pengecualian BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	WTP	100,00	100,00	WTP	100,00
				Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	%	21,56	23,50	36,06	29,44	81,64	32,84	25,45	77,50	33,32	27,59	82,80	32,47	32,47	25,45	78,38	78,38	31,47	80,87
				BUMD dengan Kategori Sehat dan Baik	Angka	2,00	3,00	5,00	3,00	60,00	5,00	3,00	60,00	5,00	3,00	60,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00	5,00	100,00
			6.1.3 Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat	T	T	ST	T	50,00	ST	ST	100,00	ST	ST <sup>a</sup>	100,00 <sup>a</sup>	ST	ST	Dalam Proses			ST	



## **2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2020**

Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2020 adalah dalam rangka Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang merupakan implementasi dari visi dan misi kepala daerah sebagaimana yang telah dituangkan dalam RPJMD.

Evaluasi kinerja dilakukan dengan mengukur capaian target kinerja setiap indikator program, yang kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tingkat capaian kinerja masing-masing program sesuai dengan klasifikasi/interval capaian kinerja dijelaskan dalam Tabel T-E.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Evaluasi pelaksanaan program yang tertuang dalam RKPD dan ditetapkan dalam APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2020 dijabarkan dalam Tabel 2.134.

### ***Capaian Kinerja Program dan Kegiatan***

Dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 terdapat 255 (Dua Ratus Lima Puluh Lima) Program dengan 587 (Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh) indikator program. Dari 587 indikator program tersebut terdapat 117 indikator yang targetnya ditetapkan tidak sampai tahun 2020 sehingga indikator program yang rencananya (ditargetkan) akan dicapai pada akhir periode perencanaan (tahun 2020) hanya sebanyak 470 indikator.

Seratus Tujuh Belas (117) indikator ditargetkan tidak sampai dengan tahun 2020 dikarenakan adanya beberapa regulasi seperti UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 09 Tahun 2015 dan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta PMDN No.86 Tahun 2017 yang selanjutnya dilakukan penataan program pada saat penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2016-2021, sehingga



terdapat beberapa program yang tidak berlanjut. Adapun jika dilihat capaian target dari 117 indikator tersebut, secara umum semua capaian kerjanya masuk dalam kategori sangat tinggi dan tinggi.

Selanjutnya dari empat ratus tujuh puluh (470) indikator program yang ditargetkan akan dicapai pada tahun 2020, jika dilihat dari rasio capaian akhir maka secara rata-rata capaian kinerja program pada akhir periode perencanaan (tahun 2020) sebesar 107,11 persen atau dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Secara rinci tingkat pencapaian indikator program/kinerja sampai dengan Tahun 2020/akhir periode perencanaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: capaian 361 indikator masuk kategori sangat tinggi, capaian 37 indikator masuk kategori tinggi, capaian 10 indikator masuk kategori sedang, capaian 13 indikator masuk kategori rendah, dan capaian 49 indikator masuk kategori sangat rendah.

Berdasarkan hasil klasifikasi tersebut dan dengan mengacu pada gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Capaian kategori sangat tinggi dan tinggi sebesar 84,68 persen.  
Hal ini dapat dimaknai bahwa 84,68 persen pencapaian (realisasi kinerja capaian) indikator program telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2. Capaian kategori sedang sebesar 2,13 persen  
Hal ini dapat dimaknai bahwa 2,13 persen pencapaian (realisasi kinerja capaian) indikator program telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Capaian kategori rendah dan sangat rendah sebesar 13,19 persen.  
Hal ini dapat dimaknai bahwa 13,19 persen pencapaian (realisasi kinerja capaian) indikator program belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.



Adapun untuk rata-rata capaian kinerja kegiatan sampai dengan Tahun 2020 sebesar 75,77 persen dengan rincian capaian kinerja kegiatan Tahun 2016-2020 sebagai berikut : Tahun 2016 sebesar 72,78 persen, Tahun 2017 sebesar 76,74 persen, Tahun 2018 sebesar 83,73 persen, Tahun 2019 sebesar 78,08 persen, dan Tahun 2020 sebesar 67,50 persen.



Tabel 2.146 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Kota Bandar Lampung sampai dengan Tahun 2020

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Akhir Kinerja RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10=9/4		11	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																		
<b>PENDIDIKAN</b>																		
Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	Angka	89,10	3.720.735.264,00	49,46	1.674.721.736,00	89,10	1.020.167.264,00	49,36	625.881.944,00	55,40	61,35	49,36	2.300.603.680,00	55,40	61,83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Persentase Satuan PAUD Berakreditasi	%	71,81		40,84		71,81		54,00		75,20		54,00		75,20			
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD/MI	Angka		210.441.320.632,00		136.159.112.400,00								136.159.112.400,00		64,70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	APM SD/MI	Angka																
	Rasio Guru terhadap Murid SD/MI	Angka																
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Keahlian	Orang																
	Penerima Kartu Indonesia Pintar SD	Orang																
	Persentase Peserta Didik SD/MI Putus Sekolah	%																
	Persentase Lulusan SD/MI yang Melanjutkan ke SMP/MI/SMPLEB	%																
	APK SMP/MTs	%																
	APM SMP/MTs	%																
	Rasio Guru terhadap Murid SMP/MTs	Angka																
	Persentase Peserta Didik SMP Putus Sekolah	%																
	Angka Kelulusan SMP	%																
	Angka Kelulusan SMA	%																
Penerima Kartu Indonesia Pintar SMP	Orang																	



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Akhir Kinerja RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10=9/4		11
Program Pendidikan Dasar	APK SD/MI	angka	112,34	304.042.346.185,00	109,23	71.035.932.914,00	112,34	162.595.646.263,00	108,14	61.301.565.630,00	96,26	37,70	108,14	132.337.498.544,00	96,26	43,53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	APM SD/MI	angka	99,33		96,20		99,33		91,32		91,94		91,32		91,94		
	APK SMP/MTs	angka	111,00		107,16		111,00		96,37		86,82		96,37		86,82		
	APM SMP/MTs	angka	95,64		89,63		95,64		80,17		83,82		80,17		83,82		
	Bangunan SD dalam Kondisi Baik	%	80,00		35,16		80,00		80,00		100,00		80,00		100,00		
	Bangunan SMP dalam Kondisi Baik	%	95,00		41,49		95,00		95,00		100,00		95,00		100,00		
	Persentase Satuan Pendidikan Dasar (SD/MI) yang Berakreditasi A	%	40,32		30,00		40,32		31,00		76,88		31,00		76,88		
	Persentase Satuan Pendidikan Dasar (SMP/MTs) yang Berakreditasi A	%	37,97		41,00		37,97		42,00		110,61		42,00		110,61		
Program Pendidikan Menengah	APM SMA/SMK/MA/Paket C	%	83,76	28.351.281.450,00	83,76	28.351.281.450,00							83,76	28.351.281.450,00	100,00	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/ Paket C	%	98,50		98,50								98,50		100,00		
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	%	0,05		0,05								0,05		100,00		
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA/Paket C	%	100,00		100,00								100,00		100,00		
	Bangunan SMA/SMK/MA dalam Kondisi Baik	%	100,00		100,00								100,00		100,00		
Program Pendidikan Non Formal	Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal yang Terakreditasi	Lembaga	21,00	7.857.644.500,00	54,00	3.498.817.100,00	21,00	751.367.000,00	22,00	209.400.000,00	104,76	27,87	22,00	3.708.217.100,00	104,76	47,19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	92,25	117.040.335.472,00	84,10	79.495.314.880,00	92,25	24.073.636.300,00	92,25	11.177.529.100,00	100,00	46,43	92,25	90.672.843.980,00	100,00	77,47	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Guru SD yang Bersertifikasi	%	65,70		42,03		65,70		37,38		56,89		37,38		56,89		
	Persentase Guru SMP yang Bersertifikasi	%	70,15		43,45		70,15		57,40		81,82		57,40		81,82		
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase TK yang Dilakukan Pembinaan	%	100,00	598.681.432.264,11	100,00	342.118.353.672,11	100,00	153.128.280.675,00	100,00	121.413.229.283,00	100,00	79,29	100,00	463.531.582.955,11	100,00	77,43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Sekolah SMP/MTs yang Melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berbasis Online	%	30,37		100,00		30,37		100,00		329,27		100,00		329,27		



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Akhir Kinerja RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10=9/4		11
Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Jumlah Peserta Sosialisasi PUG Pendidikan	Orang	90,00	172.600.000,00	-	-	90,00	43.000.000,00	-	-	-	-	80,00	-	88,89	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>KESEHATAN</b>																	
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Balita Kurang Gizi	%	13,00	57.310.000,00	3,08	7.310.000,00							3,08	7.310.000,00	422,08	12,76	Dinas Kesehatan
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Anak Baduta (bawah dua tahun)	%	21,00		6,10								6,10		344,26		
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	90,00	50.000.000,00	92,78	-							92,78	-	103,09	-	Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%		84.664.000,00		19.664.000,00							19.664.000,00		23,23	Dinas Kesehatan	
	Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 Penduduk (CNR)	Angka															
	Eliminasi Malaria	Angka															
	Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi	%															
	Persentase Puskesmas yang Melakukan Deteksi Dini dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Pelayanan Kesehatan Jiwa (Posbindu)	%															
	Persentase Penemuan Penyakit Tidak Menular (Diabetes Melitus)	%															
	Prevalensi Tekanan Darah Tinggi	%															
	Prevalensi Obesitas pada Penduduk Usia 18+ Tahun	%															
	Prevalensi Merokok Penduduk Usia <18 Tahun	%															
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	95,00	25.790.000.000,00	97,00	321.087.000,00	95,00	25.280.000.000,00	90,00	14.839.343.516,00	94,74	58,70	90,00	15.160.430.516,00	94,74	58,78	Dinas Kesehatan
	Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk (CNR)	Orang	271,00		331,00		271,00		258,00		95,20		258,00		95,20		



1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10=9/4		11
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Eliminasi Malaria	Per Mil	<1		0,38		<1		<1		100,00		<1		100,00		
	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi	%	0,22		1,57		0,22		0,20		110,00		0,20		110,00		
	Persentase Puskesmas yang Melakukan Deteksi Dini dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Pelayanan Kesehatan Jiwa (Posbindu)	%	90,00		100,00		90,00		90,00		100,00		90,00		100,00		
	Persentase Penemuan Penyakit Tidak Menular (Diabetes Melitus)	%	50,00		87,01		50,00		47,50		95,00		47,50		95,00		
	Prevalensi Tekanan Darah Tinggi	%	21,00		71,40		21,00		20,00		105,00		20,00		105,00		
	Prevalensi Obesitas pada Penduduk Usia 18+ Tahun	%	15,40		66,31		15,40		15,00		102,67		15,00		102,67		
	Prevalensi Merokok Penduduk Usia <18 Tahun	%	5,80		32,43		5,80		3,40		170,59		3,40		170,59		
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%	50,00	586.969.280,00	100,00	5.250.000,00	50,00	79.719.280,00	50,00	79.719.280,00	100,00	100,00	50,00	84.969.280,00	100,00	14,48	Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS)	%	100,00	737.531.710.751,89	100,00	461.982.896.987,91	100,00	157.073.358.955,00	100,00	82.950.509.816,00	100,00	52,81	100,00	544.933.406.803,91	100,00	73,89	Dinas Kesehatan
	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Pencapaian 80 Persen Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi	%	95,00		96,90		95,00		84,70		89,16		84,70		89,16		
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rasio Posyandu per Satuan Balita	Balita/ Posyandu	140,00	400.434.650,00	140,00	192.970.650,00	140,00	24.500.000,00	140,00	24.500.000,00	100,00	100,00	140,00	217.470.650,00	100,00	54,31	Dinas Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya yang Sesuai Standar	%	90,00	42.108.232.723,00	90,00	21.349.979.687,00	90,00	19.512.001.920,00	100,00	8.439.372.145,00	111,11	43,25	100,00	29.789.351.832,00	111,11	70,74	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan	Cakupan Penduduk Miskin yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	%	100,00	5.994.000,00	100,00	5.994.000,00							100,00	5.994.000,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan





Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Akhir Kinerja RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10=9/4		11
Kesehatan Penduduk Miskin																	
Program Manajemen Pelayanan Kesehatan	Cakupan Manajemen Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	95,00	1.239.250.519,00	85,00	729.210.800,00	90,00	130.000.000,00	100,00	31.567.500,00	111,11	24,28	100,00	760.778.300,00	105,26	61,39	Dinas Kesehatan
Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Puskesmas yang Melakukan Kegiatan GEMA CERMAT untuk Meningkatkan Penggunaan Obat Nasional pada Masyarakat	%	100,00	135.428.666.761,00	100,00	100.401.262.068,00	100,00	436.876.000,00	100,00	136.080.600,00	100,00	31,15	100,00	100.537.342.668,00	100,00	74,24	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Persentase Puskesmas yang Memanfaatkan Obat Tradisional dan Melakukan Asuhan Mandiri	%	100,00	29.833.600,00	60,00	29.833.600,00							100,00	29.833.600,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase Produsen Industri Rumah Tangga (PIRT) yang Mendapatkan Ijin Rekomendasi Kesehatan Makanan	%	90,00	80.047.700,00	50,00	10.047.700,00							50,00	10.047.700,00	55,56	12,55	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan Persalinan Ibu di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	%	82,00	6.281.031.000,00	96,02	175.823.500,00	82,00	1.886.789.000,00	95,64	285.544.500,00	116,63	15,13	95,64	461.368.000,00	116,63	7,35	Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Angka	5,00		4,00		5,00		4,00		125,00		4,00		250,00		
	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	Angka	5,00		3,00		5,00		2,00		250,00		2,00		250,00		
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin 30 PKM dan 50 Pustu	%	90,00	39.264.909.998,00	93,50	26.191.592.938,00	90,00	8.629.967.140,00	100,00	2.492.001.140,00	111,11	28,88	100,00	28.683.594.078,00	111,11	73,05	Dinas Kesehatan dan RSUD
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Angka Penggunaan Tempat Tidur (BOR)	%	85,00	122.373.664.253,00	58,00	96.715.968.749,05	85,00	7.493.775.000,00	39,00	3.437.010.200,00	45,88	45,86	39,00	100.152.978.949,05	45,88	81,84	RSUD
	Rata-Rata Lama Perawatan di Rumah Sakit (LOS=Length Of Stay)	Hari	6,00		3,00		6,00		3,00		50,00		3,00		50,00		
	TOI (Turn Over Interval = Tenggang Perputaran)	Hari	1,00		3,00		1,00		3,00		300,00		3,00		300,00		
	BTO (Bed Turn Over = Angka Perputaran Tempat Tidur)	Kali	50,00		47,00		50,00		40,00		80,00		40,00		125,00		
	Gross Death Rate (GDR)/Per Mill	0/00	20,35		19,71		20,35		10,00		49,14		10,00		203,50		
	Net Death Rate (NDR)/Per Mill	0/00	8,50		10,11		8,50		19,00		223,53		19,00		44,74		



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Akhir Kinerja RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10=9/4		11
Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	Cakupan Pelayanan BLUD	%	100,00	61.666.736.844,17	100,00	17.851.770.418,13	100,00	25.000.000.000,00	100,00	22.545.500.769,17	100,00	90,18	100,00	40.397.271.187,30	100,00	65,51	RSUD
	Hasil Evaluasi Kinerja RSUD	Nilai	Baik		Baik		Baik		Baik		100,00		Baik		100,00		
	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan RSUD	%	100,00		90,91		100,00		95,45		95,45		95,45		95,45		
	RSUD yang Tersertifikasi Akreditasi Nasional	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Pemenuhan Minimal Tujuh Dokter Spesialis di RSUD	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>																	
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jaringan Jalan Kota dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	%	100,00	883.556.294.800,50	81,64	542.826.894.597,59	100,00	147.640.175.492,00	84,81	40.801.899.910,00	84,81	27,64	87,98	583.628.794.507,59	87,98	66,05	Dinas Pekerjaan Umum
	Persentase Jalan Kota dalam Kondisi Baik (>40 km/jam)	%	100,00		81,64		100,00		76,00		76,00		76,00		76,00		
	Rasio Panjang Jalan Kota Dibandingkan dengan Luas Wilayah	km/k m <sup>2</sup>	4,68		6,86		4,68		2,00		42,74		2,00		42,74		
	Rasio Panjang Jalan Kota Dibandingkan dengan Jumlah Penduduk	m/jiwa	0,86		1,29		0,86		0,37		43,02		0,37		43,02		
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Air Tidak Tersumbat	%	82,00	1.510.259.600,00	82,00	1.510.259.600,00							82,00	1.510.259.600,00	100,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum
	Persentase Penanganan Luas Genangan	%	14,63		14,63								14,63		100,00		
	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5 M)	%	52,00		52,00								52,00		100,00		
Program Penataan dan Pengembangan Keindahan Kota	Rasio Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum terhadap Panjang Jalan Kota	Angka		211.329.127.367,00	17,00	191.893.530.559,00								191.893.530.559,00		90,80	Dinas Pekerjaan Umum
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Cakupan Jalan Kota Rusak yang Direhabilitasi	%	100,00	56.507.720.332,00	87,06	27.066.263.357,00	100,00	26.444.197.632,00	100,00	11.105.305.640,00	100,00	42,00	100,00	38.171.568.997,00	100,00	67,55	Dinas Pekerjaan Umum
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/Bronjong	Cakupan Talud/Bronjong yang Direhabilitasi	%	75,00	41.114.002.945,00	89,02	29.485.017.825,00	75,00	7.439.665.745,00	100,00	5.415.096.405,00	133,33	72,79	100,00	34.900.114.230,00	133,33	84,89	Dinas Pekerjaan Umum



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Akhir Kinerja RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10=9/4		11
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebnamargaan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Berat sebagai Penunjang Kegiatan Konstruksi	%	87,10	2.500.000.000,00	85,00	2.470.429.710,00							85,00	2.470.429.710,00	97,59	98,82	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Persentase Luas Embung yang Direhabilitasi	%	81,00	996.562.100,00	99,47	779.439.900,00	81,00	196.562.100,00	100,00	192.176.000,00	123,46	97,77	100,00	971.615.900,00	123,46	97,50	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keciaptakarya	Persentase OPD yang Memiliki Kantor Sendiri	%	100,00	1.031.164.686.520,40	98,50	401.206.552.370,00	95,00	329.056.442.711,00	80,45	140.944.317.575,00	84,68	42,83	80,45	542.150.869.945,00	80,45	52,58	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pemeliharaan Sumber Daya Air	Panjang Penanganan Sungai yang Dinormalisasi	km	19,90	30.791.527.715,00	6,10	13.744.679.134,00	6,66	11.837.594.695,00	6,66	3.620.753.975,00	100,00	30,59	6,66	17.365.433.109,00	33,47	56,40	Dinas Pekerjaan Umum
	Panjang Penanganan Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor	km	19,90		-		6,66		-		-						
Program Perencanaan dan Pengendalian	Tersedianya Jasa Konsultansi Kegiatan Kontruksi	Jumlah	141,00	14.027.753.000,00		3.176.144.200,00							141,00	3.176.144.200,00	100,00	22,64	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Infrastruktur	Persentase Rumah Tinggal yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak	%	50,88	19.994.099.213,00	35,96	5.871.081.579,00	50,88	8.491.000.724,00	50,88	2.116.493.544,00	100,00	24,93	50,88	7.987.575.123,00	100,00	39,95	Dinas Pekerjaan Umum
	Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	2,78		5,34		2,78		2,78		100,00	2,78					
Program Prasarana Sumber Daya Air	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Air Tidak Tersumbat	%	90,00	75.371.281.765,00	87,00	25.355.380.425,00	90,00	32.889.674.375,00	46,88	6.040.061.770,00	52,09	18,36	46,88	31.395.442.195,00	52,09	41,65	Dinas Pekerjaan Umum
	Persentase Penanganan Luas Genangan	%	79,92		67,39		79,92		79,92		100,00	79,92					
	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5 M)	%	70,00		12,62		70,00		13,00		18,57	13,00					
Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Persentase Pemeliharaan Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik	%	100,00	39.699.462.000,00	100,00	24.209.492.900,00							100,00	24.209.492.900,00	100,00	60,98	Dinas Pekerjaan Umum



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Akhir Kinerja RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10=9/4		11
Program Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan	Rasio Panjang Jalan Lingkungan dengan Jumlah Penduduk	m/jiwa	0,62	233.092.990.741,50	0,91	84.790.205.278,00	0,62	128.900.813.341,00	1,09	35.186.648.605,00	56,88	27,30	1,09	119.976.853.883,00	56,88	51,47	Dinas Pekerjaan Umum
	Rasio Panjang Jalan Lingkungan dengan Luas Wilayah	km/k m <sup>2</sup>	3,37		4,87		3,37		5,89		57,22		5,89		57,22		
	Persentase Panjang Jalan Lingkungan dengan Kondisi Mantap	%	80,00		86,00		75,00		96,00		128,00		96,00		120,00		
Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU	Rasio Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum terhadap Panjang Jalan Kota	Angka	20,20	21.676.574.820,00	19,50	7.446.233.700,00	20,20	12.369.538.220,00	20,20	4.651.159.500,00	100,00	37,60	20,20	12.097.393.200,00	100,00	55,81	Dinas Pekerjaan Umum
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	61,80	28.549.387.965,10	44,17	13.832.704.574,00	61,80	10.324.307.410,00	61,80	3.540.322.305,00	100,00	34,29	61,80	17.373.026.879,00	100,00	60,85	Dinas Pekerjaan Umum
	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	%	61,80		44,17		61,80		61,80		100,00		61,80		100,00		
Program Perencanaan Tata Ruang	Luasan RTH Publik Sebesar 20 Persen dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	%	14,00	1.344.403.550,00	11,08	726.428.352,00	14,00	111.987.800,00	20,00	110.387.800,00	142,86	98,57	20,00	836.816.152,00	142,86	62,24	Dinas Tata Kota dan Bappeda (Tahun 2016), Dinas Perumahan dan Permukiman
	Persentase Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kota Beserta Rencana Rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital Terbaru (mutakhir)	%	100,00		96,31		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase Pemenuhan Dokumen Tata Ruang Wilayah	%															
Program Pengendalian Tata Ruang	Persentase Bangunan ber-IMB	%	87,38	926.642.500,00	80,33	250.543.730,00	87,38	191.642.500,00	93,45	87.438.970,00	106,95	45,63	93,45	337.982.700,00	106,95	36,47	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Persentase Pelanggaran Perda Penataan Ruang yang Ditangani	%	70,00		79,23		70,00		100,00		142,86		100,00		142,86		
	Cakupan Pengawasan Tim Ahli Bangunan Gedung	%	100,00		99,70		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Program Pemanfaatan Ruang	Cakupan Peningkatan Kapasitas Masyarakat tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Bangunan	%	100,00	193.499.600,00	100,00	89.974.600,00	100,00	89.725.000,00	100,00	40.150.000,00	100,00	44,75	100,00	130.124.600,00	100,00	67,25	Dinas Perumahan dan Permukiman
Program Pengendalian	Persentase Bangunan ber-IMB	%		234.874.000,00		160.321.500,00								160.321.500,00		68,26	Dinas Pekerjaan Umum



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Akhir Kinerja RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10=9/4		11
Pemanfaatan Ruang	Persentase Pelanggaran Perda Penataan Ruang yang Ditangani	%															
	Persentase Pemenuhan Fasilitas dan Koordinasi Tim Penataan Ruang Wilayah	%															
<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b>																	
Program Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan	Rasio Panjang Jalan Lingkungan dengan Jumlah Penduduk	Angka		36.682.820.950,00		14.236.167.015,00								14.236.167.015,00		38,81	Dinas Pekerjaan Umum
	Rasio Panjang Jalan Lingkungan dengan Luas Wilayah	Angka															
	Persentase Panjang Jalan Lingkungan dengan Kondisi Mantap	%															
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%		6.193.719.250,00		4.961.316.500,00								4.961.316.500,00		80,10	Dinas Pekerjaan Umum
	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	%															
Program Pengembangan Perumahan	Persentase Panjang Jaringan Jalan Lingkungan dengan Kondisi Mantap	%		10.322.757.100,00		10.322.757.100,00								10.322.757.100,00		100,00	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Pelanggaran Perda Penataan Ruang yang Ditangani	%		200.000.000,00		164.379.000,00								164.379.000,00		82,19	Dinas Perumahan dan Permukiman
Program Peningkatan Fungsi Lembaga Bangunan Gedung	Cakupan Pengawasan Tim Ahli Bangunan Gedung	%		100.000.000,00		82.607.000,00								82.607.000,00		82,61	Dinas Perumahan dan Permukiman
Program Perumahan	Cakupan Pengawasan Tim Ahli Bangunan Gedung	%		100.000.000,00		7.200.000,00								7.200.000,00		7,20	Dinas Perumahan dan Permukiman
Program Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Cakupan Pelaksanaan BSPTS	%		50.000.000,00		7.278.000,00								7.278.000,00		14,56	Dinas Perumahan dan Permukiman
Program Peningkatan	Persentase RTLH yang Tertangani	%	72,25	5.099.354.000,00	18,23	2.808.396.045,00	72,25	2.086.210.000,00	72,25	1.745.450.000,00	100,00	83,67	72,25	4.553.846.045,00	100,00	89,30	Dinas Perumahan



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Akhir Kinerja RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10=9/4		11
Kualitas Perumahan	Cakupan Pelaksanaan BSPTS	%	100,00		13,45		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		dan Permukiman
<b>KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>																	
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan Petugas Linmas	%	100,00	5.410.504.461,00	100,00	2.769.610.678,00	100,00	980.707.569,00	100,00	58.499.300,00	100,00	5,97	100,00	2.828.109.978,00	100,00	52,27	Satuan Polisi Pamong Praja
	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	%	76,00		100,00		76,00		100,00		131,58		100,00		131,58		
	Persentase Penegakan PERDA	%	76,00		100,00		76,00		76,00		100,00		76,00		100,00		
	Persentase Konflik Sosial yang Terselaikan	%	80,00	3.193.741.960,00	82,00	2.136.795.395,00	80,00	754.620.000,00	60,00	600.835.000,00	75,00	79,62	60,00	2.737.630.395,00	75,00	85,72	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Persentase SDM yang Mempunyai Kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial	%	60,00		70,00		60,00		70,00		116,67		70,00		116,67		
<b>SOSIAL</b>																	
Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase Jumlah Anak Terlantar yang Tertangani	%	71,00	117.125.000,00	60,00	91.975.000,00	71,00	11.000.000,00	70,00	10.975.000,00	98,59	99,77	70,00	102.950.000,00	98,59	87,90	Dinas Sosial
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma yang Dibina	%	12,00	162.207.150,00	5,00	67.240.150,00	12,00	30.208.650,00	-	824.600,00	-	2,73	5,00	68.064.750,00	41,67	41,96	Dinas Sosial
	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	36,00		9,00		36,00		-		-		9,00		25,00		
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Psk, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Persentase Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	%	56,00	1.112.132.912,00	42,00	731.168.700,00	56,00	192.134.412,00	55,00	174.832.250,00	98,21	90,99	55,00	906.000.950,00	98,21	81,47	Dinas Sosial
	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	%															
	Persentase PMKS yang Tertangani	%															
Program Operasional Bencana Alam dan Bencana Sosial	Cakupan Penanganan Bencana Alam dan Sosial	%	29,00	35.261.083.760,00	27,00	179.730.714,00	29,00	35.058.627.300,00	29,00	16.930.774.000,00	100,00	48,29	29,00	17.110.504.714,00	100,00	48,53	Dinas Sosial
	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	29,00		27,00		29,00		29,00		100,00		29,00		100,00		
	Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan	%	29,00		-		29,00		-		-		-		-		



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Akhir Kinerja RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10=9/4		11
	Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap																
	Ketersediaan Buffer Stock Logistik dan Pemenuhan Dasar Korban Bencana	%	87,00		81,00		87,00		87,00		100,00		87,00		100,00		
Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Persentase Ketersediaan Data PMKS dan PSKS	%	6,00	80.505.000,00	6,00	80.505.000,00	6,00					6,00	80.505.000,00	100,00	100,00		Dinas Sosial
	Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya	%	6,00		6,00		6,00					6,00		100,00			
	Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial	%	6,00		6,00		6,00					6,00		100,00			
Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Jumlah Lansia yang Tertangani	%	25,00	308.697.700,00	9,00	95.463.400,00	25,00	112.701.400,00	12,00	54.717.500,00	48,00	48,55	12,00	150.180.900,00	48,00	48,65	Dinas Sosial
Program Keluarga Harapan (PKH)	Cakupan Pendampingan Program PKH	%		654.150.500,00		450.822.381,00							450.822.381,00		68,92		Dinas Sosial
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang Ikut Serta dalam Penanganan Masalah Sosial	Orang	325,00	4.919.464.600,00	673,00	2.421.707.000,00	325,00	1.073.623.350,00	768,00	507.180.050,00	236,31	47,24	768,00	2.928.887.050,00	236,31	59,54	Dinas Sosial
	Rasio Tempat Ibadah Agama Persatuan Penduduk	Tempat Ibadah/Jiwa	0,18		0,15		0,18		0,17		94,44		0,17		94,44		
	Persentase TPU yang Ditangani	%															
	Persentase Tempat Pemakaman Umum Persatuan Penduduk	%															
Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase TPU yang Ditangani	%	15,00	100.000.000,00	15,00	76.265.250,00							15,00	76.265.250,00	100,00	76,27	Dinas Sosial
	Persentase Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk	%	8,40		0,03								0,03		0,36		
Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kota Bandar Lampung	Cakupan Pendampingan Program PKH dan BPNT Kota Bandar Lampung	%	100,00	3.115.610.342,00	100,00	719.986.040,00	100,00	2.350.610.342,00	100,00	2.066.079.000,00	100,00	87,90	100,00	2.786.065.040,00	100,00	89,42	Dinas Sosial



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Akhir Kinerja RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10=9/4		11
<b>URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
<b>TENAGA KERJA</b>																	
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	%		176.458.765,00		176.458.765,00								176.458.765,00		100,00	Dinas Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	%	55,00	653.007.800,00	50,00	233.729.700,00	55,00	163.566.100,00	20,00	-	36,36	0,00	20,00	233.729.700,00	36,36	35,79	Dinas Tenaga Kerja
	Persentase Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	%	20,00		-		20,00		-		-		20,00		100,00		
	Persentase Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	22,50		-		22,50		-		-		17,50		77,78		
Program Pengembangan Data dan Informasi Ketenagakerjaan	Rasio Pencaker yang Terdaftar Lulusan S1/S2/ S3 Dibagi Pencaker yang Terdaftar per Tahun	Angka	21,00	205.534.400,00	21,11	165.300.742,00	21,00	17.415.000,00	20,00	-	95,24	-	20,00	165.300.742,00	95,24	80,42	Dinas Tenaga Kerja
Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Meningkatnya Tenaga Kerja yang Ditempatkan Dibandingkan Tahun Sebelumnya	%	97,62	389.919.300,00	227,50	295.935.330,00							227,50	295.935.330,00	233,05	75,90	Dinas Tenaga Kerja
	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	Orang	7.245,00		681,00								681,00		9,40		
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Angka Perselisihan Pengusaha-Pekerja per Tahun	Angka		207.341.900,00		199.315.469,00								199.315.469,00		96,13	Dinas Tenaga Kerja
	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Jumlah															
	Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	Orang															
	Upah Minimum Kota	Rp															
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Kasus	58,00	601.097.500,00	34,00	257.252.131,00	58,00	293.590.050,00	32,76	198.092.200,00	56,48	67,47	58,00	455.344.331,00	100,00	75,75	Dinas Tenaga Kerja





Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Akhir Kinerja RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10=9/4		11
Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Angka Perselisihan Pengusaha-Pekerja per Tahun	Angka	58,00		55,00		58,00		65,00		112,07		58,00		100,00		
	Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	Orang	14.226,00		142.554,00		14.226,00		79.478,00		558,68		14.226,00		100,00		
	Persentase Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Upah Minimum Kota	Rp	2.560.904		2.445.141		2.560.904		2.739.983		106,99		2.560.904		100,00		
<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>																	
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	%		124.772.350,00		124.772.350,00							124.772.350,00		100,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase Aktivas Perempuan dalam Penanganan Kasus Kekerasan di Masyarakat (persen per 1000 perempuan)	%															
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	%		154.248.500,00	100,00	154.248.500,00							154.248.500,00		100,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Jumlah Perempuan Berdaya Terpenuhi Haknya dan Terlindungi	Orang		2.460.787.050,00	500,00	2.460.787.050,00							2.460.787.050,00		100,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	%			4,20												
Program Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Terpenuhinya Hak-Hak Anak		85,00	1.828.234.750,00	90,17	948.605.000,00	85,00	565.912.500,00	69,23	458.720.500,00	81,45	81,06	69,23	1.407.325.500,00	81,45	76,98	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase Kecamatan Layak Anak		75,00		65,00		75,00		65,00		86,67		65,00		86,67		
Program Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan	Persentase Jumlah Perempuan yang Berdaya Guna dan Berdaya Saing	%	77,95	4.048.095.000,00	59,45	3.672.132.650,00	77,95	40.000.000,00	59,45	-	76,27	-	59,45	3.672.132.650,00	76,27	90,71	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	%	4,33		3,19		4,33		3,19		73,67		3,19		73,67		
Program Peningkatan Kualitas Hidup	Persentase Jumlah Perempuan yang Mampu Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga	%	77,78	1.130.725.100,00	58,15	870.596.400,00	77,78	147.344.100,00	59,59	27.874.750,00	76,61	18,92	56,69	898.471.150,00	72,89	79,46	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Akhir Kinerja RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10=9/4		11
Perempuan dan Keluarga																	
Program Data dan Informasi Gender dan Anak	Tersedianya Informasi Data Gender dan Anak	Data	ada	688.449.000,00	ada	427.196.183,00	ada	118.250.000,00	ada	-	100,00	0,00	ada	427.196.183,00	100,00	62,05	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase Aktifis Perempuan dalam Penanganan Kasus Kekerasan di Masyarakat (persen per 100.000 perempuan)	%	137,00		147,00		137,00		147,00		107,30		147,00		107,30		
<b>PANGAN</b>																	
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian, Peternakan dan Kehutanan	Persentase Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi	%	80,00	8.922.500,00		8.922.500,00							80,00	8.922.500,00	100,00	100,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian
	Persentase Tersedianya Benih Sayuran dan Rak Beserta Media Tanam	%	30,00										30,00		100,00		
	Keikutsertaan Dinas Dalam Promosi Pembangunan	Kali	1,00										1,00		100,00		
	Persentase Tersedianya Sarana Pertanian untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	%	0,00										-		-		
	Tersedianya data Statistik Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Data	tidak										tidak		-		
Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Kelembagaan	Persentase SDM yang Telah Mengikuti Diklat	%	30,00	623.593.100,00		623.593.100,00							30,00	623.593.100,00	100,00	100,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase Termonitornya Harga-Harga Komoditi Pertanian Ditingkat Usaha Tani	%	80,00	22.478.000,00		22.478.000,00							80,00	22.478.000,00	100,00	100,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian
	Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	7,00														
	Ketersediaan Energi per Kapita (kkal/kap/hari)	Jumlah															
	Ketersediaan Protein per Kapita (gr/kap/hari)	Jumlah															
	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%															



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Akhir Kinerja RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10=9/4		11
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	10,00	3.279.460.800,00	24,08	866.384.550,00	10,00	988.136.800,00	-	287.521.000,00	-	29,10	-	1.153.905.550,00	-	35,19	Dinas Pangan
	Ketersediaan Energi per Kapita	kkal/kap/hari	2.400,00		3.339,00		2.400,00		2.490,00		103,75		2.490,00		103,75		
	Ketersediaan Protein per Kapita	gr/kap/hari	71,98		72,06		71,98		72,10		100,17		72,10		100,17		
	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	62,50		80,00		62,50		85,00		136,00		85,00		136,00		
<b>PERTANAHAN</b>																	
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Sertifikat yang Diterbitkan dan Diserahkan kepada Masyarakat Dibandingkan Jumlah Bidang Tanah yang Dibantu Pengurusan Sertifikatnya	%	100,00	75.554.953.239,00	100,00	58.436.156.550,00	100,00	298.362.271,00	-	-	-	-	100,00	58.436.156.550,00	100,00	77,34	Dinas Perumahan dan Permukiman; Dinas Pekerjaan Umum; Sekretariat Daerah (2017)
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase Konflik Pertanahan yang Termediasi Dibandingkan Konflik Pertanahan yang Terjadi	%	100,00	40.980.000,00	60,00	21.258.000,00							60,00	21.258.000,00	60,00	51,87	Sekretariat Daerah
Program Pengelolaan Tanah Aset Pemda	Persentase Aset Tanah Pemkot yang Bersertifikat Dibandingkan dengan Jumlah Aset Tanah Pemkot	%		130.151.570,00		130.151.570,00								130.151.570,00		100,00	Sekretariat Daerah
Program Pengelolaan Tanah Aset Pemda dan Tertib Pertanahan	Persentase Aset Tanah Pemkot yang Bersertifikat Dibandingkan dengan Jumlah Aset Tanah Pemkot	%	85,94	3.420.812.121,00	75,00	255.465.845,00	85,94	1.099.811.521,00	75,00	584.001.852,00	87,27	53,10	75,00	839.467.697,00	87,27	24,54	Sekretariat Daerah ; Dinas Permukiman dan Permukiman
	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	100,00		100,00		100,00		0,00		0,00		100,00		100,00		
	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>																	
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rasio Ketersediaan Kebutuhan SDA	Angka	>1	32.079.500,00	>1	32.079.500,00							>1	32.079.500,00	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi	Persentase Ketersediaan Data LH	%	75,00	1.125.000,00	75,00	1.125.000,00							75,00	1.125.000,00	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Akhir Kinerja RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10=9/4		11
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup																	
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dan Energi	Berkurangnya Kawasan Pertambangan Ilegal	%	80,00	68.090.200,00	80,00	68.090.200,00							80,00	68.090.200,00	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	%		503.895.000,00		503.895.000,00								503.895.000,00		100,00	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Peningkatan Kawasan Hijau Pertamanan	m <sup>2</sup>		1.125.622.500,00		1.125.622.500,00								1.125.622.500,00		100,00	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Program Penataan dan Pengembangan Keindahan Kota	Taman Kota dalam Kondisi Baik	Jumlah	5,00	3.327.940.050,00	5,00	3.327.940.050,00							5,00	3.327.940.050,00	100,00	100,00	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	Rasio Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum terhadap Panjang Jalan Kota	Angka	14,00		14,00								14,00		100,00		
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Angka	81,00	4.739.443.750,00	80,31	2.100.554.250,00	81,00	590.000.000,00	83,00	10.208.155,00	102,47	1,73	83,00	2.110.762.405,00	102,47	44,54	Dinas Lingkungan Hidup
	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Angka	59,00		54,00		59,00		51,31		86,97		51,31		86,97		
	Persentase Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Mentaati Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air	%	60,00		70,00		60,00		60,00		100,00		60,00		100,00		
	Persentase Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Sumber Tidak Bergerak yang Memenuhi Persyaratan Administratif dan Teknis Pencegahan Pencemaran Udara	%	60,00		50,00		60,00		60,00		100,00		60,00		100,00		
	Persentase Luasan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa yang Telah Ditetapkan dan Diinformasikan Status Kerusakannya	%	60,00		48,00		60,00		0,00		0,00		48,00		80,00		
	Persentase Ketersediaan Data LH	%	85,00		80,00		85,00		85,00		100,00		85,00		100,00		



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Akhir Kinerja RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10=9/4		11
	Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%															
	Persentase Jumlah Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH dari Izin yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditangani	%	60,00		50,00		60,00		100,00		166,67		100,00		166,67		
	RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	1		-												
	Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota (dokumen)	Jumlah	1		-												
Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	100,00	360.000.000,00	100,00	12.482.000,00	100,00	120.000.000,00	100,00	-	100,00	-	100,00	12.482.000,00	100,00	3,47	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kota yang Ditangani	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Program Peningkatan Adaptasi Terhadap Dampak Perubahan Iklim	Penurunan Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca	%	5,00	2.171.388.000,00	1,00	840.083.260,00	1,00	620.000.000,00	1,00	-	100,00	-	4,00	840.083.260,00	80,00	38,69	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	%	14,00		11,08		14,00		11,08		79,14		14,00		100,00		
Program Pengelolaan Sampah	Persentase Jumlah Penduduk yang Dilayani Melalui Kegiatan Pengurangan Volume Sampah (3R)	%	60,00	46.556.364.690,00	40,00	12.784.288.310,00	60,00	4.182.041.480,00	-	859.077.650,00	0,00	20,54	-	13.643.365.960,00	-	29,31	Dinas Lingkungan Hidup
	Timbunan Sampah yang Ditangani	Ton	950,00		85,00		950,00		950,00		100,00		950,00		100,00		
	Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan	%	100,00		98,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	%	95,00		95,00		95,00		95,00		100,00		95,00		100,00		



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Akhir Kinerja RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10=9/4		11
	Kualitas Pengelolaan TPA (koefisien operasi, kualitas lindi, penanganan gas)	%	60,00		10,00		60,00		60,00		100,00		60,00		100,00		
<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>																	
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk	%	97,00	13.583.759.900,00	95,00	8.974.272.415,00	97,00	3.802.393.000,00	97,00	3.362.107.352,00	100,00	88,42	97,00	12.336.379.767,00	100,00	90,82	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Bayi Berakte Kelahiran	%	94,00		92,00		94,00		94,00		100,00		94,00		100,00		
	Persentase Pasangan Berakte Perkawinan	%	70,00		60,00		70,00		70,00		100,00		70,00		100,00		
	Persentase Penduduk Berkartu Keluarga (KK)	%	95,00		93,00		95,00		95,00		100,00		95,00		100,00		
	Persentase Anak Berkartu Identitas Anak	%	70,00		50,00		70,00		70,00		100,00		70,00		100,00		
	Terselenggaranya Pelayanan Terpadu Satu Atap Secara Mantap	%	100,00		90,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>																	
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Kelurahan yang Difasilitasi dan Diberdayakan			226.253.000,00		226.253.000,00								226.253.000,00		100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Program Peningkatan Masyarakat dalam Membangun Desa	Pembentukan POKJANAL POSYANDU (Kelurahan)	Jumlah		39.895.750,00		39.895.750,00								39.895.750,00		100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Program Peningkatan Kualitas Perumahan	Pengendalian dan Monitoring Bedah Rumah	Kelurahan		76.364.750,00	126,00	76.364.750,00								76.364.750,00		100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Cakupan Kawasan Permukiman yang Dikembangkan	Kelurahan	126,00	177.142.600,00	126,00	177.142.600,00							126,00	177.142.600,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Kelurahan yang Difasilitasi dan Diberdayakan	%	95,00	2.840.175.000,00	90,00	1.291.437.700,00	95,00	619.675.000,00	2,38	400.291.000,00	2,51	64,60	2,38	1.691.728.700,00	2,51	59,56	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	Kelompok	110,00		147,00		110,00		147,00		133,64		147,00		147,00		



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Akhir Kinerja RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10=9/4		11	
	Persentase PKK Aktif	%	90,00		90,00		90,00		90,00		100,00		90,00		90,00			
	Jumlah Kelurahan yang Memiliki Profil	Kelurahan	126,00		126,00		126,00		126,00		100,00		126,00		100,00			
Program Peningkatan Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Persentase Pelaksanaan BBGRM	%	75,00	964.250.000,00	100,00	347.996.300,00	75,00	189.250.000,00	-	82.139.400,00	-	43,40	-	430.135.700,00	-	44,61	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	
	BOP BDC (Business Development Centre)	Orang	60,00		60,00		60,00		60,00		100,00		60,00		100,00			
Program Penanggulangan Kemiskinan	BOP P2KP	Kelurahan	126,00	267.548.200,00	126,00	67.548.200,00							126,00	67.548.200,00	100,00	25,25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Pembentukan POKJANAL POSYANDU	Kelurahan	126,00	308.750.000,00	126,00	158.602.000,00	126,00	58.750.000,00	126,00	53.000.000,00	100,00	90,21	126,00	211.602.000,00	100,00	68,54	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan yang Dikembangkan	Meningkatnya Lembaga Ekonomi Kelurahan yang Dikembangkan	Kelompok	55,00	261.500.000,00	45,00	106.782.500,00	55,00	151.500.000,00	55,00	31.743.000,00	100,00	20,95	55,00	138.525.500,00	100,00	52,97	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	
<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>																		
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita	%	78,30	1.699.817.750,00	78,30	1.699.817.750,00							78,30	1.699.817.750,00	100,00	100,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 Petugas di Setiap 1 Desa/Kelurahan (Petugas)	Angka	126,00	2.782.885.000,00	126,00	2.782.885.000,00							126,00	2.782.885.000,00	100,00	100,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Program Keluarga Berencana	Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya di Bawah Usia 20 Tahun	%	2,83	18.304.224.950,00	0,28	6.547.704.250,00	2,83	5.239.834.500,00	0,30	888.616.117,00	10,60	16,96	0,30	7.436.320.367,00	943,33	40,63	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin ber KB Tidak Terpenuhi (unmet need)	%	9,31		11,62		9,31		11,50		123,52		11,50		80,96			
	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif	%	67,40		72,65		67,40		72,79		108,00		72,79		92,60			
Program Penyuluhan dan	Angka Kelahiran (Total Fertility Rate/ TFR)	Angka	2,12	15.084.612.400,00	2,17	9.278.970.135,00	2,12	4.960.592.000,00	2,37	2.186.985.000,00	89,45	44,09	2,37	11.465.955.135,00	89,45	76,01	Dinas Pengendalian Penduduk dan	



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Akhir Kinerja RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10=9/4		11
Penggerakan Masyarakat	Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas di Setiap 1 Desa/Kelurahan (Petugas)	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Keluarga Berencana
	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 Petugas di Setiap 1 Desa/Kelurahan (Petugas)	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	35,38		32,19		35,38		34,68		98,02		34,68		98,02		
	Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi	%	6,48		16,54		6,48		15,58		41,59		15,58		41,59		
Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pasangan Usia Subur Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	87,00	13.777.253.000,00	84,21	8.278.030.580,00	87,00	4.270.280.000,00	50,00	1.621.070.000,00	57,47	37,96	50,00	9.899.100.580,00	57,47	71,85	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Setiap Tahun	%	30,00		30,00		30,00		30,00		100,00		30,00		100,00		
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita	%	70,00		96,82		70,00		50,00		71,43		50,00		71,43		
Program Pengendalian Penduduk	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan Setiap Tahun	%	100,00	1.055.000.000,00	100,00	363.439.100,00	100,00	110.000.000,00	50,00	-	50,00	-	50,00	363.439.100,00	50,00	34,45	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase Sekolah yang Mendapat Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja	%	75,00	17.465.000,00	75,00	17.465.000,00							75,00	17.465.000,00	100,00	100,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>PERHUBUNGAN</b>																	
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tingkat Pelayanan pada Jalan Arteri	Parameter	B	470.664.100,00	C	368.484.600,00	B	50.000.000,00	C	49.025.900,00	100,00	98,05	C	417.510.500,00	100,00	88,71	Dinas Perhubungan
	Tingkat Pelayanan pada Jalan Kolektor	Parameter	B		C		B		C		100,00		C		100,00		
	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum	Orang	69.640		1.153.400		69.640		1.003.344		1.440.76		1.003.344,00		1440,76		





Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Akhir Kinerja RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10=9/4		11
	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun	Orang	274.264		1.668.224,00		274.264		217.290,00		79,23		217.290,00		79,23		
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ	Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ dalam Kondisi Baik	%	90,00	1.900.200.112,00	98,66	1.249.164.700,00	90,00	228.140.000,00	90,00	151.240.000,00	100,00	66,29	90,00	1.400.404.700,00	100,00	73,70	Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya Load Faktor Angkutan Umum (berdasarkan hasil survey)	%	52,74	236.958.500,00	38,34	14.598.500,00	52,74	47.975.000,00	45,37	-	86,03	-	45,37	14.598.500,00	86,03	6,16	Dinas Perhubungan
	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Orang	69.640,00		1.153.400		69.640		1.003.344		1.440,76		1.003.344		1440,76		
	Rasio Ijin Trayek	%	0,011		0,000		0,011		0,004		36,36		0,004		36,36		
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rasio Volume Lalu Lintas pada Jalan Arteri	%	0,20	21.154.810.500,00	0,49	11.102.956.690,00	0,20	8.295.451.000,00	0,49	6.780.477.700,00	245,00	81,74	0,49	17.883.434.390,00	245,00	84,54	Dinas Perhubungan
	Rasio Volume Lalu Lintas pada Jalan Kolektor	%	0,30		0,61		0,30		0,61		203,33		0,61		203,33		
	Persentase Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan (rambu, marka, guardrail) pada Jalan Kota dalam Kondisi Baik	%	67,11		98,32		67,11		67,11		100,00		67,11		100,00		
	Rasio Titik Kemacetan yang Terkendali	%	75,00		25,00		75,00		70,00		93,33		70,00		93,33		
Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	100,00	1.320.924.000,00	100,00	1.101.838.000,00	100,00	177.558.000,00	100,00	173.790.000,00	100,00	97,88	100,00	1.275.628.000,00	100,00	96,57	Dinas Perhubungan
	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Uji	973,00		790,00		973,00		13.048,00		1.341,01		13.048,00		1.341,01		
	Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor bagi Kota yang Memiliki Populasi Kendaraan Wajib Uji Minimal 4000 (empat ribu) Kendaraan Wajib Uji	Unit	1,00		1		-		-		-		1		100,00		
<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>																	
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	100,00	14.280.888.050,00	85,00	1.687.173.479,00	100,00	9.792.700.800,00	90,00	2.613.115.800,00	90,00	26,68	90,00	4.300.289.279,00	90,00	30,11	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi	%	100,00		85,00		100,00		95,00		95,00		95,00		95,00		



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Akhir Kinerja RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10=9/4		11
Program Penelitian dan Pengembangan Iptek	Sistem Informasi Pemda yang Terimplementasi	%	100,00	155.990.000,00	80,00	99.990.000,00							100,00	99.990.000,00	100,00	64,10	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Persentase Tayang Publikasi Kegiatan Pemda di Media Elektronik	%	100,00	7.976.268.012,00	95,00	5.340.834.600,00	100,00	2.411.268.012,00	95,00	2.245.799.150,00	95,00	93,14	95,00	7.586.633.750,00	95,00	95,12	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi Serta Penggunaan Media Massa	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Call Center dan Website	%		142.464.140,00	100,00	129.099.515,00								129.099.515,00		90,62	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan POSTELSUS dan Penyiaran	%			100,00												
	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	%			75,00												
Program Pengembangan Sistem Manajemen Data	Persentase Ketersediaan Data/Statistik Dibandingkan Jumlah Data yang Seharusnya Tersedia	%		101.000.000,00	60,00	22.840.000,00								22.840.000,00		22,61	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Persentase Kepatuhan Wajib Retribusi Membayar Kewajiban	%	70,00	550.000.000,00	70,00	452.913.320,00							70,00	452.913.320,00	100,00	82,35	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>																	
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Kredit Ekonomi Kerakyatan yang Tersalurkan	%		672.337.850,00		672.337.850,00								672.337.850,00		100,00	Dinas Koperasi dan UKM
	Terpromosinya Produk UMKM (kali)	Jumlah															
	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha (pendapatan kotor + piutang) Koperasi Dibanding Volume Usaha (pendapatan kotor + piutang) Koperasi Tahun Sebelumnya	%															
Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	Persentase UKM Non BPR/LKM aktif	%	60,20	5.935.732.000,00	46,63	2.877.863.468,00	60,20	2.954.322.000,00	36,89	483.046.000,00	61,28	16,35	36,89	3.360.909.468,00	61,28	56,62	Dinas Koperasi dan UKM
	Persentase BPR/LKM Aktif	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Dibanding Seluruh UKM	%	87,84		89,47		87,84		63,10		71,84		63,10		71,84		



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Akhir Kinerja RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10=9/4		11
	Persentase Kredit Ekonomi Kerakyatan (KEK) Melalui Bank Pasar yang Disalurkan Dibandingkan Dana KEK yang Tersedia di Bank Pasar	%	85,00		31,53		85,00		19,05		22,41		19,05		22,41		
	Persentase Koperasi Aktif Dibanding Jumlah Koperasi Terdaftar	%	65,05		25,23		65,05		26,35		40,51		26,35		40,51		
Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	Persentase Pertumbuhan Anggota Koperasi Dibanding Jumlah Anggota Koperasi Tahun Sebelumnya	%	0,61	369.634.500,00	-7,10	160.740.000,00	0,61	164.634.500,00	-0,024	33.900.000,00	-3,93	20,59	-0,024	194.640.000,00	-3,93	52,66	Dinas Koperasi dan UKM
	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha (pendapatan kotor + piutang) Koperasi Dibanding Volume Usaha (pendapatan kotor + piutang) Koperasi Tahun Sebelumnya	%	2,25		-2,44		2,25		-0,051		-2,27		-0,051		-2,27		
<b>PENANAMAN MODAL</b>																	
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	IKM Bidang Perizinan	%	90,00	2.855.257.500,00	81,13	1.481.250.502,00	90,00	1.105.687.500,00	85,25	563.750.826,00	94,72	50,99	85,25	2.045.001.328,00	94,72	71,62	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Nilai Investasi PMA yang Termonitor	%	25,50	205.000.000,00	16,37	127.908.791,00	25,50	50.000.000,00	25,30	-	99,22	0,00	25,30	127.908.791,00	99,22	62,39	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Persentase Peningkatan Jenis Investasi PMA yang Termonitor	%	14,50		14,50		14,50		13,70		94,48		13,70		94,48		
	Persentase Peningkatan Nilai Investasi PMDN yang Termonitor	%	13,50		30,39		13,50		14,05		104,07		14,05		104,07		
	Persentase Peningkatan Jenis Investasi PMDN yang Termonitor	%	14,50		25,00		14,50		13,30		91,72		13,30		91,72		
	Persentase Peningkatan Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	%	11,00		3,45		11,00		11,65		105,91		11,65		105,91		
	Persentase Peningkatan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	%	10,75		30,39		10,75		11,75		109,30		11,75		109,30		
	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	20,24		30,39		20,24		20,29		100,25		20,29		100,25		



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Akhir Kinerja RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10=9/4		11
<b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>																	
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	85,00	1.575.570.375,00	70,00	1.119.678.500,00	85,00	378.900.375,00	85,00	93.425.000,00	100,00	24,66	85,00	1.213.103.500,00	100,00	76,99	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	100,00	4.168.793.182,00	100,00	3.526.193.485,00	100,00	588.395.000,00	100,00	154.808.000,00	100,00	26,31	100,00	3.681.001.485,00	100,00	88,30	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Peningkatan Pelatih yang Bersertifikasi	%	24,00		24,00		24,00		24,00	100,00		24,00		100,00			
	Cakupan Pembinaan Atlit Muda/Pelajar	%	75,00		70,00		75,00		75,00	100,00		75,00		100,00			
Program Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga dalam 1 Tahun	Kali	10,00	410.642.000,00	8,00	278.496.935,00	10,00	41.500.000,00	10,00	35.000.000,00	100,00	84,34	10,00	313.496.935,00	100,00	76,34	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Atlet Berprestasi	%	90,00		80,00		90,00		90,00	100,00		90,00		100,00			
Program Peningkatan Kapasitas dan Peran Pemuda	Persentase Wirasaha Muda	%	80,00	25.000.000,00	50,00	-							50,00	-	62,50	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
<b>STATISTIK</b>																	
Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Persentase Pemenuhan Informasi Statistik Daerah	%	70,00	141.880.000,00		141.880.000,00							70,00	141.880.000,00	100,00	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pengembangan Sistem Manajemen Data	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Sistem	Ada	1.077.197.800,00	Ada	729.079.408,00	Ada	181.197.800,00	Ada	122.327.500,00	100,00	67,51	Ada	851.406.908,00	100,00	79,04	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Buku "Kota dalam angka"	Dokumen	Ada		Ada		Ada		Ada		100,00		Ada		100,00		
	Buku "PDRB"	Dokumen	Ada			Ada		Ada		Ada	100,00		Ada		100,00		
<b>PERSANDIAN</b>																	
Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi serta Penggunaan Media Massa	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Call Center dan Website	%	100,00	3.401.530.000,00	100,00	2.290.324.878,00	100,00	723.530.000,00	100,00	589.297.000,00	100,00	81,45	100,00	2.879.621.878,00	100,00	84,66	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan POSTELSUS dan Penyiaran	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase Perangkat daerah yang Telah Menggunakan	%	100,00		85,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Akhir Kinerja RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10=9/4		11
	Sandi dalam Komunkasi Perangkat Daerah																
<b>KEBUDAYAAN</b>																	
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penyelenggaraan Festival dan Budaya	Kali	5	1.288.787.400,00	1	445.251.500,00	5	190.000.000,00	-	-	-	-	-	445.251.500,00	-	34,55	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pengembangan Seni dan Nilai Budaya	Jumlah Promosi Budaya yang Diselenggarakan/Diikuti	Even	10,00	5.863.422.500,00	1,00	2.911.328.100,00	10,00	980.000.000,00	-	4.750.000,00	-	0,48	-	2.916.078.100,00	-	49,73	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Lestari	Angka	3		-		1		-		-				-		
	Persentase Sanggar Seni yang Aktif	%	100,00		47,14		100,00				0,00						
Program Pembinaan Seni dan Nilai Budaya	Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Diinventarisasi	Angka	90,00	425.000.000,00	52,00	-	90,00	175.000.000,00	-	-	0,00	-	52,00	-	57,78	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>PERPUSTAKAAN</b>																	
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Orang	14.500,00	1.588.729.900,00	8.012,00	827.384.597,00	14.500,00	215.677.300,00	3.791,00	9.821.500,00	26,14	4,55	3.791,00	837.206.097,00	26,14	52,70	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Buku	23.836,00		1.508,00		1.600,00		2.554,00		159,63		4.062,00		17,04		
	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	11.986,00		550,00		900,00		900,00		100,00		1.450,00		12,10		
	Buku Siap Layan	Buku	10.000,00		1.583,00		1.250,00		1.250,00		100,00		8.016,00		80,16		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan dan Otomatisasi Perpustakaan Umum	Kualitas SDM Pengelola Perpustakaan	Orang	50,00	2.066.472.000,00	100,00	1.392.148.900,00							100,00	1.392.148.900,00	200,00	67,37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Penyediaan dan Pengolahan Koleksi Bahan Pustaka	Buku	1.000,00		800,00								800,00		80,00		
	Sarana dan Prasarana Perpustakaan Sesuai Standar Perpustakaan Nasional	Paket	1,00		1,00								1,00		100,00		
	Buku Siap Layan	Buku			1.250,00												



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Akhir Kinerja RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10=9/4		11	
<b>KEARSIPAN</b>																		
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	62,00	157.349.000,00	87,50	91.834.500,00	62,00	39.762.500,00	10,00	-	16,13	-	10,00	91.834.500,00	16,13	58,36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Peningkatan Pengolahan Arsip	Berkas	17.000,00	327.603.000,00	2.400,00	174.253.100,00	2.600,00	14.665.000,00	611,00	-	23,50	-	611,00	174.253.100,00	3,59	53,19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi di Bidang Arsip	Peningkatan Jumlah SDM Pengelola Kearsipan	Orang	200,00	234.500.000,00	-	19.465.000,00	50,00	80.000.000,00	10,00	-	20,00	-	10,00	19.465.000,00	5,00	8,30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Tersedianya Dokumen JRA yang Ditetapkan Perwali	Dokumen	ada	186.207.842,00	Ada	71.526.472,00		36.207.842,00		-		0,00	ada	71.526.472,00	100,00	38,41	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	Persentase Arsip yang Dimusnahkan	%	66,00		100,00		33,00		10,00		30,30		10,00		15,15			
<b>URUSAN PILIHAN</b>																		
<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>																		
Program Pengembangan Budaya Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	131,01	2.077.264.600,00	115,55	1.480.478.750,00	131,01	438.230.250,00	100,30	190.600.000,00	76,56	43,49	100,30	1.671.078.750,00	76,56	80,45	Dinas Kelautan dan Perikanan	
Program Peningkatan dan Pengembangan Produksi Perikanan Budi Daya	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Jumlah	103,00	315.019.850,00	103,00	305.160.900,00							103,00	305.160.900,00	100,00	96,87	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Nilai Tukar Nelayan	Jumlah	102,10		102,10								102,10		100,00			
	Produksi Perikanan Budidaya	Ton																
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	703,11	1.370.136.100,00	3.404,00	1.200.598.300,00	703,11	125.086.300,00	459,67	93.163.500,00	65,38	74,48	459,67	1.293.761.800,00	65,38	94,43	Dinas Kelautan dan Perikanan	
	Cakupan Bina Kelompok Nelayan Dibandingkan Jumlah Kelompok Nelayan	Kelompok	33,00		28,00		33,00		33,00		100,00		33,00		100,00			
Program Meta Data, Informasi dan Inovasi Potensi Kelautan dan Perikanan	Persentase Ketersediaan Jenis dan Ragam Data Kelautan dan Perikanan	%	57,00	96.130.000,00	20,00	38.875.000,00	57,00	25.580.000,00	50,00	25.580.000,00	87,72	100,00	50,00	64.455.000,00	87,72	67,05	Dinas Kelautan dan Perikanan	



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Akhir Kinerja RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10=9/4		11
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Perikanan	%	8,30	541.437.050,00	7,10	316.558.580,00	7,40	141.264.750,00	4,00	-	54,05	-	4,00	316.558.580,00	48,19	58,47	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Perumusan Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kebijakan Terbaru yang Ditetapkan Cakupan Perikanan dan Kelautan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	3	7.565.000,00	1	-							1	-	33,33	-	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan	%	100,00	109.735.000,00	100,00	104.443.850,00							100,00	104.443.850,00	100,00	95,18	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	Nilai Konsumsi Ikan (kg/perkapita/tahun)	Jumlah		391.044.000,00		381.094.000,00								381.094.000,00		97,46	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Ketersediaan Dana Pendamping	%	10,00	101.240.000,00	10,00	101.240.000,00							10,00	101.240.000,00	100,00	100,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Cakupan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dikelola	%	99,17	13.900.000,00	99,17	13.900.000,00							99,17	13.900.000,00	100,00	100,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Tingkat Keamanan Pangan	%	16,50	121.925.000,00	12,50	102.253.500,00							16,50	102.253.500,00	100,00	83,87	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim	Nilai Konsumsi Ikan	kg/perkapita/tahun	33,28	301.921.000,00	35,81	86.067.000,00	33,20	204.046.000,00	41,22	-	124,16	-	124,16	86.067.000,00	373,08	28,51	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan Perikanan yang Dibantu			776.061.000,00		723.983.300,00								723.983.300,00		93,29	Dinas Kelautan dan Perikanan



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Akhir Kinerja RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10=9/4		11
Program Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Cakupan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan Perikanan yang Dibantu	%	90,00	1.313.717.650,00	21,00	1.056.355.600,00	26,00	221.604.000,00	217,04	188.600.000,00	834,78	85,11	217,04	1.244.955.600,00	241,16	94,77	Dinas Kelautan dan Perikanan
<b>PARIWISATA</b>																	
Program Pengembangan Pemasaran Wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik	Orang		791.537.900,00		791.537.900,00								791.537.900,00		100,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang															
	Jumlah Even Promosi yang Diselenggarakan/Diikuti	Jumlah															
	Kontribusi Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (bidang pariwisata) terhadap PDRB	%															
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Objek Wisata yang Dikembangkan	Lokasi		18.300.000,00		18.300.000,00								18.300.000,00		100,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari															
Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah Industri Baru yang Mendukung MICE (jasa usaha)	Jumlah		757.686.750,00		732.760.250,00								732.760.250,00		96,71	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Kontribusi Kategori Pariwisata terhadap PAD	%															
	Jumlah SDM Pariwisata yang Tersertifikasi	Orang															
Program Pengembangan Destinasi Wisata	Jumlah Destinasi Baru yang Dikembangkan	Lokasi	2,00	4.565.979.200,00	4,00	111.876.700,00	2,00	4.392.606.500,00	5,00	830.768.780,00	250,00	18,91	5,00	942.645.480,00	250,00	20,64	Dinas Pariwisata
	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	2,00		1,70		2,00		1,50		75,00		1,50		75,00		
Program Pengembangan Pemasaran	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik	Jiwa	193.211,00	827.284.000,00	1.064.493,00	627.753.430,00	193.211,00	50.000.000,00	819.492,00	49.745.000,00	424,14	99,49	819.492,00	677.498.430,00	424,14	81,89	Dinas Pariwisata
	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Jiwa	1.850,00		22.218,00		1.850,00		1.767,00		95,51		1.767,00		95,51		
	Jumlah Even Promosi yang Diselenggarakan/Diikuti	Event	15,00		15,00		15,00		10,00		66,67		10,00		66,67		
	Kontribusi Kategori Penyediaan Akomodasi dan	%	2,95		2,90		2,95		2,90		98,31		2,90		98,31		





Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Akhir Kinerja RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10=9/4		11
	Makan Minum (bidang pariwisata) terhadap PDRB																
Program Pengembangan Kemitraan dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Industri Baru yang Mendukung MICE (jasa usaha)	Event	50,00	6.523.951.736,00	40,00	1.525.706.850,00	50,00	3.971.378.593,00	40,00	830.768.780,00	80,00	20,92	40,00	2.356.475.630,00	80,00	36,12	Dinas Pariwisata
	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	%	15,00		23,16		15,00		23,16		154,40		23,16		154,40		
	Jumlah SDM Pariwisata yang Tersertifikasi	Orang	50,00		40,00		50,00		40,00		80,00		40,00		80,00		
<b>PERTANIAN</b>																	
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	%		7.334.000,00		7.334.000,00								7.334.000,00		100,00	Dinas Pertanian
	Produksi Padi	Ton/Thn															
	Produksi Jagung	Ton/Thn															
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Jumlah Kasus Penyakit yang Berasal dari Hewan (rabies, antrax, flu burung dll)	Kasus		147.395.000,00		147.395.000,00								147.395.000,00		100,00	Dinas Pertanian
	Produksi Daging	Ton/Thn															
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian, Peternakan dan Kehutanan	Sarana Pertanian untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	%	27,95	100.217.250,00		100.217.250,00							27,95	100.217.250,00	100,00	100,00	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dan Kehutanan	Tersedianya Bibit Pala dan Cengkeh Unggul (Batang)	Jumlah		37.317.000,00		37.317.000,00								37.317.000,00		100,00	Dinas Pertanian
Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik Daerah	Tersedianya Buku Pertanian dalam Angka	Dokumen	4	159.350.000,00	1	108.035.000,00	1	39.350.000,00	-	-	-	-	3	108.035.000,00	75,00	67,80	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Penyuluhan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian	Persentase Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pelatihan	%	10,00	1.785.097.250,00	26,92	1.560.159.350,00	10,00	141.981.250,00	10,00	-	100,00	-	10,00	1.560.159.350,00	100,00	87,40	Dinas Pertanian



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Akhir Kinerja RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10=9/4		11
Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	Persentase Luas Lahan Tembakau yang Menggunakan Bibit Tembakau Berkadar Nikotin Rendah	%	81,82	1.033.188.900,00	100,00	405.229.000,00	81,82	338.188.900,00	70,00	234.620.900,00	85,55	69,38	70,00	639.849.900,00	85,55	61,93	Dinas Pertanian
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Jumlah Kasus Penyakit yang Berasal dari Hewan (rabies, antrax, flu burung dll)	Kasus	0,00	1.375.335.072,00	0,00	1.133.569.350,00	0,00	180.335.072,00	0,00	87.227.000,00	100,00	48,37	0,00	1.220.796.350,00	100,00	88,76	Dinas Pertanian
	Produksi Daging	Ton/Thn	4.986,40		5.474,75		4.986,40		5.078,67		101,85		5.078,67		101,85		
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian	Peningkatan Pendapatan Petani	%	20,00	360.418.412,00	31,96	245.218.000,00	5,00	-	4,00	-	80,00	-	45,96	245.218.000,00	229,80	68,04	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Hortikultura Ramah Lingkungan	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Tanaman Hortikultura terhadap PDRB	%	0,14	604.364.150,00	0,14	232.504.000,00	0,14	321.671.150,00	0,14	69.879.000,00	100,00	21,72	0,14	302.383.000,00	100,00	50,03	Dinas Pertanian
	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian Tanaman Hortikultura	%	12,15		12,15		12,15		12,15		100,00		12,15		100,00		
	Data Potensi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dokumen	1,00		1,00		1,00		1,00		100,00		1,00		100,00		
	Produksi Padi	Ton/Thn															
	Produksi Jagung	Ton/Thn															
	Desa yang Berbudidaya Sayuran Organik	Angka	1,00		1,00		0,00		0,00		100,00		1,00		100,00		
	Pusat Pelatihan Budidaya Hortikultura	Angka	1,00				1,00		1,00				1,00		100,00		
	Kontribusi Sektor Pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	0,24		0,24		0,24		0,24		100,00		0,24		100,00		
	Kontribusi Sektor Perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	0,20		0,20		0,20		0,20		100,00		0,20		100,00		
Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	0,02		0,02		0,02		0,02		100,00		0,02		100,00			
Program Penataan dan	Peningkatan Kawasan Hijau Pertamanan Kota	m <sup>2</sup>	80.841,43	5.652.034.300,00	146.643,68	2.103.483.700,00	80.841,43	1.925.080.700,00	146.643,68	1.729.154.600,00	181,40	89,82	146643,68	3.832.638.300,00	181,40	67,81	Dinas Pertanian



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Akhir Kinerja RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10=9/4		11	
Pengembangan Keindahan Kota																		
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Produksi Tembakau	ton/tahun	29,75	2.748.358.100,00		2.694.548.700,00							25,65	2.694.548.700,00	86,22	98,04	Dinas Pertanian	
Program Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau	Persentase Kelompok Petani Tembakau yang Dibina	%	70,00	1.364.649.571,00	58,00	459.378.925,00							58,00	459.378.925,00	82,86	33,66	Dinas Pertanian	
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan	Produksi Padi (ton/tahun)	Jumlah	10.337,83	247.250.000,00	9.269,65	-							9.269,65	-	89,67	0,00	Dinas Pertanian	
	Produksi Jagung (ton/tahun)	Jumlah	410,36		771,91									771,91		188,10		
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	%	55,56	63.375.000,00		-	55,56	63.375.000,00	96,24	60.990.000,00	173,22	96,24	96,24	60.990.000,00	173,22	96,24	Dinas Pertanian	
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Cakupan Kelompok Tani yang Mendapatkan Bantuan Sarana dan Prasarana Pertanian	%	35,00	6.431.381,00		-	35,00	-	50,00	-	142,86	-	50,00	-	142,86	-	Dinas Pertanian	
<b>KEHUTANAN</b>																		
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pembinaan, Monitoring dan koordinasi Penatausahaan Hasil Hutan	%	100,00	19.649.500,00		19.649.500,00							100,00	19.649.500,00	100,00	100,00	Dinas Pertanian	
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase Administrasi Penunjang Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Lingkungan	%	100,00	966.216.050,00		954.181.200,00							100,00	954.181.200,00	100,00	98,75	Dinas Pertanian	
	Persentase Penghijauan Lingkungan	%	100,00										100,00		100,00			
	Persentase Pengembangan Tanaman Bambu	%	100,00											100,00		100,00		
Program Perlindungan dan Konservasi	Persentase Pengendalian Satwa Liar di Hutan Kera Tirtosari	%	100,00	2.954.000,00		2.954.000,00							100,00	2.954.000,00	100,00	100,00	Dinas Pertanian	



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Akhir Kinerja RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10=9/4		11
Sumber Daya Hutan	Persentase Pemeliharaan Tata Batas Kawasan Hutan Register 19 Tahun	%	100,00										100,00		100,00		
<b>PERDAGANGAN</b>																	
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen yang Ditindaklanjuti	%		5.736.000,00		5.736.000,00								5.736.000,00		100,00	Dinas Perdagangan
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase Promosi Produk Unggulan Daerah	%		348.647.900,00		348.647.900,00								348.647.900,00		100,00	Dinas Perdagangan
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Kontribusi Sub Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	%		1.516.933.550,00		1.516.933.550,00								1.516.933.550,00		100,00	Dinas Perdagangan
Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Penyediaan Data Perkembangan Harga Pasar Dibandingkan Data yang Seharusnya Tersedia	%	90,00	1.475.265.350,00	90,00	1.439.210.875,00							90,00	1.439.210.875,00	100,00	97,56	Dinas Perdagangan
Program Penataan Lingkungan Pasar	Persentase Jumlah Pasar yang Ditata	%		387.940.000,00		290.931.000,00								290.931.000,00		74,99	Dinas Perdagangan
Program Bina Pasar	Persentase Jumlah Pasar yang Ditata	%	80,00	1.691.426.800,00	10,00	744.606.400,00	20,00	632.736.500,00	-	6.826.500,00	-	1,08	40,00	751.432.900,00	50,00	44,43	Dinas Perdagangan
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Cakupan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Lingkungan Pasar	%	80,00	244.023.000,00	100,00	92.664.000,00							100,00	92.664.000,00	125,00	37,97	Dinas Perdagangan
Program Perdagangan	Kontribusi Sub Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	%	7,39	2.999.601.303,00	7,37	2.417.606.950,00	7,39	536.753.203,00	7,37	183.385.000,00	99,73	34,17	7,37	2.600.991.950,00	99,73	86,71	Dinas Perdagangan
	Persentase Penyediaan data Perkembangan Harga Pasar Dibandingkan Data yang Seharusnya Tersedia	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Program Peningkatan dan Pengembangan Tertib Ukur	Cakupan Pengawasan Kemetrolagian	%	85,00	1.514.399.432,00	85,00	584.018.341,00	85,00	113.319.050,00	69,54	22.615.250,00	81,81	19,96	69,54	606.633.591,00	81,81	40,06	Dinas Perdagangan



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Akhir Kinerja RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10=9/4		11	
<b>PERINDUSTRIAN</b>																		
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%															-	Dinas Perindustrian
	Pertumbuhan IKM	%																
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pertumbuhan IKM	%	6,41	6.353.880.100,00	4,03	2.416.638.728,00	6,41	3.240.000.000,00	2,38	377.963.985,00	37,13	11,67	2,38	2.794.602.713,00	37,13	43,98	Dinas Perindustrian	
	Cakupan IKM yang Mendapatkan Pembinaan Dibandingkan dengan Seluruh IKM (incremental)	%	7,80		16,03		7,80		12,44		159,49		12,44		159,49			
	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	6,50		33,33		6,50		50,00		769,23		50,00		769,23			
<b>TRANSMIGRASI</b>																		
Program Pengembangan Masyarakat Melalui Transmigrasi	Cakupan Masyarakat di Wilayah Kumuh yang Mendapatkan Pemahaman Transmigrasi Dibandingkan Total Wilayah Kumuh	%	12,00	75.000.000,00	12,00	59.660.700,00	12,00	15.000.000,00	-	-	-	-	12,00	59.660.700,00	100,00	79,55	Dinas Tenaga Kerja	
<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																		
<b>PERENCANAAN</b>																		
Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Pemenuhan Dokumen Tata Ruang Wilayah	%	80,00	172.500.000,00		48.935.000,00							80,00	48.935.000,00	100,00	28,37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
Program Kerjasama Pembangunan	Persentase Pelaporan/Kegiatan TP dan DAK	%	100,00	11.312.500,00	100,00	11.312.500,00							100,00	11.312.500,00	100,00	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Pemenuhan Fasilitas dan Koordinasi/Konsultasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	%		3.100.000,00		3.100.000,00								3.100.000,00		100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
Program Perencanaan Sosial Budaya	Persentase Pemenuhan Fasilitas dan Koordinasi/Konsultasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	%		78.117.733,00		78.117.733,00								78.117.733,00		100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Akhir Kinerja RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10=9/4		11	
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA	Persentase Pemenuhan Fasilitas dan Koordinasi/ Konsultasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan SDA	%		41.837.500,00		41.837.500,00								41.837.500,00		100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
Program Penanggulangan Kemiskinan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	%		81.854.782,00		81.854.782,00								81.854.782,00		100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketepatan Waktu dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan	%	100,00	10.747.351.152,00	100,00	5.796.052.616,00	100,00	3.196.611.900,00	100,00	2.032.480.900,00	100,00	63,58	100,00	7.828.533.516,00	100,00	72,84	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Dokumen	-		ada		-		Ada		-		Ada		100,00			
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang Ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen	ada		ada		ada		Ada		100,00		Ada		100,00			
	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	90,00		92,53		90,00		87,43		97,14		87,43		97,14			
	Persentase Pemenuhan Fasilitas dan Koordinasi/ Konsultasi Perencanaan Pembangunan	%	90,00		90,63		90,00		100,00		111,11		100,00		111,11			
	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD	%																
	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	%																
Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	%	100,00	981.800.000,00	100,00	586.795.200,00	100,00	200.000.000,00	100,00	93.241.505,00	100,00	46,62	100,00	680.036.705,00	100,00	69,26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Tersedianya Dokumen Evaluasi RPJMD	Dokumen	ada				ada		-		-		-		-			
	Tersedianya Dokumen Evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan RKPD	Dokumen	ada		ada		ada		Ada		100,00		ada		100,00			
	Tersedianya Dokumen Evaluasi RPJPD	Dokumen	-				-		-		-		-		-			
	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keterangan	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Akhir Kinerja RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10=9/4		11
	Pertanggungjawaban Kepala Daerah																
Program Pengembangan dan Informasi Statistik Daerah	Tersedianya Informasi Pembangunan Daerah	%	70,00	203.199.000,00		103.110.000,00							70,00	103.110.000,00	100,00	50,74	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>KEUANGAN</b>																	
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas LKPD	Predikat	WTP	92.510.489.319,00	WTP	64.029.627.908,00	WTP	24.598.101.671,00	WTP	24.322.854.354,00	100,00	98,88	WTP	88.352.482.262,00	WTP	95,51	BPPRD, BPKAD, Sekretariat Daerah dan Seluruh OPD
	Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD dan RAPBD-P	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Ketepatan Waktu penyelesaian SP2D yang Dinyatakan Lengkap dan Sah Secara Ketentuan	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase Temuan Penatausahaan Keuangan oleh BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase Kesesuaian Data Rincian Data Total BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca Pemerintah Kota	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Persentase Terlaksananya Penilaian dan Penghapusan BMD Sesuai dengan Usulan OPD	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Nilai Indeks Kepuasan atas Layanan Kas Daerah	Angka	4,00		3,00		4,00		4,00		100,00		4,00		100,00		
	Ketepatan Waktu Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Daerah	%															
	Terselesaikannya Kewajiban Pembayaran Hutang	%	100,00		99,99				99,99								
	Persentase Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD	%															
	Persentase Jumlah Peningkatan Objek Pajak	%															



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Akhir Kinerja RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10=9/4		11
Program Optimalisasi Penerimaan PAD	Persentase Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD	%	54,01	29.253.765.080,00	76,59	15.707.204.218,00	54,01	10.729.392.630,00	76,14	8.490.015.144,00	140,97	79,13	76,14	24.197.219.362,00	140,97	82,71	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak	%	75,00		86,83		75,00		75,80		101,07		75,80		101,07		
	Persentase Jumlah Peningkatan Objek Pajak	%	13,72		11,67		13,72		17,98		131,05		17,98		131,05		
	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	%	79,52		79,30		79,52		79,30		99,72		79,30		99,72		
<b>KEPEGAWAIAN</b>																	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang Lulus Seleksi Lain Belajar dan Tugas Belajar (PNS)	Orang	300,00	2.070.119.950,00	300,00	2.070.119.950,00							300,00	2.070.119.950,00	100,00	100,00	Badan Kepegawaian Daerah
	Jumlah CPNS Golongan I, II, III dari Formasi Honorer yang Mengikuti Diklat Prajabatan	Orang	120,00		120,00								120,00		100,00		
	Jumlah PNS yang Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)	Orang	100,00		100,00								100,00		100,00		
	Jumlah PNS yang Mengikuti Ujian Dinas Tingkat I dan II	Orang	75,00		75,00								75,00		100,00		
	Jumlah Pelaksanaan Upacara/Apel Mingguan, Bulanan, dan Hari-Hari Besar Nasional serta Acara Lainnya yang Diminta Walikota	Angka	70,00		70,00								70,00		100,00		
	Jumlah PNS Mengikuti Pendidikan & Penjurangan Struktural (DiklatPim Tk. III dan IV)	Orang	30,00		30,00								30,00		100,00		
	Jumlah PNS yang Mengikuti Bimtek Sistem Administrasi Kepegawaian	Orang	100,00		100,00								100,00		100,00		
	Jumlah PNS yang Mengikuti Bimtek Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	Orang	100,00		100,00								100,00		100,00		





Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Akhir Kinerja RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10=9/4		11
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah PNS yang Menerima Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Orang	10,00	790.726.988,00	10,00	790.726.988,00							10,00	790.726.988,00	100,00	100,00	Badan Kepegawaian Daerah
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Realisasi Kegiatan BKD	Angka	16,00		16,00								16,00		100,00		
	Jumlah Pelaksanaan Sidang Baperjakat, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pajabat Struktural dan Fungsional, serta Pengalih tugas/ Penempatan Tugas PNS dan Seleksi Pengisian Jabatan Tinggi Pratama	Angka	12,00		12,00								12,00		100,00		
	Jumlah Jabatan Eselon II pada Instansi Pemerintah	ASN	40,00		40,00								40,00		100,00		
	Jumlah PNS yang Menerima Tanda Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	Orang	600,00		600,00								600,00		100,00		
	Jumlah Pelaksanaan Rapat Pembinaan Disiplin PNS dan Pembinaan Waskat	Jumlah	15,00		15,00								15,00		100,00		
	Tersusunnya Formasi Kebutuhan PNS Kota Bandar Lampung	Angka	600,00		600,00								600,00		100,00		
	Terbitnya SK Cuti Pegawai Negeri Sipil	Jumlah	1.000,00		1.000,00								1.000,00		100,00		
	Jumlah SK Pensiun PNS yang Dikeluarkan BKN	Jumlah	400,00		400,00								400,00		100,00		
	Jumlah Data dan Arsip PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang terkelola	Jumlah	11.650,00		11.650,00								11.650,00		100,00		
	Jumlah Kasus Pegawai Negeri Sipil yang terselesaikan	Jumlah	35,00		35,00								35,00		100,00		
	Jumlah PNS yang Melakukan Sumpah PNS	Orang	50,00		50,00								50,00		100,00		
	Jumlah Informasi Aparatur Sipil Negara	ASN	11.650,00		11.650,00								11.650,00		100,00		
Program Pelayanan Mutasi dan Pensiun Pegawai	Jumlah KARPEG, KARIS, KARISU yang Dikeluarkan BKN	Jumlah	700,00	311.345.768,00	700,00	311.345.768,00							700,00	311.345.768,00	100,00	100,00	Badan Kepegawaian Daerah
	Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan	Jumlah	10.500,00		10.500,00								10.500,00		100,00		



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Akhir Kinerja RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10=9/4		11	
	Pemerintah Kota Bandar Lampung Periode April, Oktober dan Usulan Kenaikan Gaji Berkala																	
	Jumlah Peningkatan Status CPNS menjadi PNS	Orang	600,00		600,00								600,00				100,00	
	Jumlah Tenaga Kontrak yang Mendapat SK Pengangkatan Kembali	Orang	5.000,00		5.000,00								5.000,00				100,00	
	Jumlah Peserta yang Lulus Seleksi CPNS Pelamar Umum dan Tenaga Honorar	Orang	600,00		600,00								600,00				100,00	
	Jumlah Usulan NIP CPNS yang Terbit	Angka	600,00		600,00								600,00				100,00	
	Jumlah PNS Fungsional yang Memperoleh Penetapan Angka Kredit	Orang	400,00		400,00								400,00				100,00	
	Jumlah Kartu Pegawai Elektronik yang Terkonversi	Jumlah	2.000,00		2.000,00								2.000,00				100,00	
Program Penyelenggaraan Managemen Kepegawaian Daerah	Persentase Pejabat yang Memenuhi Persyaratan Jabatan (struktural) Dibandingkan Jumlah Jabatan Seluruh OPD	%	100,00	14.493.883.618,00	100,00	5.287.021.280,00	100,00	7.154.266.850,00	100,00	3.210.277.155,00	100,00	44,87	100,00	8.497.298.435,00	100,00	58,63		Badan Kepegawaian Daerah
	Persentase Pejabat yang Telah Mengikuti Diklat Struktural (PIM) Sesuai Jabatan Dibandingkan Jumlah Jabatan Seluruh OPD	%	100,00		100,00				100,00				100,00				100,00	
	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Dibandingkan Total ASN	%																
	Rata-rata Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Kepegawaian Sesuai dengan SPM Kepegawaian	%	100,00		100,00				100,00				100,00				100,00	
	Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	%	100,00		100,00				100,00				100,00				100,00	
	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	100,00		100,00				100,00				100,00				100,00	



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Akhir Kinerja RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10=9/4		11
	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	ASN	39,00		39,00		39,00		39,00		100,00		39,00		100,00		
	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	ASN	208,00		208,00		208,00		208,00		100,00		208,00		100,00		
	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	ASN	5.368,00		5.368,00		5.368,00		4804,00		89,49		4804,00		89,49		
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>																	
Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	%	80,00	1.924.055.000,00	100,00	509.309.926,00	80,00	799.055.000,00	100,00	511.405.700,00	125,00	64,00	100,00	1.020.715.626,00	125,00	53,05	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	65,00		60,00		65,00		42,86		65,94		42,86		65,94		
<b>FUNGSI PENUNJANG LAINNYA</b>																	
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Terlatihnya Tim Rescue dan Satgas Penanggulangan Bencana	%	100,00	191.960.000,00	100,00	191.960.000,00							100,00	191.960.000,00	100,00	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Pelajar yang Siaga Menghadapi Bencana (Peserta)	Orang	80,00		80,00								80,00		100,00		
	Satgas yang Siap dalam Penanggulangan Bencana	Orang	100,00		100,00								100,00		100,00		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Aparatur	%		626.357.800,00		626.357.800,00								626.357.800,00		100,00	Sekretariat Daerah
	Cakupan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Melalui SPSE	%															
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Layanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	%	100,00	15.360.899.508,00	94,00	9.949.238.379,00	100,00	2.349.478.904,00	88,89	1.546.379.000,00	88,89	65,82	88,89	11.495.617.379,00	88,89	74,84	Sekretariat Daerah
Program Kerjasama Daerah	Persentase KSD yang Terfasilitasi (terbit MoU) Dibandingkan dengan Usulan KSD	%	25,00	959.158.100,00	49,14	263.895.500,00	25,00	190.867.500,00	20,00	22.610.700,00	80,00	11,85	20,00	286.506.200,00	80,00	29,87	Sekretariat Daerah



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Akhir Kinerja RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10=9/4		11
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Perda yang Disahkan Dibagi Raperda yang Diusulkan	%		1.863.796.100,00		963.207.012,00		525.340.000,00		122.491.000,00		23,32		1.085.698.012,00		58,25	Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
	Persentase Perwalikota yang Disahkan Dibagi Perwalikota yang Diusulkan	%															
	Legislasi Peraturan Daerah yang Akan Dibahas Tahun Berjalan	%	95,00		95,00		95,00		95,00		100,00		95,00		100,00		
	Terwujudnya Peraturan Daerah yang Berkualitas yang Tidak Bertentangan dengan Peraturan yang Lebih Tinggi	%	95,00		95,00		95,00		95,00		100,00		95,00		100,00		
Program Penataan Produk Hukum Daerah	Persentase Perda yang Disahkan Dibagi Raperda yang Diusulkan	%	100,00	439.000.000,00	100,00	243.502.500,00	100,00	194.000.000,00	100,00	154.950.900,00	100,00	79,87	100,00	398.453.400,00	100,00	90,76	Sekretariat Daerah
	Persentase Perwalikota yang Disahkan Dibagi Perwalikota yang Diusulkan	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen ANJAB OPD Dibagi Jumlah OPD	%	100,00	1.051.432.600,00	100,00	653.718.688,00	100,00	285.747.850,00	100,00	243.034.940,00	100,00	85,05	100,00	896.753.628,00	100,00	85,29	Sekretariat Daerah
	Persentase Tersusunnya Dokumen ABK OPD Dibagi Jumlah OPD	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Program Pengendalian dan Evaluasi	Persentase Rekomendasi yang Diterbitkan Dibandingkan Jumlah KSD yang Masih Berlaku/Akan Berakhir	%	80,00	851.034.100,00	66,58	366.439.008,00	80,00	225.549.700,00	100,00	15.600.000,00	125,00	6,92	100,00	382.039.008,00	125,00	44,89	Sekretariat Daerah
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase Dokumen Kendaraan Dinas Lingkup Sekretariat Daerah yang Terpelihara	%		105.550.000,00		43.500.000,00								43.500.000,00		41,21	Sekretariat Daerah
Program Pengembangan Ekonomi Daerah	Persentase Proposal CSR yang Terasilitasi	%	100,00	2.601.922.000,00	100,00	1.824.171.934,00	100,00	504.865.000,00	100,00	265.589.500,00	100,00	52,61	100,00	2.089.761.434,00	100,00	80,32	Sekretariat Daerah
	Persentase Penyediaan Data Harga Sembako	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Program Administrasi Pembangunan	Persentase OPD yang Menggunakan Layanan Perencanaan Pengadaan Secara Elektronik	%	100,00	2.471.873.500,00	100,00	948.465.500,00		681.160.000,00		268.847.500,00		39,47	100,00	1.217.313.000,00	100,00	49,25	Sekretariat Daerah
	Persentase OPD yang Melaksanakan Money Secara Elektronik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Akhir Kinerja RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10=9/4		11	
	Cakupan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Melalui SPSE	%																
	Ketepatan Waktu Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	Persentase OPD dengan Realisasi dan Penyerapan Anggaran Baik	%	85,00		100,00		80,00		100,00		125,00		100,00		117,65			
Program Penegakan Hukum	Cakupan Kelurahan yang Mendapatkan Pembinaan Kadarkum/Dibagi Seluruh Kelurahan yang Mengikuti Lomba Kelurahan	%	100,00	2.086.395.890,00	100,00	1.707.496.840,00	100,00	333.000.000,00	100,00	259.160.300,00	100,00	77,83	100,00	1.966.657.140,00	100,00	94,26		Sekretariat Daerah
Program Dokumentasi dan Informasi Hukum	Persentase Perda yang Diupload ke JDIH/Dibagi Perda yang Disahkan Pertahun	%	100,00	448.132.700,00	100,00	285.658.100,00	100,00	162.150.000,00	100,00	142.981.000,00	100,00	88,18	100,00	428.639.100,00	100,00	95,65		Sekretariat Daerah
	Persentase Perwali yang Diupload ke JDIH/Dibagi Perwali yang Disahkan Pertahun	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Fasilitasi MTQ Tingkat Kota dan Provinsi	%	100,00	15.576.224.660,00	100,00	11.159.218.672,00	100,00	4.142.292.500,00	100,00	2.216.887.500,00	100,00	53,52	100,00	13.376.106.172,00	100,00	85,88		Sekretariat Daerah
	Terselenggaranya TPHD	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
Program Pelayanan Administrasi Informasi Media Massa	Persentase Ekspose Kegiatan Pemerintah Kota Bandar Lampung Melalui Media Cetak dan Elektronik	%	100,00	4.246.225.000,00	100,00	3.159.950.000,00	100,00	1.075.025.000,00	100,00	897.575.000,00	100,00	83,49	100,00	4.057.525.000,00	100,00	95,56		Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Kualitas Pejabat Daerah Kerjasama Antarpemda	Nilai EKPPD Tinggi (3)	Angka	3,00	2.428.577.655,00	3,00	974.580.600,00	3,00	560.520.820,00	3,00	371.156.236,00	100,00	66,22	3,00	1.345.736.836,00	100,00	55,41		Sekretariat Daerah
	Tingkat Partisipasi Pemkot dalam Kegiatan APEKSI Dibandingkan Jumlah Kegiatan APEKSI	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
Program Penguatan Lembaga Pemerintah Kecamatan Kelurahan	Cakupan Kelurahan yang Dimonitoring Dibandingkan Seluruh Kelurahan	%	100,00	2.762.632.699,00	100,00	2.157.002.450,00	100,00	421.062.305,00	25,00	105.336.000,00	25,00	25,02	25,00	2.262.338.450,00	25,00	81,89		Sekretariat Daerah dan Kecamatan
	Persentase Kelurahan yang Memiliki Gedung Kantor	%	95,00		88,89		95,00		88,89		93,57		88,89		93,57			
Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pengaduan Pelayanan Publik yang Ditangani	%	95,00	2.128.846.220,00	100,00	1.224.314.736,00	95,00	392.772.300,00	100,00	265.672.650,00	105,26	67,64	100,00	1.489.987.386,00	105,26	69,99		Sekretariat Daerah



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Akhir Kinerja RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10=9/4		11
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	62,00		55,14		62,00		62,00		100,00		62,00		100,00		
	Persentase OPD yang Melakukan Survei IKM Dibanding OPD yang Seharusnya Melakukan Survei IKM	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Sekretariat Daerah	Persentase Dokumen Kendaraan Dinas Lingkup Sekretariat Daerah yang Terpelihara	%	100,00	100.000.000,00	87,00	42.000.000,00	100,00	50.000.000,00	100,00	42.000.000,00	100,00	84,00	100,00	84.000.000,00	100,00	84,00	Sekretariat Daerah
Program Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persentase Terlaksananya Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Transparan dan Akuntabel	%	100,00	5.206.808.100,00	100,00	2.439.551.013,00	100,00	2.551.094.300,00	100,00	1.411.525.800,00	100,00	55,33	100,00	3.851.076.813,00	100,00	73,96	Sekretariat Daerah
	Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan	Level	Level 5		Level 1		Level 5		Level 5		100,00		Level 5		100,00		
	Tingkat Kematangan LPSE	Sertifikat	15		13		15		15		100,00		15		100,00		
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Prolegda yang Disetujui Menjadi Perda	%	95,00	95.707.262.585,00	93,22	57.590.354.881,00	95,00	24.176.858.600,00	95,00	15.513.826.398,00	100,00	64,17	95,00	73.104.181.279,00	100,00	76,38	Sekretariat DPRD
	Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	%	95,00		93,22		95,00		95,00		100,00		95,00		100,00		
	Terintegrasi Program-program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	%	95,00		93,22		95,00		95,00		100,00		95,00		100,00		
	Terjaringnya Aspirasi Masyarakat dalam Usulan Dokumen RPJMD maupun Usulan Dokumen RKPD	%	95,00		93,22		95,00		95,00		100,00		95,00		100,00		
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	Persentase Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD yang Terfasilitasi Dibandingkan Kegiatan	%	95,00	336.356.750,00	100,00	107.729.720,00	95,00	66.458.000,00	95,00	15.782.600,00	100,00	23,75	95,00	123.512.320,00	100,00	36,72	Sekretariat DPRD



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Akhir Kinerja RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10=9/4		11
Pimpinan dan Anggota DPRD	Pimpinan dan Anggota DPRD yang Direncanakan																
Program Peningkatan Publikasi dan Pelayanan Informasi Media Massa	Persentase Kegiatan DPRD yang Terpublikasi	%	95,00	1.607.780.250,00	54,24	270.028.750,00	95,00	662.214.000,00	95,00	180.675.000,00	100,00	27,28	95,00	450.703.750,00	100,00	28,03	Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	Persentase Tindak Lanjut Temuan	%	90,00	8.947.266.437,00	92,45	4.911.007.719,00	90,00	3.705.269.084,00	100,00	2.419.322.950,00	111,11	65,29	100,00	7.330.330.669,00	111,11	81,93	Inspektorat
	Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda (SPT)	SPT	55,00		51,00		55,00		55,00		100,00		55,00		100,00		
	Jumlah Temuan BPK Tahun Berjalan	Temuan	40,00		40,00		40,00		40,00		100,00		40,00		100,00		
	Persentase Kepatuhan Pelaporan Wajib LHKPN/LHKASN	%	50,00		40,00		50,00		50,00		100,00		50,00		100,00		
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Pemenuhan Infrastruktur Kapabilitas APIP	Level	3	457.391.255,00	3	297.570.055,00	3	97.000.000,00	3	96.000.000,00	100,00	98,97	3	393.570.055,00	100,00	86,05	Inspektorat
	Tingkat Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3		3		3		3		100,00		3		100,00		
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Tingkat Partisipasi RT dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	%	70,00	3.325.437.150,00	70,00	2.352.731.226,00	70,00	1.033.045.000,00	70,00	587.890.854,00	100,00	56,91	70,00	2.940.622.080,00	100,00	88,43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengamanan Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	%	80,00	1.951.604.334,00	80,00	1.226.632.477,00	80,00	222.250.000,00	100,00	217.750.000,00	125,00	97,98	100,00	1.444.382.477,00	125,00	74,01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Anggota Parpol yang Meningkatkan Pemahamannya tentang Demokrasi	%	95,00	1.472.288.875,00	95,00	849.365.735,00		400.000.000,00		105.150.000,00		26,29	95,00	954.515.735,00	100,00	64,83	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Kota	%	60,00										60,00		100,00		
	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Provinsi	%	70,00										70,00		100,00		
	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Legislatif	%	70,00										88,00		125,71		
	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Presiden	%	70,00										87,00		124,29		



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Akhir Kinerja RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10=9/4		11
Program Pembinaan dan Bantuan Terhadap Kehidupan Beragama	Persentase Organisasi Keagamaan yang Dibina	%	70,00	267.678.400,00	70,00	143.166.567,00							70,00	143.166.567,00	100,00	53,48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Penurunan Tingkat Kerawanan Bencana	Status	Sedang	2.170.058.370,00	Sedang	1.064.565.900,00	Sedang	775.469.470,00	Sedang	-	100,00	-	Sedang	1.064.565.900,00	100,00	49,06	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00						
	Persentase Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran (Kecamatan)	%	80,00		100,00		80,00		100,00		125,00	100,00					
Program Kedaruratan dan Logistik	Persentase Korban Bencana yang di Evakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	%	100,00	16.375.309.050,00	97,94	7.235.547.450,00	100,00	288.065.750,00	100,00	43.022.500,00	100,00	14,93	100,00	7.278.569.950,00	100,00	44,45	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Tingkat Ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Penanggulangan Bencana dalam Skala Mantab pada Seluruh Kawasan-kawasan Rawan Bencana	%	76,00		80,00		76,00		100,00		76,00						
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase Kesiapsiagaan Tanggap Daerah Layanan Wilayah Bencana	%	100,00	52.537.831.257,00	100,00	32.609.058.579,00	100,00	14.920.914.669,00	100,00	7.034.539.100,00	100,00	47,15	100,00	39.643.597.679,00	100,00	75,46	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	Persentase Kecamatan yang Berkinerja Baik	%	90,00	2.112.457.424,00	80,00	872.205.458,00	90,00	535.760.395,00	90,00	82.263.773,00	100,00	15,35	90,00	954.469.231,00	100,00	45,18	Kecamatan
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Persentase Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial, dan Pembangunan Wilayah	%	100,00	293.865.724.539,00	100,00	116.954.331.926,00	100,00	155.766.546.427,00	100,00	134.063.288.084,00	100,00	86,07	100,00	251.017.620.010,00	100,00	85,42	Kecamatan
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial, dan Pembangunan Wilayah	%	100,00	8.838.688.000,00	100,00	8.108.620.000,00							100,00	8.108.620.000,00	100,00	91,74	Kecamatan
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kecamatan	Pemenuhan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Kelurahan Kecamatan	%	100,00	37.800.000.040,00	100,00	37.790.973.773,00							100,00	37.790.973.773,00	100,00	99,98	Kecamatan





Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Akhir Kinerja RPJMD pada Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8=7/6		9=5+7		10=9/4		11
Program Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Korpri	Persentase Anggota KORPRI yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	%	82,00	4.362.019.160,00	60,00	2.639.111.243,00	82,00	496.676.000,00	35,25	148.923.619,00	42,99	29,98	35,25	2.788.034.862,00	42,99	63,92	Sekretariat Korpri
	Meningkatnya Partisipasi Anggota KORPRI dalam Even KORPRI	%	100,00		100,00		100,00		60,00		60,00		60,00		60,00		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	%	98,00	1.256.221.845.405,29	98,00	868.172.526.544,00	98,00	298.606.670.914,00	98,00	243.173.948.574,00	100,00	81,44	98,00	1.111.346.475.118,00	100,00	88,47	Seluruh OPD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	%	98,00	244.625.820.484,87	98,00	125.008.211.360,00	98,00	65.162.365.490,87	98,00	38.207.322.323,00	100,00	58,63	98,00	163.215.533.683,00	100,00	66,72	Seluruh OPD
	Inventaris Kantor yang Terpelihara	%	98,00		98,00		98,00		98,00		100,00		98,00		100,00		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas KDH	%	100,00	7.116.134.600,00	100,00	4.405.815.600,00	100,00	1.478.605.000,00	100,00	1.182.455.000,00	100,00	79,97	100,00	5.588.270.600,00	100,00	78,53	Seluruh OPD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kualitas SDM dalam Pemenuhan Kompetensi Jabatan	%	100,00	7.541.567.378,00	100,00	4.257.174.620,00	100,00	449.482.000,00	100,00	193.217.462,00	100,00	42,99	100,00	4.450.392.082,00	100,00	59,01	Seluruh OPD
	Cakupan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Melalui SPSE	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Tepat Waktu	%	100,00	13.951.474.308,21	100,00	8.521.357.651,00	100,00	3.866.460.500,00	100,00	1.828.845.966,00	100,00	47,30	100,00	10.350.203.617,00	100,00	74,19	Seluruh OPD



### **2.2.3 Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan yang bersifat wajib sesuai dengan standar pelayanan minimal yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk menerima suatu Pelayanan Dasar dari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu, serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Daerah sendiri menerapkan SPM dalam rangka pemenuhan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia. Dalam penerapan SPM ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM yang terdiri dari: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman; (5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan (6) Sosial

Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel 2.135 berikut ini :



Tabel 2.147 Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020

No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	2016			2017			2018			2019			2020			
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	Pendidikan	1.1 Pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Orang	147.300	145.337	98,67	148.773	144.599	97,19	150.261	149.168	99,27	152.150	150.644	99,01	155.193	145.414	93,70	
		1.2 Pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Orang	187.611	185.753	99,01	189.487	192.100	101,38										
		1.3 Pendidikan anak usia dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Orang	18.798	18.429	98,04	21.124	20.710	98,04	26.117	25.605	98,04	26.639	25.579	96,02	26.906	22.191	82,48	
2	Kesehatan	2.1 Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (K4)	Orang				20.216	18.869	93,34	20.216	18.869	93,34	19.896	18.942	95,21	19.731	18.587	94,20	



No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	2016			2017			2018			2019			2020		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan (PN)	Orang				19.297	17.962	93,08	19.297	17.962	93,08	18.992	18.237	96,02	18.836	18.014	95,64
		2.3 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (KN Lengkap)	Orang				18.227	17.340	95,13	18.227	17.340	95,13	18.018	17.293	95,98	17.908	16.990	94,87
		2.4 Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang				91.981	62.614	68,07	91.981	62.614	68,07	90.994	84.420	92,78	90.461	79.160	87,51



No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	2016			2017			2018			2019			2020		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang				35.029	32.789	93,61	35.029	32.789	93,61	109.006	36.551	33,53	35.811	0	0,00
		2.6 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	Orang				42.955	32.882	76,55	42.955	32.882	76,55	69.084	64.215	92,95	77.173	64.283	83,30
		2.7 Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	Orang				728.291	420.499	57,74	728.291	420.499	57,74	701.676	691.516	98,55	716.763	334.888	46,72
		2.8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia >= 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang				159.366	33.521	21,03	159.366	33.521	21,03	130.076	92.873	71,40	132.667	63.432	47,81
		2.9 Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Jumlah penderita diabetes mellitus usia >= 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang	Orang				51.626	13.154	25,48	51.626	13.154	25,48	53.712	46.736	87,01	27.788	27.451	98,79



No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	2016			2017			2018			2019			2020		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar																
		2.10 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa berat sesuai standar	Orang				813	524	64,45	813	524	64,45	1.778	1.263	71,03	1.817	1.290	71,00
		2.11 Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang	Orang				2.975	2.259	75,93	2.975	2.259	75,93	30.094	23.987	79,71	30.132	16.488	54,72
		2.12 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Orang				18.302	11.129	60,81	18.302	11.129	60,81	15.549	13.549	87,14	17.574	14.189	80,74
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4 (mendapat pelayanan kehamilan paling sedikit 4 kali sesuai standar)	Persen	95	95	100,00												
			Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	Persen	80	84	105,00												
			Cakupan Pertolongan Persalinan oleh	Persen	90	96	106,67												



No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	2016			2017			2018			2019			2020		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan																
			Cakupan Pelayanan Ibu Nifas (masa 6 sampai 42 jam pasca persalinan)	Persen	90	85	94,44												
			Cakupan Neonatus (bayi umur 0-28 hari) dengan Komplikasi yang Ditangani	Persen	80	84	105,00												
			Cakupan Kunjungan Bayi	Persen	90	95	105,56												
			Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (desa/kelurahan dengan cakupan imunisasi dasar secara lengkap pada bayi >= 80%)	Persen	100	100	100,00												
			Cakupan Pelayanan Pemantauan Tumbuh-Kembang Anak Balita (12-59 bulan)	Persen	90	92	102,22												
			Cakupan Pemberian Makanan	Persen	100	100	100,00												



No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	2016			2017			2018			2019			2020		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pendamping ASI pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin																
			Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	Persen	90	100	111,11												
			Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Siswa Kelas I SD dan Setingkat oleh Tenaga Kesehatan atau Tenaga Terlatih (guru UKS/dokter kecil)	Persen	100	100	100,00												
			Cakupan Peserta KB Aktif pada Pasangan Usia Subur	Persen	70	72	102,86												
			Angka Penemuan Acute Flacid Paralysis (lumpuh layuh mendadak) per 100.000 penduduk < 15 tahun	Persen	100	100	100,00												
			Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita	Persen	100	100	100,00												





No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	2016			2017			2018			2019			2020		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	Persen	85	90	105,88												
			Cakupan Penderita DBD yang ditangani	Persen	100	100	100,00												
			Cakupan Penemuan Penderita Diare	Persen	100	100	100,00												
			Cakupan Pelayanan Pasien Masyarakat Miskin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas/ Balai Pengobatan/	Persen	100	100	100,00												
			Praktek bersama dan Perorangan)																
			Cakupan Pelayanan Pasien Masyarakat Miskin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan (Rumah Sakit/ BKMM/BKPM/ BKIM)	Persen	100	100	100,00												



No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	2016			2017			2018			2019			2020		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan oleh Sarana Kesehatan (Rumah Sakit) di Kab/Kota	Persen	100	100	100,00												
			Cakupan Desa/kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa yang ditangani < 24 jam	Persen	100	100	100,00												
			Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	80	100	125,00												
3	Pekerjaan Umum	3.1	Jalan kota dalam kondisi baik (<40 km/jam)	Persen	90,09	90,09	100,00	91,76	79,09	86,19	93,42	80,95	86,65	100,00	81,64	81,64	100,00	87,98	87,98
		3.2	Penanganan luas genangan	Persen	14,63	14,63	100,00	22,33	21,21	94,98	55,12	50,32	91,29	73,81	67,39	91,30	79,92	68,74	86,01
		3.3	Penduduk berakses air minum	Persen	41,41	41,41	100,00	43,21	43,21	100,00	44,98	43,65	97,04	52,54	44,17	84,07	61,80	44,82	72,52
		3.4	Rumah tinggal yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	Persen	33,26	33,26	100,00	36,49	36,49	100,00	40,63	35,99	88,58	44,64	35,96	80,56	50,88	35,61	69,99



No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	2016			2017			2018			2019			2020			
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
4	Perumahan Rakyat	4.1	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah daerah)	Persen									100	100	100,00	100	100	100,00	
		4.2	Lingkungan yang Sehat dan Aman yang di Dukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Di Dukung Dengan PSU (bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah daerah)	Persen										100	100	100,00	100	100	100,00
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5.1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum PERDA dan PERKADA	Persen	100	74	74,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00
		5.2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	79	78,50	100	79	79,00	100	80	79,50	100	80	80,00	100	80	80,00
		5.3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan	Persen	100	89	88,50	100	89	89,00	100	90	89,50	100	90	90,00	100	90	90,00



No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	2016			2017			2018			2019			2020		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		n terhadap bencana	kesiapsiagaan terhadap bencana																
		5.4 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	89	88,50	100	89	89,00	100	90	89,50	100	90	90,00	100	90	90,00
		5.5 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	89	88,50	100	89	89,00	100	90	89,50	100	90	90,00	100	90	90,00
6	Sosial	6.1 Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Orang	20	16	80,00	90	23	25,56	100	2	2,00	50	34	68,00	100	3	3,00
		6.2 Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Orang	96	23	23,96	210	180	85,71	210	170	80,95	258	207	80,23	104	103	99,04
		6.3 Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi	Orang	60	20	33,33	90	90	100,00	90	90	100,00	140	3	2,02	195	95	48,72



No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	2016			2017			2018			2019			2020			
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			sosial diluar panti																	
		6.4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Orang	10	7	70,00	12	7	58,33	12	7	58,33	20	19	95,00	17	17	100,00
		6.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Kecamatan	20	14	70,00	20	15	75,00	20	17	85,00	20	19	95,00	20	20	100,00



## **2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH**

### **2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

1. Pemulihan ekonomi dalam upaya menekan dampak *Pandemi Covid-19*. Pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung pada Tahun 2020 terkontraksi sebesar 1,85 persen.
2. Laju inflasi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir cenderung fluktuatif, pada tahun 2020 inflasi yang terjadi yaitu sebesar 1,93 persen. Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu menjaga daya beli masyarakat dengan cara mengendalikan stabilitas harga terutama bahan pokok.
3. Distribusi pendapatan masyarakat Kota Bandar Lampung masih ada ketimpangan atau belum merata. Hal ini terlihat dari rasio gini Kota Bandar Lampung pada Tahun 2020 yang masih berada di angka 0,359.
4. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB Kota Bandar Lampung perlu ditingkatkan. Pada tahun 2020, Kategori Industri Pengolahan memberikan kontribusi sebesar 20,97 persen terhadap PDRB Kota Bandar Lampung.
5. Kontribusi Kategori Perdagangan terhadap PDRB Kota Bandar Lampung perlu ditingkatkan. Pada tahun 2020, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi sebesar 13,30 persen terhadap PDRB Kota Bandar Lampung.
6. Kontribusi Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Kategori Sektor Jasa masih perlu ditingkatkan. Pada Tahun 2020, Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Kategori Sektor Jasa memberikan kontribusi sebesar 15,42 persen terhadap PDRB Kota Bandar Lampung.
7. Penduduk miskin atau yang berada di bawah garis kemiskinan masih cukup tinggi. Berdasarkan data tahun 2020 sekitar 8,81 persen penduduk Bandar Lampung masih berada di bawah garis kemiskinan.



8. Tingkat Pengangguran Terbuka yang masih relatif tinggi. Pada Tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bandar Lampung sebesar 8,78 persen.
9. Kawasan kumuh, permukiman liar (squatter area) dan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Bandar Lampung masih membutuhkan penanganan. Persentase luas kawasan kumuh di Kota Bandar Lampung Tahun 2020 sebesar 2,83 persen.
10. Pertumbuhan penduduk masih relatif tinggi. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,109 persen.
11. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2020, persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 25,45 persen.
12. Opini penilaian BPK terhadap pengelolaan Keuangan Daerah perlu dipertahankan. Sembilan tahun terakhir pengelolaan keuangan daerah mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
13. Badan Usaha Milik Daerah yang sejatinya dibentuk untuk mewujudkan tujuan mulia pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dibarengi dengan pencapaian keuntungan finansial untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum bekerja secara optimal.
14. Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2020, Persentase panjang jaringan Jalan dan jembatan dalam Kondisi Mantap sebesar 93,97 persen.
15. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan data tahun 2020, IKLH Kota Bandar Lampung mencapai angka 60. Angka tersebut masih dibawah target nasional yaitu sebesar 68,5.



## **2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**

### **2.3.2.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib**

#### **2.3.2.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

##### **1. Pendidikan**

Permasalahan terkait pendidikan di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Angka rata-rata lama sekolah belum mencapai 12 tahun. Pada Tahun 2020 rata-rata lama sekolah sebesar 10,93 tahun.
- b. Jumlah satuan pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar yang terakreditasi masih rendah/sedikit. Berdasarkan data Tahun 2020, jumlah PAUD yang berakreditasi 54,00 persen dari jumlah PAUD yang ada, sedangkan pendidikan dasar yang terakreditasi A Tahun 2020 tingkat SD sebesar 30,00 persen dan tingkat SMP sebesar 41,00 persen.
- c. Angka Partisipasi Kasar PAUD masih perlu ditingkatkan, APK PAUD Tahun 2020 sebesar 49,36 persen.
- d. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya.
- e. Kurangnya penguasaan dan pemanfaatan IT dalam pembelajaran.
- f. Biaya pendidikan menengah pertama dan tinggi masih membebani orang tua peserta didik, khususnya masyarakat tidak mampu.
- g. Kualitas tenaga pendidik yang belum merata pada setiap sekolah, sehingga diperlukan upaya pemerataan kualitas guru.
- h. Sarana dan prasarana gedung tempat pendidikan termasuk sarana penunjang pendidikan masih ada yang belum memadai. Keterbatasan dan harga lahan di Bandar Lampung juga menuntut pengembangan pembangunan kearah vertikal dengan utilitas yang modern
- i. Masih kurangnya kesejahteraan tenaga pendidik yang berstatus honorer.





## **2. Kesehatan**

Permasalahan terkait kesehatan di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Pandemi *Covid-19* yang belum dapat diprediksi kapan akan berakhir masih memerlukan konsentrasi terhadap dukungan tenaga medis dan infrastruktur kesehatan.
- b. Kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan berbagai penyakit menular ataupun tidak menular termasuk perkembangan yang sangat cepat dari kasus *Covid-19* dengan melaksanakan pola hidup bersih dan sehat masih harus ditingkatkan.
- c. Penempatan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama belum merata.
- d. Jumlah tenaga kesehatan di Kota Bandar Lampung masih kurang, terutama untuk tenaga fungsional tertentu seperti fungsional gizi, kesehatan lingkungan, kefarmasian, analis laboratorium, rekam medik dan tenaga administrasi lainnya.
- e. Pembiayaan kesehatan bagi masyarakat harus ditingkatkan, terutama untuk promotif dan preventif.
- f. Meningkatnya prevalensi terjadinya penyakit degeneratif akibat situasi kondisi perkotaan, pola hidup dan masalah lingkungan.
- g. Penyediaan sarana prasarana kesehatan/Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) masih harus ditingkatkan agar sesuai dengan standar.
- h. Masih adanya Angka kematian ibu, bayi dan balita.
- i. Masih adanya kasus stunting di Kota Bandar Lampung.

## **3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

### **3.1. Pekerjaan Umum**

Permasalahan terkait sarana dan prasarana umum di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Volume jalan di Kota Bandar Lampung masih perlu ditingkatkan sehingga jalan yang ada dapat mendukung pergerakan penduduk dan



kendaraan serta mengurangi kemacetan. Berdasarkan data Tahun 2020, rasio Panjang jalan dibandingkan luas wilayah sebesar 7,89 dan rasio panjang jalan dibandingkan jumlah penduduk sebesar 1,46.

- b. Masih terdapat infrastruktur jalan lingkungan yang rusak.
- c. Jalan alternatif sebagai pemecah arus kemacetan belum dikembangkan secara optimal
- d. Kondisi *drainase* yang tidak selaras dengan tata ruang dan prasarana lainnya telah menimbulkan dampak negatif pada sarana jalan dan menyebabkan banjir.
- e. Prasarana dasar kawasan permukiman belum berfungsi dengan baik, seperti:
  - 1) *Drainase* banyak yang tersumbat;
  - 2) Tingkat pelayanan sanitasi tidak memadai;
  - 3) Akses sarana air bersih masih rendah;
  - 4) Sarana dan pengelolaan sampah belum memadai;
  - 5) Penataan lingkungan kumuh dengan peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman, air bersih, dan sanitasi.
- f. Masih sering terjadi genangan di titik-titik tertentu.
- g. Sistem informai pengelolaan infrastruktur perkotaan datanya belum *update*, tidak sebanding dengan kecepatan pelaksanaan pembangunan.
- h. Masih terdapat ruas jalan yang memerlukan penerangan jalan umum yang hemat energi.
- i. Aksesibilitas menuju jalan tol trans Sumatera perlu ditingkatkan.
- j. Kebutuhan sarana gedung dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
- k. Masih banyak rumah tangga yang belum mendapatkan akses Sumber Air Bersih dan Sumber Air Layak. Data Tahun 2020 menunjukkan bahwa Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak baru mencapai 44,82 persen.



### **3.2. Penataan Ruang**

Permasalahan terkait penataan ruang di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Belum optimalnya pemanfaatan dokumen rencana tata ruang sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan (Peraturan Daerah tentang RTRW sedang direvisi dan RDTR sedang disusun).
- b. Persentase bangunan ber-IMB dan SLF (bagi bangunan komersil) masih harus ditingkatkan.
- c. Tekanan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian yang menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan.
- d. Perlunya komitmen untuk mencegah timbulnya permukiman baru diatas air secara illegal/ Permukiman liar (*Squatter area*).
- e. Belum optimalnya pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan tata bangunan dan lingkungan.
- f. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi TABG Kota Bandar Lampung dan penerbitan sertifikat laik fungsi (SLF) bangunan gedung.
- g. Perlunya inovasi daerah terkait penataan wilayah pesisir.

### **4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Permasalahan terkait perumahan dan permukiman di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Perlunya peningkatan peran dan kesadaran masyarakat dalam proses pemeliharaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman melalui program pemberdayaan masyarakat.
- b. Belum tertatanya beberapa kawasan permukiman liar (*squatter area*) disempadan pantai dan sungai serta beberapa kawasan yang pertumbuhannya tidak memenuhi aspek kesehatan dan perencanaan kota.
- c. Masih rendahnya proses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung oleh pengembang.
- d. Perlunya penanganan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Bandar Lampung melalui anggaran APBD Kota Bandar



Lampung, dimana sampai dengan tahun 2020 rata-rata penuntasan RTLH setiap tahunnya melalui sumber pendanaan APBN hanya sekitar 100-300 unit.

- e. Perlu adanya bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) untuk perumahan bersubsidi dan permukiman kumuh dari Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- f. Jumlah rumah susun sewa yang masih kurang di Kota Bandar Lampung sebagai solusi mengatasi bertambahnya jumlah penduduk.
- g. Perlu adanya kerjasama, baik dengan pihak perbankan maupun swasta yang bergerak dalam bidang perumahan terkait pengadaan perumahan bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dengan mudah dan ringan.

## **5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**

Permasalahan terkait urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Bandar Lampung yaitu :

- a. Masih adanya gangguan ketentraman dan ketertiban di masyarakat.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan.
- c. Penanganan bencana daerah masih perlu ditingkatkan.

## **6. Sosial**

Permasalahan terkait sosial di Kota Bandar Lampung yaitu :

- a. Dampak sosial akibat Pandemi *Covid-19* yang masih membutuhkan penanganan.
- b. Belum optimalnya penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial serta Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- c. Belum optimalnya pelaksanaan pemeliharaan dan pembuatan rumah jaga serta fasilitas TPU.



### **2.3.2.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

#### **1. Tenaga Kerja**

Permasalahan terkait Ketenagakerjaan di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Tenaga kerja yang dirumahkan sebagai dampak adanya Pandemi *Covid-19*.
- b. Ketersediaan lapangan kerja masih terbatas.
- c. Tingkat pengangguran masih relatif tinggi.
- d. Belum seimbang antara pertumbuhan angkatan kerja yang besar dengan pertumbuhan kesempatan kerja.
- e. Keterampilan dan kecakapan tenaga kerja yang masih rendah, kurang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja dan kewirausahaan.
- f. Keterbatasan informasi pasar kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran.

#### **2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Permasalahan terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan termasuk upaya pencegahan dan penanganannya masih harus ditingkatkan.
- b. Tingkat partisipasi perempuan khususnya di bidang politik dan hukum masih belum maksimal.
- c. Sistem pencatatan dan pelaporan serta sistem penanganan dan penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu ditingkatkan.
- d. Kapasitas pemberdayaan perempuan dan anak di Kota Bandar Lampung masih terbatas.
- e. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan/ regulasi yang ditujukan untuk perlindungan perempuan dan anak masih perlu ditingkatkan.



- f. Peran masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media dalam perlindungan perempuan dan anak perlu ditingkatkan.
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) masih perlu ditingkatkan.
- h. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih perlu ditingkatkan.
- i. Masih banyak perempuan rentan terhadap tindak kekerasan.
- j. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
- k. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan terlihat dari kasus pornografi dan *cyber crime*.
- l. Kurangnya pemahaman tentang penanganan dan perlakuan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABH) sehingga hak ABH sulit terpenuhi.

### **3. Pangan**

Permasalahan pangan di Kota Bandar Lampung antara lain terkait:

- a. Cadangan pangan Pemerintah Daerah yang masih perlu diperhatikan kecukupannya.
- b. Ketersediaan Pangan yang disebabkan oleh alih fungsi lahan dari lahan pertanian mejadi lahan non pertanian, langkanya ketersediaan sumber daya air dan curah hujan yang tidak menentu. Selain itu tingkat produktivitas usaha tani relatif rendah karena sempitnya lahan pertanian.
- c. Keamanan pangan yang beredar di masyarakat ditunjukkan dengan masih terjadinya berbagai kasus gangguan kesehatan akibat pangan tidak aman tercemar secara biologi, fisik karena pemakaian bahan kimia yang berlebihan atau yang terlarang.
- d. Diversifikasi Pangan (masih ketergantungan dengan pangan beras).
- e. Proses distribusi yang tidak lancar sehingga menyebabkan harga pangan naik
- f. Ketersediaan informasi harga, distribusi, pasokan dan akses pangan masih memiliki keterbatasan dalam hal penyajian dan analisis data. Saat ini, Dinas pangan masih dalam tahap awal mempersiapkan sistem



penginputan informasi harga pangan pokok secara digital, sehingga agar kelak dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan.

#### **4. Pertanahan**

Permasalahan terkait pertanahan di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Perlunya peningkatan fungsi koordinasi antara organisasi perangkat daerah penyelenggara bidang pertanahan untuk meningkatkan sinergitas dan keterpaduan program pertanahan.
- b. Perlunya dokumentasi dan database terkait penyelenggaraan kegiatan bidang pertanahan terutama terkait program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penanganan kasus dan sengketa tanah serta pengembangan sistem informasi dan pendaftaran tanah.
- c. Perlunya komitmen dan kesepakatan dengan Pemerintah Propinsi terkait penanganan pertanahan kawasan permukiman liar (*squatter area*) melalui program sertifikasi secara komunal atas nama Pemerintah Kota Bandar Lampung.

#### **5. Lingkungan Hidup**

Permasalahan terkait lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Ruang Terbuka Hijau Ruang (RTH) masih perlu ditingkatkan.
- b. Tingginya konversi lahan produktif ke lahan terbangun.
- c. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan.
- d. Masih tingginya pencemaran di kawasan pesisir pantai.
- e. Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan.
- f. Pencemaran udara sebagai dampak kemajuan transportasi dan industrialisasi, pencemaran sungai dan tanah karena limbah industri dan limbah rumah tangga.
- g. Sarana dan prasarana persampahan yang belum memadai dan optimal.



- h. Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang masih menggunakan *system open dumping* berdampak kurang baik terhadap sanitasi lingkungan di sekitar TPA dan berakibat semakin pendeknya umur TPA.

## **6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Permasalahan terkait Kependudukan di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan perekaman KTP Elektronik berbasis NIK dan memiliki dokumen pencatatan sipil lainnya.
- b. Sinkronisasi dan pemutakhiran data kependudukan terkait data ganda penduduk Kota Bandar Lampung perlu ditingkatkan.

## **7. Pemberdayaan Masyarakat**

Permasalahan terkait pemberdayaan masyarakat di Kota Bandar Lampung yaitu :

- a. Masih kurangnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.
- b. Belum optimalnya kualitas lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan maupun aparatur penyelenggara pemerintahan kelurahan.

## **8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Permasalahan terkait Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Masih tingginya *Unmeet Need*. Kondisi pada tahun 2020 *Unmeet Need* sebesar 11,50 persen.
- b. Angka kelahiran total (TFR) per Pasangan Usia Subur (15 - 49 tahun) pada Tahun 2020 sebesar 2,37; dimana kondisi ideal yang diharapkan adalah 2 (setiap keluarga memiliki 2 anak saja).

## **9. Perhubungan**

Permasalahan terkait perhubungan di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Perlu penataan trayek angkutan umum dan penataan jaringan trayek angkutan umum massal yang sesuai dengan kondisi saat ini.





- b. Masih kurangnya sarana pendukung operasional lalu lintas (kendaraan operasional, kendaraan hidrolik, kendaraan derek, water barrier, traffic cone, alat komunikasi) dan fasilitas keselamatan lalu lintas
- c. Pelayanan pada Jalan Arteri dan kolektor masih perlu ditingkatkan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.
- d. Perlunya memenuhi fasilitas ruang parkir pada 5 (lima) wilayah parkir yang dikelola Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
- e. Belum terimplementasinya Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung terkait penyelenggaraan transportasi Kota Bandar Lampung.
- f. Perlu segera dilakukan upaya peningkatan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang antara jalan raya dengan jalan rel (PJL) yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung.
- g. Perlu peningkatan sarana dan prasarana kebutuhan petugas Pintu Perlintasan Kereta Api untuk memastikan tugas dapat berjalan optimal.
- h. Perlu dilakukan penambahan lokasi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di ruas-ruas jalan yang volume lalu lintasnya padat untuk mengurangi kemacetan lalu lintas.
- i. Perlu adanya dana alokasi pemeliharaan halte dan Jembatan Pemeliharaan Orang (JPO) untuk memastikan fasilitas halte dan JPO selalu dalam kondisi yang layak dipergunakan.
- j. Perlu dilakukan pendataan terhadap potensi kendaraan wajib uji baru berdasarkan jenis JBB kendaraannya sehingga dapat diketahui pertumbuhannya setiap tahun.

## **10. Komunikasi dan Informatika**

Permasalahan terkait komunikasi dan informatika di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Pemahaman dan keterampilan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi aparatur dan masyarakat perlu ditingkatkan.
- b. Belum terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk meningkatkan pelayanan publik.
- c. Belum optimalnya sistem *e-government* dan aplikasi pendukungnya.



- d. Belum terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kota Bandar Lampung.
- e. Belum adanya Peraturan Daerah (Perda) mengenai pengelolaan dan pelaksanaan *Smart City* Kota.

### **11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

Permasalahan terkait Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Produktivitas UKM yang menurun bahkan mati akibat Pandemi *Covid-19* perlu untuk dibangun kembali.
- b. Produktivitas/volume usaha koperasi masih rendah. Pada tahun 2020, produktivitas/volume usaha koperasi sebesar 464,635 Milyar, dengan penurunan 2,26 persen dari tahun sebelumnya.
- c. Rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi oleh sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- d. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia terkait perkoperasian.
- e. Rendahnya aksesibilitas pelaku UMKM terhadap sumber permodalan khususnya perbankan.

### **12. Penanaman Modal**

Permasalahan terkait penanaman modal di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Penanaman Modal Asing masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2020 jumlah penanaman modal asing mencapai 630.598.514 (dolar), dengan persentase pertumbuhan dari tahun sebelumnya sebesar 4,05 persen.
- b. Penanaman Modal Dalam Negeri masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2020 jumlah penanaman modal dalam negeri mencapai Rp2.210.330.624.677 dengan persentase pertumbuhan dari tahun sebelumnya sebesar 14,99 persen.
- c. Peluang investasi yang ada belum bisa di konversi menjadi investasi sektor riil secara optimal.



- d. Belum optimalnya ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan bagi perluasan usaha penanaman modal.

### **13. Kepemudaan dan Olahraga**

Permasalahan terkait kepemudaan dan olah raga di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Masih minimnya kader-kader kepemimpinan dan kepoloporan pemuda.
- b. Sarana olah raga masih terbatas.
- c. Pembinaan atlit dan pelatih masih minim.

### **14. Statistik**

Permasalahan terkait statistik di Kota Bandar Lampung antara lain yaitu :

- a. Akurasi data sektoral dari Perangkat Daerah yang masih kurang konsisten, sehingga masih terdapat perbedaan antara data yang dikeluarkan oleh BPS dan data Perangkat Daerah.
- b. Belum optimalnya koordinasi dengan OPD terkait data kestatistikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Wali Data di Pemerintah Kota Bandar Lampung.

### **15. Persandian**

Permasalahan terkait persandian di Kota Bandar Lampung antara lain :

- a. Terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang menguasai urusan persandian serta belum optimalnya pengamanan terhadap sistem sandi daerah.
- b. Belum adanya Tenaga Fungsional Sandi Man yang berasal dari ASN.
- c. Belum optimalnya pengamanan *cyber* dan persandian di Tingkat Kota Bandar Lampung khususnya pengamanan data aplikasi online antar OPD/ Data Center
- d. Belum terselenggaranya Standar Operasional Prosedur (SOP) baik pada keamanan *cyber* dan persandian dan Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi (TIK).



## **16. Kebudayaan**

Permasalahan terkait kebudayaan di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, seni, bahasa dan sastra daerah;
- b. Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan dan menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal;
- c. Belum optimalnya pengelolaan budaya untuk meningkatkan daya tarik wisata dari luar daerah dan dunia internasional.

## **17. Perpustakaan**

Permasalahan terkait perpustakaan di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat sehingga pemanfaatan terhadap perpustakaan belum optimal.
- b. Penurunan jumlah pengunjung perpustakaan sebagai dampak dari Pandemi *Covid-19*.
- c. Masih terbatasnya koleksi bahan pustaka sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
- d. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki.
- e. Masih rendahnya kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau diklat terkait perpustakaan.

## **18. Kearsipan**

Permasalahan terkait kearsipan di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Sarana dan Prasarana penyimpanan kearsipan masih belum memadai sehingga perlu dilakukan pembenahan dan penataan secara berkesinambungan.
- b. Kurangnya pengetahuan dinas/instansi tentang arti pentingnya arsip sebagai sumber informasi.



- c. Kurangnya kesadaran OPD untuk menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan.
- d. Rendahnya kesempatan untuk mengikuti seminar dan workshop serta pelatihan terkait kearsipan.

### **2.3.2.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan**

#### **1. Kelautan dan Perikanan**

Permasalahan terkait urusan kelautan dan perikanan di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Belum optimal dan terkelolanya tempat pelelangan ikan di kota bandar lampung untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap dan mendukung peningkatan nilai tukar nelayan;
- b. Pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya milik pemerintah dan masyarakat yang tersedia belum termanfaatkan dengan baik, guna membantu dalam peningkatan volume produksi perikanan budidaya;
- c. Pemberdayaan pelaku usaha perikanan skala kecil yang masih belum merata dan belum memiliki *impact/outcome* nyata dalam peningkatan nilai tukar pembudidaya dan nelayan terhadap peningkatan produksi perikanan;
- d. Tingginya permintaan ikan konsumsi berkualitas tidak sebanding dengan seiringnya tingkat populasi penduduk yang meningkat setiap tahunnya, sehingga perlu adanya tata kelola *supply-demmand* dan pengembangan daya saing produk hasil perikanan di masyarakat;
- e. Terjadinya degradasi dan alih fungsi lahan pada wilayah green belt di sempadan pantai sebagai ekosistem pesisir yang lestari yang berubah menjadi kawasan industri dan pemukiman;
- f. Masih rendah dan lemahnya kompetensi sumber daya manusia termasuk pada kelembagaan kelompok di sektor perikanan dan kelautan.



## **2. Pariwisata**

Permasalahan terkait urusan pariwisata di Kota Bandar Lampung yaitu :

- a. Sektor pariwisata yang menurun akibat Pandemi *Covid-19*.
- b. Kurangnya sajian atraksi pariwisata budaya di tempat destinasi pariwisata.
- c. Rambu petunjuk jalan ke arah tempat wisata masih sangat minim.
- d. Kurangnya pemandu wisata berbahasa asing khususnya selain berbahasa Inggris.
- e. Terbatasnya tenaga kerja tersertifikasi.

## **3. Pertanian**

Permasalahan terkait urusan pertanian di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Keterbatasan dan alih fungsi lahan Pertanian menjadi fungsi lain (pemukiman), semakin mempersulit usaha Pertanian, Peternakan dan Perkebunan.
- b. Sebagian petani berkebun di tanah register karena tidak mempunyai lahan sendiri.
- c. Minimnya pengetahuan petani dalam pengolahan pasca panen hasil pertanian.
- d. Sebagian besar petani tidak mempunyai modal untuk merehabilitasi tanaman perkebunan yang sudah tua, sehingga hasilnya tidak maksimal.
- e. Belum optimalnya infrastruktur pertanian.
- f. Usaha peternakan yang ada masih didominasi skala rumah tangga, belum berorientasi agribisnis dengan skala usaha tertentu.
- g. Belum maksimalnya produksi hasil peternakan akibat manajemen dan SDM yang masih kurang, ketersediaan HMT (Hijauan Makanan Ternak) dan kualitas bibit yang rendah.
- h. Masih rendahnya permodalan bagi petani dan pelaku usaha pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan untuk dapat



menghasilkan produksi yang maksimal dan produk olahan yang berkualitas dan berdaya saing.

- i. Bandar Lampung belum bebas penyakit rabies dan flu burung (AI).

#### **4. Perdagangan**

Permasalahan terkait urusan perdagangan di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB cenderung fluktuatif tiap tahunnya dan pertumbuhannya masih perlu ditingkatkan lagi. Pada tahun 2020, kontribusi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,30 persen dengan pertumbuhan terkontraksi sebesar 10,00 persen.
- b. Meningkatnya animo masyarakat untuk berprofesi sebagai pedagang mengakibatkan bertambahnya jumlah pedagang, hal ini akan berdampak secara langsung pada kebutuhan tempat berdagang.

#### **5. Perindustrian**

Permasalahan terkait urusan perindustrian di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan cenderung fluktuatif tiap tahunnya. Pada tahun 2020, pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan terkontraksi sebesar 4,27 persen dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 20,97 persen.
- b. Sektor industri yang menurun akibat Pandemi *Covid-19*.
- c. Kurangnya modal usaha Industri Kecil Menengah.
- d. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan sebagian Industri Kecil Menengah.
- e. Kurangnya sarana dan prasarana industri kecil dan menengah.



## **6. Transmigrasi**

Permasalahan terkait urusan transmigrasi di Kota Bandar Lampung adalah hal-hal yang berkaitan dengan faktor eksternal, diantaranya kerjasama antar instansi yang masih belum terbangun, juga rendahnya animo dan pengetahuan masyarakat mengenai ketransmigrasian itu sendiri.





## **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

### **4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan perencanaan jangka menengah daerah.

Hal ini mengingat bilamana visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan mengalami kesulitan dalam mengoperasionalkannya kedalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

#### **4.1.1 Visi**

Visi RPJMD merupakan cerminan dari kondisi masa depan Kota Bandar Lampung yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa 5 (lima) tahun. Visi RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesesuaian terhadap sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan RPJPD tahap ke 4. Visi pembangunan daerah Kota Bandar Lampung untuk periode RPJMD 2021-2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

**“BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA,  
NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK  
KEMAKMURAN RAKYAT”**



Pernyataan visi Kota Bandar Lampung tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

**BANDAR LAMPUNG** : meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandar Lampung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1682 hingga sekarang.

**SEHAT** : Kota Bandar Lampung sebagai kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah.

**CERDAS** : adalah sikap dan kondisi masyarakat kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/ lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.

**BERIMAN** : adalah sikap dan kondisi masyarakat yang bertaqwa, dan beramal shaleh serta mewujudkan masyarakat yang taat hukum, bermoral, dan berakhlak mulia.

**BERBUDAYA** : kondisi kota yang mengutamakan kearifan/budaya lokal dalam berbagai sektor.

**NYAMAN** : kondisi Kota Bandar Lampung dengan lingkungan hidup yang baik mendukung kehidupan masyarakatkota yang nyaman



- dengan dukungan keamanan kota terpadu melibatkan TNI, Polri, Linmas dan Partisipasi Masyarakat.
- UNGGUL : menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.
- BERDAYA SAING : kondisi Kota yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.
- EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT : Ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran.

#### **4.1.2 Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Secara teknokratis, misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Disini, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik terhadap stakeholder. Ada banyak stakeholder pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) sekaligus



subjek (pelaku) pembangunan. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Dengan memperhatikan sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah tahap ke 4 didalam RPJPD Kota Bandar Lampung, dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kota Bandar Lampung yang telah ditetapkan diatas maka misi pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Penjelasan masing-masing misi tersebut diatas dijabarkan sebagai berikut:

**MISI PERTAMA** : Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan perluasan



akses yang mudah, murah, terjangkau yang didukung oleh sarana prasarana dan fasilitas yang memadai serta mutu pelayanan yang terus membaik.

MISI KEDUA : Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat. Dimaksudkan untuk membangun sumber daya masyarakat Kota Bandar Lampung yang Cerdas sehingga pada akhirnya akan menjadi SDM yang produktif, kompetitif dan bermanfaat bagi sesama masyarakat.

MISI KETIGA : Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam Skala Mantap Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial. Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga kota Bandar Lampung melalui layanan Infrastruktur yang berkualitas dan terintegrasi satu sama lain, serta mampu mendukung aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat dengan memperhatikan tata ruang.

MISI KEEMPAT : Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat, dengan terus mengoptimalkan sektor-sektor strategis daerah yang mampu menciptakan kesempatan kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, termasuk mengembangkan koperasi dan UMKM yang berazaskan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

MISI KELIMA : Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius. Dimaksudkan untuk membangun masyarakat religius yang dapat menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban



didalam bermasyarakat dan bernegara dengan berazaskan kearifan lokal serta mengembangkan budaya daerah dalam taraf nasional dan internasional.

**MISI KEENAM** : Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi. Dimaksudkan yaitu melanjutkan tata Kelola pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang mandiri dengan mengembangkan keswadayaan masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha lain, serta memberikan pelayanan birokrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang prima, dalam rangka menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung oleh kemampuan aparat yang professional dengan sistem berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.

**MISI KETUJUH** : Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan. Dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan, dengan menitik beratkan pada pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan



daya dukung daya tampung serta pengendalian resiko bencana.

#### 4.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dari 7 (tujuh) misi yang telah diuraikan sebelumnya, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1.1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1.1.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
2	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat		1.1.2 Meningkatkan Mutu dan Pemerataan Pendidikan bagi Seluruh Masyarakat 1.1.3 Meningkatkan Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda
3	Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial	3.1 Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang berkualitas	3.1.1 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan 3.1.2 Meningkatkan pengendalian banjir 3.1.3 Meningkatkan akses masyarakat terhadap permukiman layak 3.1.4 Meningkatkan Kualitas Tata Ruang 3.1.5 Menurunnya masalah kemacetan
4	Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	4.1 Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan	4.1.1 Meningkatkan Sektor unggulan daerah 4.1.2 Meningkatkan Investasi dan memperluas kesempatan kerja 4.1.3 Menurunnya kemiskinan 4.1.4 Meningkatkan penanganan PMKS



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
5	Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius	5.1 Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat dan bernegara yang Aman, Tenram dan Damai Berlandaskan Nilai-Nilai Budaya	5.1.1 Meningkatnya Kemananan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama 5.1.2 Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah
6	Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi	6.1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan dan Inovatif	6.1.1 Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung 6.1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan 6.1.3 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah 6.1.4 Terciptanya Inovasi Layanan Publik 6.1.5 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
7	Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan	7.1 Terwujudnya keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan	7.1.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 7.1.2 Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana

#### 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan penajaman, perluasan cakupan, dan lanjutan prioritas pembangunan tahun sebelumnya serta merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Prioritas pembangunan juga ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis, korelasi terhadap Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pembangunan serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang. Selain itu, prioritas pembangunan daerah juga





memperhatikan dan disinergikan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Lampung.

#### **4.2.1 Tinjauan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022**

Visi Misi Presiden disusun berdasarkan arahan RPJPN Tahun 2020-2025 yang akan dilaksanakan pada periode kepemimpinan Tahun 2020-2024 yaitu *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”*, dengan Misi :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden juga menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia Tahun 2045. Kelima arahan tersebut yaitu :

1. Pembangunan SDM, yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;



3. Penyederhanaan Regulasi, yaitu segala bentuk kendala regulasi, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang dengan pendekatan omnibus law. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi, yaitu memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;
5. Transformasi Ekonomi, yaitu melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan Visi dan Misi serta 5 (lima) arahan Presiden tersebut, dalam Rancangan Awal RKP Tahun 2022, Pemerintah telah merancang tema ***“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”*** dengan 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi:



1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan
10. Reformasi Kesehatan

#### **4.2.2 Tinjauan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2021**

Visi dan Misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yaitu mewujudkan “*Rakyat Lampung Berjaya*” dengan Misi :

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Mewujudkan “*good governance*” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Meningkatkan Kualitas SDM dan Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Untuk mendorong percepatan pembangunan pada Tahun 2022 mendatang yang mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, serta sejalan dengan RKP Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan 6 (enam) prioritas pembangunan



dengan Tema Pembangunan **“Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan serta Peningkatan SDM Berkualitas”** yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Pembangunan Infrastruktur;
4. Reformasi Birokrasi;
5. Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman Dan Berbudaya;
6. Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana.

#### **4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2021**

Dalam konteks pembangunan, keterpaduan pusat-daerah dan antar daerah merupakan penentu utama kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Kota Bandar Lampung yang merupakan bagian dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Lampung harus mempunyai sinergi perencanaan pembangunan agar apa yang telah ditetapkan menjadi prioritas Kota Bandar Lampung dapat selaras dengan Prioritas Nasional dan Prioritas pembangunan Provinsi Lampung.

Prioritas dan sasaran pembangunan Nasional maupun daerah pada Tahun 2022 disusun dengan mempertimbangkan adanya fenomena dunia yang tidak diprediksi sebelumnya yaitu krisis *Covid-19* yang merupakan krisis kesehatan dan berimbas ke sektor keuangan, finansial, bahkan ke sektor ekonomi dan sosial. Oleh sebab itu, dibutuhkan langkah strategis dalam merencanakan pembangunan kedepan yang tidak hanya menjalankan amanah RPJMD tetapi juga dapat menangani wabah *Covid-19* beserta dampaknya.

Guna mendukung tema dan prioritas pembangunan nasional maupun pembangunan Provinsi Lampung serta mempertimbangkan dampak yang timbul akibat adanya Pandemi Covid-19, maka Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menetapkan tema pembangunan yaitu



**“Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Pemantapan Infrastruktur Perkotaan, Pendidikan, Kesehatan, Sosial Perdagangan dan Jasa Serta Peningkatan Kualitas SDM”** dengan 6 (enam) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Memulihkan Perekonomian Daerah Melalui peningkatan sektor-sektor strategis daerah;
2. Memantapkan infrastruktur dan pelayanan kesehatan Masyarakat;
3. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan;
4. Memantapkan kualitas infrastruktur dan pelayanan pendidikan serta SDM;
5. Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Kearifan Lokal;
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui pemanfaatan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah.

Tema dan prioritas yang ditetapkan tersebut tentu saja dalam rangka mendorong pencapaian Visi, Misi dan kinerja RPJMD Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis nasional dan daerah. Keterkaitan antara Misi, Prioritas dan sasaran RKPD Tahun 2022 digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4.2 Keterkaitan antara Misi, Prioritas dan sasaran RKPD Tahun 2022

No	Misi	Prioritas	Sasaran
4	Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	1 Memulihkan Perekonomian Daerah Melalui peningkatan sektor-sektor strategis daerah	4.1.1 Meningkatnya Sektor unggulan daerah 4.1.2 Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja 4.1.3 Menurunnya kemiskinan 4.1.4 Meningkatnya penanganan PMKS
1	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	2 Memantapkan infrastruktur dan pelayanan kesehatan Masyarakat	1.1.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk



No	Misi	Prioritas	Sasaran
3	Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial	3 Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan	3.1.1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan 3.1.2 Meningkatnya pengendalian banjir 3.1.3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak 3.1.4 Meningkatnya Kualitas Tata Ruang 3.1.5 Menurunnya masalah kemacetan
7	Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan		7.1.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 7.1.2 Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana
2	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat	4 Memantapkan kualitas infrastruktur dan pelayanan pendidikan serta SDM	1.1.2 Meningkatnya Mutu dan Pemerataan Pendidikan bagi Seluruh Masyarakat 1.1.3 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda
5	Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius	5 Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Kearifan Lokal	5.1.1 Meningkatnya Kemananan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama 5.1.2 Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah
6	Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi	6 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui pemanfaatan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	6.1.1 Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung 6.1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan 6.1.3 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah 6.1.4 Terciptanya Inovasi Layanan Publik 6.1.5 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah



Untuk lebih memperjelas gambaran penjabaran keselarasan pembangunan antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dengan prioritas dan sasaran daerah Kota Bandar Lampung dapat dilihat dalam jabaran keselarasan pada Tabel 4.3. Sedangkan prioritas dan sasaran pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2022 beserta target kinerja disajikan pada Tabel 4.4.

Berdasarkan prioritas pembangunan yang mengarah pada pencapaian sasaran daerah, maka fokus kebijakan Tahun 2022 adalah ***Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Peningkatan Sektor-sektor Strategis untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan.*** Selanjutnya strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Bandar Lampung sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2022 dan memperhatikan Rancangan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 4.4.



Tabel 4.3 Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Lampung dengan Prioritas dan Sasaran Daerah

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah
1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1 Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan	1 Memulihkan Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Sektor-Sektor Strategis Daerah	4.1.1 Meningkatnya Sektor unggulan daerah 4.1.2 Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja 4.1.3 Menurunnya kemiskinan 4.1.4 Meningkatnya penanganan PMKS
3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	2 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	2 Memantapkan infrastruktur dan pelayanan kesehatan Masyarakat	1.1.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar  6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	3 Pembangunan Infrastruktur  6 Pengelolaan Lingkungan Yang Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana	3 Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan	3.1.1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan 3.1.2 Meningkatnya pengendalian banjir 3.1.3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak 3.1.4 Meningkatnya Kualitas Tata Ruang 3.1.5 Menurunnya masalah kemacetan 7.1.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 7.1.2 Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana
3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	2 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	4 Memantapkan kualitas infrastruktur dan pelayanan pendidikan serta SDM	1.1.2 Meningkatnya Mutu dan Pemerataan Pendidikan bagi Seluruh Masyarakat 1.1.3 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda





<b>Prioritas Nasional</b>	<b>Prioritas Provinsi</b>	<b>Prioritas Daerah</b>	<b>Sasaran Daerah</b>
4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	5 Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Aman Dan Berbudaya	5 Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Kearifan Lokal	5.1.1 Meningkatnya Kemananan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama 5.1.2 Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah
7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4 Reformasi Birokrasi	6 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui pemanfaatan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	6.1.1 Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung 6.1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan 6.1.3 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah 6.1.4 Terciptanya Inovasi Layanan Publik 6.1.5 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah



Tabel 4.4 Prioritas, Sasaran dan Target Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2022

Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2022
1 Memulihkan Perekonomian Daerah Melalui peningkatan sektor-sektor strategis daerah	4.1.1 Meningkatkan Sektor unggulan daerah	1 Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	21,20
		2 Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	%	14,05
		3 Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	%	15,34
		4 Persentase UMKM yang Meningkatkan Labanya	%	31,50
		5 Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	%	18,11
	4.1.2 Meningkatkan Investasi dan memperluas kesempatan kerja	1 Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	%	15,99
		2 Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	%	5,05
		3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	8,51
	4.1.3 Menurunnya kemiskinan	1 Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	91,43
		2 Pendapatan Per Kapita Penduduk	Juta Rp	54,00 – 56,00
	4.1.4 Meningkatkan penanganan PMKS	1 Persentase PMKS yang tertangani	%	77,00
	2 Memantapkan infrastruktur dan pelayanan kesehatan Masyarakat	1.1.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	1 Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun
2 Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)			%	6,50
3 Laju Pertumbuhan penduduk			%	1,109
3 Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan	3.1.1 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan	1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	%	85,81
	3.1.2 Meningkatkan pengendalian banjir	1 Persentase Daerah Rawan Banjir	%	50,00
	3.1.3 Meningkatkan akses masyarakat terhadap permukiman layak	1 RTLH yang tertangani pertahun	%	23,63
		2 Persentase Kawasan Kumuh	%	0,890
3.1.4 Meningkatkan Kualitas Tata Ruang	1 Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	%	54,65	



Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2022
	3.1.5 Menurunnya masalah kemacetan	1 Persentase Titik Kemacetan yang Terselesaikan	%	50,00
	7.1.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	61,43
	7.1.2 Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	1 Indeks Resiko Bencana	Angka	139,046 (Tinggi)
4 Memantapkan kualitas infrastruktur dan pelayanan pendidikan serta SDM	1.1.2 Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat	1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah 2 Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun Tahun	10,96 16,14
	1.1.3 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda	1 IPG (Indeks Pembangunan Gender) 2 Tingkat Capaian Kota Layak Anak 3 Pemuda Berprestasi	Angka Tingkatan %	93,88 Madya 9,61
5 Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Kearifan Lokal	5.1.1 Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	1 Angka kriminalitas yang tertangani 2 Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani	Angka %	1.531 78,50
	5.1.2 Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	1 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	40,00
6 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui pemanfaatan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	6.1.1 Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung	1 Indeks RB (Reformasi Birokrasi) 2 Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	Skor Predikat	61,00 (CC) A-
	6.1.3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Angka Predikat	56,20 WTP
	6.1.4 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	1 Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	26,72



Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2022
	6.1.2 Terciptanya Inovasi Layanan Publik	1 Indeks Inovasi Pemerintah Daerah	Predikat	Sangat Inovatif
	6.1.5 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	1 Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Skor/ Predikat	3/ST <sup>a)</sup>

Tabel 4.5 Prioritas, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2022

Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Memulihkan Perekonomian Daerah Melalui peningkatan sektor-sektor strategis daerah	4.1.1 Meningkatnya Sektor unggulan daerah	4.1.1.1 Meningkatkan kinerja sektor industri dengan didukung oleh penguatan dan pengembangan IKM/IRT	1 Mengembangkan Sektor Industri dengan Menumbuh kembangkan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Industri Rumah Tangga (IRT) yang Produktif, Berdaya Saing, Tahan Krisis, dan Padat Karya serta Optimalisasi Peran Sektor Industri dalam Penyerapan Tenaga Kerja Lokal
			2 Meningkatkan Aksesibilitas IKM/IRT terhadap Pembiayaan Tanpa Bunga maupun dengan Bunga Rendah/Terjangkau Baik dengan Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank
			3 Mengembangkan IKM/IRT Berbasis Potensi Daerah
			4 Menyiapkan kapasitas IKM/IRT dalam memasuki era Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital
		4.1.1.2 Mengembangkan perdagangan baik formal maupun informal dengan tetap memprioritaskan perlindungan konsumen	1 Stabilisasi harga komoditas, ketersediaan dan menghindari kelangkaan barang diantaranya melalui penyediaan sarana perdagangan yang representatif
			2 Meningkatkan Keamanan Perdagangan dan Perluasan Jaringan Pemasaran Produk Unggulan Daerah melalui Event Promosi, termasuk penerapan digitalisasi dalam aktivitas perdagangan (e-commerce)
			3 Meningkatkan kesadaran penggunaan produksi lokal
			4 Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan melalui Pengelolaan Pasar Tradisional dan Pasar Rakyat serta Pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima
			5 Meningkatkan Cakupan Pengawasan Kemetropolitan



Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		4.1.1.3 Mengembangkan Industri/Jasa kepariwisataan secara terpadu	1 Meningkatkan Kualitas Jasa Transportasi, Perdagangan, Keuangan dan Jasa Lainnya
			2 Mendorong Keterpaduan Program dalam Masterplan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
			3 Mendorong Peningkatan Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara dengan Meningkatkan Promosi Pariwisata Kota Bandar Lampung baik melalui Event-event Lokal, Nasional dan Internasional maupun promosi melalui media digital
			4 Meningkatkan SDM pemandu wisata yang sopan, ramah, menguasai bahasa, dan objek-objek wisata
			5 Meningkatkan Kemitraan dengan Pelaku Usaha Kepariwisata untuk menumbuh kembangkan usaha-usaha kepariwisataan
		4.1.1.4 Mengembangkan Koperasi dan UMKM sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan disertai peningkatan kualitas dan perluasan peluang usaha untuk mendorong tumbuh kembangnya wira usaha baru	1 Mendorong Penguatan Kelembagaan dan Meningkatkan Daya Saing UMKM dan Koperasi sehingga Mampu Tumbuh Menjadi Usaha yang Berkelanjutan dengan Skala yang Lebih Besar
			2 Meningkatkan Fasilitasi/pendampingan dalam mengembangkan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM untuk meningkatkan volume usaha
			3 Meningkatkan aksesibilitas koperasi dan UMKM terhadap pembiayaan tanpa bunga maupun dengan bunga rendah/terjangkau baik dengan lembaga keuangan Bank maupun Non Bank
			4 Meningkatkan Iklim Usaha Mikro Kecil dan Koperasi yang Kondusif pada Era Perdagangan Bebas/Globalisasi
			5 Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM dalam era Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital yang kompetitif
4.1.2 Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja	4.1.2.1 Penguatan iklim investasi dengan didukung promosi, sumberdaya, sarana	1 Optimalisasi Promosi Investasi untuk Publikasi Potensi Disertai Kemitraan Investasi	
		2 Meningkatkan layanan investasi yang sederhana, mudah, cepat, tepat dan transparan baik secara offline maupun online	



Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		dan prasarana serta teknologi informasi	
		4.1.2.2 Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan yang mampu menciptakan kesempatan kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Meningkatkan informasi investasi baik offline maupun online</li> <li>2 Meningkatkan kerjasama daerah</li> <li>3 Mendorong investor/pelaku usaha, lembaga donor, dan lembaga pemerintah untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal</li> </ol>
		4.1.2.3 Meningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Mendorong Arah Investasi yang Padat Karya yang Menjadikan Masyarakat Partisipatif dalam Pembangunan</li> <li>2 Meningkatkan kopetensi dan daya saing tenaga kerja lokal melalui Pembinaan dan Pelatihan serta mengembangkan tempat-tempat atau Balai Latihan Kerja</li> <li>3 Meningkatkan Perlindungan dan Pengawasan Sistem Ketenagakerjaan</li> <li>4 Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Informasi Lapangan Pekerjaan, Pelatihan Kerja dan Penyaluran Tenaga Kerja</li> </ol>
	4.1.3 Menurunnya kemiskinan	4.1.3.1 Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan program-program unggulan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Meningkatkan koordinasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan daerah</li> <li>2 Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial dengan fokus pada peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berada di lingkungan masyarakat</li> <li>3 Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dengan mendorong peran dan partisipasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam Pelaksanaan Pembangunan di segala bidang, terutama dalam menumbuh kembangkan Semangat Gotong Royong dalam masyarakat</li> </ol>



Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			4 Meningkatkan ketahanan pangan sebagai wujud kedaulatan pangan melalui penganekaragaman, ketersediaan dan keamanan pangan
			5 Meningkatkan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura Rakyat
			6 Meningkatkan Aksesibilitas Petani terhadap Teknologi, Sumber-sumber Pembiayaan, serta Informasi Pasar dan Akses Pasar termasuk Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran
			7 Meningkatkan Produktifitas Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat
			8 Menyalurkan Bibit dan Sarana Prasarana Produksi Pertanian dan Perikanan Skala Kecil pada Masyarakat
			9 Meningkatkan Produktivitas, Optimalisasi Kapasitas dan Kontinuitas Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya untuk Kesejahteraan nelayan dan Masyarakat
			10 Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan
	4.1.4 Meningkatnya penanganan PMKS	4.1.4.1 Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan PMKS	1 Meningkatkan aksesibilitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi
			2 Penguatan Skema Perlindungan dan Bantuan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
			3 Meningkatkan Kemandirian Penyandang Disabilitas melalui Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
			4 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pemakaman Baik Milik Pemerintah Maupun Pemakaman Milik Masyarakat/Umum
			5 Menyediakan Buffer Stock Logistik dan Pemenuhan Dasar Korban Bencana



Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2 Memantapkan infrastruktur dan pelayanan kesehatan masyarakat	1.1.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	1.1.1.1 Mengoptimalkan Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Secara Komprehensif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Baik di Rumah Sakit maupun Fasilitas Kesehatan Lainnya melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Penyelenggaraan Kesehatan untuk Masyarakat
			2 Pengembangan Profesionalitas SDM Kesehatan Baik Medis, Paramedis maupun Non Medis melalui Peningkatan Kualifikasi
			3 Meningkatkan Ketersediaan, Pemerataan dan Keterjangkauan Obat, Vaksin dan Alat Kesehatan di Puskesmas/Pustu dan Jaringannya
			4 Meningkatkan Bentuk Kegiatan dengan Pendekatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif yang Dilaksanakan secara Terpadu, Menyeluruh dan Berkesinambungan termasuk Pencegahan Kasus Baru Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Kejadian Luar Biasa/Wabah
			5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan dan Laboratorium yang Memadai
		1.1.1.2 Melakukan Advokasi, Sosialisasi, Edukasi, dan Fasilitasi Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Mengendalikan Usia Perkawinan Pertama Penduduk
			2 Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata di Setiap Wilayah dan Kelompok Masyarakat dengan Menjamin Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat dan Obat Kontrasepsi dengan Fokus pada Penurunan Unmet Need dan Resiko Drop Out KB
			3 Meningkatkan Jumlah dan Penguatan Kapasitas Tenaga Lapangan KB dan Tenaga Kesehatan Pelayanan KB, serta Penguatan Lembaga di Tingkat Masyarakat untuk Mendukung Penggerakan dan Penyuluhan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera serta Reproduksi Bagi Remaja





Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3 Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan	3.1.1 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan	3.1.1.1 Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan beserta kelengkapannya	1 Meningkatkan Sistem Jaringan Transportasi Jalan dan Jembatan Terutama untuk Mengurai Kemacetan dengan Membangun dan Meningkatkan Jalan Kota, Jalan Lingkungan dan Jalan-jalan Alternatif
			2 Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan Melalui Pemantauan Kondisi Jalan dan Jembatan secara Berkala, serta Penanganan Pemeliharaan Secara Responsif
			3 Penguatan Base Line Data Pembangunan Jalan dan Jembatan
			4 Meningkatkan Utilitas Penerangan di Kawasan Jalan Umum
			5 Membangun Infrastruktur Gedung Pemerintahan
	3.1.2 Meningkatkan pengendalian banjir	3.1.2.1 Optimalisasi pengendalian banjir dengan mengurangi titik-titik banjir dan luas genangan	1 Mengurangi Luas Genangan dan Mengendalikan Banjir Melalui normalisasi sungai
			2 Pembangunan, Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Drainase secara terpadu
			3 Meningkatkan Penanganan Daerah/Kawasan Rawan Longsor
	3.1.3 Meningkatkan akses masyarakat terhadap permukiman layak	3.1.3.1 Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Permukiman yang Berkualitas, Layak, Sehat serta Terjangkau	1 Meningkatkan Kualitas Permukiman yang Bermartabat melalui penanganan RTLH dengan Pelibatan Masyarakat dan Swasta, Pembagian Proporsi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat
			2 Mengurangi Kawasan Kumuh melalui Pembangunan Sarana Infrastruktur Dasar Permukiman dan Lingkungan Sehat Permukiman
			3 Penataan wilayah pesisir yang sehat dan nyaman
			4 Mengoptimalkan ketersediaan sumber air bersih dan air minum layak
			5 Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk menunjang Hunian
	3.1.4 Meningkatkan Kualitas Tata Ruang	3.1.4.1 Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan melalui	1 Pemenuhan Ketersediaan Perencanaan Tata Ruang yang Efektif, Spesifik dan Harmonis
			2 Meningkatkan Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan sesuai Peruntukannya



Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Pengawasan secara Berkelanjutan untuk Menjamin Kesesuaian Pemanfaatan Lahan dengan Rencana Tata Ruang	<p>3 Meningkatkan pengawasan kesesuaian Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah terhadap RTRW</p> <p>4 Meningkatkan peran lintas sektor dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang dan Pertanahan untuk menyelaraskan pembangunan yang berkelanjutan</p> <p>5 Meningkatkan pengawasan pengelolaan Pertanahan</p> <p>6 Meningkatkan Layanan terhadap Penyelesaikan Konflik-Konflik Pertanahan</p>
	3.1.5 Menurunnya masalah kemacetan	3.1.5.1 Meningkatkan sarana prasarana serta layanan perhubungan yang terpelihara dan dapat menjamin keamanan, keselamatan, kenyamanan dan waktu tempuh	<p>1 Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan termasuk ketersediaan rambu-rambu lalu lintas dan penyediaan marka jalan</p> <p>2 Mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan raya dengan meningkatkan pelayanan angkutan umum yang memadai</p> <p>3 Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dengan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan</p> <p>4 Evaluasi dan penataan kawasan parkir</p> <p>5 Meningkatkan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor</p> <p>6 Penguatan Kelembagaan dan Inventarisasi Data Perhubungan</p>
	7.1.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	7.1.1.1 Meningkatkan Upaya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup melalui Pembangunan yang Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan serta Peduli terhadap Perubahan Iklim	<p>1 Mendorong Pencapaian Kota yang Berketahanan Iklim dan Berkelanjutan</p> <p>2 Memperkuat Sistem Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang Menyeluruh</p> <p>3 Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau secara Terpadu dengan Penataan Taman-Taman dan Kawasan Hijau Kota yang Ramah Lingkungan</p> <p>4 Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan dan Penguatan Pengolahan Limbah/Persampahan secara Terpadu</p> <p>5 Meningkatkan Layanan Persampahan termasuk Pemeliharaan dan Pembaharuan Infrastruktur Persampahan</p> <p>6 Mendorong Pengembangan Energi Alternatif dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian Energi Daerah</p>



Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	7.1.2 Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	7.1.2.1 Menyediakan Rencana Aksi Pencegahan dan Mitigasi Bencana Daerah serta Peningkatan Kepedulian Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Membangun Sarana dan Prasarana Peringatan Dini yang Terintegrasi Satu Sama Lain, serta Pembangunan Infrastruktur Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana</li> <li>2 Meningkatkan Koordinasi Penanggulangan Bencana antara Masyarakat, Pemerintah dan Stakeholder</li> <li>3 Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat dalam Mengurangi dan Menanggulangi Risiko Bencana</li> <li>4 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana</li> </ol>
4 Memantapkan kualitas infrastruktur dan pelayanan pendidikan serta SDM	1.1.2 Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat	1.1.2.1 Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Semua, Berdaya Saing dan Non Diskrimatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Pendidik dengan Mendorong Pelaksanan Kurikulum Secara Baik, Meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis IT, Termasuk Menyediakan Bahan Ajar dengan Muatan Lokal dan Menanamkan Karakter Sejak Dini Melalui <i>Multigrade</i> dan/atau <i>Multisubject Teaching</i></li> <li>2 Pengembangan Anak Usia Dini yang Menjamin Terpenuhinya Kebutuhan Esensial Anak Usia Dini Secara Utuh dan Terintegrasi Antar lembaga Layanan Terkait dengan Mendorong Komitmen Seluruh Lapisan Masyarakat di Dalam Mengembangkan PAUD</li> <li>3 Menjamin Keterbukaan dan Kemudahan bagi Seluruh Masyarakat Kota (tanpa diskriminasi) untuk Memperoleh Pelayanan Pendidikan Dasar yang Bermutu Hingga Terpenuhinya Wajib Belajar 12 Tahun</li> <li>4 Menyediakan Bantuan untuk Anak dari Keluarga Kurang Mampu Kota Bandar Lampung untuk Dapat Mengikuti Pendidikan Dasar</li> <li>5 Meningkatkan sarana dan prasarana melalui rehabilitasi gedung, laboratorium, perpustakaan, dan infrastruktur IT sekolah dan madrasah</li> <li>6 Meningkatkan Peran dan Fungsi Pendidikan Non Formal dalam Peningkatan Mutu Pendidikan dengan Mendorong Akreditasi Lembaga Pendidikan Non Formal</li> </ol>



Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		1.1.2.2 Meningkatkan Minat Baca Masyarakat yang Didukung Ketersediaan Perpustakaan yang Memadai	1 Mendorong Gerakan Budaya Membaca/Literasi Masyarakat 2 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Disetiap Tingkatan
	1.1.3 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, anak dan Generasi Muda	1.1.3.1 Meningkatkan kualitas SDM perempuan serta aksesibilitas pelayanan anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang yang berkualitas	1 Mendorong Pemahaman Pemangku Kepentingan, Perencana dan Pelaksana Pembangunan terhadap Konsep Kesetaraan Gender dengan Fokus Penguatan Partisipasi Perempuan dalam Segala Lini 2 Meningkatkan Kualitas dan Peran Perempuan Sebagai Leader di Berbagai Bidang 3 Meningkatkan kualitas hidup dan Kemandirian perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan 4 Menciptakan lingkungan fisik dan sosial yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta kehidupan yang ramah anak 5 Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Anak dan Perempuan dari Berbagai Tindak Kekerasan dan Perlakuan Salah Lainnya 6 Meningkatkan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan
		1.1.3.2 Meningkatkan Pembangunan Pemuda yang Berkarakter dan Meningkatkan Prestasi Olahraga secara Partisipatif dengan Menciptakan Kecerdasan Emosional dan Intelektual	1 Meningkatkan Peranserta Pemuda dalam Pembangunan Sosial, Politik, Ekonomi, Budaya dan Agama 2 Melakukan Penguatan dan Pengembangan Pola Pembinaan Olahraga Berjenjang dan Berkelanjutan 3 Meningkatkan Akses dan Partisipasi Masyarakat secara Lebih Luas dan Merata untuk Meningkatkan Kebugaran Jasmani dan prestasi olahraga melalui Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga bagi Masyarakat Umum



Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
5 Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan Daerah dengan Mengembangkan Kearifan Lokal	5.1.1 Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	5.1.1.1 Mengendalikan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah	1 Meningkatkan Sinergitas, Toleransi, dan Peranserta <i>Stakeholders</i> bersama Sumber Daya Linmas (Perlindungan Masyarakat) dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban Umum
			2 Meningkatkan Pembinaan dan Fasilitasi SDM Perlindungan Masyarakat dalam Penegakan Peraturan Daerah Khususnya Terkait dengan K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
			3 Meningkatkan Peranserta Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan
		5.1.1.2 Meningkatkan toleransi beragama dan wawasan kebangsaan	1 Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama dan Perilaku Keagamaan di Masyarakat
			2 Memperkuat Iklim Kondusif bagi Berkembangnya Demokrasi yang Beradab, Memelihara Perdamaian dan Meningkatkan Rasa Persatuan dan Kesatuan
			3 Meningkatkan Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, politik, demokrasi dan toleransi umat beragama
	5.1.2 Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	5.1.2.1 Meningkatkan Perlindungan dan Pelestarian Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya serta Seni Budaya Daerah	4 Meningkatkan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial, Agama dan RAS
			1 Melestarikan dan Mengembangkan Kesenian, Sejarah, Tradisi dan Nilai-nilai Budaya Lokal Melalui Aktivitas Seni dan Promosi
			2 Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan festival seni dan budaya untuk pelestarian dan aktualisasi adat budaya
			3 Menghidupkan sanggar-sanggar seni dengan meningkatkan peran seniman dan budayawan
			4 Meningkatkan Pemeliharaan, Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya Daerah



Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
6 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui pemanfaatan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah	6.1.1 Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung	6.1.1.1 Meningkatkan Pencapaian Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	1 Mendorong Perubahan Mental Aparatur untuk Menciptakan Budaya Kerja dan Profesionalitas Sumber Daya Aparatur
			2 Memperkuat Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
			3 Menerapkan Sistem Akuntabilitas yang Dapat Mendorong Birokrasi Lebih Berkinerja dan Mampu Mempertanggungjawabkan Kinerjanya
			4 Menerapkan Sistem Kelembagaan/Organisasi yang Mendorong Efisiensi, Efektivitas dan Percepatan Proses Pelayanan dan Pengambilan Keputusan dalam Birokrasi
			5 Menerapkan Sistem Tatalaksana/Tatakerja Birokrat dengan Proses yang Singkat dan Jelas dalam Rangka Mendorong Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
			6 Mengelola SDM yang Mampu Menghasilkan Aparatur yang Profesional
			7 Memperkuat Sistem Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Efektif dan Menyentuh Kebutuhan Masyarakat
			8 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat dengan Mengoptimalkan Pelayanan Satu Pintu, Termasuk Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
	6.1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	6.1.2.1 Meningkatkan kualitas perencanaan, akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	1 Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah
			2 Memanfaatkan Hasil Penelitian dan Kajian dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
			3 Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			4 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
			5 Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Belanja Daerah
			6 Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah serta Kepatuhan terhadap Pelaporan Keuangan



Prioritas	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	6.1.3 Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	6.1.3.1 Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah
			2 Menyediakan Layanan Pajak dan Retribusi yang Mudah, Cepat dan Akurat berbasis IT
			3 Mengoptimalkan penagihan pajak dan retribusi daerah
			4 Meningkatkan Koordinasi, Konsultasi dan Evaluasi dalam pengelolaan dana transfer
			5 Mendorong Kinerja BUMD dan Perusahaan Daerah
	6.1.4 Terciptanya Inovasi Layanan Publik	6.1.4.1 Meningkatkan akses masyarakat dalam informasi dan layanan publik melalui penciptaan inovasi di segala bidang	1 Mengembangkan e-Government dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
			2 Memperkuat dan Memperluas Jangkauan Teknologi Komunikasi dan Informatika
			3 Menciptakan Inovasi Layanan di Segala Bidang
			4 Mengembangkan Penelitian dan Inovasi Daerah
			5 Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk Memberikan Informasi dan Pelayanan Publik
	6.1.5 Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	6.1.5.1 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Secara Transparan dan Demokratis	1 Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Secara Komprehensif
			2 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dengan menjamin ketersediaan sarana prasarana pendukung kinerja Perangkat Daerah
			3 Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan
			4 Meningkatkan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Daerah



Tabel 4.6 Keselarasan Prioritas Nasional dengan Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2022

No	RPJMN				RKPD			
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2022	Prioritas Daerah/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	PN	<b>MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS</b>			<b>MEMULIHKAN PEREKONOMIAN DAERAH MELALUI PENINGKATAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS DAERAH</b>			
	PP	<b>Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi</b>	Produktivitasair (water productivity) (US\$/m <sup>3</sup> )	4.70	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kota (%)	25,728	
					Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Sumur Bor untuk Peningkatan Produksi Pertanian	20,00	
						Persentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian	80,00	
	PP	<b>Peningkatan ketesediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan</b>	Skor pola pangan harapan (2.2.2(c))	92,80	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (skor)	86,20	
					Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Energi per kapita (kkal/kap/ hari)	2.510,00	
						Angka kecukupan energi (AKE) (2.1.2(a)) (kkal/hari)	2.100,00	
						Angka kecukupan protein (AKP) (gram/kapita/hari)	57,00	
						Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Protein per kapita (gr/kap/ hari)	72,16
							Ketersediaan pangan utama (%)	100,00
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rawan Pangan	7,00						
	Persentase Daerah Rawan Pangan	7,00						
		Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (prevalence of under-nourishment/ PoU)	5,50					
		Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecurity Experience Scale/FIES)	4,5					





No	RPJMN				RKPD		
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2022	Prioritas Daerah/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	PP	<b>Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan</b>	Konservasi kawasan kelautan (14.5.1*) (Juta ha)	25,1			
			Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1*) (%)	<72	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	0,031
	PP	<b>Penguatan kewirausahaan, usaha Mikro, Kecil menengah (UMKM), dan Koperasi</b>	Rasio Kewirausahaan nasional (persen)	3,80	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Berskala Mikro (%)	18,40
			Kontribusi UMKM terhadap PDB (persen)	63,00	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Berskala Mikro (%)	18,40
					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kontribusi PAD sektor pariwisata (%)	23,45
					Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	65,50
						Pertumbuhan Produktivitas UMKM (%)	3,40
			Kontribusi Koperasi terhadap PDB (persen)	5,30	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi (%)	0,29
					Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah (Indikator Sasaran RPJMD)	Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	18,11
					Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	3,99
	Produk/Usaha Ekonomi Kreatif yang Distandarisasi	Jumlah produk/usaha ekoomi kreatif yang Distrandarasi (produk/ usaha)	330	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif (%)	2,35	
	Pengembangan Produk Pangan, Barang Dari Kayu dan Furnitur Untuk	Jumlah IKM yang menjadi pemasok Industri Besar	15	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	13,64	



No	RPJMN				RKPD		
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2022	Prioritas Daerah/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
		Industri Besar dan Sedang	dan Sedang (IKM (Kumulatif))		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	IKM yang Terinformasi dalam SINAS (IKM)	8,00
		Pengembangan Produk Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka Untuk Industri Besar dan Sedang	Jumlah IKM yang menjadi pemasok Industri Besar dan Sedang (IKM (Kumulatif))	90	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	13,64
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	IKM yang Terinformasi dalam SINAS (IKM)	8,00
		Pengembangan Produk Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Untuk Industri Besar dan Sedang	Jumlah IKM yang menjadi pemasok Industri Besar dan Sedang (IKM (Kumulatif))	60	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	13,64
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	IKM yang Terinformasi dalam SINAS (IKM)	8,00
		Pembangunan/Revi- taslisasi sentra IKM	Jumlah provinsi yang dibangun/ direvitalisasi sentra IKM nya (provinsi)	34	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	13,64
<b>2</b>	<b>PN</b>	<b>MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN</b>					
	<b>PP</b>	<b>Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi</b>	Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	3,9	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Padi	58,50
						Produktivitas Jagung	48,50
						Produksi Daging	5.180,24
						Produksi Telur	126,90
					Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Sumur Bor untuk Peningkatan Produksi Pertanian	20,00
						Persentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian	80,00
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Angka Kejadian Penyakit	6,80
					Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100,00
					Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Petani (%)	70,00



No	RPJMN				RKPD		
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2022	Prioritas Daerah/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kontribusi PDB kemaritiman (Persen)	7,2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman	0,031
						Cakupan Bina Kelompok Nelayan	34,00
						Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	58,48
						Produksi Perikanan Tangkap (ton)	3.118,26
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	135,23
					Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	36,54
			Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (9.2.1(a)) (persen)	6,50	Meningkatnya Sektor unggulan daerah (Indikator Sasaran RPJMD)	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	21,20
					Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan Industri (%)	2,52
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait (%)	60,00
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	IKM yang Terinformasi dalam SINAS (IKM)	8
			Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*)	5,20	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	PAD sektor pariwisata (%)	23,45
					Program Pemasaran Pariwisata	Rata-rata Belanja Wisatawan Nusantara (rupiah/ kunjungan)	1.500.000,00
						Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara (rupiah/ kunjungan)	10.100.000,00
					Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif (%)	2,35



No	RPJMN				RKP		
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2022	Prioritas Daerah/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Penyelenggaraan Event Ekonomi Kreatif (%)	50,00
			Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp triliun)	1.439-1.452	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif (%)	2,35
					Program Pemasaran Pariwisata	Rata-rata Belanja Wisatawan Nusantara (rupiah/ kunjungan)	1.500.000,00
						Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara (rupiah/ kunjungan)	10.100.000,00
						Lama kunjungan Wisata (hari)	1,60
			Pertumbuhan Investasi (PMTB) (persen)	6,90	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah/Nilai Investasi PMA (\$)	649.658.354,09
						Jumlah/Nilai Investasi PMDN (Rp)	2.277.138,25
						Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (org/perusahaan)	8,85
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kenaikan/ penurunan Nilai Realisasi PMDN (%)	18,47
					Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal (%)	100,00
					Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM Bidang Perizinan (angka)	85,60
			Penyediaan lapangan kerja per tahun (Juta orang)	2,7-3,0	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rasio daya serap tenaga kerja (org/perusahaan)	8,85
					Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja (%)	29,25
					Program Penempatan Tenaga Kerja	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (%)	92,57
			Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (8.2.1*) (Persen)	3,2-3,7	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja (%)	29,25
						Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi (%)	50,00



No	RPJMN				RKPD		
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2022	Prioritas Daerah/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					Program Penempatan Tenaga Kerja	Rasio penduduk yang bekerja (%)	93,12
						Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (%)	92,57
						Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	3,41
						Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	72,35
			Kontribusi tenaga kerja industri (9.2.2*) Persen)	15,0	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja (%)	29,25
						Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi (%)	50,00
					Program Penempatan Tenaga Kerja	Rasio penduduk yang bekerja (%)	93,12
						Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (%)	92,57
						Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	3,41
						Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	72,35
			Jumlah tenaga kerja industri (Juta orang)	20,9	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja (%)	29,25
						Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi (%)	50,00
					Program Hubungan Industrial	Persentase Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun (5)	55,21
						Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	42,00
						Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak/PP/ PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenaga kerjaan (%)	62,00



No	RPJMN				RKPD		
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2022	Prioritas Daerah/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (Juta orang)	14,0	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif (%)	2,35
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Penyelenggaraan Event Ekonomi Kreatif (%)	50,00
			Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (juta orang)	20,00	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Penyelenggaraan Event Ekonomi Kreatif (%)	50,00
					Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif (%)	2,35
		Pelaku Ekraf yang mendapat fasilitasi Konsultasi HKI (orang)	Jumlah Pelaku Ekraf yang mendapat fasilitasi Konsultasi HKI (orang)	5.250	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Penyelenggaraan Event Ekonomi Kreatif (%)	50,00
		Produk/jasa Ekraf yang didaftarkan HKI (Produk/Jasa)	Jumlah produk/ jasa Ekraf yang didaftarkan (produk/ jasa)	2.950	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Penyelenggaraan Event Ekonomi Kreatif (%)	50,00
		Pelaku/Usaha Kreatif yang difasilitasi Komersialisasi HKI (orang/usaha)	Jumlah Pelaku/usaha Kreatif yang difasilitasi Komersialisasi HKI (orang/usaha)	245	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Penyelenggaraan Event Ekonomi Kreatif (%)	50,00
		Kabupaten/ Kota yang dikembangkan	Jumlah Kab/Kota kreatif yang dikembangkan (kab/kota)	5	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Penyelenggaraan Event Ekonomi Kreatif (%)	50,00



No	RPJMN				RKPD		
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2022	Prioritas Daerah/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ruang kreatif yang direvitalisasi dan sarana kreatif yang difasilitasi (khususnya di lokasi pengembangan klaster ekonomi kreatif)	Jumlah ruang kreatif yang direvitalisasi dan sarana kreatif yang difasilitasi (unit)	34	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Penyelenggaraan Event Ekonomi Kreatif (%)	50,00
		Fasilitasi promosi penanaman modal daerah di dalam dan luar negeri	Jumlah minat investasi dalam kegiatan promosi penanaman modal daerah di dalam dan LN (minat investasi)	500	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal (%)	100,00
		Perkuatan peta potensi dan peluang investasi daerah	Jumlah pemetaan potensi dan Peluang Investasi (peta potensi daerah)	15	Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM Bidang Perizinan (angka)	85,60
					Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Penyajian Data Penanaman Modal (%)	83,00
		Fasilitasi rencana penanaman modal di daerah	Jumlah Workshop penyusunan rencana umum penanaman modal (RUPM) kepada provinsi dan Kabupaten/ Kota (kegiatan)	4	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal (%)	100,00
		Pelaksanaan integrasi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Inventarisasi, Sinkronisasi dan Koordinasi Integrasi Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi Secara elektronik di Pusat dan Daerah (KL/D)	200	Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM Bidang Perizinan (angka)	85,60
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	IKM yang Terinformasi dalam SINAS (IKM)	8,00
		Implementasi perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Implementasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (KL/D)	200	Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM Bidang Perizinan (angka)	85,60
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	IKM yang Terinformasi dalam SINAS (IKM)	8,00
	PP	<b>Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)</b>	Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (persen)	4,80	Program Pengembangan Ekspor	Cakupan Promosi Perdagangan dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	20,00
			Neraca perdagangan barang (USD miliar)	3	Program Pengembangan Ekspor	Cakupan Promosi Perdagangan dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	20,00



No	RPJMN				RKPD		
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2022	Prioritas Daerah/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
			Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)) (USD miliar) (USD miliar)	25	Program Pemasaran Pariwisata	Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara (rupiah/kunjungan)	10.100.000,00
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Penyelenggaraan Event Ekonomi Kreatif (%)	50,00
			Industri alat kesehatan yang memproduksi alat kesehatan di dalam negeri	7	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan Standar (%)	93,00
					Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan Industri (%)	2,52
			Kontrak katalog Lokal/ Sektoral	Jumlah Kontrak katalog Lokal/ Sektoral (Kontrak katalog Lokal/ Sektoral)	4	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase OPD yang mengikuti Pembinaan Pengadaan Barang (%)
	PP	<b>Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi</b>	Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (persen)	4,30	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi aktif (%)	45,90
			Biaya logistik terhadap PDB (Persen)	21,1			
			Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) (Peringkat)	NA	Program Pemasaran Pariwisata	Lama kunjungan Wisata (hari)	1,60
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Penyelenggaraan Event Ekonomi Kreatif (persen)	50,00
3	PN	<b>MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING</b>			<b>MEMANTAPKAN INFRASTRUKTUR DAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT</b>		
			PP	<b>Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan</b>	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	-	Program Pemberdayaan Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial (SPM)	Persentase PMKS yang tertangani				77,00	
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial				21,00	
Angka kelahiran total (Total fertility rate/TFR)	2,21	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)			Total Fertility Rate ( TFR ) (%)	2,25	





No	RPJMN				RKPD		
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2022	Prioritas Daerah/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	-	Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial (%)	78,00
					Program Rehabilitasi Sosial (SPM)	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	77,00
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	21,00
	<b>PP</b>	<b>Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial</b>	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	-	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	21,00
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	-	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	21,00
					Program Rehabilitasi Sosial (SPM)	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	77,00
		Penyelenggaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi Keluarga Miskin	Keluarga Miskin dan Rentan yang memperoleh bantuan Tunai Bersyarat (KPM)	10.000.000	Program Rehabilitasi Sosial (SPM)	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	77,00
	<b>PP</b>	<b>Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan</b>	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	205,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (SPM)	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup (kasus)	10
			Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	18,60	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (SPM)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup (Angka)	2
			Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	11,6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (SPM)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup (Angka)	2
			Angka Prevalensi Kontrasepsi modern/ modern Contraceptive prevalence Rate (mCPR)	62,50	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/ modern Contraceptive (mCPR) (%)	61,99



No	RPJMN				RKPD		
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2022	Prioritas Daerah/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,00	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	19,06
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/ Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	21,0	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun (%)	0,28
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	18,40	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (SPM)	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	6,50
			Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	7,5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat ber PHBS (%)	75,00
			Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,19	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat ber PHBS (%)	75,00
			Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	231,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (SPM)	Tingkat Prevalensi Tuberculosis per 100.000 Penduduk (kasus)	393,00
			Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	365,0	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat ber PHBS (%)	75,00
			Insidensi hepatitis B (persen)	1,39	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat ber PHBS (%)	75,00
			Insidensi hepatitis B (persen) 1,68 1,54 1,39 1,24 1,09 Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	8,9	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (SPM)	Tingkat Prevalensi Tuberculosis per 100.000 Penduduk (kasus)	393,00
			Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (persen)	21,8	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat ber PHBS (%)	75,00
			Persentase tekanan darah tinggi	34,1	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat ber PHBS (%)	75,00



No	RPJMN				RKPD		
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2022	Prioritas Daerah/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	80,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	60,00
			Persentase rumah sakit terakreditasi	90,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	60,00
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan Standar	93,00
		Penyediaan Vaksin Imunisasi Dasar lengkap	Persentase Kab/Kota dengan ketersediaan vaksin imunisasi dasar lengkap	93,00	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan Standar	93,00
		Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program kesehatan ibu dan anak	Persentase kabupaten/ kota dengan ketersediaan obat kesehatan dan perbekalan kesehatan program ibu dan anak	100,00	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan Standar	93,00
		Pelaksanaan surveilans dan intervensi gizi berkualitas di kabupaten/ kota	Persentase kabupaten/ kota yang melaksanakan surveilans gizi	90,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat ber PHBS (%)	75,00
		SPALD-S skala individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik sesuai standar (rumah tangga)	2.940.304	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat ber PHBS (%)	75,00
		Penguatan intervensi stunting melalui Therapeutic Feeding Centepenyediaan obat, makanan tambahan dan alat antropometri	Jumlah kabupaten/ kota yang mendapatkan dukungan penguatan intervensi stunting	460,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (SPM)	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun) (%)	6,50
		Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TB	Persentase kabupaten/ kota dengan ketersediaan obat program tuberkulosis	100,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (SPM)	Tingkat Prevalensi Tuberculosis per 100.000 Penduduk (kasus)	393,00



No	RPJMN				RKPD		
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2022	Prioritas Daerah/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga(PIS-PK)	Jumlah kabupaten/kota yang telah melaksanakan PIS-PK dengan 100% intervensi keluarga	300,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat ber PHBS	75,00
		Penggunaan obat sesuai FORNAS dirumah sakit	Persentase rumah sakit dengan penggunaan obat sesuai FORNAS	80,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	60,00
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan Standar	93,00
		Pelaksanaan manajemenpengelolaan obat dan vaksin sesuai standar di instalasi farmasi kabupaten/ kota	Jumlah instalasi farmasi kabupaten/kota yang melakukan manajemen pengelolaanobat dan vaksin sesuai standar	364,00	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan Standar	93,00
		Penerapan aplikasi logistik obat danBahan Medis Habis Pakai (BMHP) diinstalasi farmasi provinsi dan kab/kota	Jumlah instalasi farmasi provinsi dan kabupaten/ kota yang menerapkan aplikasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	204,00	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan Standar	93,00
					<b>MEMANTAPKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN PELAYANAN PENDIDIKAN SERTA SDM</b>		
	<b>PP</b>	<b>Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas</b>	Nilai rata- rata hasil PISA: a. Membaca b. Matematika c. Sains	NA NA NA	Program Pengelolaan Pendidikan (SPM)	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Dalam Pendidikan Usia Dini (%)	97,72
						Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-15 Tahun Dalam Pendidikan Dasar (%)	98,46
						Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Dalam Pendidikan Kesetaraan (%)	100,00
			Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (Persen): a. Membaca b. Matematika c. Sains	NA NA NA	Program Pengelolaan Pendidikan (SPM)	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Dalam Pendidikan Usia Dini (%)	97,72
						Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-15 Tahun Dalam Pendidikan Dasar (%)	98,46



No	RPJMN				RKPD		
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2022	Prioritas Daerah/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
						Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Dalam Pendidikan Kesetaraan (%)	100,00
			Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	8,95	Program Pengelolaan Pendidikan (SPM)	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Dalam Pendidikan Kesetaraan (%)	100,00
			Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas (Tahun)	13,79			
	<b>PP</b>	<b>Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan Dan Pemuda</b>	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	69,87	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Perlindungan Anak (IPA) (%)	66,20
			Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Menurun	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat kan Penanganan Pengaduan (%)	100,00
						Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapat kan layanan komprehensif	100,00
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,28			
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,74	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) (Angka)	72,50
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	53,76	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	55,56
			Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	Menurun	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapat kan layanan komprehensif	100,00
			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	56,50	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif (%)	100,00
						Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (%)	3,66
		Peningkatan kapasitas dan peran forum anak	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pemenuhan hak partisipasi anak	17,00	Program Pengelolaan Pendidikan (SPM)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini (%)	97,72
						Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar (5)	98,46



No	RPJMN				RKPD		
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2022	Prioritas Daerah/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
		Peningkatan hak sipil dan akses informasi layak anak	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam peningkatan hak sipil dan akses informasi layak anak	17,00	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kota Layak Anak (Tingkat Capaian)	Madya
		Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA sesuai standar	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80,00	Program Pengelolaan Pendidikan (SPM)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	59,73
						Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	116,83
						Angka Partisipasi Murni (APM) SD	99,43
						Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	104,23
						Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	84,23
						Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini (%)	97,72
						Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar (%)	98,46
						Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Dalam Pendidikan Kesetaraan (%)	100,00
		koordinasi penanganan kasus kekerasan dan eksploitasi pada anak	Jumlah Provinsi yang difasilitasi dalam penyalangan penanganan kekerasan dan eksploitasi pada anak	14,00	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat kan Penanganan Pengaduan (%)	100,00
		Fasilitasi pelaksanaan Jambore Pemuda Indonesia	Jumlah keikutsertaan dalam Jambore Pemuda Indonesia	34,00	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	100,00
	<b>PP</b>	<b>Pengentasan Kemiskinan</b>	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)	-	Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial (%)	78,00



No	RPJMN				RKPD		
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2022	Prioritas Daerah/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	21,00
			Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dilepaskan untuk TORA (Ha)	1.850.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (%)	61,00
			Bidang tanah yang didistribusi				
			Bidang tanah yang dilegalisasi		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Penanganan Konflik Pertanahan (%)	60,00
					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	100,00
	PP	Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	48,40	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	50,00
			Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi (%)	47,0	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi (%)	50,00
		Revitalisasi SMK yang Mendukung Industri 4.0	Jumlah SMK yang mendukung industri 4.0 yang terrevitalisasi	15,00	Program Pengelolaan Pendidikan (SPM)	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Dalam Pendidikan Kesetaraan (%)	100,00
		Fasilitasi tenaga keolahragaan olimpiq dalam pengembangantena keolahragaan	Jumlah tenaga keolahragaan olimpiq yang difasilitasi dalam pengembangantena keolahragaan	3.000,00	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pembinaan Olahraga (%)	100,00
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Pelatih yang Bersertifikasi (%)	50,00
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Sarana dan Prasarana Olahraga yang Terpelihara (%)	50,00
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga (jumlah)	10,00



No	RPJMN				RKPD		
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2022	Prioritas Daerah/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
		Siswa Yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	Jumlah Siswa SMP Yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	39.423	Setiap jenjang Pendidikan		
		Sekolah yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	Jumlah Sekolah Dasar yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	540	Setiap jenjang Pendidikan		
		Siswa yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	Jumlah Siswa Pendidikan Khusus yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	850	Setiap jenjang Pendidikan		
		Siswa Yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	Jumlah Siswa SMA Yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	5.612	Setiap jenjang Pendidikan		
		Peningkatan Kapasitas Personal dan Sosial Sebagai Agen Perubahan	Anak Remaja Mengikuti Peningkatan Kapasitas Personal dan Sosial Sebagai Agen Perubahan	20.000	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	70,00
		Guru/Dosen/Pengawas PAI yang bermutu	Jumlah Guru/Dosen/Pengawas PAI yang bermutu	220	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi Guru S1/DIV (%)	85,90
		Guru PAI yang meningkatkan kompetensinya	Jumlah Guru PAI yang meningkatkan kompetensinya	4.500	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi Guru S1/DIV (%)	85,90
		Guru Pendidikan Agama Katolik yang Meningkatkan Kompetensinya	Jumlah Guru Pendidikan Agama Katolik yang Meningkatkan Kompetensinya	4.369	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi Guru S1/DIV (%)	85,90
		Pengawas Pendidikan Agama Katolik yang Meningkatkan Kompetensinya	Jumlah Pengawas Pendidikan Agama Katolik yang Meningkatkan Kompetensinya	120	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi Guru S1/DIV (%)	85,90
		Peningkatan Kompetensi Guru	Jumlah Guru yang Meningkatkan Kompetensinya	5.712	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi Guru S1/DIV (%)	85,90
		Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha yang ditingkatkan kompetensinya	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha yang ditingkatkan kompetensinya	1.900	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi Guru S1/DIV (%)	85,90





No	RPJMN				RKPD		
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2022	Prioritas Daerah/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi dan Pembinaan	Jumlah Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi dan Pembinaan	9.000	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi Guru S1/DIV (%)	85,90
		Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas	Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Indonesia (%)	66,00	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (%)	61,00
						Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan (sekolah)	3,00
						Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota (%)	100,00
		Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas	Persentase jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	30,00	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (%)	61,00
					Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan (sekolah)	3,00
					Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/ Kota (%)	100,00
		Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang perilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah TPS 3R yang berfungsi dengan baik	25,00	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	10,00



No	RPJMN				RKPD		
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2022	Prioritas Daerah/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
		Peningkatan sinergi penyediaansarana dan prasarana yangmenunjang perilaku hidup bersih dan sehat	Persentase pengurangan sampah nasional	17,00	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	10,00
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam menunjang perilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah partisipasi semua pihak dalam aksi publik, edukasi, dan pendamping an terkait hidup bersih dan sehat	24,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat ber PHBS (%)	75,00
		Peningkatan dan penyempurnaan peraturan terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah peraturan perundangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah terkait perilaku hidup bersih dan sehat	19,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat ber PHBS (%)	75,00
4	PN	<b>REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN</b>			<b>MENINGKATKAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN DAERAH DENGAN MENGEEMBANGKAN KEARIFAN LOKAL</b>		
	PP	<b>Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter</b>					
		Penguatan Gerakan Indonesia Bersatu dalam kebhinekaan	Jumlah provinsi melaksana kan kampanye Gerakan Indonesia Bersatu dalam kebhinekaan	34,00	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan (%)	70,00
		Penguatan pusat-pusat perubahan di tingkat daerah	Jumlah kabupaten/ kota yang melaksana kan dan menguatkan program GNRM	25	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	70,00



No	RPJMN				RKPD		
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2022	Prioritas Daerah/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kebijakan Teknis dan Program Strategis Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis perencanaan dan program pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan	3	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	70,00
		Kebijakan Teknis dan Program Strategis Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis penyusunan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan	3	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	70,00
		Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan	1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	70,00
		Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	Terselenggara ranya Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	500,00	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang dibina (%)	50,00
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase SDM yang Mempunyai Kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial	60,00
		Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	Terselenggara ranya Training of Trainer (ToT) Nilai-Nilai Kebangsaan	500,00	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang dibina (%)	50,00
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase SDM yang Mempunyai Kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial	60,00
		Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	Terselenggara ranya Sosialisasi/ Dialog Wawasan Kebangsaan	400,00	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang dibina (%)	50,00



No	RPJMN				RKPD		
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2022	Prioritas Daerah/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase SDM yang Mempunyai Kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial	60,00
		Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang berkinerja tinggi	Jumlah Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang berkinerja tinggi	17,00	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang dibina (%)	50,00
		Penguatan sinergi antar lembaga yang berfungsi melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis kerja sama dengan lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lain yang diselesaikan	1,00	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	70,00
		Penguatan sinergi antar lembaga yang berfungsi melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara	Jumlah dokumen kebijakan Teknis dan Program Strategis Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan	1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	70,00
		Peningkatan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) hingga ke daerah dan desa	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis peta jalan pembinaan ideologi Pancasila dan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila yang diselesaikan	3	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	70,00
		Pembenahan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila	Jumlah dokumen rekomendasi atas regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila yang diselesaikan	3,00	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	70,00



No	RPJMN				RKPDP		
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2022	Prioritas Daerah/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pembenahan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila	Persentase penyelesaian rekomendasi atas regulasi yang bertentangan dengannilai Pancasila	100,00	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Produk Hukum dan Informasi Hukum Daerah yang Berkualitas (%)	100,00
		Analisis dan Sinkronisasi Hukum Nasional	Jumlah dokumen analisis dan sinkronisasi hukum tingkat pusat dan daerah yang diselesaikan	1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Produk Hukum dan Informasi Hukum Daerah yang Berkualitas (%)	100,00
		Evaluasi dan penanganan ormas, organisasi dan perusahaan asing serta media yang tidak bertentangan dengan Ideologi negara/Pancasila	Jumlah evaluasi dan penanganan ormasorganisasi dan perusahaan asing serta media yang tidak bertentangan dengan Ideologi negara/Pancasila	1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	70,00
	<b>PP</b>	<b>Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia</b>					
		Penguatan integrasi Kebudayaan pada proses pembelajaran	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan Kebudayaan mendapat kan proses pembelajaran	33,00	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Kesenian yang dilestarikan (jumlah)	4,00
		Peningkatan kualitas layananmuseum dan galeri	Persentase museum yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	77,00	Program Pembinaan Sejarah	Jumlah Sejarah yang Dilakukan Pembinaan	1,00
		Peningkatan kualitas layanan museum dan galeri	Presentase koleksi museum yang dipamerkan (terhadap total koleksi)	52,00	Program Pengembangan Kebudayaan	Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (jumlah)	74,00



No	RPJMN				RKPD		
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2022	Prioritas Daerah/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	308.145	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Koleksi Naskah kuno dan Nasional yang teridentifikasi (jumlah)	5,00
		Pemanfaatan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	Jumlah arsip yang dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	10.120	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Koleksi Naskah kuno dan Nasional yang teridentifikasi (jumlah)	5
		Pemanfaatan arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	323.823	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Koleksi Naskah kuno dan Nasional yang teridentifikasi (jumlah)	5
		Pemanfaatan arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya	Jumlah manuskrip yang diinventarisasi, dikaji dan dimanfaatkan	347	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku (%)	18,50
		Peningkatan pemanfaatan produk seni	Jumlah produksi film, musik dan media baru yang didukung	40	Program Pengembangan Kebudayaan	Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (jumlah)	74,00
		Peningkatan pemanfaatan produk seni	Persentase inisiatif pemanfaatan ekonomi atas Objek Pemajuan Kebudayaan yang didukung	49,00	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Kesenian yang dilestarikan (jumlah)	4
		Peningkatan pemanfaatan produk seni	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikaji dan dipetakan	25	Program Pengembangan Kebudayaan	Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (jumlah)	74
		Inventarisasi kekayaan budaya komunal dan kekayaan intelektual bidang budaya	Persentase kekayaan budaya komunal dan kekayaan intelektual bidang budaya yang diinventarisasi	55,00	Program Pengembangan Kebudayaan	Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (jumlah)	74
	<b>PP</b>	<b>Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan Harmoni Sosial</b>	Indeks kerukunan umat beragama		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani	78,50
					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan yang Terfasilitasi	100,00



No	RPJMN				RKPD		
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2022	Prioritas Daerah/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ormas dan Lembaga Keagamaan	Jumlah Ormas dan Lembaga Keagamaan	100	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang dibina (%)	50,00
	<b>PP</b>	<b>Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter</b>					
		Pembinaan dan pengembangan perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dibina dan dikembangkan	900	Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio Pengunjung Perpustakaan per Tahun	0,04
<b>5</b>	<b>PN</b>	<b>MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar</b>					
	<b>PP</b>	<b>Peningkatan kualitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi</b>	Produktivitas air (water productivity) (US\$/m <sup>2</sup> )	4,7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPM)	Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%)	45,82
						Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak Perkotaan (%)	62,80
	<b>PP</b>	<b>Infrastruktur Pelayanan Dasar</b>	Persentase rumah tangga yang Menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)	94	Program Pengembangan Perumahan (SPM)	Persentase Rusunawa yang Terpelihara (%)	100,00
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)	84,8	Program Pengembangan Perumahan (SPM)	Persentase Rusunawa yang Terpelihara (%)	100,00
			Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)	58,23	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	100,00
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman (%)	82,07% akses layak (termasuk 13% akses aman)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (%)	61,00



No	RPJMN				RKPD		
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2022	Prioritas Daerah/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (%)	2,98			
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik (%)	75.28% penangan; 9.13% pengurangan	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	95,00
						Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R	20,00
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	95.9% (JP: 27.1% B,JP: 68.7%)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPM)	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak Perkotaan (%)	62,80
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	10,00	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPM)	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	45,82
			Volume tampungan air per kapita (m3/kapita)	57,05999842			
			Jumlah Daerah Irigasi yang dimodernisasi	3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian (%)	80,00
			Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risiko bencana	20,00	Program Penanggulangan Bencana (SPM)	Cakupan Pelayanan Bencana Daerah	100,00
						Kelurahan Siaga Bencana	6
			Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum, industri, dan Kawasan unggulan (m3/detik)	11,4325	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPM)	Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%)	45,82
						Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak Perkotaan (%)	62,80
			Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap informasi dasar 2010) (persen)	57,00	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan	195,00





No	RPJMN				RKPD		
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2022	Prioritas Daerah/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
		Peningkatan tata kelola kelembagaan Pemda dalam dokumen Perencanaan Daerah untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman (APBD)	Jumlah kab/kota yang mengintegrasikan kebijakan nasional air minum dan sanitasi dalam dokumen perencanaan daerah (kab/kota)	514	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPM)	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak Perkotaan (%)	62,80
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (SPM)	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (%)	61,00
		Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)	Tambahan debit air baku di daerah 3T (m <sup>3</sup> /detik)	4,1	Penyediaan Air Minum (SPM)	Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%)	45,82
		Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m <sup>3</sup> /detik)	2,3	Penyediaan Air Minum (SPM)	Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%)	45,82
		Penanganan perlintasan sebidang KA dengan jalan, Pemasangan, dan Penyediaan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian	Lokasi yang ditangani dan disediakan fasilitas keselamatan jalan (provinsi)	10,00	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Tingkat Kecelakaan di Pintu Perlintasan Sebidang Kereta Api Yang dijaga	1,00
<b>PP</b>	<b>Infrastruktur Ekonomi</b>	Panjang jalan tol, baru yang beroperasi dalam 5 tahun (2500 km)					
		Jumlah Pelabuhan Utama (Hub) yang memenuhi standar (7 Pelabuhan)					
		Panjang Jaringan KA yang beroperasi (7.635 km)					
<b>PP</b>	<b>Infrastruktur Perkotaan</b>	Jumlah layanan angkutan umum masal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Kota)			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pelayanan Angkutan Darat	0,09
<b>PP</b>	<b>Transformasi Digital</b>	Persentase pertumbuhan sektor TIK (rata-rata)		8,80	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi	95,00
		Persentase pengguna internet (Persentase)		79,20	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi IT dan aplikasi E-government yang mendukung smart city dan layanan publik yang berfungsi baik	85,00



No	RPJMN				RKPD		
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2022	Prioritas Daerah/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) Existing Q2 2019 : 97,59%	98,50	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Infrastruktur IT yang Berfungsi Baik	95,00
	PP	<b>Energi dan Tenaga Kelistrikan</b>	Rasio Elektrifikasi (persen)	100			
			Pemenuhan kebutuhan (konsumsi listrik)	1268			
6	PN	<b>MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM</b>			<b>MEMANTAPKAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN</b>		
	PP	<b>Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup</b>	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,30	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara (indeks)	81,20
			Indeks Kualitas Air (IKA)	55,30	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Hasil pengukuran Indeks Kualitas air (indeks)	58,00
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	63,50	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (indeks)	30,75
			Kecepatan Penyampaian Informasi Peringatan Dini Bencana Kepada Masyarakat (menit)	4,0	Program Penanggulangan Bencana (SPM)	Cakupan Pelayanan Bencana Daerah (%)	100,00
							Kelurahan Siaga Bencana (angka)
		Pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya	Jumlah pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya (pelaku usaha)	45	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Compliance (Persentase Kepatuhan) Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan (%)	2,50



No	RPJMN				RKPD		
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2022	Prioritas Daerah/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
		Inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman tinggi partisipatif	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (juta ha)	70,00	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (dokumen)	Ada
						Master Plan Ruang Terbuka Hijau (dokumen)	Ada
						Peningkatan presentase Ruang Terbuka Hijau (%)	4,40
		Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	Jumlah luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL (juta ha)	10,00	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (dokumen)	Ada
						Master Plan Ruang Terbuka Hijau (dokumen)	Ada
						Peningkatan presentase Ruang Terbuka Hijau (%)	4,40
	PP	<b>Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim</b>	Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	4,00	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (SPM)	Tingkat Waktu Tanggap ( <i>Response Time Rate</i> ) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	76,00
						Peningkatan kapasitas masyarakat untuk ketahanan bencana geologi	Jumlah kabupaten/wilayah yang terlayani sosialisasi mitigasi bencana geologi (wilayah)
	Kelurahan Siaga Bencana (angka)	6					
	PP	<b>Pembangunan Rendah Karbon</b>	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (persen)	12,80	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	6,00
Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (persen)				53,10			
Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (persen)				9,30			



No	RPJMN				RKPD		
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2022	Prioritas Daerah/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (persen)	2,50			
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (persen)	6,80			
7	PN	<b>MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK</b>			<b>MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL DAN SISTEM INFORMASI DAERAH</b>		
	PP	<b>Konsolidasi Demokrasi</b>					
		Penguatan Demokrasi di Daerah	Jumlah provinsi yang mendapatkan penguatan demokrasi	34 Provinsi	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu (%)	70,00
		Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu (%)	70,00
		Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu (%)	70,00
		Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu (%)	70,00



No	RPJMN				RKPD		
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2022	Prioritas Daerah/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/ bencana	Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/ bencana	549 Sakter (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota)	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu (%)	70,00
		Pendidikan Politik Masyarakat di Daerah	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	6000 Orang	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu (%)	70,00
		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah pengurus ormas yang memperoleh penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pendidikan politik	3000 Orang	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang dibina (%)	50,00
		Diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional	Persentase (%) Mitra Strategis (Kelompok Masyarakat/KIM, Media Tradisional, Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat/Bako Humas, Petugas Informasi Publik/PIP, dan lain-lain) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional	75,00	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi (%)	95,00
		Kecamatan di wilayah 3T yang menerima Layanan Informasi Publik	Jumlah Kecamatan di wilayah 3T yang menerima Layanan Informasi Publik Melalui Petugas Informasi Publik	600,00	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi (%)	95,00



No	RPJMN				RKPD		
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2022	Prioritas Daerah/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pemanfaatan informasi publik program dan kebijakan pemerintah oleh masyarakat melalui berbagai media (cetak, elektronik, internet, luar ruang, tatap muka	Persentase (%) tingkat kepuasan masyarakat di wilayah 3T yang mendapat akses informasi publik	70,00	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi (%)	95,00
	PP	<b>Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola</b>	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Indeks RB Baik Keatas*	80,00			
			Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas*	45,00			
		Pemetaan kompetensi ASN melalui Assesment Center	Jumlah ASN (JPT dan JA) yang terpetakan kompetensinya melalui assesment center	-	Program Kepegawaian Daerah	Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi (jabatan)	207,00
	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah					39,00	
		Kebijakan penataan jabatan fungsional	Jumlah kebijakan	-	Program Kepegawaian Daerah	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (jabatan)	3485,00
		Evaluasi Sistem Diklat Kepemimpinan ASN	Jumlah Rekomendasi	-	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	63,80
		Kebijakan Smart Office	Jumlah Kebijakan	-	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi IT dan aplikasi e-government yang mendukung smart city dan layanan publik yang berfungsi baik (%)	85,00
		Integrasi data dan informasi pelayanan publik sektor strategis dalam SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Publik)	Jumlah sektor pelayanan publik strategis yang data dan informasinya masuk ke dalam SIPP	-	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi IT dan aplikasi e-government yang mendukung smart city dan layanan publik yang berfungsi baik (%)	85,00
		Pengembangan Jejaring Inovasi Daerah	Fasilitasi dan pendampingan daerah dalam penerapan replikasi inovasi daerah	34 Provisi	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	92,59



No	RPJMN				RKPD		
	Kode (PN/PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target 2022	Prioritas Daerah/ Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pengembangan SPSE Terpusat	Jumlah LPSE yang menggunakan aplikasi terpusat	300 LPSE	Program Perencanaan dan Pembangunan	Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Pelayanan PBJ	90,00
		Monitoring UKPBJ yang Mencapai Maturitas Level 3	Jumlah UKPBJ yang mencapai maturitasLevel 3	350 UKPBJ			
		Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran	Persentase integrasi sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah	100,00	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00

#### 4.2.4 Kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 di Kota Bandar Lampung

Pandemi *Covid-19* yang mengancam keselamatan masyarakat Indonesia masih belum dapat diprediksi kapan akan berakhir, sehingga kedepan seluruh stakeholder dan Pemerintah Daerah masih perlu merespon dengan cepat penanganan pandemi ini termasuk juga penanganan dampak sosial ekonomi akibat dari adanya *Covid-19*. Berdasarkan keenam prioritas pembangunan daerah, fokus pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak Pandemi *Covid-19* yang telah dan akan terus dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 adalah :

1. Penguatan kesehatan dan pemenuhan layanan dasar masyarakat, melalui :
  - a. Peningkatan upaya promotif dan preventif serta penguatan infrastruktur kesehatan, tenaga medis dan laboratorium;
  - b. Terus mensosialisasikan protokol kesehatan 5 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas) dan 3 T (testing, tracing, dan treatment);
  - c. Meningkatkan fungsi dan koordinasi Satgas Covid-19 Kota Bandar Lampung sampai ke tingkat kelurahan;



- d. Melaksanakan vaksinasi Covid-19 termasuk memantau pelaksanaannya di masyarakat;
2. Pemulihan ekonomi masyarakat dengan mengaktifkan kembali roda perekonomian secara berangsur melalui :
    - a. Mengaktifkan kembali UMKM dan IKM Kota Bandar Lampung dengan memberikan akses permodalan tanpa bunga;
    - b. Memperkuat ketahanan pangan daerah;
    - c. Memberikan pelatihan kepada tenaga kerja dan masyarakat agar lebih terampil dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang mandiri;
  3. Jaringan pengaman sosial masyarakat, melalui perluasan program bantuan sosial dan hibah individu/ masyarakat terdampak atau memiliki resiko sosial, termasuk perluasan basis data.

Kebijakan-kebijakan tersebut diintegrasikan dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang pada akhirnya merupakan upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penanganan pandemi *Covid-19*, termasuk upaya dalam menangani dampak sosial ekonomi akibat adanya *Covid-19*.





## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2022 yang merupakan pelaksanaan tahun pertama RPJMD Tahun 2021-2026, dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. RKPD Tahun 2022 merupakan gambaran Rencana Prioritas Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan tahunan yang kemudian digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan.

Dalam rangka mencapai prioritas dan sasaran pembangunan Daerah yang telah ditetapkan, maka disusunlah program prioritas Daerah Tahun 2022 sebagai penjabaran visi dan misi Walikota Bandar Lampung yang berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang), telah teridentifikasi berbagai usulan kegiatan Tahun 2022 yang telah dipilah dalam rangka menjawab permasalahan dan pencapaian target pembangunan yang terangkum dalam RKPD.

Rencana program prioritas dilaksanakan melalui urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat dan urusan pilihan serta fungsi penunjang yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi yang ada. Urusan pemerintahan beserta Perangkat Daerah pelaksana di Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 adalah sebagai berikut :



<b>URUSAN PEMERINTAHAN DAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANA</b>	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB</b>	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	
1	PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	KESEHATAN Dinas Kesehatan RSUD A. Dadi Tjokrodipo
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dinas Pekerjaan Umum Dinas Perumahan dan Permukiman
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Perumahan dan Permukiman
5	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	SOSIAL Dinas Sosial
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	
1	TENAGA KERJA Dinas Tenaga Kerja
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	PANGAN Dinas Pangan
4	PERTANAHAN Dinas Perumahan dan Permukiman Sekretariat Daerah
5	LINGKUNGAN HIDUP Dinas Lingkungan Hidup
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Dinas Pemberdayaan Masyarakat



<b>URUSAN PEMERINTAHAN DAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANA</b>	
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	PERHUBUNGAN Dinas Perhubungan
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Dinas Komunikasi dan Informatika
11	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
12	PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Dinas Kepemudaan dan Olahraga
14	STATISTIK Dinas Komunikasi dan Informatika
15	PERSANDIAN Dinas Komunikasi dan Informatika
16	KEBUDAYAAN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17	PERPUSTAKAAN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18	KEARSIPAN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN Dinas Kelautan dan Perikanan
2	PARIWISATA Dinas Pariwisata
3	PERTANIAN Dinas Pertanian
4	PERDAGANGAN Dinas Perdagangan
5	PERINDUSTRIAN Dinas Perindustrian
6	TRANSMIGRASI



<b>URUSAN PEMERINTAHAN DAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANA</b>	
	Dinas Tenaga Kerja
<b>UNSUR PENDUKUNG</b>	
1	Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung
2	Sekretariat DPRD
<b>UNSUR PENUNJANG</b>	
1	PERENCANAAN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	KEUANGAN Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
3	KEPEGAWAIAN Badan Kepegawaian Daerah
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Badan Kepegawaian Daerah
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>UNSUR PENGAWAS</b>	
1	Inspektorat Daerah
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	
1	Kecamatan
<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	
1	Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana program prioritas daerah merupakan uraian yang menjelaskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator keluaran (output) maupun hasil (outcome). Rencana program prioritas disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3798 Tahun 2020



tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perencanaan pembangunan yang telah disusun dalam RKPD Tahun 2022 ini tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Bandar Lampung. Namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Selain untuk mencapai prioritas dan sasaran pembangunan daerah, program-program pembangunan Daerah Tahun 2022 yang disusun dalam dokumen RKPD ini tentunya juga bersinergi dengan program-program prioritas Provinsi Lampung dan Nasional.



## **BAB VI**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maksudnya adalah menetapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

#### **6.1 Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bandar Lampung Tahun 2022 berdasarkan Rancangan RPJMD Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET CAPAIAN TAHUN 2022</b>
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	71,72
2	Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	Persen	6,50
3	Laju Pertumbuhan penduduk	Persen	1,109
4	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,96



<b>NO</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET CAPAIAN TAHUN 2022</b>
5	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	16,14
6	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Angka	93,88
7	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	Madya
8	Persentase Pemuda Berprestasi	Persen	9,61
9	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen	85,81
10	Persentase Daerah Rawan Banjir	Persen	50,00
11	RTLH yang tertangani pertahun	Persen	23,63
12	Persentase Kawasan Kumuh	Persen	0,890
13	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	Persen	54,65
14	Persentase Titik Kemacetan yang terselesaikan	Persen	50,00
15	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	21,20
16	Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	Persen	14,05
17	Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	Persen	15,34
18	Persentase UMKM yang Meningkatkan Labanya	Persen	31,50
19	Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	Persen	18,11
20	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	Persen	15,99
21	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	Persen	5,05
22	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,51
23	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	91,43
24	Pendapatan Per Kapita Penduduk	Juta Rp	54 ,00- 56,00
25	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	77,00
26	Angka kriminalitas yang tertangani	Angka	1.531
27	Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani	Persen	78,50
28	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persen	40,00
29	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Skor	61,00 (CC)
30	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	61,43
31	Indeks Resiko Bencana	Angka	139,048 (Tinggi)



## 6.2 Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator Kinerja Daerah dalam RKPD Tahun 2022 yang mengacu pada Rancangan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Daerah Tahun 2022

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2022
<b>I ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>		
<b>I.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>		
1. Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,50 - 5,50
2. Laju Inflasi	Persen	3,0 ± 1
3. Pendapatan per Kapita	Juta Rp	54 ,00- 56,00
4. Rasio Gini	Angka	0,327
5. Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	Persen	14,05
6. Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	Persen	15,34
7. Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	Persen	21,20
8. Pertumbuhan Industri	Persen	2,52
9. Rasio penduduk yang bekerja	Persen	93,12
10. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	Persen	92,57
11. Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja	Persen	29,25
12. Penguatan cadangan pangan pemerintah	Persen	30,00
13. Persentase daerah rawan pangan	Persen	7,00
<b>I.2 Fokus Kesejahteraan Sosial</b>		
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	77,65-77,99
2. Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	91,43
3. Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	10,96
4. Angka harapan lama sekolah	Tahun	16,14
5. Angka harapan Hidup (AHH)	Tahun	71,72
6. Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	Persen	6,50
7. RTLH yang tertangani pertahun	Persen	23,63
8. Persentase Kawasan Kumuh	Persen	0,890
9. IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Angka	93,88
10. IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Angka	72,50
11. Tingkat Capaian Kota Layak Anak	tingkat capaian	Madya





ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2022
12. Laju pertumbuhan penduduk	Persen	1,109
<b>I.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga</b>		
1. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	40,00
2. Persentase Pemuda Berprestasi	Persen	9,61
3. Cakupan pembinaan olahraga	Persen	100,00
<b>I.4 Fokus Reformasi Birokrasi</b>		
1. Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Skor	61,00 (CC)
2. Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	Predikat	A-
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	56,20
4. Indeks Inovasi Pemerintah daerah	Predikat	sangat inovatif
<b>II ASPEK PELAYANAN UMUM</b>		
<b>II.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib</b>		
<b>II.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>		
<b>1. Pendidikan</b>		
1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Angka	59,73
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Angka	116,83
3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Angka	99,43
4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Angka	104,23
5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Angka	84,23
6. Guru yang memenuhi kualifikasi S1 /D-IV	Persen	85,90
7. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	Persen	97,72
8. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	Persen	98,46
<b>2. Kesehatan</b>		
1. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka	2,00
2. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Kasus	10,00
3. Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Kasus	393,00
4. Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Rasio	1.:1689
5. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	100,00
6. Pelayanan Kesehatan Balita	Persen	100,00
7. Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	Persen	71,00
8. Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	60,00
9. Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	Persen	55,00



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2022
<b>3.</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	89,00
2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Angka	0,86
3.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	61,00
4.	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	68,47
5.	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	45,82
6.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Persen	62,80
7.	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Persen	61,00
<b>4.</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>		
1.	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Persen	100,00
2.	Persentase Rusunawa yang Terpelihara	Persen	100,00
3.	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/ kota yang memperoleh rumah layak huni	Persen	100,00
<b>5.</b>	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>		
1.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	100,00
2.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100,00
3.	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	Persen	100,00
4.	Cakupan pelayanan bencana daerah	Persen	100,00
5.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	76,00
6.	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	Persen	100,00
<b>6.</b>	<b>Sosial</b>		
1.	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	77,00
2.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	100,00
3.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100,00
4.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	100,00
5.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	21,00
6.	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	20,00



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2022
<b>II.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>			
<b>1. Tenaga Kerja</b>			
1.	Persentase sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Persen	55,21
2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	42,00
3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	3,41
4.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	50,00
5.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	44,00
<b>2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>			
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	2,79
2.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	62,97
3.	Rasio KDRT yang tertangani	Persen	0,78
4.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	55,56
5.	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	Persen	100,00
6.	Cakupan Anak korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	Persen	100,00
7.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Persen	66,20
<b>3. Pangan</b>			
1.	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	86,20
2.	Ketersediaan pangan utama	Persen	100,00
3.	Ketersediaan Energi per kapita	(kkal/kap/hari)	2.510,00
4.	Ketersediaan Protein per kapita	(gr/kap/hari)	72,16
5.	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persen	86,00
<b>4. Pertanahan</b>			
1.	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	100,00
2.	Persentase penerbitan Izin lokasi	Persen	100,00
<b>5. Lingkungan Hidup</b>			
1.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	6,00
2.	RPPLH Kabupaten/Kota	dokumen	ada
3.	RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kab/Kota yang Terintegrasi	dokumen	ada
4.	KLHS untuk K/R/P tingkat kab/kota	dokumen	
5.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	indeks	58,00
6.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	indeks	81,20
7.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	indeks	30,75



<b>ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>SATUAN</b>	<b>TARGET CAPAIAN TAHUN 2022</b>
8.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persen	61,00
9.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	Persen	1,00
10.	Timbulan sampah yang ditangani	Persen	85,00
11.	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Persen	10,00
12.	Persentase cakupan area pelayanan	Persen	100,00
13.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	95,00
14.	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	61,00
<b>6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil</b>			
1.	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persen	50,00
2.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah
3.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	99,00
4.	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Persen	98,00
5.	Pemanfaatan data kependudukan	Persen	95,00
6.	IKM Pelayanan	Persen	85,11
<b>7. Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>			
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Persen	95,00
2.	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen	95,00
<b>8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>			
1.	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2,25
2.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen	0,28
3.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	19,06
4.	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Persen	61,99
5.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	27,68
6.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	66,80
7.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	90,00



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2022
<b>9.</b>	<b>Perhubungan</b>		
1.	Persentase Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Standar dalam Kondisi Baik	Persen	96,00
2.	Persentase Pelayanan Angkutan Darat	Persen	0,0875
3.	Menurunnya Tingkat Kecelakaan	Kejadian	195,00
<b>10.</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>		
1.	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi	Persen	95,00
2.	Persentase aplikasi IT dan aplikasi E - government yang mendukung smart city dan layanan publik yang berfungsi baik	Persen	85,00
3.	Persentase Infrastruktur IT yang Berfungsi Baik	Persen	95,00
<b>11</b>	<b>Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah</b>		
1.	Meningkatnya Koperasi Berkualitas	Persen	1,98
2.	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	Persen	38,00
3.	Persentase BPR/LKM aktif	Persen	100,00
4.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	65,50
5.	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Persen	18,40
<b>12</b>	<b>Penanaman Modal</b>		
1.	Jumlah/nilai investasi PMA	Dolar (\$)	#REF!
2.	Jumlah/nilai investasi PMDN	Juta Rupiah (Rp)	2.277.138,25
3.	Rasio daya serap tenaga kerja	Orang/perusahaan	8,85
4.	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Persen	18,47
<b>13</b>	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>		
1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	100,00
2.	Persentase wirausaha muda	Persen	3,66
3.	Peningkatan pelatih yang Bersertifikasi	Persen	87,03
4.	Atlet Berprestasi	Jumlah	100,00
5.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	3,66
<b>14</b>	<b>Statistik</b>		
1.	Data dan Informasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik	Ada/Tidak	Ada
<b>15</b>	<b>Persandian</b>		
1.	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik	Persen	95,00
<b>16</b>	<b>Kebudayaan</b>		
1.	Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jumlah	74,00
2.	Sanggar seni yang lestari	Jumlah	18
3.	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	Unit	5,00



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2022
<b>17</b>	<b>Perpustakaan</b>		
1.	Rasio Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Angka	0,04
2.	Koleksi Naskah kuno dan Nasional yang teridentifikasi	Jumlah	3
<b>18</b>	<b>Kearsipan</b>		
1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	18,50
2.	Arsip yang Teridentifikasi untuk Dimusnahkan	Jumlah	130,00
3.	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Arsip	40
<b>II.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan</b>			
<b>1</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>		
1.	Produksi perikanan tangkap	Ton	3.118,26
2.	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	135,23
3.	Angka konsumsi ikan	Kg/kap/Th)	36,54
4.	Cakupan bina kelompok nelayan	Persen	34,00
5.	Produksi perikanan kelompok nelayan	Persen	58,48
6.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Persen	0,031
<b>2</b>	<b>Pariwisata</b>		
1.	Persentase kunjungan wisata	Persen	100,00
2.	Lama kunjungan Wisata	Hari	1,60
3.	Kontribusi PAD sektor pariwisata	Persen	23,45
4.	Rata-rata Belanja Wisatawan Domestik	Rupiah/ Kunjungan	1.500.000,00
5.	Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara	Rupiah/ Kunjungan	10.100.000,00
<b>3</b>	<b>Pertanian</b>		
1.	Produktivitas padi	kw/ha	58,50
2.	Produktivitas jagung	kw/ha	48,50
3.	Produksi Jagung	ton/tahun	5,180,24
4.	Produksi Telur	ton/tahun	126,90
5.	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	Persen	85,00
6.	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Persen	6,80
<b>4</b>	<b>Perdagangan</b>		
1.	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Persen	95,00
2.	Inflasi Pangan bergejolak	Persen	3,0 ± 1
3.	Cakupan Promosi Perdagangan dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Persen	20,00
4.	Persentase Jumlah UTTP Yang Ditera/Tera Ulang	Persen	86,10
<b>5</b>	<b>Perindustrian</b>		
1.	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	13,64
2.	IKM yang Terinformasi dalam SINAS	IKM	8



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2022
<b>6</b>	<b>Transmigrasi</b>		
1.	Cakupan Masyarakat di Wilayah Kumuh yang Mendapatkan Pemahaman Transmigrasi Dibandingkan Total Wilayah Kumuh	Persen	12,00
<b>II.3 Fokus Layanan Unsur Pendukung</b>			
<b>1</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>		
1.	Tingkat Layanan Administrasi Umum	Persen	100,00
2.	Persentase Produk Hukum dan Informasi Hukum Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00
<b>2</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>		
1.	Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Rencana Tahunan (RKPD) yang Terintegrasi dengan Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran	dokumen	ada
2.	Perencanaan dan Anggaran Setwan DPRD yang Terintegrasi dengan Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran	dokumen	ada
<b>II.4 Fokus Layanan Unsur Penunjang</b>			
<b>1</b>	<b>Perencanaan</b>		
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	dokumen	ada
2.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	89,19
3.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100,00
4.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	100,00
<b>2</b>	<b>Kuangan</b>		
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Predikat	WTP
2.	Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P	Persen	100,00
3.	Persentase Kesesuaian Data Rincian Total BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca Pemerintah Daerah	Persen	100,00
<b>3</b>	<b>Kepegawaian</b>		
1.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	13,90
2.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	63,80
3.	Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah	Jabatan	207
4.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jabatan	3485,00
<b>4</b>	<b>Pendidikan dan pelatihan</b>		
1.	Persentase CASN yang Lulus Pelatihan Dasar Formasi Umum	Persen	100,00



ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2022
<b>5</b>	<b>Penelitian dan pengembangan</b>		
1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen	100,00
2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	100,00
3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	92,59
4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Persen	90,00
<b>II.5 Fokus Layanan Unsur Pengawas</b>			
<b>1</b>	<b>Inspektorat</b>		
1.	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	100,00
2.	Persentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan OPD	Persen	80,00
3.	Persentase Pendampingan dan Asistensi APIP	Persen	75,00
<b>II.6 Fokus Layanan Unsur Kewilayahan</b>			
<b>1</b>	<b>Kecamatan</b>		
1.	Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	Persen	100,00
2.	Persentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan	Persen	80,00
3.	Persentase Linmas (Perlindungan Masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persen	100,00
<b>II.7 Fokus Layanan Unsur Pemerintahan Umum</b>			
<b>1</b>	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik</b>		
1.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persen	70,00
2.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Persen	70,00
3.	Persentase SDM yang Mempunyai Kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial	Persen	60,00
<b>III ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>			
<b>III.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>			
1.	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	26,72
2.	Opini BPK	Predikat	WTP
3.	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	Persen	15,99
4.	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	Persen	5,05
5.	BUMD dengan Kategori Sehat dan Baik	Angka	5,00
6.	Persentase UMKM yang Meningkatkan Labanya	Persen	31,50
7.	Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	Persen	18,11
8.	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	86,20





ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2022
<b>III.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</b>		
1. Indeks Infrastruktur	Angka	94,87 (tinggi)
2. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen	85,81
3. Persentase daerah rawan banjir	Persen	50,00
4. Persentase Titik Kemacetan yang Terselesaikan	Persen	50,00
5. Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	Persen	54,65
6. Indeks Resiko Bencana	Angka	139,048 (Tinggi)
7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	61,43
<b>III.3 Fokus Iklim Berinvestasi</b>		
1. Angka kriminalitas yang tertangani	Angka	1.531
2. Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani	Persen	78,50
3. Persentase Penegakan PERDA	Persen	78,50
<b>III.4 Fokus Sumber Daya Manusia</b>		
1. Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Persen	8,51
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	72,35

### 6.3 Inovasi Daerah

Dalam ranah penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa salah satu kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah memajukan dan mengembangkan daya saing daerah, salah satunya perihal Iptek. Pemerintah daerah saat ini dituntut membangun kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan daya saing daerah. Inovasi di segala bidang merupakan jawaban terhadap hal tersebut, baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah, maupun peningkatan produk atau proses produksi di masyarakat.

Sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengedepankan inovasi dalam pembangunan, maka beberapa inovasi telah dikembangkan oleh Perangkat Daerah. Berikut beberapa inovasi yang telah dilaksanakan oleh OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2019 dan 2020 :



1. POKJANAL POSYANDU (Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu). Inovasi tersebut di buat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota-Kota Bandar Lampung.

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat dalam pemenuhan pelayan kesehatan dasar dan gizi keluarga, dengan prinsip dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dengan dukungan bantuan dari pemerintah. Adapun kelembagaan yang mengkoordinasikan fungsi pembinaan dari pemerintah itu, diorganisasikan melalui wadah Kelompok Kerja Operasional Posyandu (Pokjanal Posyandu). Di kelurahan dikoordinasikan melalui Pokja Posyandu. Fungsi pembinaan tersebut meliputi 3 (tiga) aspek program, aspek kelembagaan dan aspek personil atau sumber daya manusia pengelola Posyandu.

Tujuan Pengorganisasian Pokjanal/Pokjal Posyandu adalah untuk mengkoordinasikan berbagai upaya pembinaan yang berkaitan dengan peningkatan fungsi dan kinerja posyandu, yang secara operasional dilaksanakan oleh unit atau kelompok pengelola Posyandu di kelurahan, melalui mekanisme pembinaan secara berjenjang oleh Pokjanal Posyandu di daerah.

2. KOIN ABANG (Klinik Konsultasi dan Informasi Agribisnis Bandar Lampung). Inovasi tersebut di buat oleh Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung.

Dalam upaya pelaksanaan 5 peran BPP guna mendukung pembangunan pertanian di Kota Bandar Lampung, maka dibentuklah Klinik Konsultasi dan Informasi Agribisnis Kota Bandar Lampung (KOIN ABANG), selain itu terbentuknya inovasi Klinik Konsultasi dan Informasi Agribisnis Bandar Lampung (KOIN ABANG) ini digagas karena adanya permasalahan yang dihadapi oleh petani/wanita tani yang ada di Kota Bandar Lampung terkait masalah budidaya, pengolahan dan akses untuk pemasaran hasil pertanian. Umumnya hasil pertanian hanya dijual terbatas di sekitar lingkungan petani/wanita tani sehingga



pendapatan yang dihasilkan pun terbatas. KOIN ABANG pada awal terbentuk merupakan kegiatan non digital. Akan tetapi di masa pandemic Covid-19 ini KOIN ABANG juga dapat diakses melalui media social Instagram. Pelayanan di KOIN ABANG ada 3 yaitu (1) Konsultasi dan informasi Hama dan Penyakit Tanaman (KOIN HPT); (2) Konsultasi dan informasi Budidaya Pertanian (KOIN BAPER); (3) Konsultai dan Informasi Agribisnis (KOIN Agri) dan (4) Konsultasi Keliling (SuLing). KOIN ABANG bertujuan untuk Memberikan pelayanan konsultasi terhadap situasi/masalah yang dihadapi oleh petani dan masyarakat umum yang memiliki kegiatan agribisnis secara holistik, dan mampu memberikan gambaran/situasi tentang investasi agribisnis yang layak dan mampu bersaing di pasar.

3. SENTRA DAN STRUKTUR ORGANISASI INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) TAHUN 2019. Inovasi tersebut di buat oleh Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung.

Sentra IKM merupakan kelompok IKM dalam satu lokasi/tempat yang menggunakan bahan baku, menghasilkan produk sejenis untuk melakukan proses produksi. Mengelompoknya IKM dalam sentra akan mempermudah pembinaan untuk meningkatkan kemampuan IKM dalam sentra tersebut. Dengan terbentuknya Struktur Organisasi sentra dan telah dikukuhkan oleh Walikota Bandar Lampung Bapak Drs.H.Herman HN.,MM pada tanggal 14 November 2019 di Gedung PKK mengukuhkan 8 Sentra dan Struktur Organisasi Industri Kecil Menengah Komoditas Unggulan Kota Bandar Lampung Tahun 2019 antara lain : Sentra Sulam Usus Agow, Sentra Pengolahan Ikan Teri, Sentra Aneka Keripik Bandar Lampung Telo Rezeki, Sentra Emping Melinjo, Sentra Kopi Bandar Lampung, Sentra Kaos Motif Lampung, Sentra Batik Canting Lampung, Sentra Tapis Lampung.

Tujuan dari pembentukan Sentra dan Struktur Organisasi adalah: Penguatan kelembagaan sentra, Pengembangan teknologi tepat guna



dan mutu produk sentra, Peningkatan daya saing produk sentra melalui pembinaan dan pelatihan, Peningkatan jejaring bahan baku dan pemasaran, Mempercepat koordinasi dengan Industri Kecil Menengah.

4. FASILITASI PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG. Inovasi tersebut di buat oleh Bagian Perekonomian Kota Bandar Lampung.

Dalam upaya menjaga kondisi laju infasi yang rendah, stabil dan kondusif dan bertujuan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, Bagian Perekonomian Kota BandarLampung selaku Sekretariat Tim Pengendalian Infasi Daerah (TPID) Kota Bandar Lampung melakukan koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian infasi Daerah (TPID) Kota Bandar Lampung. Pembinaan dan pendampingan kepada pengelola pedagang, pengelola mall dan pedagang eceran dilakukan secara kontinyu agar semua stakeholder bersama-sama menjaga pasokan pangan dan stabilitas harga selama pemerintah melakukan upaya penanganan Covid-19.

Inovasi Fasilitasi Pengendalian Infasi Daerah Kota Bandar Lampung bertujuan : Memperkuat koordinasi, fasilitasi dan implementasi kebijakan dalam rangka memenuhi 4K ( kesediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif); Menindaklanjuti evaluasi sumber-sumber dan kemungkinan potensi tekanan infasi yang berdampak terhadap pencapaian sasaran infasi; Memfasilitasi pilihan kebijakan melalui kegiatan tindak lanjut jika terjadi hal- hal yang berkaitan dengan pengendalian infasi.

5. STRATEGI PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH BAGI UMKM BINAAN. Inovasi tersebut di buat oleh Bagian Perekonomian Kota Bandar Lampung.

Dalam upaya strategi percepatan akses keuangan daerah, Bagian Perekonomian Kota BandarLampung selaku Sekretariat Tim Percepatan



Akses Keuangan Daerah (TPAKD) berusaha mendorong percepatan akses keuangan daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan melalui sektor UMKM khususnya pelaku usaha UMKM Binaan OPD Kota Bandar Lampung. Wujud dukungan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Kota Bandar Lampung, salah satu upayanya yaitu dengan dikukuhkannya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung pada tanggal 6 Agustus 2019 dan Pembentukan Panitia Upaya Percepatan Kinerja Tim Akses Keuangan Daerah bagi UMKM dan Percepatan Berusaha Kota Bandar Lampung, dimana keberadaan Panitia Upaya Percepatan diharapkan mampu menyusun kebijakan dan program kerja TPAKD Kota Bandar Lampung untuk tahun berikutnya dan dalam implementasi program kerja memberikan manfaat bagi kemajuan UMKM Binaan Kota Bandar Lampung. Dan diharapkan juga berguna dan menjadi dasar tindak lanjut bagi pihak Lembaga Jasa Keuangan Penyalur Kredit UMKM, calon investor, pengusaha dan pelaku ekonomi lainnya.

Inovasi strategi percepatan akses keuangan daerah bagi UMKM Binaan bertujuan : mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada pelaku usaha UMKM Binaan dalam rangka mendukung kelangsungan usaha; mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi UMKM Binaan untuk meningkatkan pengembangan UMKM; melakukan koordinasi antara OPD dan pihak terkait lainnya untuk menjamin perluasan akses keuangan di daerah; perluasan akses pengembangan usaha dan perluasan akses kelangsungan usaha UMKM Binaan OPD Kota Bandar Lampung; d. Membantu para pelaku UMKM Binaan untuk mempertahankan kelangsungan usaha dimasa pandemi Covid 19 yang berdampak pada penurunan pendapatan, penurunan permintaan dan kendala bisnis dan operasional UMKM.

6. SI MPUS (SISTEM PELAYANAN TERPADU PUSKESWAN). Inovasi



tersebut di buat oleh Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung.

Pembentukan Pos Kesehatan Hewan dengan diperkuat oleh Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 630/Kpts/TN.510/10/93 dan Nomor 88 Tahun 1993. Melalui Permentan No. 64/Permentan/OT.140/9/2007, istilah Pos Kesehatan Hewan (Poskeswan) diubah menjadi Pusat kesehatan hewan (Puskeswan) dengan tugas melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya dan melakukan konsultasi veteriner di bidang kesehatan hewan. Disebutkan pula bahwa Puskeswan mempunyai fungsi pelaksanaan penyehatan hewan, pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, pelaksanaan epidemiologik dan pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah serta pemberian pelayanan jasa veteriner.

Tujuan dari “SI MPUS” (SisteM pelayanan terpadu PUSkeswan) ini adalah: Memberikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat dan pemilik hewan berupa pelayanan kesehatan hewan yang berkualitas Mendukung pembangunan berkelanjutan dengan berupaya menjamin kehidupan yang sehat.

7. PENGEMBANGAN SISTEM PAJAK ONLINE (SAI-PEPADUN). Inovasi tersebut di buat oleh BPPRD Kota Bandar Lampung.

Strategi perluasan basis pajak yaitu dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memberikan pengawasan serta penegakan hukum yang berkeadilan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satu bentuk penemuan baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dari Pemerintah Kota Bandar Lampung ialah diciptakannya sistem yang dapat memudahkan masyarakat terutama Wajib Pajak di kota Bandar Lampung. SAI-PEPADUN merupakan pengembangan dari SIMPATDA (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah), dimana dalam penggunaan SIMPATDA selama ini semua adminisitrasi cetak, entri



pajak, pelaporan dilakukan oleh admin. Dengan SAI-PEPADUN pemilik usaha sudah bisa langsung berinteraksi dalam hal administrasi pajak yang akan dibayarkan mulai dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Renstra. Tujuan dan sasaran yang akan ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

8. PELAYANAN PENCETAKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN MELALUI MESIN ANJUNGAN DUKCAPIL MANDIRI (ADM). Inovasi tersebut di buat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung.

Pelayanan yang baik menjadi tolak ukur dalam menghasilkan output yang berupa dokumen sesuai dengan yang diusulkan oleh warga yang terkait, tentunya dengan lebih mudah, cepat, dan dalam proses waktu yang jelas Dengan adanya Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) ragam pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) semakin mudah dan cepat. Masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan bisa langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, mengurus secara online dan sekarang melalui Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Warga yang hendak mencetak dokumen kependudukan di Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) harus



teregistrasi terlebih dahulu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. Warga yang bisa menggunakan ini tidak ubahnya analog dengan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Dapat masuk dan menggunakan apabila telah teregistrasi.

Selanjutnya, selain telah teregistrasi orang yang bisa mengakses Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) ialah mereka yang sudah merekam data untuk Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Setelah itu akan diberi Nomor PIN melalui SMS ke Nomor telepon yang sudah didaftarkan ataupun melalui Email. Sejalan dengan keadaan, perkembangan dinamika kesehatan yang dipengaruhi oleh keadaan pandemic COVID 19 dimana warga untuk saling menjaga physical disatancing dan social distancing, yang terkait dengan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung sebagai penyelenggara sangat sesuai dengan yang dianjurkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dengan menyiapkan kelengkapan peralatan yang diperlukan berupa : keran air yang mengalir untuk tempat pencucian tangan disisi kiri dan kanan di depan kantor gedung pelayanan, meja tempat hand sanitizer dan penggunaan sarana Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker, *handscoon* dan *face shield*.

9. LATEN SIRAJA (Layanan Tender dan Seleksi Barang dan Jasa). Inovasi tersebut di buat oleh LPBJ Kota Bandar Lampung.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 34 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung yang telah direvisi melalui Peraturan Walikota No. 51 tahun 2019. Sebagai Unit Kegiatan yang bertanggung jawab terhadap proses pemilihan barang dan jasa maka Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang ditetapkan melalui Surat





Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung nomor 890/1304/I.12/HK/2019 tanggal 03 September 2019. Untuk memenuhi SOP tersebut maka BPBJ wajib memenuhi standar minimal prasarana dan sarana yang disyaratkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP). Persyaratan tersebut meliputi pembagian ruang kegiatan dalam setiap tahapan proses pemilihan barang dan jasa sehingga proses tersebut dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel.

Tujuan Inovasi Layanan Tender dan Seleksi Barang dan Jasa (Laten Siraja) adalah untuk memenuhi persyaratan minimal dalam sarana dan prasana UKPBJ.

10. PPS LAPANG (Pokja Pasar Sehat Layak Pangan Lokasi Pasar Way Halim). Inovasi tersebut di buat oleh Dinas Pangan Kota Bandar Lampung.

Saat ini Pemerintah Kota Bandar Lampung bekerjasama di BBPOM untuk mengintervensi beberapa pasar tradisional yang akan direplikasi menjadi pasar sehat dan layak pangan. Salah satunya adalah Pasar Tradisional Way Halim yang ditunjuk sebagai Percontohan Pasar Sehat dan Layak Pangan. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah membentuk Tim Satuan Tugas pangan Kota Bandar Lampung melalui Surat keputusan walikoita Bandar Lampung Nomor 155/III.09/HK/2019 tanggal 7 Pebruari 2019. Adapun maksud dan tujuan dibentuknya tim ini adalah dalam rangka mewujudkan system distribusi yang efektif dan efisien, serta harga pangan yang terjangkau oleh masyarakat sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Inovasi ini intinya membentuk Pokja Pasar, pengambilan sampel pangan secara mandiri dan pembentukan paguyuban pedagang sadar pangan sehat untuk mewujudkan Pasar Sehat dan Layak Pangan, serta bebas dari bahan berbahaya seperti formalin dan pengawet. Terbukti akhirnya Pasar Way



Halim menjadi contoh Nasional sebagai Pasar Sehat dan Layak Pangan serta aman dari bahan berbahaya dan mendapat penghargaan dari BPOM tahun 2020.

Tujuan inovasi ini adalah: Menjaga stabilitas harga pangan dengan melakukan pengawasan dan distribusi terhadap distribusi dan ketersediaan pangan, Melakukan pengawasan terhadap gudang untuk mencegah terjadinya penimbunan stok yang akan mengakibatkan kelangkaan pangan di pasar, Melakukan sidak dan pembinaan keamanan pangan dipasar modern dan tradisional yang ada di Kota Bandar Lampung, Menindaklanjuti isu pangan yang menimbulkan keresahan masyarakat.

11. U-Fly (*Underpass dan Flyover*). Inovasi tersebut di buat oleh Dinas PU kota Bandar Lampung.

Adapun pembangunan sarana transportasi pencapaian dari tujuan utama tersebut juga akan dibagi menjadi 4 (empat) sub kegiatan, yaitu: Pembangunan underpass Jl. Z.A. Pagar Alam – Jl. Sumantri Brojonegoro; Pembangunan Flyover Jl. Untung Suropati – Jl. RA. Basyid; Pembangunan Flyover Jl. Kapten Abdul Haq – Jl. Hi. Komarudin; Pembangunan Flyover Jl. Sultan Agung Simpang Kereta Api. Adapun pelaksanaan keempat kegiatan tersebut disusun berdasarkan urutan pelaksanaan pekerjaan. Dimulai dari sosialisasi kepada masyarakat terdampak, negosiasi pembebasan lahan dilanjutkan dengan pembayaran, detail engineering design (DED), pelelangan serta tahapan pelaksanaan konstruksi. Kondisi keempat persimpangan tersebut sudah sangat jenuh pada jam puncak pagi dan sore hari, dimana lebar jalan eksisting tidak lagi memadai untuk mengalirkan arus lalu lintas. Setelah keempat persimpangan jalan utama ini ditingkatkan pelayanannya, baru tahapan selanjutnya bisa diteruskan untuk peningkatan kualitas layanan pada jalur pejalan kaki dan halte angkutan umum.

Tujuan inovasi adalah : Peningkatan daya dukung infrastruktur dengan



mengedepankan penataan wilayah, pembangunan sarana dan prasarana kota wisata yang maju dan modern.

12. SIAGABAPOKBANDARLAMPUNG. Inovasi tersebut di buat oleh Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.

Permasalahan yang sering timbul adalah terjadinya kenaikan harga yang diakibatkan oleh kelangkaan persediaan barang – barang di pasaran Kota Bandar Lampung karena kurangnya pasokan maupun pendistribusian barang di dalam pusat – pusat pasar dalam wilayah Kota Bandar Lampung. Selain itu kenaikan harga yang terjadi juga disebabkan karena Kota Bandar Lampung masih bergantung pada pasokan barang dari luar daerah. Sehingga dengan terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan lainnya mengakibatkan putusnya hubungan transportasi dari dan ke Bandar Lampung yang menyebabkan pula terputusnya pasokan barang dari luar daerah ke dalam wilayah Kota Bandar Lampung. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka kegiatan Pemantauan Harga Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Pada Pelaku Usahan Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota, diharapkan dapat membantu pelaku usaha dan masyarakat untuk menyediakan informasi harga pasar.

Tujuan inovasi adalah : Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri di wilayah Kota Bandar Lampung.

13. GALLERY UMKM MASJID AGUNG AL-FURQON. Inovasi tersebut di buat oleh Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.

Peresmian Galley Masjid Agung Al-Furqon Kota Bandar Lampung yang dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2020 oleh Bapak Walikota Bandar Lampung dan turut mengundang Bapak Asisten, Staf Ahli, Inspektur, Sekretaris Dewan, Kepala-kepala OPD, Sekretaris Korpri, Ketua/ Pengurus Association of The Indonesia Tours and Travel Agencies



(ASITA) Kota Bandar Lampung, Ketua/ Pengurus Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Cabang Bandar Lampung, dan Ketua-ketua kluster UKM/IKM.

Tujuan inovasi adalah : Mengembalikan kestabilan ekonomi Kota Bandar Lampung dan ekonomi para pengerajin UMKM Kota Bandar Lampung yang mengalami masa-masa sulit akibat dampak pandemi Covid-19.

14. BAZAR PRODUK INDUSTRI KECIL MENENGAH. Inovasi tersebut di buat oleh Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung.

Perkembangan IKM setiap tahunnya selalu memberikan nilai positif dengan angka yang baik. Program penumbuhan dan pengembangan IKM sengaja dibuat bersinergi dengan lajunya industri saat ini untuk meningkatkan tren positif yang tumbuh. Sebagai unsur pelaksana maka Dinas Perindustrian memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan IKM Kota Bandar Lampung. Berawal dari Pengukuhan Pengurus Sentra yang dikukuhkan oleh Walikota Bandar Lampung Bapak Drs. H. HERMAN HN, MM pada bulan November 2019 di Gedung PPK Kota Bandar Lampung, 8 (delapan) Sentra yang telah dikukuhkan antara lain : Sentra Aneka Keripik, Sentra Ikan Olahan, Sentra Kopi, Sentra Emping Melinjo, Sentra Tapis, Sentra Sulam Usus, Sentra Batik Lampung, Sentra Motif Lampung Dengan dikukuhkannya sentra tersebut untuk membantu para IKM dalam menjual, mempromosikan produknya maka disediakan lahan / tempat untuk para IKM berjualan. Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Perindustrian memfasilitasi dalam bentuk Kegiatan Bazar produk – produk IKM Kota Bandar Lampung sebagai media promosi bagi IKM yang ada di Kota Bandar Lampung.



Tujuan dari Kegiatan Bazar ini adalah : Media Promosi dan pemasaran bagi IKM Kota Bandar Lampung, Memperkenalkan produk khas dan produk unggulan IKM Kota Bandar Lampung, Meningkatkan pendapatan IKM Kota Bandar Lampung, Sebagai wadah mediasi antar masing – masing IKM dan juga dengan Dinas Perindustrian.

15. PELAYANAN DUKCAPIL CEPAT MELALUI ONLINE. Inovasi tersebut di buat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung.

E-Government menjadi sangat populer sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai Negara dibelahan dunia berlomba mengimplementasikan E-Government dengan strategi yang disesuaikan dengan kondisi social politik serta geografsnya masing-masing, yang tujuan akhirnya diharapkan meningkatkan kualitas kinerja pemerintah terutama dalam lingkup pelayanan masyarakat sehingga dapat bermanfaat bagi segenap warga negaranya. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya yang luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara tepat. Di era digital pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan cepat tentunya ini dapat dijadikan potensi dan sarana membuka peluang dalam pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar, secara tepat dan akurat. Bergulirnya reformasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia membawa perubahan dalam Sistem Pemerintahan Negara ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik yang mensyaratkan ditetapkan prinsip akuntabilitas transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan public, untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Terkait dengan upaya tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan suatu sistem monitoring dan



laporan pertanggung jawaban instansi pemerintah yang tepat, jelas dan terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna berhasil bersih dan bertanggung jawab.

Hal ini dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Pelayanan yang baik menjadi tolak ukur dalam menghasilkan output yang berupa dokumen sesuai dengan yang diusulkan oleh warga yang terkait, tentunya dengan lebih mudah, cepat, dan dalam proses waktu yang jelas dengan melalui pengaksesan ke laman website <https://disdukcapil.bandarlampungkota.go.id>. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi ini adalah website. Fungsi dasar dari website ini adalah sebagai media informasi dan komunikasi dari Pemerintah Kota Bandar Lampung kepada publik. Di level kedua fungsi website menjadi media interaktif keterhubungan dengan lembaga/ instansi lain. Website ini menjadi media penyampaian informasi kepada masyarakat, serta memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi maupun keluhan terhadap pelaksanaan pemerintah kota Bandar Lampung secara umum, serta menjalin hubungan online dalam jaringan interaktif dengan lembaga/ instansi lain, serta dapat berintegrasi dengan aplikasi pelayanan pemerintahan yang lebih tinggi.

16. PANTAS SEHAT (Pasar Komunitas Sadar Pangan Sehat Lokasi Pasar Tani Kota Bandar Lampung). Inovasi tersebut di buat oleh Dinas Pangan Kota Bandar Lampung.

Provinsi Lampung memiliki 15 kabupaten kota, provinsi Lampung beribukota di Kota Bandar Lampung. Sejak tahun 2013, BBPOM di Bandar Lampung sudah melakukan intervensi terhadap sembilan pasar yang berasal dari tujuh kabupaten/kota. Dari sekian banyak kabupaten/kota di Provinsi Lampung, populasi penduduk terbanyak



terdapat di Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung juga memiliki peranan penting dalam pengembangan dan kegiatan ekonomi di pulau Sumatera. Kota Bandar Lampung juga memiliki pasar terbanyak yaitu Bandar Lampung mempunyai 171 pasar modern, 17 pasar tradisional yang permanen dan 7 pasar tradisional tempel. Di Kota Bandar Lampung, pasar yang sudah diintervensi oleh BBPOM di Bandar Lampung adalah Pasar Gudang Lelang dan Pasar Cimeng, sementara itu pasar yang sudah direplikasi menjadi pasar sehat dan layak pangan oleh pemerintah daerah adalah Pasar Way Halim sejak tahun 2019 dan kemudian dilanjutkan dengan Pasar Tani Kemiling di tahun 2020. Pada tahun 2020, replikasi pasar juga ditingkatkan dengan menumbuhkan dan mendorong semangat kreativitas, partisipasi komunitas pasar dalam mengambil peran lebih besar demi mewujudkan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.

Tujuan inovasi ini adalah : Menominasikan pasar Tani Kemiling Pasar Berbasis Komunitas Sadar Pangan Sehat sebagai pasar percontohan pasar aman dari bahan berbahaya tahun 2020; Memberikan reward kepada pemerintah daerah dan komunitas yang sudah memberikan kontribusi dan kerjasama yang baik dengan Badan POM terutama dalam program pasar aman.

17. IMPLEMENTASI E-KINERJA. Inovasi tersebut di buat oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.

Pemerintah Kota Bandar Lampung mulai bulan Januari 2020, secara resmi telah menggunakan aplikasi e-Kinerja yang yang dapat diakses secara online oleh seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui alamat website <http://ekineria.asnkotabdl.net>.

Dengan aplikasi ini, masing-masing ASN dapat menginputkan hasil kegiatan/pekerjaannya serta Pejabat Penilai dapat melakukan verifikasi hasil kegiatan/pekerjaan bawahannya kapanpun dan dimanapun



selama komputer atau smartphone yang digunakan terkoneksi dengan internet. Aplikasi ini akan mempermudah ASN dalam mencatat hasil kegiatan tugas jabatan, sesuai tugas pokok dan fungsi masing - masing ASN, dan mempermudah Atasan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan kinerja serta penilaian perilaku kerja bawahannya. Selain Aplikasi E-Kinerja, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga menggunakan aplikasi pendukung E-Kinerja, yaitu Aplikasi E-Absen yang hanya dapat diakses secara online oleh Operator E-Absen yang telah ditunjuk dari masing-masing OPD. Aplikasi ini digunakan untuk mengolah data absensi pegawai dan terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN dan Aplikasi E-Kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung sehingga mempermudah penyajian dan pelaporan data mengenai tingkat disiplin PNS dan juga sebagai alat ukur dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai.

Selanjutnya beberapa inovasi daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 dan kedepan yaitu sebagai berikut :

#### **1. Permen Manis**

Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.

Permen Manis adalah singkatan dari Pelayanan Online Masyarakat Duduk Manis. Aplikasi ini diluncurkan sebagai upaya Disdukcapil Kota Bandar Lampung meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan.

Adapun tujuan dari inovasi Permen Manis ini adalah mengurangi kerumunan dimana masyarakat bisa langsung mengunduh aplikasi Permen Manis di playstore melalui handphone. Adapun pelayanan yang dapat diberikan adalah untuk dokumen kependudukan jenis Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran, Akte Pernikahan, Akte Perceraian, Akte Kematian, Surat Pindah, KTP dan KIA.





## 2. **Aplikasi Market Place**

Inovasi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung

Aplikasi Market Place merupakan aplikasi market digital untuk memasarkan produk-produk UMKM Kota Bandar Lampung. Aplikasi ini di harapkan dapat membantu meningkatkan promosi dan penjualan produk UMKM Kota Bandar Lampung.

## 3. **KL ! KPR**

Inovasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung

Dalam rangka menjawab perkembangan era digital saat ini yang semakin maju serta mudah dalam pengaplikasiannya, Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Perumahan Dan Permukiman dalam hal mengembangkan informasi berkaitan dengan pemanfaatan ruang berbasis web dengan nama aplikasi *KL ! KPR*, dalam hal ini Dinas Perumahan Dan Permukiman akan membangun sebuah basis data berupa peta/Web GIS untuk memudahkan para stakeholder untuk mengakses serta meng- *KL ! KPR* untuk mendapatkan informasi pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.

Dengan adanya *KL ! KPR* maka para stakeholder serta masyarakat dengan mudah dapat mengakses serta mendapatkan informasi pemanfaatan ruang Kota Bandar Lampung sesuai dengan peruntukannya. Selain itu juga untuk mempermudah para stakeholder yang berada diluar Kota Bandar Lampung untuk dapat mengakses serta mendapatkan informasi pemanfaatan ruang. *KL ! KPR* dibangun berdasarkan basis data pada peta Rencana Tata Ruang Kota Bandar Lampung, sistematika pembuatannya melalui pemrograman berbasi Web GIS.



#### **4. SMS BLAST untuk akseptor KB Jatuh Tempo**

Inovasi Dinas PPKB Kota Bandar Lampung

dalam rangka meningkatkan jumlah peserta KB dan menghindari drop out peserta KB diperlukan suatu sistem yang akan dipergunakan untuk mengingatkan / memberi notifikasi kepada peserta KB bahwa mereka telah memasuki waktunya untuk mengulang proses mereka berKB.

Metode input aplikasi memerlukan : Nama,alamat,nmr telepon, metode kontrasepsi yg digunakan.

Tujuan : meningkatkan jumlah peserta KB dan menghindari droup out peserta KB

Manfaat : memberikan pelayanan yg lebih optimal kepada masyarakat terutama dalam pelayanan KB dikota bandar Lampung

Jumlah data peserta aktif (aseptor ) tahun 2021 sejumlah 125.619 jiwa.

#### **5. Kenaikan Pangkat Berkala Otomatis**

Inovasi Dinas BKD Kota Bandar Lampung

Berkala otomatis adalah suatu inovasi dari BKD kota Bandar Lampung dimana ASN kota Bandar Lampung bisa mendapatkan SK Berkala tanpa harus mengajukan atau mengusulkan ke BKD.

Dikarenakan BKD Kota Bandar Lampung sudah mendapatkan data pribadi berkala pegawai ASN dari sistem online SKPk dimana sistem tersebut tertera data seluruh pegawai ASN Bandar Lampung.

#### **6. Sistem Aplikasi Pelayanan Barang dan Jasa**

Inovasi Bagian LPBJ Kota Bandar Lampung



Sistem informasi monitoring pengelolaan pengadaan barang dan jasa Kota Bandar Lampung

Sistem informasi ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pengadaan barang dan jasa dari hulu (perencanaan) sampai ke hilir (serah terima pekerjaan). Informasi dalam sistem ini berintegasi dengan SiRup.LKPP.go.id dan SPSE pengadaan barang dan jasa, sehingga pemerintah kota bandar lampung memperoleh data secara komprehensif dan lengkap.

#### **7. Pembuatan Database Jalan Menggunakan Aplikasi Google Earth**

Inovasi Dinas PU Kota Bandar Lampung

Maksud : Mengumpulkan informasi data Jalan di Kota Bandar Lampung menggunakan citra satelit melalui aplikasi Google Earth tanpa harus survei ke lapangan.

Tujuan :

1. Membuat Peta Jalan menggunakan citra satelit melalui aplikasi *google earth*.
2. Mengetahui Panjang Jalan berdasarkan citra satelit melalui aplikasi *google earth*.
3. Mengetahui penampakan situasi Jalan melalui *google street view*.

#### **8. Fasilitasi Peminjaman Alat/Mesin Kemasan Bagi Industri Kecil Dan Menengah**

Inovasi Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung

Pengemasan memiliki arti suatu sistem yang telah terkoordinasi dalam hal menyiapkan barang untuk disalurkan, pergudangan, logistik, pengguna akhir dan penjualan. Artinya, pengemasan adalah suatu bentuk kegiatan untuk memberi wadah atau pembungkus suatu produk. Untuk itu, tujuan utama dari memberikan kemasan pada produk adalah guna melindungi dan juga mencegah adanya kerusakan atas produk yang dijual.



Citra yang baik merupakan kunci dari keberhasilan sebuah usaha untuk merangkul sebanyak mungkin pelanggan dan calon pelanggan, kemudian menumbuhkan kepercayaan untuk membeli produk yang dijual. Citra ini ternyata dipengaruhi oleh kemasan produk.

Hal ini yang mendorong Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung untuk memfasilitasi IKM dengan menyediakan Alat/Mesin Kemasan berupa *Vaccum Sealer*, *Continuos Sealer*, *Hand Sealer* dan *Cup Sealer*. Alat/Mesin yang tersedia ini dapat dipinjam oleh seluruh IKM Kota Bandar Lampung secara gratis.

Langkah inovatif ini diambil oleh Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung berdasarkan keadaan dilapangan dimana IKM masih sangat minim menggunakan alat/mesin yang modern untuk menunjang kegiatan produksi dengan lebih baik.

Fasilitasi Peminjaman Alat/Mesin Kemasan ini bertujuan untuk :

1. Memberi kemudahan kepada IKM yang belum memiliki alat/mesin kemasan seperti *Vaccum Sealer*, *Continuos Sealer*, *Hand Sealer* dan *Cup Sealer*.
2. Mendukung IKM untuk menciptakan kemasan yang baik dan aman.
3. Menambah nilai ekonomis dari pada produk yang dihasilkan.
4. Meningkatkan kapasitas produksi IKM dan efisiensi waktu produksi.

Fasilitasi ini diharapkan dapat memudahkan IKM yang kebanyakan masih skala kecil untuk memiliki produk yang tekemas dengan rapih, menarik dan memiliki daya tahan cukup lama. Adapun manfaat yang tercipta selama Fasilitasi Peminjaman Alat/Mesin Kemasan ini antara lain :

1. Meningkatkan Nilai tambah serta keamanan delivery produk ke konsumen
2. Efisiensi waktu pengerjaan produk yang akan di kemas.



3. Meningkatkan kapasitas produksi.
4. Memotifasi IKM untuk memiliki alat/mesin yang sama karena sudah merasakan manfaat untuk usahanya.

## **9. Fasilitasi Barang UMKM di Pasar / Toko Modern**

Inovasi Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung

Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung melihat masih banyak IKM yang terkendala pemasaran produk akibat kurangnya sarana pemasaran yang menjanjikan. Oleh sebab itu Dinas Perindustrian mengupayakan kerjasama baik dengan OPD di lingkungan Pemkot Bandar Lampung dan juga pihak swasta untuk dapat membantu memperluas pemasaran produk IKM.

Melalui Surat Walikota Bandar Lampung Nomor 020.1/60/III.22/2020 yang dikeluarkan pada bulan Januari 2020, dalam rangka meningkatkan ekonomi industri kecil dan menengah Bapak Walikota Bandar Lampung menghimbau kepada pimpinan / pemilik toko oleh – oleh untuk dapat menerima produk hasil IKM agar dapat dipasarkan / dijual di toko oleh – oleh tersebut.

Beberapa toko oleh – oleh yang saat ini sudah bekerja sama dengan IKM antara lain Yussy Akmal cabang Jendral Sudirman, Toko Aneka Sari Rasa Teluk Betung dan Toko Hai Tom's Tanjung Karang.

Fasilitasi Pemasaran Produk Ke Toko Oleh - Oleh :

1. Memberi kesempatan IKM memperluas pemasaran.
2. Mendukung IKM untuk membuat produk yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Memperkenalkan IKM yang memiliki potensi untuk merambah kepasar nasional dan internasional.
4. Meningkatkan kapasitas produksi IKM.



Adapun manfaat dari Fasilitasi ini sebagai berikut :

1. IKM memiliki tempat pemasaran yang menjanjikan dengan sistem yang kredibel.
2. IKM menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam membuat produk.
3. Kesempatan IKM untuk menggali kelebihan produk agar kualitas dan kuantitas meningkat.

## **10. SINOVAK**

Inovasi BAPPEDA Kota Bandar Lampung

SINOVAK adalah Sistem Informasi Inovasi Kota Bandar Lampung.

Inovasi ini merupakan suatu proses untuk mewujudkan, mengkombinasikan, atau mematangkan suatu pengetahuan/gagasan ide, yang kemudian disesuaikan guna mendapat sistem informasi tentang inovasi kota bandar lampung.

Tujuan untuk memudahkan bidang litbang melakukan pemilahan terhadap inovasi yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan, baik inovasi dalam bentuk tata pemerintahan, pelayanan publik maupun inovasi jenis lainnya. Sistem inovasi ini untuk mendukung kinerja pemerintah Kota Bandar Lampung khususnya dlm rangka pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih baik.

## **11. Digital Marketing**

Inovasi Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung

Pelatihan Digital Marketing diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, skill, keterampilan, mutu, kualitas produk IKM serta meningkatkan kompetensi terhadap ilmu di Bidang Digital marketing sehingga para pelaku usaha Industri Mikro, Kecil dan Menengah (IKM) sehingga dapat memasarkan produk – produknya dengan memanfaatkan teknologi berbasis internet sehingga dapat



meningkatkan omzet penjualan dengan memperluas pangsa pasar baik di dalam maupun di luar Kota Bandar Lampung.

Adapun tujuan dari Digital Marketing Melalui Sosial Media IKM Kota Bandar Lampung:

1. Meningkatkan kompetensi Industri Kecil Menengah (IKM) Kota Bandar Lampung dibidang pengetahuan, skill, keterampilan, mutu/kualitas produk IKM dalam mempromosikan hasil produk IKM
2. IKM dapat memahami Digital Marketing dan dapat mengaplikasikannya sehingga dapat meningkatkan hasil pemasaran dan penjualan dengan optimal.
3. Memperluas pemasaran promosi produk Unggulan Kota Bandar Lampung melalui social media sehingga produk IKM Kota Bandar Lampung dapat dikenal oleh seluruh masyarakat Lampung umumnya dan masyarakat Kota Bandar Lampung khususnya.

Manfaat dari Digital Marketing Melalui Sosial Media berupa :

1. IKM dapat memperluas pemasaran promosi Produk Unggulan Kota Bandar Lampung melalui pemasaran secara online
2. IKM dapat meningkatkan kompetensi , skill, pengetahuan dan memahami bagaimana pembuatan toko online GMB, pembuatan design gambar dan pembuatan *website*.

## **12. Eco Enzym**

Inovasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

*Eco Enzym* adalah cairan alami serba guna yang merupakan hasil fermentasi dari gula ditambah sisa buah/sayuran ditambah air.

Lama pembuatan *eco enzym* adalah 3 bulan di wilayah tropis dan 6 bulan di wilayah sub tropis.

Hasil akhirnya adalah cairan berwarna kecoklatan dengan aroma asam segar.



Mengapa *eco enzym*? 60% sampah yang terbuang di TPA adalah sampah organik yang menimbulkan bau tak sedap dan menghasilkan gas meta (penyebab pemanasan global).

Dengan membuat *eco enzym* kita telah mengolah sebagian besar sampah dan mengurangi beban TPA. Selain itu kita juga berpartisipasi mengurangi beban bumi sekaligus menerapkan gaya hidup minim kimia sintetis.

Manfaat *eco enzym* antara lain adalah :

- Tanah yang gersang dan tandus dapat ditingkatkan kualitasnya dengan menggunakan *eco enzym*
- *Eco enzym* dapat memperbaiki kualitas air yang sudah tercemar
- Dapat digunakan sebagai pupuk
- Dapat digunakan untuk kebersihan (cuci piring, cuci pakaian, pel lantai, sampo, pembersih udara, dll)





## **BAB VII PENUTUP**

RKPD Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan azas keterbukaan, akurasi dan akuntabilitas publik dengan memperhatikan Rancangan RPJMD Tahun 2021-2026 dan RPJMD Provinsi Lampung serta RPJMN. Proses perencanaan pembangunan Daerah dalam rangkaian tahapan penyusunan RKPD Tahun 2022 menerapkan asas perencanaan partisipatif yaitu dengan melibatkan para pihak dan mempertimbangkan segenap masukan dan aspirasi dari masyarakat dalam Musrenbang.

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan Daerah Tahun 2022 dan menjadi landasan bagi penyusunan KUA dan PPAS yang kemudian digunakan sebagai pedoman penyusunan RKA-SKPD dan APBD Tahun Anggaran 2022.

Sebagai dokumen rencana operasional pembangunan Tahun 2022, RKPD memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas serta tema pembangunan Daerah Tahun 2022 yang mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kerangka pendanaan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Oleh karenanya, pencapaian target rencana program/kegiatan pembangunan Daerah melalui serangkaian program/kegiatan prioritas yang termuat dalam RKPD Tahun 2022, dalam pelaksanaannya mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergitas guna



pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara menyeluruh. Selanjutnya melalui pelaksanaan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2022 ini, diharapkan mampu mendukung upaya menuju tercapainya Visi dan Misi pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, yaitu mewujudkan Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat.

**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,**



**EVA DWIANA**

